

PENDIDIKAN KARAKTER

MENUJU
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN

Bunga Rampai Karya Menjangka Sustainable Development Goals



Destriana Saraswati (ed.)

Halaman ini sengaja dikosongkan

PENDIDIKAN KARAKTER

MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Bunga Rampai Karya Menjangka Sustainable Development Goals

Destriana Saraswati (ed.)

Destriana Saraswati, Tutik Wijayanti, Maman Rachman, Hafiz Rafi Uddin, Muhammad Andi Kurniawan, Fuad Hilmi, Deden Syarif Hidayatulloh, Ridwan Fauzi, Nia Kurniasih, Siti K Azhari, Cecep Alba, Shohib Khoiri, Ulinnuha Madyananda, Hasbi Ali, Teuku Muttaqin Mansur, Sulaiman Tripa, M. Adli Abdullah, Dwi Purnomo, Ryan Hara, Faris Prima Fadhilah, Aprida Sondang, Siti Ulfah Rifa'atul Fitri, Martini, Efridani Lubis, Khalid Rahman, Albar Adetary Hasibuan, Abdul Madjid, Venus Khasanah, Teguh Prakoso, Sri Hudiarini, Galuh Kartiko, Hudriyah Mundzir, Moh Sinal, Izuddinsyah Siregar, Salmah Naelofaria, Kurniawan, Emi Setyaningsih, Betsi Rooroh, Nurhayati, Windasari AR. Haku, Mifdal Zusron Alfaqi, Rika Safitri Nur Azizah, Tri Ratna Herawati, Muncar Tyas Palupi, Wahda Rahma Laila, Fabian Omar Batitusta, Alief Ananta Falaqurrahman, Hudson Sidabutar, Riscal Sitorus, Triya Indra Rahmawan, Galieh Damayanti, Agni Istighfar Paribrata, Millatuz Zakiyah, Mohamad Anas.



**PENDIDIKAN KARAKTER
MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

*Bunga Rampai Karya Menjangka
Sustainable Development Goals*

©Universitas Brawijaya

Penulis: Destriana Saraswati, Tutik Wijayanti, Maman Rachman, Hafiz Rafi Uddin, Muhammad Andi Kurniawan, Fuad Hilmi, Deden Syarif Hidayatulloh, Ridwan Fauzi, Nia Kurniasih, Siti K Azhari, Cecep Alba, Shohib Khoiri, Ulinnuha Madyananda, Hasbi Ali, Teuku Muttaqin Mansur, Sulaiman Tripa, M. Adli Abdullah, Dwi Purnomo, Ryan Hara, Faris Prima Fadhilah, Aprida Sondang, Siti Ulfah Rifa'atul Fitri, Martini, Efridani Lubis, Khalid Rahman, Albar Adetary Hasibuan, Abdul Madjid, Venus Khasanah, Teguh Prakoso, Sri Hudiari, Galuh Kartiko, Hudriyah Mundzir, Moh Sinal, Izuddinsyah Siregar, Salmah Naelofaria, Kurniawan, Emi Setyaningsih, Betsi Rooroh, Nurhayati, Windasari AR. Haku, Mifdal Zusron Alfaqi, Rika Safitri Nur Azizah, Tri Ratna Herawati, Muncar Tyas Palupi, Wahda Rahma Laila, Fabian Omar Batitusta, Alief Ananta Falaqurrahman, Hudson Sidabutar, Riscal Sitorus, Triya Indra Rahmawan, Galieh Damayanti, Agni Istighfar Paribrata, Millatuz Zakiyah, Mohamad Anas

Editor: Destriana Saraswati

Penata Bahasa: Aria Koesoemahprawira

Tata Letak & Sampul: Syadad K Nabil

Diterbitkan Oleh:

Ifada Publishing (Anggota IKAPI)

Jl. Turen No. 240 KKN-54

Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman - Yogyakarta 55581

Email: pustakaifada@gmail.com

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pendidikan Karakter Menuju Pembangunan Berkelanjutan / Destriana Saraswati, Tutik Wijayanti, Maman Rachman, Hafiz Rafi Uddin, Muhammad Andi Kurniawan, DLL.
Editor; Destriana Saraswati

Cet. 1, April 2023

ISBN: 978-623-190-062-3

Sambutan

Tiada Peradaban Tanpa Karakter

Pasca wacana postmodernisme menggelinding ke publik pada beberapa dekade lalu, penulis meyakini akan terjadi suatu era di mana berbagai ragam sudut pandang dan ekspresi yang berlatar belakang apapun, entah itu agama, etnis, bahasa dapat hidup dalam ruang bersama dengan norma yang telah disepakati bersama, tanpa adanya saling dominasi satu dengan yang lain. Dugaan penulis ternyata meleset, fenomena ketertutupan diri atau memisahkan diri dari masyarakat justru terjadi di sebagian masyarakat kita yang cenderung masif.

Kita semua tentu paham bahwa seharusnya pandangan-pandangan yang bercorak eksklusiv jelas tidak dapat dipertahankan di dalam kultur dunia kosmopolitan saat ini, sebuah era yang sering disebut sebagai era multikultural, di mana Bhikhu Parekh (2008) mendefinisikannya sebagai: *“just as society with several religions or languages is multi religions or multilingual, a society containing several cultures is multicultural”*.

Masyarakat multikultur adalah masyarakat yang terdiri atas ragam etnis dan kebudayaan yang beranekaragam. Kehidupan mereka tidak diatur oleh sistem budaya tunggal dan tertutup, atau dalam terminologi postmodern grand narrative, narasi tunggal (J. F. Lyotard, 1991), melainkan terdiri atas sistem budaya yang beragam dan nilai yang relatif. Menurut Tilaar, titik utama di era multikultural terletak pada pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaan masing-masing (H.A.R Tilaar, 2004).

Di dalam keragaman tidak selamanya terjadi hubungan timbal-balik atau interaksi dan penghormatan ataupun lainnya. Akan tetapi potensi konflik, klaim kebenaran, intoleransi atau bahkan disintegrasi justru

menghantui masyarakat multikultural. Oleh karena itu program yang disepakati oleh 197 negara, yakni Sustainable Development Goals atau Pembangunan Berkelanjutan yang merekomendasikan penguatan inklusi sosial perlu mendapat perhatian.

Inklusi sosial mengajarkan sikap “peduli” dan mau mengerti (*verstehen*), atau “*politics of recognition*” politik pengakuan terhadap kelompok rentan dan minoritas. Penanaman sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama, kelompok etnis, kelompok rentan dan minoritas, serta belajar untuk mengadvokasi permasalahan dan bahkan kampanye nilai-nilai perdamaian untuk melawan intoleransi, diskriminasi, dan peminggiran kelompok minoritas di tengah hegemoni budaya dan kultur monolitik dan uniformitas global. Di samping itu, tema-tema mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya juga menjadi perhatian dalam program SDGs ini.

Bagaimana karakter juga dapat menjadi bagian dari diskursus ini? Dominasi abad pencerahan lalu disusul abad modern yang berparadigma antroposentrik berdampak pada peminggiran kutub Ekologi dan bahkan Tuhan sekaligus. Pada ranah mikro, kita dapat merasakan bagaimana standarisasi yang berhasrat penyeragaman itu lalu meminggirkan segala macam narasi-narasi yang dianggap menyimpang dari narasi besar. Antropologi manusia modern yang kemudian membentuk karakteristik subjek dominan, hegemoni, dan tentu saja instrumental lalu berdampak pada peminggiran narasi lokal, kebenaran bersifat terpusat, bahkan narasi karakter jelas tidak menjadi bagian yang penting untuk diperbincangkan.

Di sisi lain, paradigma *developmentalisme* yang menekankan pada ukuran statistik dalam pembangunan masyarakat kenyataannya bergeser ke arah peminggiran manusia itu sendiri. Tolak ukur materialistik menjadi dominan dan meminggirkan hal-hal mendasar dalam pembangunan manusia itu sendiri, yakni karakter.

Dalam konteks demikianlah, kehadiran buku ini penting kiranya untuk menyuguhkan ke khalayak umum dalam memperbincangkan karakter dalam berbagai dimensi, bentuk dan bahkan model yang dapat menjadi kontribusi penting dalam upaya mencapai tujuan mendasar dari pembangunan berkelanjutan.

Secara garis besar, buku ini memaparkan karakter yang berpijak dari antropologi manusia itu sendiri. Manusia tidak diletakkan pada kutub yang berlawanan satu dengan lainnya, yakni individu dan komunal (sosial), tetapi manusia yang berkarakter adalah manusia yang berada dalam jaringan,

jejaring di antara dua kutub secara inheren. Konsepsi demikian sangatlah penting, terlebih dalam rangka untuk mencounter cara pandang manusia modern yang menjadikan dirinya terpisah, egoistik dari lainnya.

Pada beberapa tulisan lain, kita akan menemui beberapa tulisan yang memfokuskan diri pada upaya untuk mencari format, model atau bentuk ideal pendidikan karakter, baik pada tingkat pendidikan menengah ataupun Perguruan Tinggi. Praktik pendidikan karakter kenyataannya tidaklah seragam, bukan perihal nilai yang hendak diinternalisasikan, tetapi dinamika struktur dan bahkan konteks yang melatarinya menjadi pertimbangan utama dalam penanaman karakter. Pembaca justru akan diajak untuk ‘membandingkan’ berbagai ragam model pendidikan karakter dan sekali lagi bukan dalam rangka untuk menggugulkan model satu dengan lainnya akan tetapi menjadi khasanah yang kita semua dapat mengambil dan sekaligus mengabaikannya jika tidak relevan.

Beberapa tulisan lain yang berkisar mengenai karakter juga menyingung mengenai pentingnya menjadikan kearifan lokal, local genius, atau bahkan local knowledge menjadi subkultur yang dapat dikembangkan atau bahkan ditransformasikan di masa sekarang. Akibat ketersilauan kita semua akan modernitas seringkali mengabaikan tradisi dan lokalitas yang mempunyai banyak nilai, karakter, dan kearifan yang dikemas dalam budaya, entah berupa permainan tradisional, seni, musik, ataupun lainnya.

Alhasil, gagasan-gagasan yang dipaparkan para penulis di dalam buku ini kiranya menjadi milestone untuk mendorong wacana karakter menjadi bagian fundamental bagi kehidupan manusia untuk keberlanjutan peradaban pasca modern.

Malang, 25 Desember 2022

Dosen Pancasila
UPT Pengembangan Kepribadian Mahasiswa
Universitas Brawijaya

Mohamad Anas

Halaman ini sengaja dikosongkan

PRAKATA

Dewasa ini, pendidikan karakter menuju tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals SDGS) merupakan sebuah program yang sedang digandrungi oleh banyak pihak. Sebab itu, banyak sekali forum-forum yang diadakan, terutama oleh perguruan tinggi, baik seminar maupun konferensi, untuk merumuskan dan mengumpulkan gagasan demi menyambut tantangan zaman. Sebagian dari hasil-hasil forum diterbitkan dalam berbagai jurnal, artikel, maupun buku.

Lembaga pendidikan sebagai peletak pondasi setiap insan dalam menjajaki kehidupan selalu mendapat tantangan untuk pembaharuan serta penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Keselarasan pendidikan ditujukan untuk mempersiapkan dan membentuk karakter anak bangsa yang akan menghadapi kehidupan dalam masa dan konteks yang berbeda, sesuai perkembangan zaman yang ada. Kehidupan yang dinamis menuntut manusia agar selalu siaga dalam setiap keadaan. Salah satu solusi dari hal ini adalah penguatan karakter.

Pengembangan pendidikan karakter dan kepribadian pada peserta didik juga bertujuan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi peserta didik. Pendidikan karakter yang terintegrasi dalam proses pembelajaran dilakukan dengan menginternalisasikan nilai-nilai luhur pada perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

Buku ini adalah sebuah bunga rampai, rangkaian ide berkelanjutan tentang pendidikan karakter yang bermuara pada tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Pendekatan isu dalam buku ini dilakukan dari berbagai sisi, mulai dari pengembangan pendidikan di perguruan tinggi, penguatan karakter melalui nilai-nilai Pancasila,

pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, hingga tinjauan pengetahuan adat lokal. Seluruh upaya ini dilakukan demi mempersiapkan pendidik maupun peserta didik dalam menyambut dan melaksanakan tujuh belas poin dari tujuan pembangunan berkelanjutan.

Selamat membaca.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN - iii

PRAKATA - vii

DAFTAR ISI - ix

- 1

**INOVASI MODEL PEMBELAJARAN SMART CITIZEN
GUNA MEWUJUDKAN PROFIL PELAJAR PANCASILA
DI SMA NEGERI 2 SEMARANG**

Tutik Wijayanti, Maman Rachman, Hafiz Rafi Uddin, Muhammad Andi Kurniawan

- 12

**INTERNALISASI NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM
PEMBINAAN TOLERANSI BERAGAMA**

Fuad Hilmi, Deden Syarif Hidayatulloh

- 26

**MENGGAGAS DESAIN *HYBRID LEARNING* PADA MATA KULIAH
PENDIDIKAN PANCASILA KEWARGANEGARAAN DI INSTITUT
TEKNOLOGI BANDUNG**

Ridwan Fauzi, Nia Kurniasih, Siti K Azhari, Cecep Alba, Shohib Khoiri

- 42

**PEDOMAN ALTERNATIF PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA
SEBAGAI MATA KULIAH WAJIB DI ERA PASCA PANDEMI**
Ulinnuha Madyananda

- 53

**PEMBELAJARAN MKWU ISBD BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA
UPT MKU UNIVERSITAS SYIAH KUALA**
Hasbi Ali, Teuku Muttaqin Mansur, Sulaiman Tripa, M. Adli Abdullah

- 64

**PERANCANGAN SINERGITAS MATA KULIAH WAJIB KURIKULUM
DALAM PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK DI 6 UNIVERSITAS DI
INDONESIA**
Dwi Purnomo, Ryan Hara, Faris Prima Fadhilah, Aprida Sondang, Siti Ulfah Rifa'atul Fitri

- 74

**MODEL PENERAPAN SIKAP ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI
MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERBASIS
COMPANY'S ANTI CORRUPTION SYSTEM**
Martini, Efridani Lubis

- 86

**PERAN FIQIH PADA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DALAM
BINGKAI HALAL CITY**
Khalid Rahman, Albar Adetary Hasibuan, Abdul Madjid

- 98

**PENTINGNYA KESADARAN LINGKUNGAN
SEBAGAI SALAH SATU NILAI KEBUDAYAAN DALAM
KARYA SASTRA INDONESIA**
Venus Khasanah dan Teguh Prakoso

- 112

**PEMAHAMAN PENDIDIKAN DEMOKRASI
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN BERPOLITIK**
Sri Hudiarini, Galuh Kartiko, Hudriyah Mundzir, Moh Sinal

- **120**

**PERSPEKTIF PENDIDIKAN KARAKTER DALAM NILAI-NILAI
PANCASILA MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**
Izuddinsyah Siregar, Salmah Naelofaria

- **130**

MAKNA AKU (INDIVIDU) DALAM KONSEP MANUSIA INDONESIA
Y.B. MANGUNWIJAYA
Kurniawan dan Emi Setyaningsih

- **147**

**IDENTITAS PERSONAL KAPITA DALAM CERITA RAKYAT
ORANG LOLODA PERANTAUAN**
Betsi Rooroh

- **156**

**IMPLEMENTASI PERMAINAN TRADISIONAL
DALAM MEMBENTUK KARAKTER ANAK USIA 5-6 TAHUN**
Nurhayati, Windasari AR. Haku

- **176**

**KAJIAN HISTORIS REOG BULKIYO DALAM PERSPEKTIF MULTIPLE
INTELLIGENCES, STRATEGI PENGUATAN KARAKTER BANGSA DI
ERA DISRUPSI**
Mifdal Zusron Alfaqi, Rika Safitri Nur Azizah

- **187**

**KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DESA SENTOLO SEBAGAI
MATERI AJAR MATA KULIAH SASTRA LISAN (FOLKLORE)**
Tri Ratna Herawati, Muncar Tyas Palupi

- **198**

**PELESTARIAN LINGKUNGAN DI LERENG GUNUNG ARJUNO
MELALUI PENGUNGKAPAN HUBUNGAN MITOS SEMAR DENGAN
TIRTA AMERTA SARI**
Wahda Rahma Laila, Fabian Omar Batitusta, Alief Ananta Falaqurrahman

- **208**

**PENGEMBANGAN MULTIMEDIA INTERAKTIF BERBASIS
ADOBE FLASH TERINTEGRASI NILAI-NILAI KARAKTER PADA
MATERI SISTEM RESPIRASI**

Hudson Sidabutar, Riscal Sitorus

- **219**

**PARTSISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DESA: TELAAH YURIDIS DAN PILIHAN METODE**

Triya Indra Rahmawan, Galieh Damayanti, Agni Istighfar Paribrata

- **232**

**REFLEKS PMP PADA BAHASA ACEH DIALEK PIDIE:
KAJIAN HISTORIS DAN KEBUDAYAAN**

Millatuz Zakiyah

- **251**

MENCARI IDENTITAS DIRI-KULTURAL INDONESIA

Mohamad Anas

**INOVASI MODEL
PEMBELAJARAN *SMART CITIZEN*
GUNA MEWUJUDKAN PROFIL
PELAJAR PANCASILA DI SMA
NEGERI 2 SEMARANG**

*Tutik Wijayanti, Maman Rachman,
Muhammad Andi Kurniawan,
Hafiz Rafi Uddin*

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Universitas Negeri Semarang

Pendidikan merupakan proses untuk mengembangkan semua aspek kepribadian manusia yang mencakup pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan. Keberadaannya dalam kehidupan manusia sangatlah penting, dikarenakan pendidikan dijadikan sebagai dasar dalam membangun peradaban yang maju dan unggul. Menurut Philip H. Coombs, pendidikan terbagi dalam tiga lingkungan, yakni lingkungan pendidikan informal, formal, dan non-formal (dalam Munib dkk, 2016: 76)¹. Ketiga lingkungan pendidikan tersebut, memiliki peranan masing-masing dalam membangun peradaban dunia. Dari tiga tersebut, pendidikan formal sedikit berbeda dalam pelaksanaannya yang cenderung terstruktur dibandingkan dengan kedua lingkungan pendidikan lainnya yang jauh lebih santai dan menyesuaikan situasi maupun kondisi.

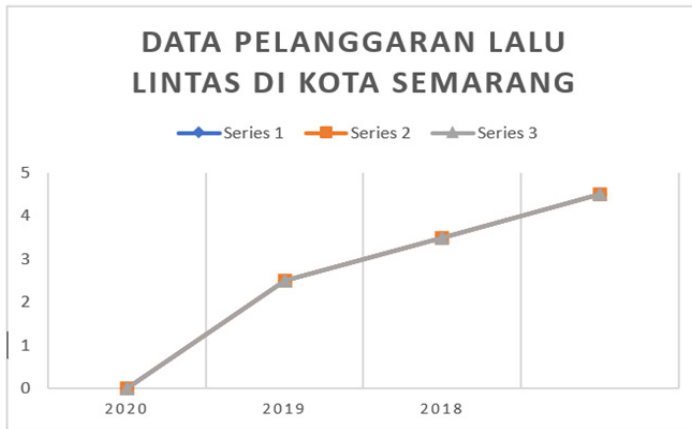
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003² mendefinisikan pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Adapun ciri-ciri yang melekat pada pendidikan formal yaitu: 1) Sistem persekolahan; 2) Berstruktur; 3) Berjenjang; dan 4) Penyelenggaraanya berdasarkan kurikulum.

Masyarakat Indonesia biasa menyebut pendidikan formal sebagai sekolah, yang berarti tempat untuk menuntut ilmu. Kata Ilmu memiliki makna yang luas seperti pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku. Pada saat ini, pelaksanaan pendidikan formal didasarkan pada Profil Pelajar Pancasila, yakni suatu gagasan yang dijadikan pedoman dalam pembangunan pendidikan, terutama pada pembangunan karakter bangsa. Pada Profil Pelajar Pancasila, terdapat tujuh nilai penting salah satunya adalah mengenai kemandirian. Karakter kemandirian menitik beratkan pada pembangunan sikap bertanggung jawab, dapat mengolah baik rasa maupun tindakan ke hal-hal yang baik dan dapat menentukan sikap.

Penguatan karakter kemandirian sangat dibutuhkan untuk siswa SMA, karena pada masa tersebut anak memasuki babak baru dalam kehidupan yakni peralihan menuju remaja. Karakteristik remaja adalah suka mencoba hal-hal baru, merasa tertantang, dan tidak suka diatur atau patuh dengan aturan. Seperti halnya dalam berkendara, masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas oleh siswa SMA.

1. Munib, Achmad Dkk. 2016. Pengantar Ilmu Pendidikan. Semarang: UNNES Press

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional



Berdasarkan data yang diambil dari Polda Jawa Tengah, pada tahun 2020 kasus pelanggaran kedisiplinan berlalu lintas di Kota Semarang mencapai angka 417,523. Angka tersebut sangat tinggi selama beberapa tahun terakhir, di mana pelanggar didominasi kisaran usia 16-20 tahun. Adapun jenis pelanggaran lalu lintas cenderung beragam, mulai dari tidak memiliki kelengkapan lalu lintas, tidak menggunakan helm, menerobos lalu lintas dan kecepatan diatas rata-rata dalam berkendara. Permasalahan tersebut sangat berbahaya apabila didiamkan saja karena dapat membahayakan keselamatan diri sendiri ataupun pengendara lain. Untuk menangani permasalahan tersebut dibutuhkan adanya pembangunan karakter disiplin berlalu lintas melalui lembaga pendidikan formal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui pengembangan model pembelajaran “*smart citizen*” dalam menanamkan karakter disiplin.

Smart Citizen merupakan model pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan karakter disiplin siswa berdasarkan pada Profil Pelajar Pancasila poin kemandirian yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Model pembelajaran ini dikemas dengan menarik, di mana dibagi menjadi beberapa tahapan dimulai dari tahap: 1) *pre test*, yang bertujuan untuk melihat sejauh mana pengetahuan siswa dalam berlalu lintas, 2) sosialisasi, yang bertujuan untuk memberikan stimulus berupa pengetahuan tata cara berlalu lintas, 3) pelaksanaan, melalui proyek terkait tata aturan berlalu lintas, dan 4) *post test*, yang bertujuan untuk melihat peningkatan pengetahuan setelah diberikan stimulus. Model pembelajaran *smart citizen* ini dikemas dengan menarik, ringan dan mudah dimengerti berdasarkan perkembangan zaman dan disesuaikan dengan minat dari siswa yang berusia 15-18 tahun. Model ini akan efektif guna mengurangi permasalahan mengenai pelanggaran disiplin berlalu lintas.

METODE

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and Development) yang bertujuan untuk menghasilkan produk dan menguji keefektifan produk yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan pandangan Sugiyono (2011)³, yang menyatakan bahwa penelitian pengembangan (R&D) bertujuan menghasilkan produk. Adapun produk yang dihasilkan dari penelitian pengembangan ini yaitu inovasi model pembelajaran smart citizen dalam berlalu lintas. Model Pengembangan pada penelitian ini mengikuti model Sugiyono (2011:408),⁴ dengan langkah-langkah sebagai berikut.

Tabel 1. Metode Penelitian Research and Development



2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian di SMA Negeri 2 Semarang dikarenakan sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang sedang mengembangkan profil Pelajar Pancasila. Sampel dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XI dengan mengambil 2 kelas di SMA Negeri 2 Semarang.

3. Prosedur Penelitian

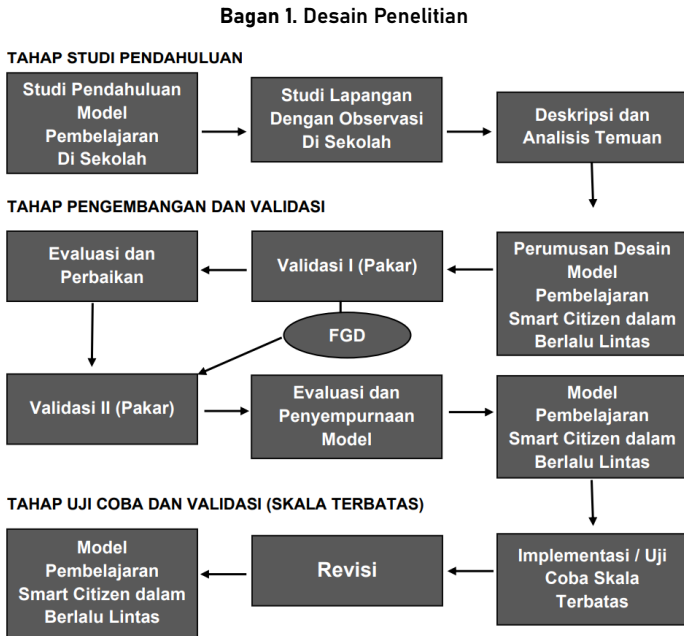
Prosedur dalam penelitian ini mengikuti dari langkah-langkah penelitian dan pengembangan. Borg & Gall (2003)⁵ menyatakan terdapat

3. Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta.

4. Ibid., Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta.

5. Borg, W and Gall, M. (2003). Educational Research: An introduction 7th edition. New York. Longman Inc.

10 tahapan penelitian dan pengembangan, Dalam penelitian ini, tahap yang akan dilakukan hanya pada tahap uji coba produk. Prosedur pengembangan dan validasi produk dilakukan dengan diagram alur kegiatan seperti pada bagan 1.



4. Jenis Data

Dalam mempermudah mengetahui jenis data, tujuan data tersebut diambil, cara mengukur data, instrumen apa yang digunakan untuk mengambil data, dan analisis yang digunakan setelah data terkumpul, dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut ini.

Tabel 2. Jenis Data

NO	Jenis Data	Tujuan	Cara Mengukur	Instrumen	Analisis
1	Identifikasi Potensi, Masalah dan Informasi	Kondisi Awal yang Melatar Belakangi Penelitian	Wawancara, Observasi, Studi Literature	Panduan Wawancara, Lembar Observasi	Deskriptif, Kualitatif
2	Validitas Model <i>Smart Citizen</i>	Validitas Model Oleh Ahli	Angket, Validasi Ahli, Observasi	Angket	Deskriptif, Kualitatif

3	Efektifitas a. Inovasi Model Pembelajaran <i>Smart Citizen</i> b. Hasil	Implementasi Model Pembelajaran Smart Citizen Dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila Dapat Diketahui Hasil Implementasi	Observasi Projek	Lembar Observasi Produk Sesuai Kebutuhan	Deskriptif, Kualitatif
4	Kepraktisan Model	Kepraktisan Model Pembelajaran <i>Smart Citizen</i>	Angket Respon Pendidik dan Peserta Didik	Lembar Angket Respon Pendidik dan Peserta Didik	Deskriptif, Kualitatif

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kemudian dianalisis sesuai dengan kebutuhan.

a. Uji Validitas

Validitas instrumen yang akan diukur adalah validitas isi dan validitas susunan. Validitas isi tes dilakukan melalui uji ahli atau profesional (*expert judgment*) oleh pakar evaluasi pendidikan (*judgment*).

b. Kepraktisan Model

Kepraktisan dilakukan untuk memperoleh data respon Pendidik dan Peserta Didik SMA Negeri 2 Semarang terhadap model pembelajaran *smart citizen* yang dikembangkan. Teknik analisis data yang digunakan kali ini adalah statistik deskriptif. Data respon pendidik dan peserta didik akan dipresentasikan. Data yang terkumpul akan diinterpretasikan dengan kriteria seperti pada tabel 3.

Tabel 3. Kriteria Penilaian Respon Pengguna

Kriteria Penilaian	Rentang Rata-rata Skor
Sangat Positif	85% > RP
Positif	70% > RP < 85%
Cukup Positif	50% > RP < 70%
Kurang Positif	RP < 5-%

6. Alur Penelitian

Secara ringkas, alur penelitian tertuang pada Bagan Alur Penelitian berikut ini.

Tabel 4. Bagan Alur Penelitian

Tahap	Fokus	Sumber Data	Alat Pengambil Data	Keabsahan/Analisis Data	Temuan/Luaran
1	2	3	4	5	6
Pendahuluan	Model-model pembelajaran dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila	Informan, Guru, Peristiwa, Fenomena	Pedoman Wawancara, lembar Observasi, Daftar cek (Catatan lapangan)	Triangulasi alat, sumber dan pengamat Analisis data, interaktif, reduksi data, display data, simpulan	Model faktual pembelajaran dalam mewujudkan profil pelajar pancasila
Pengembangan	Mengembangkan Model pembelajaran smart citizen dalam mewujudkan profil pelajar pancasila	Informan, Ahli dan Praktisi, Peristiwa, Dokumen	Wawancara, Observasi, Dokumen, FGD	Triangulasi alat, sumber dan pengamat Analisis data, interaktif, reduksi data, display data, simpulan	Model hipotetik penyelenggaraan model pembelajaran smart citizen dalam mewujudkan profil pelajar pancasila
Validasi Model dan Produk	Menguji Kelayakan Model pembelajaran smart citizen dalam mewujudkan profil pelajar pancasila	Ahli: Pendidikan Karakter, model pembelajaran, Guru, Mapel PPKN	Intrumen Kelayakan Model. Intrumen Kelayakan Produk Buku referensi. Intrumen kelayakan artikel.	Diskusi Terfokus para ahli dan Praktisi. Pakar penulisan jurnal, pakar penulisan buku.	Model akhir kelayakan model pembelajaran smart citizen dalam mewujudkan profil pelajar pancasila

7. Distribusi Tugas Tim Peneliti

Peneliti beranggotakan tiga orang dosen, empat mahasiswa, satu alumni dan juga mitra dengan pembagian tugas sebagai berikut: Ketuan peneliti Tutik Wijayanti, S.Pd., M.Pd sebagai pakar dalam bidang Evaluasi pendidikan bertugas sebagai koordinator kegiatan yang bertanggungjawab atas keseluruhan jalannya penelitian. Selain itu, sebagai pakar dalam bidang evaluasi pendidikan, Tutik Wijayanti, S.Pd., M.Pd juga bertugas dalam melakukan pengembangan model pembelajaran *smart citizen*. Prof. Dr. Maman Rachman bertugas dalam mengembangkan model pembelajaran dan juga mengembangkan instrumen penelitian. Hafiz Rafi Uddin, S.H. S.Pd.I, M.H bertugas dalam membuat laporan dan penyusunan artikel. Sedangkan Muhammad Andi Kurniawan bertugas sebagai pembantu penelitian di lapangan, serta mengurus teknis administrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Smart Citizen merupakan inovasi model pembelajaran penguatan pendidikan karakter yang dirancang secara khusus guna menerapkan karakter disiplin siswa dalam mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. Model Pembelajaran *Smart Citizen* memiliki urgensi nyata dalam mencetak generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, cerdas dan tertib dalam berlalu lintas.

Hal ini didasarkan karakteristik remaja sekarang suka mencoba hal-hal baru, merasa tertantang, dan tidak suka diatur atau patuh dengan aturan. Seperti halnya dalam berkendara, masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas oleh siswa SMA, oleh karena itu dengan adanya Model Pembelajaran *Smart Citizen* ini diharapkan dapat menjadi langkah solutif dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Berikut merupakan langkah-langkah tahapan implementasi Model Pembelajaran *Smart Citizen*, antara lain:

1. Pemberian Materi

Tahapan awal dalam Model Pembelajaran *Smart Citizen* yaitu dengan melalui penyampaian materi awal. Peserta didik diberikan bekal pengetahuan mendasar dan komprehensif mengenai Pendidikan Karakter, fungsi dan tujuan dalam mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. Dalam penyampaian materi ini, diberikan studi kasus realitas di lapangan tentang permasalahan karakter generasi muda yang harus dihindari dan segera untuk mendapatkan penanganan khusus dalam meminimalisir lunturnya karakter baik pada diri peserta didik salah satunya melalui Model Pembelajaran *Smart Citizen*.

2. Menghadirkan Role Model

Pada tahap kedua yaitu menghadirkan *role model*, dengan cara menunjukkan kepada peserta terkait aksi nyata penguatan karakter kemandirian dan disiplin pada diri peserta didik. Menghadirkan *role model* bisa melalui berbagai cara, salah satunya yaitu bisa ditunjukkan dengan menayangkan video atau film pendek tentang implementasi nilai-nilai karakter. Melalui penayangan tersebut, peserta didik dapat melihat secara langsung betapa pentingnya nilai karakter baik pada diri seseorang, bagaimana cara menumbuhkan nilai karakter tersebut dan dampak baiknya dalam menumbuhkan nilai karakter tersebut.

3. Pemberian Projek Berkelompok

Setelah diberikan penataran materi yang cukup mengenai Penguatan Pendidikan Karakter, peserta akan dijelaskan mengenai Proyek Kelompok. Ada beberapa cara dan model yang dapat digunakan dalam pemberian proyek ini. Peserta didik dapat diajak untuk melakukan *outbound* yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan karakter mandiri dan disiplin diri pada peserta didik. Cara alternatif lain dapat dilakukan dengan cara bermain peran. Apabila yang dipilih adalah *outbound*, maka terlebih dahulu harus dipersiapkan jenis *outbound* apa yang cocok dan sesuai dengan karakter yang ingin dimunculkan, selanjutnya persiapkan peralatan dan bentuk kelompok sesuai dengan yang dibutuhkan. Masing-masing kelompok akan didampingi oleh satu tutor yang bertugas untuk mengarahkan dan membantu peserta dalam memunculkan karakter yang diharapkan.

Sedangkan, apabila yang dipilih adalah bermain peran, maka perlu dipersiapkan pendidikan karakter kemandirian dan disiplin diri untuk selanjutnya di persiapkan topik-topik apa saja yang akan dibagi ke peserta untuk dimainkan, kemudian persiapkan peralatan penunjangnya. Dalam pelaksanaan bermain peran peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok besar, kemudian masing-masing kelompok diberikan satu tutor dengan satu tema karakter, misalnya disiplin, tanggung jawab dan kemandirian. Setiap kelompok akan diberikan waktu untuk latihan bersama tutornya sesuai dengan tema yang diperoleh. Estimasi waktu tampil setiap kelompoknya yakni 10-15 menit. Secara bergiliran setiap kelompok tampil berdasarkan temanya masing-masing.

4. Penyampaian Hasil

Pada tahap ini, peserta didik akan mempraktekkan dari apa yang sudah mereka persiapkan. Sebelum diberikan Proyek Berkelompok, peserta didik diberi waktu untuk dapat mempersiapkan peralatan apa saja yang akan digunakan dan juga dipersilahkan mengatur latarnya.

5. Evaluasi Program

Evaluasi program diberikan sebagai refleksi dan pembenahan dari program yang sudah dijalankan, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh peserta didik ataupun belum. Masukan dan saran inilah yang nantinya dapat digunakan untuk dapat mengembangkan model pembelajaran *Smart Citizen* dalam mengembangkan karakter mandiri dan disiplin peserta didik dalam mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.

PENUTUP

Profil Pelajar Pancasila merupakan dasar pelaksanaan Pendidikan Formal yang dijadikan pedoman dalam pembangunan karakter kemandirian dan disiplin diri. Penguatan karakter mandiri dan disiplin diri sangat penting untuk dilakukan mengingat banyaknya kasus pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh peserta didik SMA. Untuk menangani permasalahan tersebut dibutuhkan adanya pembangunan karakter disiplin berlalu lintas melalui lembaga pendidikan formal dengan mengembangkan model pembelajaran "*smart citizen*" guna mengurangi pelanggaran berlalu lintas. Pelaksanaan Model Pembelajaran ini dilakukan dengan 5 tahapan yakni 1) Pemberian Materi; 2) Menghadirkan *Role Model*; 3) Pemberian Projek Berkelompok; 4) Penyampaian Hasil; dan 5) Evaluasi Program. Dengan adanya Model Pembelajaran *Smart Citizen* ini diharapkan dapat menjadi langkah solutif dalam menyelesaikan kasus pelanggaran kedisiplinan oleh Pelajar SMA.

DAFTAR RUJUKAN

- Munib, Achmad, dkk. (2016). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Semarang: UNNES Press.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu lintas dan Angkutan Jalan*.
- Lase, S. (2021). *Gambaran Pengetahuan Siswa/Siswi Tentang Bantuan Hidup Dasar (BHD) di SMA Negeri 2 Bawolato Kabupaten Nias*. Karya Tulis. Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang *Rencana Strategis Kemendikbud tahun 2020-2024*.
- Wulandari T. (2021). 6 profil pelajar pancasila. Diakses melalui detik.com pada tanggal kamis 8 Juli 2021.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Borg, W and Gall, M. (2003). *Educational Researc: An introduction 7th edition*. New York: Longman Inc.
- Khabibah, Siti, (2006). *Pengembangan Media Pembelajaran Matematika dengan Soal Terbuka untuk Meningkatkan Kreativitas Peserta didik Sekolah Dasar: Disertasi*. Program Pasca Sarjana UNESA, hl. 97.
- Ismail S, dkk. (2021). *Analisis kebiasaan penguatan pendidikan karakter dalam mewujudkan palelajar Pancasila*. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial Vol 1 hal. 2021.
- Supratono Hen, (2015). *Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa dalam Pembelajaran SMA*. Jurnal Promosi. Vol 1 hal 36- 49.
- Hasibuan dkk, (2018). *Manajemen pendidikan karakter*. Jurnal Keilmuwan Manajemen Pendidikan. Vol. 02 hal. 191-219.

INTERNALISASI NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM PEMBINAAN TOLERANSI BERAGAMA

Fuad Hilmi

Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung,

Deden Syarif Hidayatulloh

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom

Toleransi merupakan unsur yang penting untuk diperhatikan, terutama di sebuah Negara dengan kultur yang majemuk dan terdiri dari berbagai bahasa, suku bangsa, ras dan agama yang bermacam-macam. Berbagai sebaran berita mengenai kerusuhan, kekerasan, pertikaian, dan menjamurnya paham radikalisme menjadi ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan LSI (Lembaga Survei Indonesia) terdapat 31% mahasiswa yang terindikasi tidak toleran (Etikasari, 2018). Mahasiswa, sebagai pewaris bangsa, harus dijauhkan dari paham yang mengajarkan hal-hal perilaku radikal. Apabila tidak ada solusi pencegahan dari ancaman radikalisme yang akan melahirkan terorisme, hal ini akan menjadi menjadi bom waktu yang dapat meledak sewaktu-waktu. Pembinaan toleransi, khususnya di bidang agama, menjadi suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar. Salah satu solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan internalisasi nilai-nilai moderasi.

Adapun hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian mengenai internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembinaan toleransi sebagai berikut :

Menciptakan siswa moderat harus melalui upaya internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dengan memasukkan nilai-nilai tersebut dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang berkelanjutan (Gunawan et al., 2021). Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan agama perlu mengupayakan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama agar para santri tidak terjerumus dalam paham radikalisme dan terorisme (Khotimah, 2020). Perguruan tinggi umum juga sangat perlu melakukan proses internalisasi dalam pola pembelajaran yang diterapkan, materi pembelajaran yang dikolaborasikan, dan evaluasi pembelajaran yang tepat (Purwanto et al., 2019). Beberapa usaha dalam memperkuat komitmen dalam berbangsa dan bernegara antara lain dilakukan dengan bersikap toleran dalam kemajemukan, komitmen anti kekerasan atas nama agama,

Menciptakan siswa moderat harus melalui upaya menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama maka perlu adanya upaya memasukkan dalam mata pelajaran Pendidikan agama Islam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang berkelanjutan (Gunawan et al., 2021). Pesantren sebagai salah satu lembaga membina anak bangsa memerlukan sebuah upaya internalisasi moderasi beragama agar menghindarkan para santri pada paham radikalisme dan terorisme (Khotimah, 2020), Perguruan tinggi umum perlu melakukan sebuah usaha internalisasi nilai moderasi melalui pola pembelajaran yang diterapkan, materi pembelajaran yang dikolaborasikan dan evaluasi pembelajaran yang tepat dalam internalisasi

nilai moderasi beragama dapat mencegah paham radikalisme dan paham terorisme (Purwanto et al., 2019). Moderasi beragama adalah sebuah usaha menguatkan komitmen dalam bernegara dan berbangsa, bersikap toleransi dalam hidup yang majemuk, komitmen anti kekerasan atas nama agama atau yang lainnya, dengan memperkuat sosialisasi dan melembagakan moderasi beragama melalui internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam sektor pembangunan bangsa (Jamaluddin, 2022), Moderasi beragama adalah usaha mencegah paham radikalisme melalui pendidikan Islam penanaman sikap tawazun (berkeseimbangan), i'tidal (lurus dan tegas), tasamuh (toleransi), musawah (egaliter), syura (musyawarah), ishlah (reformasi), aulawiyah (mendahulukan yang prioritas), tathawwur wa ibtikar (dinamis dan inovatif) (Fahri & Zainuri, 2019). Toleransi dalam beragama atau tasamuh dalam islam adalah upaya bagaimana ajaran rahmat (cinta), hikmat (kebijaksanaan), maslahat ummat (kemanfaatan universal) dan adl (Keadilan). Konsep toleransi dalam konteks teologis, sosiologis, dan budaya yang disebut pluralisme agama dapat menciptakan kerukunan dalam masyarakat. (Ghazali, 2016), Toleransi beragama harus melibatkan semua pihak harus secara terbuka untuk mencapai tujuan bersama dengan cara bersama, dengan mengambil pemahaman nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, ritualitas dan aktualitas dengan mengembangkan sebuah dialog yang menyatukan umat beragama sehingga toleransi bukan hanya sebuah (Casram, 2016). Moderasi beragama adalah telaah tentang moderasi beragama dan toleransi beragama mengenai batas-batas, sehingga dapat dipahami secara holistic, sehingga tercipta kerukunan dan keharmonisan dalam hidup beragama dengan cara mengendalikan diri dan menyediakan ruang untuk saling menghormati keunikannya masing-masing sehingga tidak ada merasa terancam terhadap sebuah keyakinan maupun hak-hak lainnya (Abror, 2020).

Islam mengakui dan menerima kenyataan keragaman agama, komitmen untuk menciptakan suasana kerukunan dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat, tetap menjaga kemurnian keyakinan islam menjadi pelopor toleransi, demi kerukunan, keharmonisan, dan kedamaian. Akhlak yang membahas toleransi dalam Islam dikaji secara teologis, syariah, muamalah, dan etika dari segi kemanusiaan. Akhlak toleransi Islam menjadi kajian yang perlu dikaji, mengingat ia sudah diteladankan oleh Rasulullah SAW (Suryan, 2017).

Penelitian ini membahas tentang bagaimana toleransi beragama di kalangan anak muda saat ini atau disebut generasi milenial, dengan kajian bagaimana Persepsi toleransi beragama, Sikap toleransi beragama, Kerjasama antar umat beragama yang dilakukan oleh generasi milenial ber usia 20

tahun (Nugraha & Firmansyah, 2019) Sedangkan kebaruan dari penelitian ini adalah meneliti internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembinaan toleransi beragama. Sehingga tujuan penelitian ini menjelaskan pembinaan toleransi beragama melalui internalisasi nilai-nilai moderasi beragama. Upaya dalam menciptakan kerukunan, kedamaian, persaudaraan dan kemaslahatan adalah dengan mewujudkan masyarakat yang bersikap toleransi dalam beragama dengan menerapkan internalisasi nilai-nilai beragama. Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama penting diterapkan dalam menciptakan toleransi beragama melalui pola internalisasi nilai-nilai moderasi beragama, materi internalisasi nilai-nilai moderasi beragama, dan pelaksanaan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama. internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dapat mendorong terciptanya masyarakat yang toleran sehingga dapat mencegah perilaku intoleransi yang merusak kerukunan, kedamaian, persaudaraan dan kemaslahatan dalam hidup berbangsa dan negara untuk persatuan dan kesatuan Indonesia.

Peneliti memilih Universitas Telkom Bandung, Universitas Telkom lembaga yang menerapkan Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama, lembaga pendidikan yang mengembangkan budaya toleransi di lingkungan kampus. Universitas Telkom Bandung dapat menciptakan toleransi beragama meski terdapat beragama ras, suku bangsa, dan agama, sehingga tercipta kerukunan dan kedamaian. Universitas Telkom mencoba menawarkan konsep dan praktik toleransi beragama melalui Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama. Selain itu, Universitas Telkom dipilih dikarenakan lokasi yang dekat dengan tempat peneliti bekerja, sehingga memudahkan peneliti dalam mengakses data-data yang dibutuhkan.

METODE

Metode penelitian Internalisasi Nilai-nilai moderasi beragama dalam pembinaan toleransi beragama yang berlokasi di Universitas Telkom disajikan melalui pendekatan kualitatif (Darmalaksana, 2020). Peneliti menganalisis fenomena yang terjadi secara alami oleh subyek penelitian, seperti "perilaku, persepsi, pandangan, motivasi, tindakan sehari-hari, secara menyeluruh atau holistik" dengan metode deskripsi sehingga bisa dikaji secara ilmiah apa yang dialami secara alami dari sebuah penelitian (Arifin, 2010). Wawancara, observasi atau langsung terjun kelapangan untuk melakukan pengamatan dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Setelah dari wawancara dan observasi, pengumpulan data dilanjutkan dengan pengamatan, sehingga dapat dihasilkan data yang akurat (Moleong, 2018). Data yang dihasilkan dari wawancara, pengamatan dan dokumentasi

lalu ditelaah dan dikaji secara mendalam, melalui data collection, data reduction, data display, dan verifying dan akhirnya dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian yang dilaksanakan (Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, 2000).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Pustaka

Moderat atau (*al-wasathiyah*) mempunyai tiga makna; *pertama* adalah baik dan adil terhadap sesama; *kedua* adalah berimbang sehingga tidak berlebihan, *ketiga* adalah tidak condong dan berada ditengah (Purwanto et al., 2019). Moderasi atau (*al-wasathiyah*) mempunyai kesamaan dengan *al-tawasuth* atau *al-tawazun*, yaitu menjaga keseimbangan dua sisi sehingga tidak berat sebelah (Bustomi & Zuhairi, 2021). *Agama* berasal dari bahasa sansekerta yang berarti melepaskan manusia dari belenggu kekacauan. Agama diartikan juga *religi*, *religie*, dan *religion*, yang berarti melakukan peribadatan secara terus menerus tanpa henti, bahkan secara mati-matian (Amallia, 2019), Agama adalah keyakinan yang mengubah menjadi sebuah sikap dan perilaku (Djamal, 2017). Al-Qur'an, memberi arti agama dalam kata "*diin*" atau melukiskan perasaan (Surya, 2020). Robert Thouless mendefinisikan agama menunjukkan sikap yang lebih luas dari dunia dan tidak terbatas ruang, waktu dan yang meliputi kesatuan jasmani rohani (Ummah & Khuriyah, 2021). Perilaku moderat yaitu adil, seimbang, memilih yang benar dalam menyikapi sebuah konsep berkaitan dengan keberagaman diartikan moderasi beragama, moderasi sebagai "adil" tidak memihak, memilih kepada hal yang benar dan lawan dari kesewenang-wenangan (Putri & Fadlullah, 2022). Memberikan ruang kepada yang berbeda secara agama dan memegang teguh terhadap keyakinan dan menjalankan ajarannya diartikan moderasi beragama (Khotimah, 2020). Terciptanya moderasi beragama dapat dilihat dari indikatornya, yaitu komitmen kuat terhadap Negara dan bangsa, toleransi, antikekerasan, dan mencintai budaya lokal (Rahayu & Lesmana, 2020).

Toleransi dalam bahasa inggris *tolerance*, atau *tolerantia* dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Arab, istilah ini merujuk kepada kata *tasamuh* atau *tasahal* yaitu; *to overlook, excuse, to tolerate, to be indulgent, tolerant, forbearing, lenient, merciful*. Perkataan *tasamuh*; bermakna *hilm* dan *tasahul*; diartikan *indulgence, tolerance, toleration, forbearance, leniency, lenitt, clemency, mercy and kindness*" (Yenuri et al., 2021). *Tasamuh* lebih luas dari toleransi karena *tasamuh* diartikan menerima dan memberi, sehingga

tidak satu pihak. Orang Islam dinamakan *mutasamihin* yang bermakna pemaaf, penerima, menawarkan, pemurah dari tuan rumah pada tamu. Sehingga *tasamuh* mempunyai arti saling memberi dan menerima sudut pandang tanpa merusak keyakinan masing-masing (Fadli, 2020).

Toleransi diartikan kelapangan dada, yang memberikan ruang sebuah perbedaan pendapat dan bersikap terhadap orang lain (Zuhroh & Sholikhudin, 2019). Toleransi bermakna berlapang dada terhadap orang yang berbeda pendapat dengan cara menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang lain (Ali, 2017). Toleran adalah sikap seseorang yang menghargai dan menghormati pendapat orang lain yang berbeda. Toleransi diartikan menghargai dan menghormati perbedaan pendapat orang lain (Setiyawan, 2015), saling menerima pendapat orang lain menghargai dan menghormati dengan sikap keterbukaan dengan mendengarkan sudut pandang berbeda, komunikasi secara dua arah yakni mengemukakan dan menerima pandangan, serta memberi ruang terhadap keyakinan orang lain (Simarmata et al., 2019). Hakikat toleransi beragama merupakan syarat terciptanya rasa aman dan tentram dalam menjalani kehidupan yang penuh perbedaan terutama dikalangan masyarakat yang beragama, untuk mewujudkan pemahaman dan interaksi yang baik antar umat seagama atau berbeda agama sehingga terciptanya harmonis walaupun berbeda agama (Faisal, 2020). Menghargai bahwa setiap perbedaan adalah makna toleransi, dengan bersikap memahami bahwa menghargai antara agama yang satu dengan yang lainnya berbeda baik secara ritual dan aktual adalah toleransi beragama (Amalia & Nanuru, 2018).

2. Pola Internalisasi Nilai-nilai moderasi beragama dalam pembinaan toleransi beragama di Universitas Telkom

Hasil Wawancara dengan dosen PAEI Universitas Telkom, Pola Internalisasi Nilai-nilai moderasi beragama dalam pembinaan toleransi beragama di Universitas Telkom Bandung yang pertama melalui mata kuliah pendidikan agama dan etika islam. Setiap materi/bab perkuliahan disisipkan nilai-nilai moderasi beragama, diberikan pemahaman bahwa Indonesia sebagai bangsa yang besar dan sangat kaya akan budaya dan perbedaan suku, ras, bahasa memerlukan kesadaran untuk menjaga kerukunan dan kedamaian. Hal tersebut tidak akan tanpa adanya rasa toleransi sebagai syarat utama terlebih dibidang hidup beragama. *Kedua*, Internalisasi Nilai-nilai moderasi beragama dalam pembinaan toleransi beragama dilakukan dengan adanya dukungan pemangku kebijakan di

Universitas Telkom yang sangat menekankan toleransi dan bersifat moderat di tengah masyarakat kampus yang majemuk. Keteladanan ditunjukkan seluruh masyarakat kampus universitas telkom baik tenaga kependidikan, maupun tenaga pendidik khususnya dosen pendidikan agama dan etika Islam (Mahrus, 2022).

Hasil Wawancara dengan mahasiswa Universitas Telkom menunjukkan, pola Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembinaan toleransi beragama di Universitas Telkom adalah dengan mendorong seluruh mahasiswa untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan sehingga saling mengenal dan memahami satu dengan yang lain. Seluruh masyarakat kampus memberikan teladan yang baik mengenai toleransi dan moderat terhadap hidup beragama khususnya dosen pendidikan agama (Daffa Rifki Maulana, 2022). Hasil observasi pola internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembinaan toleransi beragama di Universitas Telkom menunjukkan bahwa selain disisipkan dalam pendidikan agama dan etika islam penanaman nilai-nilai moderasi beragama, hal ini juga didukung oleh pemangku kebijakan kampus baik tingkat penyelenggara pendidikan dan pelaksana pendidikan di Universitas Telkom. Hal yang paling utama di Universitas Telkom adalah teladan yang ditunjukkan oleh seluruh masyarakat kampus universitas telkom baik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan khususnya dosen pendidikan agama dan etika islam sehingga tercipta masyarakat yang toleran.

3. Materi Internalisasi Nilai-nilai moderasi beragama dalam pembinaan toleransi beragama di Universitas Telkom

Hasil Wawancara dengan dosen PAEI Universitas Telkom menunjukkan, materi yang disisipkan dalam pembelajaran mata kuliah pendidikan agama dan etika islam adalah komitmen kebangsaan dan bernegara kepada mahasiswa, hidup bertoleransi dalam hidup bermasyarakat, hidup rukun dan damai dengan mendukung anti kekerasan di masyarakat kampus, dan memegang teguh budaya lokal sebagai identitas diri (Mahrus, 2022). Hasil Wawancara dengan Ketua DKM Syamsul 'Ulum Universitas Telkom menunjukkan, pada setiap materi sisipan nilai nasionalisme dan agama adalah yang tidak bisa dipisahkan, khususnya toleransi di bidang agama dan sikap anti kekerasan dengan mengembangkan budaya damai dan menghargai kearifan lokal yang penuh nilai-nilai positif (Muhammad Deni Akbar, 2022). Hasil Wawancara dengan Ketua UKMI Mahasiswa Universitas Telkom adalah, dalam pembinaan toleransi beragama di Universitas

Telkom disisipkan diskusi atau kajian yang materinya mengenai cinta tanah air, toleransi, cinta damai atau anti kekerasan, serta mengajak mahasiswa untuk ikut serta melestarikan budaya lokal yang diselenggarakan unit kerja mahasiswa Islam Universitas Telkom dan materi mengenai kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan budaya lokal sering diangkat dalam seminar yang diselenggarakan pihak kampus (Daffa Rifki Maulana, 2022).

Hasil Wawancara dengan Badan Mentoring Universitas Telkom, materi Internalisasi Nilai-nilai moderasi beragama dalam pembinaan toleransi beragama, rasa kebangsaan, toleransi beragama dan keberagamaan, antikekerasan, dan lestarikan kearifan lokal dimasukkan dalam mentor (Tiara, 2022). Hasil observasi materi Internalisasi Nilai-nilai moderasi beragama dalam pembinaan toleransi beragama di Universitas Telkom, penanaman nilai-nilai moderasi beragama yang diantaranya komitmen dalam berbangsa dan bernegara, toleransi, antikekerasan, serta menghargai dan melestarikan budaya lokal disisipkan bukan hanya ada di pembelajaran atau perkuliahan pendidikan agama dan etika islam, akan tetapi masuk dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan pihak DKM, unit kerja, dan mentoring menjadi materi yang disisipkan.

4. Pelaksanaan Internalisasi Nilai-nilai moderasi beragama dalam pembinaan toleransi beragama di Universitas Telkom

Hasil Wawancara dengan dosen PAEI Universitas Telkom, pelaksanaan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembinaan toleransi beragama di Universitas Telkom dilakukan melalui kegiatan di dalam kelas berupa perkuliahan pendidikan agama dan etika islam, dan di luar kelas melalui kegiatan kajian, seminar, dan diskusi yang diselenggarakan kampus, unit kerja mahasiswa islam, dan DKM kampus (Mahrus, 2022). Hasil Wawancara dengan Ketua DKM Syamsul 'Ulum Universitas Telkom, pelaksanaan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembinaan toleransi beragama di Universitas Telkom, DKM mengandung amanat untuk membina beragama, keagamaan dan keberagamaan seluruh civitas kampus terutama mahasiswa dengan menyelenggarakan kajian, diskusi, dan memfasilitasi kegiatan mentoring yang diselenggarakan pihak kampus yang ditangani langsung para mahasiswa senior (Muhammad Deni Akbar, 2022).

Hasil Wawancara dengan Ketua UKMI Mahasiswa Universitas Telkom, pelaksanaan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembinaan toleransi beragama di Universitas Telkom digiatkan melalui diskusi, kajian,

dan seminar yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai program kerja atas bimbingan dosen pembina (Daffa Rifki Maulana, 2022). Hasil Wawancara dengan Badan Mentoring Universitas Telkom, pelaksanaan Internalisasi Nilai-nilai moderasi beragama dalam pembinaan toleransi beragama di Universitas Telkom, kegiatan melalui mentoring yang terintegrasi dengan mata kuliah pendidikan agama dan etika islam yang diselenggarakan badan mentoring universitas kampus yang melibatkan mahasiswa berprestasi atau mempunyai kemampuan agama lebih dalam 14 pertemuan (Tiara, 2022). Hasil observasi menunjukkan pelaksanaan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembinaan toleransi beragama di Universitas Telkom digalakkan melalui kegiatan perkuliahan pendidikan agama dan etika islam di kelas sedangkan kegiatan di luar kelas diselenggarakan unit kerja mahasiswa islam melalui kajian dan diskusi. Sedangkan pihak DKM menyelenggarakan kajian, memfasilitasi mentoring, dan kultum. Mentoring yang dilaksanakan 14 pertemuan yang terintegrasi dengan mata kuliah pendidikan agama dan etika islam.

PEMBAHASAN

Universitas Telkom diprakarsai oleh yayasan pendidikan Telkom di Bandung, yayasan pendidikan Telkom yang lahir oleh PT Telkom Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dan pelatihan guna mengembangkan sumber daya manusia yang profesional di bidang informasi dan komunikasi. Universitas Telkom merupakan Universitas Swasta terbaik yang berorientasi pada keunggulan dan penghargaan terhadap potensi dan peningkatan sumber daya manusia khususnya dibidang teknologi informasi tapi tidak melupakan nilai budaya, agama dan nilai lainnya. Pola Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembinaan toleransi beragama dilakukan melalui dimasukkan pada mata kuliah pendidikan agama dan etika islam, dukungan pemangku kebijakan, dan lembaga seperti mentoring, dkm, dan uni kerja mahasiswa. Keteladanan menjadi hal terpenting dalam penanaman moderasi beragama sehingga menciptakan toleransi beragama. Perlunya sinergi dalam mewujudkan masyarakat yang toleransi, melalui internalisasi nilai-nilai moderasi beragama yang didukung semua pihak maka akan menghasilkan hasil yang maksimal. Suatu usaha untuk menghasilkan sesuai secara maksimal dengan cara bekerja sama dan sama-sama bekerja, melalui komunikasi, interaksi dan proses yang harmonis, syarat utamanya adalah “kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas” (Ulum, 2021). Sedangkan materi internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembinaan

toleransi beragama adalah komitmen terhadap kebangsaan, tercipta masyarakat yang toleransi, komitmen menyelesaikan berbagai kekerasan tanpa melalui kekerasan, dan menghargai, melestarikan budaya lokal sebagai identitas diri bangsa yang tidak boleh hilang. Terciptanya moderasi beragama ditandai masyarakat yang komitmen terhadap kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan akomodatif budaya lokal (Khotimah, 2020). Pelaksanaan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembinaan toleransi beragama dilakukan melalui perkuliahan dalam kelas dan luar kelas. Upaya mendesain pembelajaran yang terintegrasi mempunyai tujuan mendorong mahasiswa/siswa agar memiliki kemampuan pada masanya, kemampuan literasi, mengadopsi kearifan lokal, dan HOTS (*Higher Order Thinking Skills*). Pendidik memberikan materi-materi dan diintegrasikan dengan penanaman nilai-nilai positif. Pembelajaran harus menggunakan berbagai model, metode, pendekatan, strategi, dan media sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal dalam pembelajaran (Simanjuntak et al., 2021).

PENUTUP

Hasil penelitian dan pembahasan pada Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembinaan toleransi beragama menunjukkan bahwa toleransi beragama melalui internalisasi nilai-nilai moderasi beragama sangat efektif. Pola internalisasi nilai-nilai moderasi dalam pembinaan toleransi beragama didukung oleh pemangku kebijakan dan setiap warga kampus memberikan contoh atau teladan khususnya para dosen. Tujuan materi internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembinaan toleransi beragama adalah terciptanya jiwa kebangsaan, rasa toleransi, mendukung anti kekerasan mengedepankan perdamaian dan penghargaan yang tinggi terhadap budaya lokal. Pelaksanaan internalisasi nilai-nilai moderasi dalam pembinaan toleransi beragama tidak hanya terdapat pada mata kuliah pendidikan agama dan etika Islam, tapi juga dalam seminar yang diselenggarakan pihak kampus, diskusi dan kajian yang dilaksanakan pihak organisasi keagamaan atau unit kerja mahasiswa Islam, DKM dan badan mentoring.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, M. (2020). Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi. *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2), 143–155.
- Ali, Y. F. (2017). *Upaya Tokoh Agama Dalam Mengembangkan Sikap Toleransi Antarumat Beragama*. Untirta Civic Education Journal, 2(1).
- Amalia, A., & Nanuru, R. F. (2018). Toleransi Beragama Masyarakat Bali, Papua, Maluku. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 10(1), 150–161.
- Amallia, S. (2019). *Hakekat Agama Dalam Perspektif Filsafat Perenial*. *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, 1(1), 1–18.
- Arifin. (2010). *Penelitian Pendidikan*. Lilin Persada Press.
- Bustomi, A., & Zuhairi, Z. (2021). Aktualisasi Nilai-Nilai Moderasi dalam Pandangan Islam. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 5(2), 158–165.
- Casram, C. (2016). Membangun sikap toleransi beragama dalam masyarakat plural. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(2), 187–198.
- Daffa Rifki Maulana. (2022). Wawancara dengan mahasiswa dan ketua Campus Da'wah Institute Universitas Telkom.
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan*. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Djamal, S. M. (2017). Penerapan Nilai-nilai Ajaran Agama Islam dalam Kehidupan Masyarakat Di Desa Garuntungan Kecamatan Kandang Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Adabiyah*, 171.
- Etikasari, N. W. (2018). Persepsi Mahasiswa Program Studi S1 Ppkn Universitas Negeri Surabaya Terhadap Wacana Intoleransi Di Media Sosial. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 6(01).
- Fadli, S. (2020). Membangun toleransi generasi milenial. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL KEAGAMAAN*, 1(1).
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia. *Intizar*, 25(2), 95–100.
- Faisal, M. (2020). Manajemen pendidikan moderasi beragama di era digital. *ICRHD: Journal of Internantional Conference on Religion, Humanity and Development*, 1(1), 195–202.
- Ghazali, A. M. (2016). Toleransi beragama dan kerukunan dalam perspektif Islam. *Religiøs: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 1(1), 25–40.
- Gunawan, H., Ihsan, M. N., & Jaya, E. S. (2021). Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Pembelajaran PAI di SMA Al-Biruni Cerdas Mulia Kota

- Bandung. *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal*, 6(1), 14–25.
- Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar. (2000). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara.
- Jamaluddin, J. (2022). Implementasi Moderasi Beragama Di Tengah Multikulturalitas Indonesia. As-Salam: *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7(1), 1–13.
- Khotimah, H. (2020). Internalisasi Moderasi Beragama Dalam Kurikulum Pesantren. Rabbani: *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 62–68.
- Mahrus. (2022). Wawancara dengan Dosen Pendidikan Agama dan Etika Islam Universitas Telkom.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Deni Akbar. (2022). Wawancara dengan Ketua DKM Masjid Syamsul 'Ulum Universitas Telkom.
- Nugraha, Y., & Firmansyah, Y. (2019). Karakter Toleransi Beragama dalam Sudut Pandang Generasi Milenial. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 4(2), 69–76.
- Purwanto, Y., Qowaid, Q., & Fauzi, R. (2019). Internalisasi Nilai Moderasi Melalui Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 17(2), 110–124.
- Putri, S. N. A., & Fadlullah, M. E. (2022). WASATHIYAH (MODERASI BERAGAMA) DALAM PERSPEKTIF QURAISH SHIHAB. *INCARE, International Journal of Educational Resources*, 3(1), 66–80.
- Rahayu, L. R., & Lesmana, P. S. W. (2020). *Potensi Peran Perempuan dalam mewujudkan moderasi beragama di Indonesia*. Pustaka, 20, 31–37.
- Setiyawan, A. (2015). Pendidikan toleransi dalam hadits nabi saw. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 12(2), 219–228.
- Simanjuntak, R., Jatmiko, B., Pa, A. R., Siswoyo, H., & Langke, A. Y. (2021). Akomodasi Filsafat Pragmatisme dalam Pendidikan Agama Kristen untuk Menjawab Tantangan Pembelajaran di Era Digital. *Angelion: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 2(2), 165–181.
- Simarmata, N. N., Wardani, N. S., & Prasetyo, T. (2019). Pengembangan Instrumen Penilaian Sikap Toleransi dalam Pembelajaran Tematik Kelas IV SD. *Jurnal Basicedu*, 3(1), 194–199.
- Surya, M. E. (2020). Bahasa Tubuh Dalam Al Qur'an Juz Ke 30 (Analisis Semantis). *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 129–149.
- Suryan, S. (2017). Toleransi Antarumat Beragama: Perspektif Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 23(2), 185–200.

- Tiara. (2022). Wawancara dengan Badan Mentoring Universitas Telkom.
- Ulum, M. B. (2021). Sinergitas Guru dan Orang Tua dalam Menumbuhkan Minat Belajar Anak di Lembaga Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Bustanul Ulum. *Auladuna: Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 3(02), 65–77.
- Ummah, N. K., & Khuriyah, K. (2021). Hubungan antara Religiusitas dan Pendidikan Karakter di Rumah terhadap Akhlak Siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri Surakarta. *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 15(1), 117–127.
- Yenuri, A. A., Islamy, A., Aziz, M., & Muhandy, R. S. (2021). Paradigma Toleransi Islam Dalam Merespons Kemajemukan Hidup Di Indonesia:(Studi Analisis Pemikiran KH Ahmad Shiddiq). *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 2(2), 141–156.
- Zuhroh, K., & Sholikhudin, M. A. (2019). Nilai-Nilai Toleransi antar Sesama dan antar Umat Beragama. *Journal Multicultural of Islamic Education*, 3(1), 41–55.

**MENGGAGAS DESAIN
HYBRID LEARNING PADA
MATA KULIAH PENDIDIKAN
PANCASILA KEWARGANEGARAAN
DI INSTITUT TEKNOLOGI
BANDUNG**

*Ridwan Fauzi, Nia Kurniasih,
Siti K Azhari, Cecep Alba, Shohib Khoiri.*

Institut Teknologi Bandung

Pendidikan merupakan hal paling penting bagi sebuah bangsa. Salah satu tolok ukur kemajuan sebuah bangsa dan negara adalah kualitas pendidikan. Dalam konteks Indonesia, pendidikan termasuk tujuan berdirinya negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “*mencerdaskan kehidupan bangsa*”. Segala upaya terus menerus dilakukan agar kualitas pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Namun, pasca wabah Coronavirus Diseases-19, pendidikan di Indonesia menghadapi sejumlah masalah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran untuk menutup kegiatan pembelajaran di sekolah secara *offline* atau luring dan menerapkan pembelajaran *online* atau daring. Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ada beberapa kendala yang terjadi, terutama beberapa kalangan yang belum siap menerima perubahan tersebut karena kurangnya fasilitas (Wahyuni, 2021).

Meski demikian, pembelajaran secara daring dapat berjalan dengan lancar dengan integrasi teknologi pada pendidikan. Namun ada krisis yang terjadi, yaitu sulitnya siswa menguasai pengetahuan sesuai tingkatan kelasnya masing-masing. Ada juga faktor eksternal yang juga memengaruhi seperti pasokan listrik, akses internet, gadget, dan beberapa hal lainnya (Rusyada & Nasir, 2022). Pembelajaran daring yang berlangsung pada saat pandemi dikhawatirkan akan berdampak pada aspek psikososial peserta didik. Oleh sebab itu, kiranya diperlukan perubahan atas teknis metode pembelajaran daring tersebut. Solusinya adalah dengan menggabungkan dua metode pembelajaran, antara daring atau *online* dengan luring atau *offline*. Pengkombinasian atau penggabungan dua teknik pembelajaran ini dikenal dengan istilah “*hybrid learning*.” (Makhin, 2021)

Pelaksanaan pembelajaran di Institut Teknologi Bandung sangat adaptif terhadap sejumlah perubahan, khususnya pasca pandemi. Di antaranya adalah pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sejak bulan Januari 2020, Institut Teknologi Bandung mencanangkan *Education 4.0*, yakni transformasi digital dalam bidang sumber daya manusia, teknologi, dan informasi (Adi Permana, 2021). Sejumlah petunjuk pelaksanaan aturan ITB tentang pembelajaran pada saat pandemi terus dilaksanakan secara dinamis dalam upaya menciptakan kualitas pembelajaran sebaik mungkin.

Hybrid learning merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu *hybrid* yang memiliki arti kombinasi atau campuran, dan *learning* yang memiliki arti belajar. Ada sejumlah istilah lain yang digunakan dan memiliki makna yang sama, seperti *hybrid course*. Makna umum yang dapat diartikan dari *hybrid learning* adalah proses belajar yang

mengkombinasikan atau mencampurkan antara pembelajaran tatap muka atau *face to face* dan pembelajaran berbasis komputer secara *online* dan *offline* (Verawati & Desprayoga, 2019). Dalam sumber lain disebutkan bahwa *hybrid learning* adalah suatu model pembelajaran yang di dalamnya terdapat gabungan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di kelas dan juga pembelajaran menggunakan teknologi seperti komputer baik secara *offline* maupun *online* (Ramdhani et al., 2020).

Selain itu, Thorne (Verawati & Desprayoga, 2019) mengungkapkan *hybrid learning* sebagai:

“it represents an opportunity to integrate the innovative and technological advances offered by online learning with the interaction and participation offered in the best of traditional learning”

“Ini merupakan kesempatan untuk mengintegrasikan kemajuan inovatif dan teknologi yang ditawarkan oleh pembelajaran online dengan interaksi dan partisipasi yang ditawarkan dalam pembelajaran tradisional terbaik”.

Bersin juga (Verawati & Desprayoga, 2019) memberikan definisi bahwa *hybrid learning* adalah

“the combination of different training “media” (technologies, activities, and types of events) to create an optimum training program for a specific audience. The term “blended” means that traditional instructor-led training is being supplemented with other electronic formats. In the context of this book, blended learning programs use many different forms of learning, perhaps complemented with instructor-led training and other live formats.”

“Kombinasi dari “media” pelatihan yang berbeda (teknologi, kegiatan, dan jenis acara) untuk menciptakan program pelatihan yang optimal untuk audiens tertentu. Istilah “campuran” berarti bahwa pelatihan yang dipimpin instruktur tradisional dilengkapi dengan format elektronik lainnya. Dalam konteks buku ini, program pembelajaran campuran menggunakan banyak bentuk pembelajaran yang berbeda, mungkin dilengkapi dengan pelatihan yang dipimpin instruktur dan format langsung lainnya”.

Dari sejumlah definisi *hybrid learning*, dapat dipahami bahwa penggabungan dari dua metode pembelajaran tersebut dimaksudkan untuk mengambil setiap komponen terbaik dari metode *online* dan tatap muka di kelas. *Hybrid learning* didesain untuk mengintegrasikan setiap aktivitas pembelajaran, baik online atau offline agar dapat saling mendukung, melengkapi, dan menguatkan serta tak menempatkan metode pembelajaran secara daring sebagai bentuk tambahan saja atau *adds-on* (Indra, 2010).

1. Penerapan *Hybrid Learning*

Sistem pembelajaran *hybrid* memunculkan dua aktor yang menjadi peran utama dalam jalannya pendidikan, yaitu pengajar (*instructor-lead*) dan siswa (*learned-led*). Pada saat awal pembelajaran, pengajar menjadi aktor utama dalam sistem pembelajaran. Dalam proses pembelajaran selanjutnya, peran utama beralih pada siswa (Hendrayati & Pamungkas, 2016). Selain itu, menurut Makhin (2021), *hybrid learning* yang berkembang saat ini terdiri dari empat dimensi:

1. Pembelajaran *Face to Face*. Pembelajaran *face to face* ini adalah pembelajaran yang pelaksanaannya dilakukan secara tatap muka di kelas, melakukan praktik di laboratorium, dan aktivitasnya meliputi dari penyampaian materi, diskusi, serta beberapa hal lainnya.
2. *Synchronous Virtual Collaboration* yaitu desain pembelajaran kolaboratif yang melibatkan interaksi antara siswa dan pendidik melalui aplikasi seperti *instant messaging* atau aplikasi chat lain seperti WhatsApp di waktu yang sama. Model dilakukan pada saat jam kerja atau jam belajar.
3. *Asynchronous Virtual Collaboration*, yaitu desain atau format pembelajaran yang melibatkan interaksi antara guru dan murid, dan waktu pelaksanaannya berbeda. Fasilitas yang biasa digunakan dalam format atau desain ini yakni *online discussion board* atau forum diskusi dan email.
4. *Self Pace Asynchronous*, yaitu format atau desain pembelajaran yang dilakukan oleh para peserta didik secara mandiri dan di waktu yang berbeda. Para guru memberikan materi dalam bentuk buku atau modul, latihan soal yang dilakukan secara online. Juga para siswa dapat mengakses materi-materi dari link yang dapat mengakses ke sumber-sumber pembelajaran lainnya.

Di samping itu, ada beberapa komposisi dalam *hybrid learning* yang sering digunakan. Di antaranya 50:50, yaitu alokasi 50% waktu untuk pembelajaran tatap muka dan 50% sisanya dilakukan secara online. Ada pula yang menggunakan komposisi 75:25, yang artinya 75% dialokasikan untuk pembelajaran tatap muka dan 25% dilakukan secara daring. Ada pula yang menggunakan penerapan sebaliknya, yaitu 25% untuk pembelajaran tatap muka dan 75% digunakan untuk format pembelajaran daring. Pertimbangan yang digunakan untuk menentukan komposisi yang tepat antara 50:50, 75:25, dan 25:75 tergantung analisis kompetensi yang ingin dihasilkan, tujuan, karakteristik siswa, strategi penyampaian, lokasi pembelajar, dan sumber daya yang tersedia.

2. Model Hybrid Learning

Putra (2015) menyebutkan *hybrid learning* juga memiliki beberapa model, di antaranya:

1. *Fully online curriculum with options for face to face instruction.* Pada model yang pertama ini, *hybrid learning* diimplementasikan dengan menggunakan fasilitas internet secara menyeluruh pada setiap kegiatan pembelajaran yang dilangsungkan. Pendidik dan siswa melakukan kegiatan belajar belajar melalui internet menggunakan aplikasi *video conference* seperti Zoom, Google Meet, dan yang lainnya. Akan tetapi, instruksi pembelajarannya dilakukan secara tatap muka.
2. *Mostly or fully online curriculum with some time required in either the classroom or classroom lab.* Model yang kedua adalah bentuk implementasi *hybrid learning* menggunakan internet secara menyeluruh dan atau kadang-kadang. Pada model ini, siswa dan guru diberikan kelonggaran untuk tidak selalu mengadakan pertemuan belajar mengajar secara daring. Kadang-kadang disisipkan pembelajaran secara tatap muka untuk melaksanakan ujian atau pengumpulan tugas.
3. *Mostly or fully online curriculum with students meeting daily in the classroom or computer lab.* Implementasi *hybrid learning* dalam tipe ini dapat berupa penggunaan internet dengan cukup banyak saat proses kegiatan pembelajaran. Pembelajaran secara tatap muka dilakukan saat ada kegiatan seperti diskusi kelas atau praktikum. Model ketiga ini, penggunaan internet sama seperti model satu dan model dua, di mana siswa dan guru lebih aktif untuk melakukan akses terhadap internet.

4. *Classroom instruction with substantial required online components that extend beyond the classroom and/or the school day.* Model ini memang masih menggunakan internet, tetapi kegiatan pembelajaran tatap muka lebih banyak dilakukan. Internet dalam model ini hanya digunakan sebagai pendukung, seperti untuk kegiatan diskusi kelas, pengumuman bahan diskusi bagi siswa, dan lainnya,
5. *Classroom instruction that includes online resources with limited or no requirements for students to be online.* Model yang terakhir ini adalah bentuk implementasi *hybrid learning* yang paling sederhana. Siswa tidak selalu dituntut untuk terhubung secara online saat proses pembelajaran. Siswa dapat mengakses bahan-bahan secara *online* dari guru di luar kelas. Penggunaan internet dalam model ini tidak digunakan saat pembelajaran di kelas. Guru dan siswa tetap melakukan pembelajaran tatap muka dengan bahan-bahan yang sebelumnya didapatkan secara *online*.

Dalam pelaksanaannya, diperlukan beberapa faktor pendukung agar *hybrid learning* dapat berjalan dengan lancar. Beberapa faktor tersebut adalah (1) Sarana dan prasarana yang meliputi akses terhadap internet oleh guru dan murid; (2) Kemampuan guru dalam mengakses peralatan elektronik dan aplikasi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran; (3) Pembekalan tentang pengetahuan dalam mengakses aplikasi yang digunakan dalam proses *hybrid learning* (Putra, 2015).

METODE

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, yaitu penyelidikan mendalam mengenai suatu unit sosial sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menunjang metode studi kasus ini adalah:

1. Observasi Partisipatif. Dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan oleh kelompok, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.
2. Studi dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2009)
3. Wawancara (*interview*), yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2015).

Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu :

1. Reduksi data adalah proses analisis data yang dilakukan untuk menggolongkan, mengarahkan hasil-hasil penelitian dengan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. Dengan kata lain, reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum dan mengklasifikasi sesuai dengan masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti (Nasution,1996).
2. Penyajian data (*display data*), adalah menampilkan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya (Sugiyono 2009:249).
3. Verifikasi (*conclusion drawing*) adalah upaya untuk mencari arti, makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal penting. Kesimpulan ini dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu kepada tujuan penelitian (Nasution, 1996: 129)

Adapun lokasi dan subjek penelitian dalam penelitian ini adalah kampus Institut Teknologi Bandung dan beberapa subjek penelitiannya adalah para pemangku kebijakan yang terkait dalam pelaksanaan *hybrid learning* di Institut Teknologi Bandung seperti dosen pengampu PPKn dan pelaksana teknis pada pelaksanaan *hybrid learning* di Institut Teknologi Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi *Hybrid Learning* dalam dunia Pendidikan

Hybrid learning merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu *hybrid* yang memiliki arti kombinasi atau campuran, dan *learning* yang memiliki arti belajar. Ada sejumlah istilah lain yang digunakan dan memiliki makna yang sama, seperti *hybrid course*. Makna umum yang dapat diartikan dari *hybrid learning* adalah proses belajar yang mengkombinasikan atau mencampurkan antara pembelajaran tatap muka atau *face to face* dan pembelajaran berbasis komputer secara *online* dan *offline* (Verawati & Desprayoga, 2019). Dalam sumber lain disebutkan bahwa *hybrid learning* adalah suatu model pembelajaran yang di dalamnya terdapat gabungan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di kelas dan juga pembelajaran menggunakan teknologi seperti komputer baik

secara *offline* maupun *online* (Ramdhani et al., 2020).

Selain itu, Thorne (Verawati & Desprayoga, 2019) mengungkapkan *hybrid learning* sebagai:

“it represents an opportunity to integrate the innovative and technological advances offered by online learning with the interaction and participation offered in the best of traditional learning”

“Ini merupakan kesempatan untuk mengintegrasikan kemajuan inovatif dan teknologi yang ditawarkan oleh pembelajaran online dengan interaksi dan partisipasi yang ditawarkan dalam pembelajaran tradisional terbaik”.

Bersin juga (Verawati & Desprayoga, 2019) memberikan definisi bahwa *hybrid learning* adalah

“the combination of different training “media” (technologies, activities, and types of events) to create an optimum training program for a specific audience. The term “blended” means that traditional instructor-led training is being supplemented with other electronic formats. In the context of this book, blended learning programs use many different forms of learning, perhaps complemented with instructor-led training and other live formats.”

“Kombinasi dari “media” pelatihan yang berbeda (teknologi, kegiatan, dan jenis acara) untuk menciptakan program pelatihan yang optimal untuk audiens tertentu. Istilah “campuran” berarti bahwa pelatihan yang dipimpin instruktur tradisional dilengkapi dengan format elektronik lainnya. Dalam konteks buku ini, program pembelajaran campuran menggunakan banyak bentuk pembelajaran yang berbeda, mungkin dilengkapi dengan pelatihan yang dipimpin instruktur dan format langsung lainnya”.

Dunia pendidikan hari ini, khususnya di Indonesia, menurut hemat penulis wajib adaptif merespon perubahan zaman yakni bagaimana pendidikan yang adaptif dalam era revolusi Industri 4.0. Salah satunya adalah pelaksanaan pembelajaran bauran atau yang lazim dikenal sebagai *hybrid learning*. Adapun menurut hemat penulis terdapat sejumlah alasan terkait pentingnya *hybrid learning* dalam dunia pembelajaran khususnya di Indonesia, diantaranya :

1. Peluang proses belajar menjadi lebih beragam. Jika dahulu pembelajaran hanya bisa dilakukan secara langsung (*luring*), kini dengan *hybrid learning* peluang belajar pembelajar tidak terikat oleh tempat, karena jika tidak memungkinkan pembelajaran secara *luring* maka peserta didik/pembelajar dapat dilakukan dimanapun hanya dengan memerlukan teknologi.
2. Memungkinkan pembelajaran dilakukan dengan jumlah peserta didik yang sangat banyak. Jika dulu pembelajaran terbatas pada jumlah peserta didik (hanya memungkinkan sedikit) karena pertimbangan efektifitas pembelajaran, maka dengan *hybrid learning* jumlah peserta didik bisa menjadi lebih banyak. Batasan jumlah peserta didik tidak lagi menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran. Menurut hasil penelitian Dziuban, Hartman, dan Moskal menemukan bahwa program *hybrid learning* memiliki potensi untuk menurunkan tingkat putus sekolah. (Verawati, 2019)
3. Memperkaya sumber ajar. Dengan *hybrid learning* karena pembelajaran mengkombinasikan antara pembelajaran *luring* dan *daring* maka peserta didik memiliki referensi yang lebih banyak karena mereka dituntut untuk bisa mengelaborasi berbagai bahan ajar yang dibutuhkan khususnya yang tersedia di internet, komputer, android dan lain-lain.
4. Meningkatkan hasil belajar. Karena sumber ajar yang beragam, dengan *hybrid learning* juga terjadi peningkatan komunikasi sehingga dapat menghasilkan perasaan berkomunitas yang lebih kuat antar mahasiswa atau peserta didik dibandingkan pembelajaran tradisional atau sepenuhnya online. (Verawati, 2019)

2. Hal-Hal yang Harus dipersiapkan dalam pembelajaran *Hybrid Learning*

Untuk memastikan pembelajaran dengan *hybrid learning* berjalan dengan maksimal, maka perlu dipersiapkan hal-hal sebagai prasyarat dilaksanakannya pembelajaran *hybrid learning* tersebut. *hybrid learning* ini harus terlebih dahulu terpenuhi sejumlah faktor pendukungnya. Hal tersebut agar pembelajaran *hybrid* ini bisa berjalan dengan semestinya, beberapa faktor tersebut seperti (1) Sarana dan prasarana yang meliputi akses terhadap internet yang didapatkan oleh guru dan juga murid, (2)

Kemampuan guru dalam mengakses alat elektronik dan aplikasi yang akan dipergunakan dalam proses pembelajaran, (3) Perlunya pembekalan terhadap para siswa terkait pengetahuan dalam mengakses platform atau aplikasi yang digunakan dalam proses hybrid learning. (Putra, 2015).

Tahap pertama adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran *hybrid learning*. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan harus memadai sebagaimana memenuhi ketentuan minimum sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007. Menurut Permendikbud 24 Tahun 2007, yang dimaksud sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah. (Permendikbud 24 Tahun 2007)

Untuk hal prasarana hal ini merupakan sesuatu yang mendasar yang secara tidak langsung mendukung terhadap tujuan pembelajaran. Terkait pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* yang prasarana yang dibutuhkan yang paling penting yakni ketersediaan ruangan kelas yang mendukung pembelajaran *hybrid learning*. Diantara prasarana yang sudah disiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* yakni Gedung kuliah umum di bawah pengelolaan Direktorat Sarana dan Prasarana ITB. Kemudian ruang kelas *hybrid* di bawah fakultas/sekolah di lingkungan ITB. Selain itu prasarana lain yang dibutuhkan yakni, fasilitas internet yang memadai. Untuk kebutuhan ini ITB telah mempersiapkan kebutuhan internet yang mumpuni di bawah naungan Direktorat Teknologi Informasi (DTI), termasuk pemberian akses *zoom premium* dan *microsoft teams* bagi dosen dan mahasiswa.

Sedangkan sarana yang dibutuhkan pembelajaran *hybrid learning*, ini merupakan sesuatu hal yang wajib ada, karena kekurangan dari sarana pembelajaran *hybrid learning* akan menjadikan gagal atau tidak berhasilnya tujuan dari pembelajaran *hybrid learning*. Untuk kasus pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* di ITB, diantara fasilitas sarana yang dibutuhkan diantaranya :

1. Komputer utama yang disimpan di kelas. Komputer ini merupakan komputer master yang menjadi pusat pembelajaran hybrid learning dilaksanakan, seperti menjalankan program/aplikasi Zoom Meeting nya, mengoperasikan bahan ajar, dan lain-lain
2. *Learning Management System*. ITB telah mengembangkan lms sendiri yakni EDUNEX. Edunex ini kemudian digunakan sebagai lms yang kemudian digunakan oleh dikti yakni spada.

3. Layar komputer besar. Adapun jumlah layar komputer yang disediakan oleh ITB berjumlah dua pcs, yaitu satu layar komputer besar berfungsi menayangkan ruang kelas mahasiswa yang berada dari tempat lain, dan satu layar komputer kecil yang berfungsi menayangkan slide/materi yang dibawa dosen.
4. Kamera. Kamera di ruangan kelas *hybrid* berfungsi untuk menampilkan bagaimana dosen mengajar sehingga mahasiswa yang berada di luar ruangan tersebut masih bisa menyaksikan dosen mengajar di layar komputer mahasiswa. Selain itu, mahasiswa yang berada jauh tersebut masih bisa berkomunikasi langsung dengan dosennya. Idealnya, kamera yang dibutuhkan merupakan kamera canggih berbasis *artificial intelligent* (AI) yang bisa bergerak sendiri mengikuti arah dosen bergerak.
5. *Wireless Microfon*. Alat ini berfungsi sebagai alat yang mampu menyampaikan suara dosen ke speaker.
6. *Speaker*. Berfungsi sebagai penguat suara yang dihasilkan oleh dosen. penguat suara yang digunakan dosen Ketika mengajar, sehingga apa yang disampaikan oleh dosen dapat terdengar dengan baik oleh mahasiswa yang berada di dalam ruangan bersama dengan dosen maupun dengan mahasiswa jarak jauh.

Foto : Salah satu ruangan yang digunakan kuliah hibrid di Institut Teknologi Bandung



Sumber : Pribadi Peneliti

3. Rancangan Desain Pelaksanaan Pembelajaran Hybrid Learning pada Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan di Institut Teknologi Bandung

Sebelum ditetapkan pelaksanaan 100 persen perkuliahan *hybrid*, telah dahulu dilakukan persiapan dan uji coba. Persiapan dilakukan khususnya terkait kesiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Kemudian dilakukan uji coba perkuliahan, khususnya kelas besar dengan *hybrid learning* yang dilakukan pada mata kuliah wajib umum (MKWU) yakni pada mata kuliah Agama, PPKn, Tata Tulis Karya Ilmiah dan Bahasa Inggris. Kegiatan ini dilakukan bukan hanya merespons pembelajaran pada era pandemi, namun dalam menuju akademik ITB 4.0. (Permana, 2022)

Mulai semester 1 tahun ajaran 2022/2023, ITB melaksanakan kuliah hybrid untuk seluruh matakuliah, dengan 159 mata kuliah (80 MK wajib, dan 79 MK Pilihan) sesuai dengan Renstra ITB 2025 dan melibatkan 5900 mahasiswa serta pendanaan sejumlah Rp.5,8 Milyar. (Permana, 2022)

Pelaksanaan kuliah hybrid untuk mata kuliah PPKn di ITB, telah dirancang untuk kemudian akan dilaksanakan pembelajaran semester ini yakni tahun ajaran 2022/2023. Berikut tabel distribusi pengajaran pada matakuliah :

Tabel: Jumlah Kelas, Mahasiswa dan Dosen Pengampu MK PPKn di ITB

No	Kelas	Dosen	Jumlah Mahasiswa
1	1	ES	104
2	2	HN	140
3	3	AE	182
4	4	AE	171
5	5	SK	195
6	6	PN	171
7	7	RF	100
8	8	HN	107
9	9	PR	159
10	10	DR	167
11	11	ER	166

12	12	PR	78
JML	11 Kelas regul- er dan 1 kelas Internasional	10 Dosen	1740 Mahasiswa

Sumber : diolah Peneliti

Berdasar data di atas, bahwa rata-rata mahasiswa di setiap kelasnya berjumlah 145 mahasiswa. Setiap kelas tersebut terdiri atas tiga kampus, yakni kampus Ganesha (kampus utama), kampus Jatinangor, dan kampus Cirebon. Walaupun setiap dosen hanya mengajar satu sampai dua kelas saja, namun rata perhitungan untuk beban dosen (untuk di klaim di beban kinerja dosen) ditentukan per 60 mahasiswa dihitung menjadi satu kelas. Sebagai contoh, jika satu dosen mengajar dengan jumlah mahasiswa sebanyak 180 mahasiswa, itu berarti ia mengajar sebanyak 3 kelas dan jumlah sks terhitung di sistem kepegawaian sejumlah 6 sks. Hal ini untuk memberikan keadilan khususnya terkait pemenuhan tridharma Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Penerapan kuliah *hybrid* di ITB berdasar tipologi yang dibedakan menurut Makhin (2021) termasuk kepada pembelajaran *face to face* yakni pembelajaran yang pelaksanaannya dilakukan secara tatap muka di kelas, melakukan praktik di laboratorium, dan aktivitasnya meliputi dari penyampaian materi, diskusi, serta beberapa hal lainnya. Hal ini didukung oleh penggunaan *synchronous virtual collaboration* berupa desain pembelajaran kolaboratif dan melibatkan interaksi antara siswa dan pendidik melalui aplikasi yakni Zoom Premium dan dilakukan pada saat jam belajar yang sama.(Makhin,2021) Sebagai contoh perkuliahan PPKn di kelas satu yang dilaksanakan pada hari Selasa pukul 07.00 di kampus Ganesha, dan pada jam yang sama, mahasiswa Jatinangor dan Cirebon sedang melakukan kuliah secara langsung (*virtual*) melalui aplikasi Zoom.

Adapun menurut tipologi *hybrid learning* menurut Ino Angga Putra(Putra, 2015) termasuk ke dalam model pertama yakni *Fully online curriculum with options for face to face instruction*. Pada model yang pertama ini, *hybrid learning* diimplementasikan dengan menggunakan fasilitas internet secara menyeluruh pada setiap kegiatan pembelajaran yang dilangsungkan. Guru atau pendidik dan siswa melakukan kegiatan belajar belajar melalui internet melalui aplikasi *video conference* yakni Zoom Meeting dan intruksi pembelajarannya dilakukan secara tatap muka.

Dalam rangka pengorganisasian mata kuliah PPKn atau mata kuliah MKWU, oleh sebab kelembagaan di bawah naungan Direktorat Pendidikan ITB, maka terdapat sejumlah prosedur yang mesti dilakukan dan dipenuhi oleh setiap dosen pengampu. Adapun sejumlah prosedur yang dimaksud, diantaranya:

1. Penjadwalan dan ruangan ditentukan oleh direktorat Pendidikan ITB.
2. Setiap dosen dalam satu semester (14 pertemuan) wajib mengajar secara luring sebanyak 10 kali di kampus Ganesha dan masing-masing 2 kali mengajar luring di kampus Jatinangor dan kampus Cirebon. Adapun akomodasi dan fasilitas untuk perkuliahan di kampus utama (kampus Ganesha) kemudian dibiayai dan diatur oleh direktorat Pendidikan.
3. Jumlah mahasiswa di setiap kuliah hybrid yang dilakukan secara luring (langsung) memperhatikan prosedur jaga jarak dan keterisian kapasitas ruangan sebanyak 50% dari yang semestinya. Untuk pengaturan pembagian jumlah mahasiswa yang harus hadir langsung di kelas diatur oleh direktorat Pendidikan ITB.
4. Setiap dosen sebelumnya telah melakukan pelatihan dan uji coba terkait persiapan perkuliahan hybrid.

SIMPULAN

Berdasar penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *hybrid learning* ini adalah proses belajar yang mengkombinasikan atau mencampurkan antara pembelajaran tatap muka atau *face to face* dan pembelajaran berbasis komputer (secara *online* dan *offline*). Adapun pentingnya kuliah hybrid dalam pembelajaran diantaranya; *Pertama*, memberikan peluang belajar yang lebih beragam. *Kedua*, memungkinkan pembelajaran dilakukan dengan jumlah mahasiswa yang lebih banyak karena tidak terikat tempat dan jumlah mahasiswa. *Ketiga*, memperkaya sumber ajar, dan *Keempat*, dapat meningkatkan hasil belajar.
2. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam kuliah *hybrid* diantaranya : sarana dan prasarana yang memadai, kemampuan guru dalam mengakses alat-alat elektronik yang digunakan dalam pembelajaran, dan perlunya pembekalan dan pelatihan bagi dosen maupun mahasiswa terkait pengetahuan dalam mengakses aplikasi ataupun pembelajaran hybrid.

3. Penerapan kuliah hybrid di ITB termasuk kepada pembelajaran *face to face* yakni pembelajaran yang pelaksanaannya dilakukan secara tatap muka di kelas, melakukan praktik di laboratorium, dan aktivitasnya meliputi dari penyampaian materi, diskusi, serta beberapa hal lainnya. Juga termasuk termasuk ke dalam model *Fully online curriculum with options for face to face instruction*. Pada model yang pertama ini, *hybrid learning* diimplementasikan dengan menggunakan fasilitas internet secara menyeluruh pada setiap kegiatan pembelajaran yang dilangsungkan. Guru atau pendidik dan siswa melakukan kegiatan belajar belajar melalui internet yang dapat menggunakan aplikasi *video conference* yakni Zoom Meeting dan intruksi pembelajarannya dilakukan secara tatap muka.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Permana. (2021). *Prof Reini : ITB Lakukan Digitalisasi Pendidikan di Masa pandemi Covid 19*. Bandung: <https://www.itb.ac.id/berita/detail/57895/prof-reini-itb-lakukan-digitalisasi-pendidikan-di-masa-pandemi-covid-19>.
- Arikunto, S. (2009). *Manajemen Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Permana, A. (2022). *WRAM ITB : Perkuliahan Semester 1 TA 2022/2023 Dilaksanakan 100 % Hybrid*. Bandung: <https://www.itb.ac.id/news/read/58536/home/wram-itb-perkuliahan-semester-i-ta-20222023-dilaksanakan-100-hybrid>.
- Hendrayati, H., & Pamungkas, B. (2016). Implementasi Model Hybrid Learning Pada Proses Pembelajaran Mata Kuliah Statistika Ii Di Prodi Manajemen Fpeb Upi. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 13(2). <https://doi.org/10.17509/jpp.v13i2.3430>
- Indra, N. (2010). Pembelajaran Hibrida Sebagai Strategi Model Pembelajaran Masa Depan. *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 1(2), 119–130. <http://www4.uwm.edu/ltc/hybrid/index.cfm>
- Makhin, M. (2021). Hybrid Learning: Model Pembelajaran pada Masa Pandemi di SD Negeri Bungurasih Waru Sidoarjo. *Mudir : Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3(2), 95–103. <https://doi.org/10.55352/mudir.v3i2.312>
- Nasution.S.(1996). *Metodologi Penelitian Natural Kualitatif*. Transito : Bandung.

- Putra, I. A. (2015). *Orientasi Hybrid Learning melalui Model Hybrid Learning dengan Berbantuan Multimedia di Dalam Kegiatan Pembelajaran*. 1(1).
- Ramdhani, T., Suharta, I. G. P., & Sudiarta, I. G. P. (2020). Pengaruh Model Pembelajaran Hybrid Learning Berbantuan Schoology Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas Xi SMAN 2 Singaraja. *Jurnal Pendidikan Matematika Undiksha*, 11(2), 2613–9677.
- Romli, M. T. dan M. (2022). *Efektivitas Penerapan Hybrid Learning dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti Peserta Didik Kelas VI SDN Sidotopo I/ 48 Surabaya pada Era New Normal Moh*. 7, 9–25.
- Rusyada, H., & Nasir, M. (2022). Efektivitas Penerapan Hybrid Learning Pasca Pandemi Covid-19 di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(2), 1714–1723. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i2.2275>
- Sumardiana, B., Fergina, S., Nurmala, S., & ... (2022). Penerapan Hybrid Learning System di era Pandemi Covid-19 Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Hak Belajar Anak Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas di Desa *Journal of Legal ...*, 10–22. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/49910>
- Sugiyono. (2009). *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta :Bandung
- Triyono, M. G. (2021). Analisis efektivitas penggunaan model pembelajaran hybrid learning di SMK Negeri 2 Surabaya. *Jurnal IT-EDU.*, 5(2), 647. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/it-edu/article/view/41428>
- Verawati, & Desprayoga. (2019). Solusi Pembelajaran 4.0: Hybrid Learning. *Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 2, 999–1015. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/download/2739/2549>
- Wahyuni, A. S. (2021). Penerapan Model Hybrid Learning. *Indonesian Journal of Educational Development*, 2(November 2021), 292–297. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5681376>

**PEDOMAN ALTERNATIF
PEMBELAJARAN
BAHASA INDONESIA
SEBAGAI MATA KULIAH WAJIB
DI ERA PASCA PANDEMI**

Ulinnuha Madyananda

Dosen Bahasa Indonesia UPT PKM Universitas Brawijaya

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 2/E/KPT/2022 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran semester genap tahun akademik 2021/2022 di perguruan tinggi pada masa pandemi *Coronavirus Disease 2019*, disebutkan bahwa terdapat kemungkinan perkuliahan akan dilakukan secara seratus persen tatap muka dengan syarat mengikuti pelevelan PPKM untuk mengendalikan penyebaran *Coronavirus Disease 2019*. Keputusan empat kementerian, yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, menyebutkan bahwa jika pada suatu wilayah berada pada level satu atau dua dengan capaian vaksinasi dosis dua pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di atas 80%, serta capaian dosis dua pada warga masyarakat lansia dan peserta didik di atas 50%, sesuai perundangan maka perkuliahan dapat dilakukan setiap hari dengan jumlah tatap muka 100% selama enam jam setiap hari. Hal tersebut memberi peluang kemungkinan untuk perkuliahan dapat dilakukan dengan luring atau tatap muka di kelas secara utuh.

Lalu, apa konsekuensinya terhadap perguruan tinggi sebagai salah satu pelaksana amanat pendidikan? Perguruan tinggi sebagai pelaksana amanat pendidikan tentu memiliki peran penting setidaknya dalam dua hal: *Pertama*, sebagai tempat penyelenggara kegiatan pendidikan dengan menjalankan prinsip-prinsip pendidikan yang sudah ditetapkan. *Kedua*, menjadi lokasi interaksi sosial yang memungkinkan terjadinya penularan virus dari seseorang yang telah terpapar. Khususnya pada peran pertama, selama pembelajaran dilakukan daring, peran guru banyak dibantu oleh kehadiran orang tua sebagai *role model* pembelajaran di rumah. Mereka berfungsi sebagai orang tua sekaligus sebagai guru bagi anak-anaknya selama menjalankan pembelajaran dari rumah. Peranan tersebut tentu tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Sedangkan fungsi kedua dapat memunculkan ancaman konkret bagi penyebaran virus akibat terjadinya interaksi sosial. Meski demikian, fungsi kedua ini tidak terlampau menjadi momok pelaksanaan pembelajaran tatap muka sebab ketentuan tersebut sudah mendapat persetujuan Dirjen Dikti berdasarkan peraturan yang berlaku.

Lembaga pendidikan yang sudah hampir tiga tahun menjalankan perkuliahan secara daring, diyakini telah banyak membuka wawasan baru tentang pelaksanaan pembelajaran dengan cara yang lebih maju. Pendidik atau dosen telah banyak memanfaatkan media-media digital, perpustakaan daring, bahkan penggunaan video-video interaktif yang dapat mendukung

perkuliahan. Hal tersebut menjadi salah satu modal kuat jika mampu dikembangkan dan dimanfaatkan secara lebih optimal dalam pembelajaran pasca pandemi sebagai suatu pedoman.

Dikatakan sebagai pedoman karena mengandung ketentuan-ketentuan dasar untuk memberi petunjuk bagaimana sesuatu pembelajaran atau perkuliahan dapat dilakukan. Sebagaimana ketentuan yang diterbitkan Dirjen Dikti nomor 2/E/KPT/2022 tentang pedoman pembelajaran yang di dalamnya memuat instruksi-instruksi teknis pelaksanaan perkuliahan, maka fungsi yang sama sebenarnya dapat dikembangkan metode-metode pembelajaran yang lebih dianjurkan untuk diterapkan. Berdasarkan pemikiran tersebut, sejatinya dapat dikembangkan pedoman-pedoman baru pembelajaran yang dimungkinkan menjadi salah satu pedoman alternatif pembelajaran tipe lain.

Alternatif dapat diartikan sebagai pilihan yang paling mungkin untuk dilakukan. Artinya terdapat beberapa pilihan yang dapat diambil pembelajar dalam melaksanakan pembelajarannya di kelas. Sebab, pembelajaran menurut Majid (2013:4); (2014:140) adalah upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya (*effort*) dan berbagai strategi, metode dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Dengan kata lain dapat diartikan sebagai proses belajar dengan beberapa cakupan model pembelajaran, metode, teknik, dan sebagainya (Madyananda dan Rakhmawati, 2022:1-7).

Bahasa Indonesia sebagai salah satu mata kuliah wajib esensial memiliki peran sebagai medium perkembangan ilmu pengetahuan melalui simbol-simbol bahasa. Dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 33 ayat 1 menegaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan nasional, serta pasal 37 ayat 1 dan 2 tentang kurikulum pendidikan menegaskan bahwa bahasa Indonesia harus diajarkan di jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, dan Perguruan Tinggi. Berdasarkan landasan tersebut, penting untuk dilaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia yang lebih bernilai guna dan bernilai manfaat karena berkaitan langsung dengan daya kreatif peserta didik dalam menguasai empat kompetensi bahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis (Slamet dan Saddhono, 2012:3) melalui mata kuliah bahasa Indonesia. Yale (1996:191) menegaskan bahwa pembelajaran bahasa adalah kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas bahasa sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang keilmuan bahasa yang dipelajari.

Berdasarkan uraian di atas, maka penting memandang pembelajaran bahasa Indonesia di era pasca pandemi untuk dapat mengambil pengalaman yang baik selama berjalannya pembelajaran di masa pandemi. Tujuannya

adalah untuk menjawab tantangan pendidikan terbaru dengan melakukan adaptasi dan kolaborasi berdasarkan pengalaman mengajar selama masa pandemi untuk diterapkan di masa berikutnya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi model-model, metode, dan teknik pembelajaran apa saja yang sudah populer diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi, apa saja bentuk pembaharuan yang dapat diterapkan selama pembelajaran di masa pandemi untuk diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia pasca pandemi, dan bentuk-bentuk adaptasi tersebut bisa diterapkan dalam wujud pedoman alternatif yang dapat dipilih oleh para dosen untuk mengajar di kelas tatap muka dengan mengambil dan mengadaptasi media-media pembelajaran yang digunakan pada saat perkuliahan daring berlangsung.

METODE

Penelitian ini berbasis hasil observasi yang dilakukan selama pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurun waktu bulan Agustus 2019 sampai Juni 2022. Observasi dipilih karena berkenaan dengan objek penelitian yaitu kelas bahasa Indonesia yang dilaksanakan oleh peneliti sendiri. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. *Kedua*, model *Discovery Based Learning* adalah teori belajar yang menempatkan peserta didik sebagai pembelajar aktif dalam membangun pengetahuan yang diharapkan (Prasetyana, dkk, 2015: 135–148). Langkah pembelajarannya meliputi: (1) menciptakan stimulus, (2) menyiapkan pernyataan masalah, (3) mengumpulkan data atau mencoba, (4) mengolah data, (5) memverifikasi data, dan (6) menarik kesimpulan. Menurut Akinbobola dan Afolabi (2010) implementasi pendekatan *Discovery Based Learning* mampu melibatkan siswa dalam kegiatan berpikir kritis, belajar kreatif, belajar mandiri, serta pemahaman pada pemecahan masalah mandiri.

iptif kualitatif dengan peneliti sebagai instrumen atau *human instrument* yang diketahui posisinya sebagai peneliti oleh partisipan.

Hasil pengamatan disajikan dalam bentuk tabel untuk dipelajari kelebihan dan kekurangan selama pembelajaran berlangsung. Kemudian dipolakan berdasarkan peluang kemungkinan untuk dapat diterapkan pada pembelajaran selanjutnya. Sedangkan teknik analisis data menggunakan tiga langkah analisis menurut Milles dan Huberman (2011: 20), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Model Pembelajaran yang Sudah Populer

Pelaksanaan pembelajaran tidak dapat lepas dari model belajar yang diterapkan oleh guru atau dosen untuk menyampaikan materi pelajarannya. Meskipun demikian, tidak sedikit guru atau dosen yang tidak mengetahui jenis model pembelajaran yang diterapkannya di kelas. Arends (2008:40–61) memberikan gambaran tentang beberapa model pembelajaran yang memungkinkan untuk diterapkan guru atau dosen dalam melaksanakan tugas mengajar bahasa Indonesia, berikut beberapa model pembelajaran yang sudah populer digunakan dalam pembelajaran di kelas diantaranya, *Cooperative Learning*, *Discovery Based Learning*, *Project Based Learning*, dan *Problem Based Learning*.

Pertama, model *Cooperative Learning* adalah pembelajaran kelompok yang menuntut kerja sama dan interdependensi siswa dalam struktur tugas, struktur tujuan, dan struktur *reward*-nya (Slavin, 1995:54). Tujuan instruksional pembelajaran ini menuntut tumbuhnya prestasi akademik, sikap toleransi dan penerimaan keanekaragaman perbedaan, serta pengembangan keterampilan sosial.

Ketiga, model pembelajaran berbasis proyek atau *Project Based Learning*. Menurut Sulisworo (2010:4) *Project Based Learning* adalah metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata (menciptakan proyek berdasarkan materi). Menurut Rais dalam Lestari (2015) langkah pembelajaran *Project Based Learning* mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) menentukan pertanyaan mendasar, (2) mendesain perencanaan proyek, (3) menyusun jadwal, (4) memonitor kegiatan dan perkembangan proyek, (5) menguji hasil, serta (6) mengevaluasi kegiatan atau pengalaman belajar.

Keempat, model *Problem Based Learning* yaitu langkah pembelajaran yang mengkondisikan peserta didik pada masalah (Syamsidah dan Suryani, 2018:10). Langkah pembelajarannya adalah: (1) pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan, (2) mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, (3) membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok, (4) mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta (5) analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah.

2. Metode Pembelajaran yang Sudah Populer

Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Berdasarkan etimologinya, metode pada dasarnya merupakan cara yang digunakan dalam proses pendidikan yang bertujuan untuk mempermudah pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan (Depdikbud, 1996). Dalam hal ini tujuan pendidikan dikaitkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Menurut pandangan Mas'ud (2014: 64–65) pembelajaran bahasa Indonesia memanfaatkan metode yang meliputi empat tahap, yaitu membangun konteks, membentuk model, membangun teks bersama-sama, dan mengembangkan teks secara mandiri.

Ismawati (2012: 76–87) dalam bukunya memberikan gambaran tentang beberapa metode pembelajaran yang sering digunakan guru untuk mengajar di kelas, yaitu:

Pertama, metode diskusi yaitu metode pembelajaran yang melibatkan dua atau lebih individu yang saling berinteraksi secara verbal dan berhadapan muka secara langsung. Dalam metode ini sudah ditentukan mengenai tujuan atau sasaran yang telah direncanakan mulai dari tukar menukar informasi (*information sharing*), pengolahan masalah sendiri (*self-maintenance*) atau pemecahan masalah (*problem solving*).

Kedua, metode simulasi yaitu metode pembelajaran dengan melakukan peniruan dari keadaan sebenarnya atau erat kaitannya dengan *role playing* (main peran). *Ketiga*, metode ceramah, yaitu metode yang paling populer dilakukan karena guru menyampaikan pembelajaran secara lisan untuk menjawab semua materi dan pertanyaan yang timbul. Biasanya metode ini akan diawali dengan *pre-test* dan diakhiri dengan *postes*.

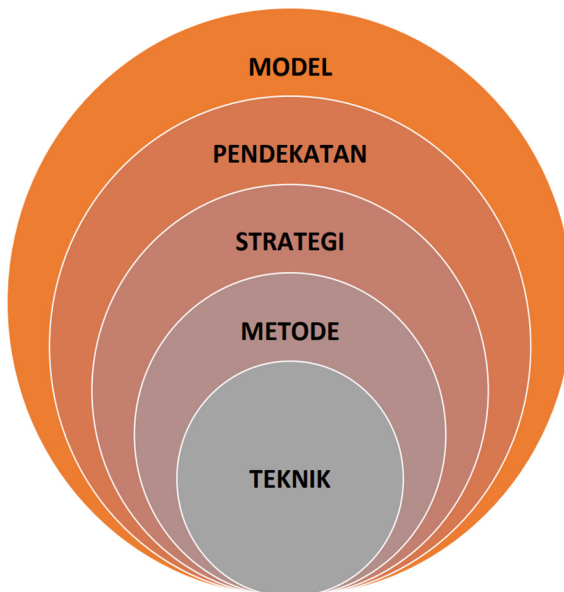
Keempat, metode dikte, yaitu metode pembelajaran dengan menyuruh pembelajar menyalin apa saja yang dikatakan atau yang ditulis guru di papan tulis. Metode ini banyak digunakan khususnya pada masa-masa tahun 1990-an di Indonesia dan tidak jarang masih diterapkan sampai saat ini untuk beberapa kondisi.

Kelima, metode forum, yaitu menyajikan bahan pelajaran melalui forum. Metode pembelajaran ini biasanya akan memanfaatkan bahan-bahan yang disajikan bukan hanya dari guru, tapi juga dari siswa. *Keenam*, metode herbart, yaitu metode pembelajaran dengan guru berusaha menghubungkan tanggapan dari para ahli dan disampaikan pada siswa. Biasanya guru akan mengulangi bahan pelajaran yang telah disajikan sebelumnya sebagai batu loncatan untuk mempelajari bahan baru yang serupa. Bahan pembelajaran lama yang digunakan guru adalah bahan yang telah diketahui siswa.

Ketujuh, metode katekismus (*Catechetical Method*) yaitu, pembelajaran dengan menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya telah ditentukan, yakni telah ditulis pada suatu buku. Model belajar diawali dari sesuatu yang bersifat umum ke khusus, mudah ke sukar, konkrit ke abstrak dan dari teoritis ke praktis.

3. Teknik Pembelajaran yang Sudah Populer

Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Menurut Sudjana (2001:14) teknik adalah cara atau langkah-langkah yang digunakan dalam metode untuk mengelola pembelajaran di kelas. Unsur penting teknik pembelajaran adalah: (1) merupakan implementasi dari suatu metode, (2) jabaran operasional dari metode tertentu, (3) berupa prosedur pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan (4) memiliki ciri khusus dan spesifik, serta sistematis.



Tabel 1. Hubungan model, pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran

4. Penguatan Media Pembelajaran Selama Masa Pandemi untuk Dimanfaatkan dalam Pembelajaran Era Pasca Pandemi

Dalam buku yang ditulis oleh Smaldino, Lowther, dan Russell (2012) berjudul *Instructional Technology & Media for Learning* menjabarkan kiat-kiat memanfaatkan teknologi dan media pembelajaran yang dapat diterapkan dalam kegiatan belajar di kelas. Penerapan teknologi pendidikan diharapkan mampu memberi dampak positif pada penguasaan materi dan dapat memberikan pengalaman belajar yang menarik bagi peserta didik.

Prinsip-prinsip pemanfaatan teknologi pendidikan yang dikembangkan Smaldino, Lowther, dan Russell mencakup: (1) Strategi pengajaran dengan memadukan teknologi dan media. (2) Merancang materi yang efektif berdasarkan prinsip-prinsip visual. (3) Pengembangan model belajar *Assure* untuk menciptakan pengalaman belajar. (4) Pemanfaatan komputer dan multimedia untuk mengakses dunia digital. (5) Penerapan pendidikan jarak jauh untuk menghubungkan para pelajar melampaui ruang kelas. (6) Belajar online melalui jaringan internet dan computer. (7) Material dan display pengajaran: menggunakan media untuk melibatkan pembelajar. (8) Visual: meningkatkan belajar dengan visual. (9) Audio: menyimak dan belajar. (10) Video: meningkatkan pengalaman belajar dengan gambar bergerak. Serta (11) pembelajaran ini dianggap sebagai tren dalam teknologi dan media untuk melihat pendidikan ke depan.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk membantu pembelajaran ini meliputi: (1) Guru perlu menganalisis pembelajar. (2) Guru perlu menyatakan standar dan tujuan pembelajaran. (3) Guru memilih strategi, teknologi, media, dan materi yang akan digunakan selama mengajar. (4) Menggunakan teknologi, media, dan material yang sudah ditentukan sebelumnya. (5) Guru mengharuskan terjadinya partisipasi antar pembelajar, serta (6) Melakukan evaluasi dan merevisi pembelajaran yang sudah berlangsung.

Berikut disajikan contoh sederhana penyusunan syntax pembelajaran dan contoh implementasi langkah-langkah pembelajaran di kelas:

Syntax	1. Memilih strategi, media, dan material
	2. Menyiapkan teknologi, media, dan materi
	3. Menyiapkan lingkungan
	4. Menyiapkan pemelajar
	5. Menyediakan pengalaman belajar

Tabel 2. Contoh Syntax

MATERI	KEGIATAN
Menggali ide menulis karya ilmiah atau populer. Menulis kerangka karangan karya ilmiah atau populer	Dosen menggunakan video, media internet, komputer, sound sistem, dan LCD untuk membantu menyampaikan materi perkuliahan yang sudah ditetapkan sesuai kebutuhan.
	Ketika awal pembelajaran, dosen dapat memutar video melalui tayangan LCD tentang gambaran umum cara menulis karya ilmiah atau sistem kerja ilmiah tertentu.
	Dosen dapat mengatur kelas sesuai kebutuhan dalam menyusun proyek karya ilmiah. Pada materi ini dapat melibatkan banyak pihak, misalnya teman sejawat dalam bentuk kelompok-kelompok, orang tua di rumah sebagai pengamat, para ahli tertentu, tentor, masyarakat sekitar tempat tinggal, atau masyarakat luas yang relevan.
	Pelajar diharuskan menentukan tema, latar belakang, rumusan masalah, metode, pengolahan dan penyajian data, serta membuat kesimpulan. Tambahkan kegiatan penggunaan media, seperti penggunaan internet untuk mencari informasi dari jurnal, makalah prosiding, video interaktif, dan sebagainya.
	Melakukan dokumentasi kegiatan dalam bentuk video tentang pengalaman atau cerita-cerita menarik selama menyusun karya ilmiah, mengumpulkan data, melakukan wawancara, menganalisis data, atau hasil kerja kelompok lainnya. Hal ini penting untuk menunjukkan keseriusan mahasiswa dalam belajar mandiri.
	Unggah ke laman penugasan seperti Google Classrom, atau media saluran lainnya yang ditentukan. Kegiatan ini dapat dilakukan secara bertahap dengan sistem yang telah disepakati antara dosen dan mahasiswa.

Tabel 3. Contoh sederhana implementasi pembelajaran

PENUTUP

Pembelajaran berbasis teknologi merupakan pembelajaran yang menerapkan konsep-konsep pembelajaran komputer dan multimedia. Jenis pembelajaran ini mirip dengan pendidikan berbasis ICT (*Information Communication Technology*) saat ini yang sudah berkembang pesat di berbagai daerah dan negara.

Perlu diterapkannya penambahan fitur-fitur pembelajaran agar pelajar mendapat pengalaman lebih selama proses pembelajaran bahasa Indonesia berlangsung. Selain itu juga ditujukan supaya dosen dan mahasiswa terbiasa dengan optimalisasi teknologi dalam proses belajar. Hal ini akan berdampak positif karena akan menumbuhkan ekosistem pembelajaran yang baru. Hal sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan media-media pembelajaran atau pengalaman-

pengalaman selama melaksanakan pembelajaran di masa pandemi. Fitur-fitur yang dimaksud adalah penambahan desain khusus yang berfungsi untuk menambah kemampuan pembelajar dalam menjalani proses belajar mengajar, seperti: (1) pemanfaatan internet secara masif dengan arahan dosen. (2) Tetap memanfaatkan laman-laman pembelajaran daring yang telah digunakan selama pembelajaran masa pandemi seperti Google Classroom untuk pengumpulan tugas, melaksanakan kuis, dan lain sebagainya. (3) Membuat video hasil belajar, hasil proyek, presentasi tugas seperti pembuatan video presentasi interaktif dalam bentuk CD-Rom interaktif sebagai bahan evaluasi pembelajaran. (4) Pemanfaatan media interaktif lainnya seperti audio visual yang menampilkan video-video relevan dengan materi pelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Akinbobola dan Afolabi. (2010). Analysis Of Science Process Skills in West African Senior Secondary School Certificate Physics Practical Examinations in Nigeria. *Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP)*. 4 (1): 32–35.
- Arends, R.I. (2008). *Learning To Teach (Belajar untuk Mengajar)*. Diterjemahkan oleh Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ismawati, E. (2012). *Perencanaan Pengajaran Bahasa: Menuju Guru Berkompetensi Professional*. Yogyakarta: Ombak.
- Lestari, T. (2015). *Peningkatan Hasil Belajar Kompetensi Dasar Menyajikan Contoh-contoh Ilustrasi dengan Model Pembelajaran Project Based Learning dan Metode Pembelajaran Demonstrasi Bagi Siswa Kelas XI Multimedia SMK Muhammadiyah Wonosari*. Skripsi. Program Studi Pendidikan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Madyananda, U dan Rakhmawati, A. (2022). Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Mata Kuliah Sosiologi Sastra di Perguruan Tinggi Berbasis Analisis Unsur Sosial Novel Ayah. *Jurnal ADJEKTIVA Educational Languages and Literature Studies*. 5 (1): 1–7.
- Majid, A. (2013). *Strategi Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____ (2014). *Pembelajaran Tematik Terpadu*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mas'ud, L. (2014). Pemilihan Metode dan Model Pembelajaran Bahasa Indonesia Berdasarkan Tuntutan Kurikulum 2013 (Kajian Konseptual Pembelajaran

- Bahasa Indonesia di SMA). *Jurnal Prasi*. 9 (17): 64–64.
- Milles, M. B. & Huberman, A. M. (2011). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Prasetyana, S.D., Sajidan, dan Maridi. (2015). Pengembangan Model Pembelajaran *Discovery Learning* yang Diintegrasikan dengan *Group Investigation* pada Materi Protista Kelas X SMA Negeri Karangpandan. *Jurnal Inkuiri*. 4 (2): 135–148.
- Slamet, St. Y., dan Saddhono, K. (2012). *Meningkatkan Keterampilan Berbahasa Indonesia: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Karya Putra Darwati.
- Slavin, R. (1995). *Cooperative learning*. Boston: Allyn & Bacon.
- Smaldino, S. E., Lowther, D. L., dan Russell, J. D. (2012). *Instructional Technology & Media for Learning (Teknologi Pembelajaran dan Media untuk Belajar)*. Diterjemahkan oleh Arif Rahman. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sudjana. (2001). *Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif*. Bandung: Falah Production.
- Sulisworo, D. (2010). *Konsep Pembelajaran Project Based Learning*. Semarang: Sindur Press.
- Syamsidah dan Suryani, H. (2018). *Buku Model Problem Based Learning (PBL) Mata Kuliah Pengetahuan Bahan Makanan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yale, G. (1996). *The Study of Language*. Brain: Cambridge University Press.

**PEMBELAJARAN MKWU ISBD
BERBASIS KEARIFAN LOKAL
PADA UPT MKU
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

*Hasbi Ali, Teuku Muttaqin Mansur,
Sulaiman Tripa, M. Adli Abdullah*

UPT MKU Universitas Syiah Kuala

Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) berbasis kearifan lokal dalam upaya pembentukan karakter mahasiswa saat ini merupakan hal yang sangat urgen. Dewasa ini, fakta menunjukkan bahwa sering terjadinya tawuran antar mahasiswa hanya disebabkan oleh hal-hal yang tidak penting. Bahkan, konflik individu dapat saja memicu terjadinya konflik sosial. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional berbasis pada pembentukan karakter peserta didik yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung visi dan misi presiden terkait dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

Budaya kearifan lokal merupakan kebudayaan yang sangat dijunjung tinggi, terutama oleh masyarakat adat pada daerah tertentu. Oleh karena itu, agar nilai-nilai budaya kearifan lokal tetap eksis, salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkannya dalam proses pembelajaran di Perguruan Tinggi. Pendidikan berbasis nilai-nilai budaya kearifan lokal dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sarana untuk melestarikan potensi daerah setempat (Nadlir, 2014: 307).

Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Ilmu Sosial dan Budaya Dasar di Perguruan Tinggi dapat memanfaatkan nilai-nilai budaya kearifan lokal, baik sebagai materi maupun media pembelajarannya, dengan menerapkan berbagai model pembelajaran yang inovatif, misalnya *Problem Based Learning* (PBL) atau *Project Based Learning* (PjBL).

Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal (*local wisdom*) biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Kearifan lokal ada di dalam cerita rakyat, peribahasa, lagu, dan permainan rakyat. Kearifan lokal sebagai suatu pengetahuan ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba dan diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat. Melalui pendidikan berbasis *local wisdom* (kearifan lokal) pendidikan yang mampu memberi makna bagi kehidupan manusia Indonesia akan tercipta. Artinya, pendidikan nantinya akan mampu menjadi spirit yang bisa mewarnai dinamika manusia Indonesia ke depan (Siahaan, 2018: 649-650).

Dalam hal ini, budaya kearifan lokal atau sering disebut *local wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Pendidikan berbasis kearifan lokal adalah pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk selalu lekat dengan situasi konkret yang mereka hadapi (Kaimuddin, 2019: 73).

Pendidikan berbasis kearifan lokal adalah pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk selalu lekat dengan situasi konkret yang mereka hadapi. Paulo Freire (Wagiran, 2012) menyebutkan, dengan dihadapkan pada problem dan situasi, peserta didik akan semakin tertantang untuk menanggapi problem tersebut secara kritis. Hal ini selaras dengan pendapat Suwito sebagaimana dikutip oleh Noor yang mengemukakan pilar pendidikan kearifan lokal yang meliputi:

1. Membangun manusia berpendidikan harus berlandaskan pada pengakuan eksistensi manusia sejak dalam kandungan.
2. Pendidikan harus berbasis kebenaran dan keluhuran budi, menjauhkan dari cara berpikir tidak benar dan grusa-grusu atau *waton sulaya*.
3. Pendidikan harus mengembangkan ranah moral dan spiritual (ranah afektif), bukan sekadar kognitif dan ranah psikomotorik.
4. Sinergitas budaya, pendidikan dan pariwisata perlu dikembangkan secara sinergis dalam pendidikan yang berkarakter (Noor, 2020: 43).

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemaparan mengenai proses pembentukan karakter mahasiswa melalui pembelajaran Mata Kuliah Wajib Umum Ilmu Sosial dan Budaya Dasar berbasis nilai- nilai budaya kearifan lokal dan sekaligus juga sebagai upaya untuk melestarikan nilai- nilai karakter bangsa yang tercermin dari budaya kearifan lokal masyarakat. Selain itu, tulisan ini juga dapat melengkapi berbagai tulisan yang ada sebelumnya, sehingga dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terkait dengan pembentukan karakter mahasiswa ini. Penulis ingin menganalisis bahwa pembelajaran Mata Kuliah Wajib Umum Ilmu Sosial dan Budaya Dasar berbasis nilai- nilai budaya kearifan lokal akan dapat membentuk karakter mahasiswa.

PEMBAHASAN

1. Pembelajaran

Hakikat pembelajaran tidak hanya berorientasi pada *transfer of knowledge*, melainkan juga pembentukan karakter peserta didik sebagaimana diamanatkan dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Hal senada juga dikatakan oleh Pane bahwa pembelajaran sebagai: “Proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar” (Pane, 2017: 337).

Dalam hal ini, pembelajaran dipandang sebagai sebuah sistem. Dimana, anatara satu komponen dengan komponen lainnya saling berinteraksi dan berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sejalan dengan hal ini, Pane menjelaskan bahwa: “Pembelajaran dipandang sebagai suatu proses interaksi yang melibatkan komponen-komponen utama, yaitu peserta didik, pendidik, dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar, maka yang dikatakan dengan proses pembelajaran adalah suatu sistem yang melibatkan satu kesatuan komponen yang saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan” (Pane, 2017: 337-338).

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal, pendidik dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar yang relevan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Trianto (2009: 19) bahwa “Pembelajaran merupakan usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan peserta didiknya (mengarahkan interaksi peserta didik dengan sumber belajar lain) dengan maksud agar tujuannya dapat tercapai”. Namun demikian, pembelajaran diharapkan dapat berlangsung dengan menjadikan peserta didik sebagai pembelajaran (*student centered*), sehingga peserta didik dapat mengeksplorasi pengetahuan yang dimilikinya. Hudoyo, sebagaimana dikutip oleh Pane mengungkapkan bahwa “Sistem pembelajaran dalam pandangan konstruktivis memberikan perbedaan yang nyata dengan ciri (a) Siswa terlibat aktif dalam belajarnya. Siswa belajar materi secara

bermakna dengan bekerja dan berpikir dan (b) Informasi baru harus dikaitkan dengan informasi sebelumnya, sehingga menyatu dengan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa” (Pane, 2017: 338-339).

Apersepsi ini perlu dilakukan agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan (*joyful*) dan pembelajaran sebaiknya diarahkan pada kepentingan peserta didik untuk mencapai *student wellbeing* sebagaimana yang diharapkan. Dalam hal ini, menurut Mulyasa, pembelajaran tidak menekankan pada penguasaan pengetahuan tentang apa yang dikerjakan, tetapi lebih menekankan pada internalisasi tentang apa yang dikerjakan agar tertanam dan berfungsi sebagai muatan nurani dan hayati serta dipraktekkan dalam kehidupan peserta didik sehari-hari (Mulyasa, 2003: 49).

Oleh karena itu, efektivitas pembelajaran sangat ditentukan oleh interaksi berbagai komponen pembelajaran yang ada. Rosyada mengemukakan bahwa pembelajaran akan berjalan efektif apabila pengalaman, bahan- bahan, dan hasil yang diharapkan sesuai dengan tingkat kematangan peserta didik serta latar belakang mereka (Rosyada, 2004: 100). Terkait dengan hal ini, Yusuf menyimpulkan bahwa ada lima indikator pembelajaran efektif, yaitu pengelolaan pelaksanaan pembelajaran, proses komunikatif, respon peserta didik, aktivitas belajar, dan hasil belajar (Yusuf, 2017: 20).

2. MKWU ISBD

Perkembangan sains dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini berdampak pada terjadinya degradasi moral bangsa, terutama pada generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan solusi konkret untuk membangun karakter bangsa yang sesuai dengan falsafah negara Pancasila. Adanya Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD) adalah salah satu metode untuk membentuk karakter generasi muda, selain sebagai pendamping mata kuliah jurusan masing- masing. Secara substansial, MKWU ISBD berkaitan dengan nilai- nilai budaya bangsa yang diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai budaya bangsa ini bersumber dari pengetahuan masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang dikenal sebagai kearifan lokal (*local genius*).

Tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak hanya berorientasi terhadap pragmatisme dan materialisme semata, akan

tetapi memiliki tujuan yang utuh untuk membentuk manusia Indonesia yang memiliki iman dan taqwa (IMTAQ) serta menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Pergeseran tujuan pendidikan nasional tersebut semakin terlihat dengan terjadinya krisis karakter di bidang pendidikan. Hal ini lebih disebabkan karena pragmatisme dalam merespon kebutuhan pasar kerja lebih memberikan penekanan pada hal-hal yang bersifat materialistik, sehingga melupakan pembelajaran semangat kebangsaan, keadilan sosial, serta sifat-sifat kemanusiaan yang memiliki moral luhur sebagai warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Junaedi, 2020: 1).

Falsafah pendidikan Indonesia telah dikemukakan oleh Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, bahwa hakikat pendidikan serta strategi mencapai hasil pendidikan yang sesuai dengan budaya Indonesia meliputi tiga prinsip yang disebut “Trikon” yang terdiri atas Kontinyu, Konvergen, serta Konsentris yang bermakna bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang berkelanjutan sepanjang hayat, memadukan antara ilmu pengetahuan yang bersumber dari dalam dan luar negeri dengan kelembutan budi pekerti yang bersumber dari budaya nasional Indonesia.

Kesemuanya itu dapat dicapai dengan konsep “among” yang berjiwa kekeluargaan dalam pendidikan. Konsep *among* bersandikan atas dua dasar, yaitu:

1. Kodrat alam sebagai syarat kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya.
2. Kemerdekaan sebagai syarat dinamisasi kekuatan lahir dan batin peserta didik agar dapat memiliki pribadi yang kuat dari hasil berpikir serta bertindak merdeka tanpa tekanan dan hambatan dalam mengembangkan potensi dirinya. Prinsip yang dikemukakan ini sejalan dengan karakter yang diharapkan mengejawantah sebagai sikap pendidik dan pemimpin, yaitu: *Ing ngarso sung tulodo, Ing madya mangun karso, dan Tut wuri handayani* (Junaedi, 2020:1-2).

Namun demikian, proses pendidikan dewasa ini telah melupakan tujuan utama pendidikan, yaitu mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara simultan dan seimbang. Proses pendidikan kita telah memberikan porsi yang sangat besar untuk pengetahuan, akan tetapi melupakan pengembangan sikap atau nilai dan perilaku dalam pembelajarannya. Implikasi dari berlangsungnya proses modernisasi dan lajunya arus globalisasi terhadap perubahan kehidupan sosial budaya yang

cepat, kompetitif, dan semakin kompleks tentunya menuntut manusia memiliki suatu nilai- nilai dan keterampilan sosial (*the social values and skills*) yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Kebutuhan akan pentingnya nilai-nilai dan keterampilan sosial sebagai filter akibat dari perubahan situasi yang semakin mengglobal dan kompleks membawa implikasi imperatif bagi pengembangan strategi upaya pendidikan, utamanya pendidikan umum atau di perguruan tinggi yang dikenal dengan Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU). MKWU merupakan wadah pendidikan umum (*general education*). Keberadaan MKWU ditujukan agar mahasiswa tidak berpikiran sempit seolah-olah keilmuan mereka itu segala-galanya demi karier di masa mendatang. Justru sebaliknya, MKWU memperluas wawasan dan mempersiapkan bekal nilai untuk kehidupan mahasiswa di masa yang akan datang. Pada dasarnya, secara filosofis, pendidikan tidak sekadar untuk mendapatkan pekerjaan (*careerism*), akan tetapi untuk menegakkan humanisme demi terbentuknya insan kamil atau manusia seutuhnya (Suandi, 2016: 1.2-1.3). Oleh karena itu, eksistensi MKWU ISBD dalam upaya pembentukan karakter generasi muda yang berbasis kearifan lokal (*local genius*) merupakan suatu keniscayaan.

3. Nilai Nilai Kearifan Lokal

Salah satu upaya pelestarian nilai- nilai kearifan lokal (*local genius*) dalam pendidikan adalah diluncurkannya buku tentang Literasi Budaya dan Kewargaan, yang memuat informasi tentang kemampuan yang harus dikuasai individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosialnya sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa. Oleh karena itu, Indonesia memiliki beragam suku bangsa, bahasa, kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, dan lapisan sosial. Literasi budaya dan kewargaan ini perlu dikuasai oleh peserta didik dalam memasuki era revolusi industri pada abad XXI ini agar dapat bersaing di era global.

Oleh karena itu, dalam Buku Materi Pendukung Literasi dan Kewargaan (2017: 2) dijelaskan bahwa literasi budaya dan kewargaan penting diberikan di tingkat keluarga, sekolah, dan masyarakat. Literasi budaya dan kewargaan tidak hanya menyelamatkan dan mengembangkan budaya nasional, tetapi juga membangun identitas bangsa Indonesia di tengah masyarakat global. Dalam hal ini, Literasi budaya merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa.

Selanjutnya, dalam Buku Materi Pendukung Literasi Budaya (2017: 3) dijelaskan bahwa Bahasa daerah dan tindak laku yang beragam menjadi kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Selain itu, kesenian merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang dihasilkan oleh suatu masyarakat. Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar tentunya menghasilkan berbagai bentuk kesenian dari berbagai daerah dengan membawa ciri khas kebudayaan dari daerahnya masing-masing. Berbagai macam bentuk kesenian yang dihasilkan oleh setiap daerah di Indonesia harus dikenalkan kepada masyarakat terutama generasi muda agar mereka tidak tercerabut dari akar budayanya dan kehilangan identitas kebangsaannya. Sudah sejak lama kearifan lokal sudah dikenal oleh masyarakat dan merupakan dasar dalam melakukan aktivitas untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, agar kearifan lokal dapat mengikuti perkembangan zaman dan tetap mempertahankan identitas atau jati diri lokal, ia harus memperhatikan dan mempertahankan sistem-sistem sosial yang ditransformasikan kepada generasi muda. Oleh karena itu, integritas masyarakat lokal dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai kekuatan identitas bangsa.

Budaya merupakan konsep yang sangat luas dan kompleks yang dapat diinterpretasikan secara beragam. Selain budaya universal, dikenal pula budaya lokal yang menyimpan kearifan lokal (*local genius*). Sementara kearifan lokal yang kesemuanya merupakan sebuah kompleksitas budaya, cerita rakyat dapat dikatakan sebagai alat penyimpanan sejumlah informasi sistem budaya seperti filosofi, nilai, norma, perilaku masyarakat. Cerita rakyat yang pada mulanya dilisankan, selain berfungsi untuk menghibur, juga dapat memberikan pendidikan nilai.

Namun demikian, cerita rakyat sekarang sudah digeser oleh macam bentuk hiburan yang lebih menarik dalam berbagai jenis siaran melalui televisi, radio, surat kabar, dan lain sebagainya. Padahal, sebelum media cetak dan media elektronik berkembang pesat seperti sekarang, cerita rakyat mendapat tempat yang baik di hati masyarakat pemiliknya. Cerita rakyat merupakan cerminan dari kehidupan masyarakat pada saat itu, pola pikir dan khayalan yang menarik, sehingga masyarakat merasa tertarik dan memperoleh keteladanan.

Secara garis besar, menurut Nurgiyantoro (2000: 324) persoalan hidup dan kehidupan manusia dapat dibedakan ke dalam persoalan: (1) Hubungan manusia dengan diri sendiri, (2) Hubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkup sosial, termasuk hubungannya dengan lingkungan alam sekitarnya, dan (3) Hubungan manusia dengan Tuhannya. Perubahan

yang dilakukan manusia melalui proses pengenalan kebudayaan yang terus menerus akan dapat diidentifikasi sebagai pemahaman manusia kepada kebudayaannya.

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Sulistyorini (2003), cerita rakyat mengandung nilai- nilai luhur yang perlu dilestarikan. Berdasarkan berbagai pendapat di atas, bercermin pada peristiwa Gempa dan Tsunami yang melanda Provinsi Aceh tahun 2004, salah satu contoh kearifan lokal adalah cerita rakyat Simeulue merupakan bukti nyata betapa pentingnya transformasi budaya pada generasi muda. Memori kolektif masyarakat Simeulue tentang Tsunami dahsyat pada tahun 1907 yang dikenal oleh masyarakat setempat dengan istilah Smong terbukti dapat menyelamatkan masyarakat Simeulue dari bencana Tsunami tersebut.

Tindakan evakuasi yang demikian hanya dapat dilakukan oleh adanya satu ingatan bersama (memori kolektif) yang kuat dengan persepsi yang sama terhadap satu objek tertentu. Oleh karena itu, pada saat kejadian yang sangat genting, masyarakat memiliki pengetahuan umum yang sama, dimana hanya dengan satu kata sandi tertentu yang diucapkan, gerakan massa akan terjadi secara masif sangat masif dan spontan dilakukan secara bersama- sama, walaupun mereka berada pada daerah yang terpisah pisah (Ali, 2020:1).

Selanjutnya, upaya pelestarian budaya kearifan lokal ini sangat diperlukan karena (1) Budaya kearifan lokal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari budaya bangsa merupakan materi yang tidak terpisahkan pula dari Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam rangka membentuk karakter bangsa melalui literasi budaya; dan (2) Upaya pelestarian budaya kearifan lokal dapat dilakukan dalam bidang pendidikan melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dimana materi budaya kearifan lokal menjadi salah satu pembahasannya sebagai salah satu kekuatan bangsa (Ali, 2020: 101)

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa belum semua dosen yang mengajar MKWU ISBD menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif dalam proses belajar mengajarnya, sehingga pembelajarannya cenderung membosankan. Selain itu, dosen yang mengajar MKWU ISBD belum menerapkan model pembelajaran yang berbasis nilai-nilai budaya kearifan lokal (*local genius*), sehingga banyak mahasiswa yang tidak memahami budaya bangsanya yang dapat

dijadikan sebagai dasar untuk membentuk karakter mahasiswa yang sesuai dengan nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, dalam upaya membentuk Profil Pelajar Pancasila sebagaimana yang digagas untuk kementerian pendidikan dan kebudayaan melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Hasil analisis literatur ini nantinya diharapkan dapat menambah khazanah teori terkait dengan pembelajaran MKWU ISBD berbasis budaya kearifan lokal karena karakter mahasiswa yang ingin dikembangkan dalam proses pembelajarannya adalah yang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsanya, yaitu Pancasila.

Namun demikian, penulis menyadari bahwa temuan literatur ini masih sangat terbatas, yang disebabkan oleh banyak hal, sehingga penulis mengharapkan agar kajian serupa dapat dilanjutkan oleh penulis berikutnya demi kesempurnaan literatur pembelajaran MKWU ISBD berbasis budaya kearifan lokal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Hasbi. 2020. *Pelestarian Budaya Kearifan Lokal dalam Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan di Era Revolusi Industri 4.0*. Dalam E-Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2020 dengan tema: Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia pada Era Digital sebagai Respon Revolusi Industri 4.0. Surakarta: Laboratorium Program Studi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret.
- Junaedi, Aris, e.al. 2020. *Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Edisi ke-4. Jakarta: Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kaimuddin, 2019. *Pembelajaran Kearifan Lokal*. Dalam Prosiding Seminar Nasional Universitas Muslim Maros Volume 1 Tahun 2019. Makasar: FKIP UMMA.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. *Buku Materi Pendukung Literasi dan Kewargaan*. Jakarta: Kemendikbud.
- Mulyasa, E. 2003. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional: Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurgiyantoro, Burhan. 2000. *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nadlir, 2014. *Urgensi Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal*. Dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume 02 Nomor 02 November 2014. Yogyakarta:

Prodi Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga.

- Noor, Fu'ad Arif. 2020. *Manajemen Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal*. Dalam Cakrawala Dini: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. Vol,II No.I Mei 2020. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru.
- Pane, Aprida dan Muhammad Darwis Dasopang. 2017. *Belajar dan Pembelajaran*. Dalam FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Vol. 03 No. 2 Desember 2017. Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024*.
- Rosyada, Dede. 2004. *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.
- Sulistiyorini, Dwi. 2003. *Mitos Masyarakat terhadap Legenda di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulung Agung*. Malang: Lemlit UM.
- Suandi, Hertati, et.al. 2016. *Materi Pokok Ilmu Sosial Budaya Dasar I*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Siahaan, Nurhalimah, 2018. *Model Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal*. Dalam Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Volume 2 Tahun 2018. Medan: FIS Unimed.
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Wagiran, 2012. *Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Hehamayu Hayuning Bawana*. Dalam Jurnal Pendidikan Karakter Tahun II Nomor 3 Oktober 2012. Yogyakarta: UNY.
- Yusuf, Bistari Basuni. 2017. *Konsep dan Indikator Pembelajaran Efektif*. Dalam Jurnal Pembelajaran dan Keilmuan Vol. 1 No. 2 Oktober 2017. Pontianak: UP4I FKIP Universitas Tanjungpura.

Perancangan Sinergitas Mata Kuliah Wajib Kurikulum dalam Pembelajaran Berbasis Proyek di 6 Universitas di Indonesia

Dwi Purnomo

Fakultas Teknologi Industri Pertanian Unpad

Ryan Hara

Fakultas Keperawatan Unpad

Faris Prima Fadhillah

The Local Enablers

Aprida Sondang, Siti Ulfah Rifa'atul Fitri

Belmawa Kemendikbudristek

Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) yang terdiri dari Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia mendapatkan tantangan yang cukup tinggi di era digital saat ini. Terlebih ketika dihadapkan pada kondisi perubahan zaman yang menyebabkan karakter generasi muda mengalami pergeseran paradigma, cara kerja dan nilai-nilai serta karakternya yang jauh berbeda dengan generasi sebelumnya (Bulturbayevich, 2021; Morrison & Camargo-Borges, 2016). Seiring perjalanannya pun, MKWK mendapatkan respon yang tidak menggembirakan karena pembelajar dalam survei penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran pada umumnya bersifat monoton dan membosankan. Di sisi lain, arah pendidikan perlu memastikan bahwa proses pembelajaran mencapai outcomes yang baik, tidak mengacu semata-mata pada output. Terlebih lagi mata kuliah yang menitikberatkan pada fundamental karakter seperti MKWK, perlu dipastikan keberhasilannya karena akan jadi nilai-nilai dasar dalam perilaku dan implementasi keilmuan selanjutnya (Andini, 2016; Purnomo, Bunyamin, Gunawan, Widianingsih, Sulistyani & Firmansyah, 2021; Saroyan & Trigwell, 2015).

Penelitian ini mencoba merancang MKWK dalam bentuk-bentuk yang transformatif, merancanginya untuk dapat saling bersinergi dan menemukan wadah serta model pembelajarannya yang tepat sehingga dapat dipastikan peluang keberhasilan yang lebih tinggi dalam mencipta capaian pembelajaran berupa karakter dan keterampilan dasar seperti yang diharapkan dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kewarganegaraan yang baik hingga memiliki keterampilan berbahasa Indonesia yang unggul dalam kesehariannya. Dalam merancang model sinergitas MKWK, diperlukan pula kontekstualisasi sesuai dengan Perguruan Tinggi pelaksanaannya, untuk menjamin inklusivitas, mewadahi keragaman dan nilai-nilai lokalitasnya.

METODE

Penelitian dilakukan di enam perguruan tinggi di Indonesia pada kurun waktu Juli 2021 hingga Januari 2022 yang meliputi 1) Universitas Padjadjaran, 2) Universitas Sumatera Utara, 3) Universitas Kristen Duta Wacana, 4) Universitas Katolik Parahyangan, 5) STMIK Primakara, 6) Universitas Telkom. Keenam universitas ini dipilih karena kesukarelaannya untuk menjadi pelopor penggunaan pola transformatif dalam mensinergikan MKWK dalam sebuah proyek pembelajaran yang berdampak pada masyarakat. Setiap sesinya dilakukan sesi lokakarya dan forum diskusi terpumpun yang melibatkan perwakilan-perwakilan pengampu MKWK serta pemegang kebijakan MKWK universitas dan kemudian memetakan kondisi eksisting pelaksanaannya hingga merancang bentuk ideal berdasarkan nilai-nilai dan kekuatan universitasnya masing-masing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

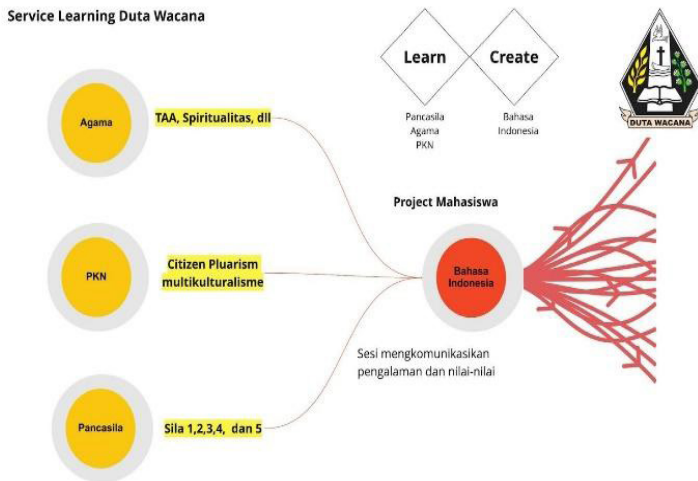
Hasil yang didapatkan mengenai perencanaan sinergitas Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) dalam Pembelajaran Berbasis Proyek di 6 Universitas di Indonesia, didapatkan sebagai berikut:

1. Universitas Padjadjaran

Universitas Padjadjaran memiliki satu mata kuliah penciri yakni Olah Kreativitas dan Kewirausahaan (OKK) yang kemudian dijadikan tempat proyek MKWK dilaksanakan. Karena kebijakan universitas menekankan untuk diselenggarakannya *blended learning*, maka pelaksanaannya juga dengan menggunakan konsep hibrida. Penggunaan sistem manajemen pembelajaran (LMS) menjadi sesuatu yang penting sehingga konsep ini dapat diterapkan.

Selain itu, penggunaan *Flipped Classroom* dan sinergitas proyek memerlukan kesepahaman posisi masing-masing mata kuliah terhadap proyek sebagai wadah aktualisasinya (Apriani, Suwandi, Ariyani & Sari, 2021). Begitupun peran dosen yang bergeser menjadi fasilitator, tutor atau mentor sesuai dengan skenario proyek dan posisi mata kuliahnya sehingga memastikan capaian pembelajarannya berlangsung dengan optimal. Berikut gambaran konsep TPB Unpad 2021.

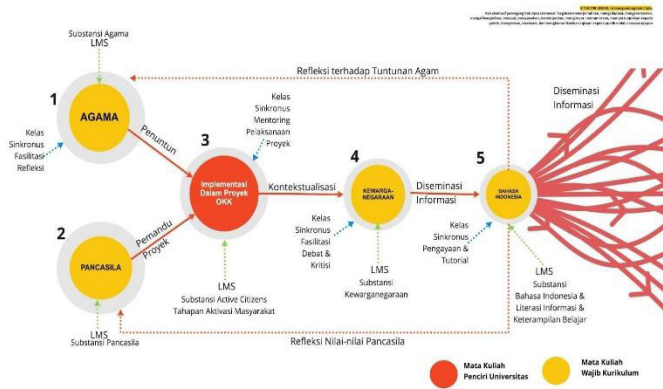
Mata kuliah Agama dilakukan dengan cara *sinkronous* dan *asinkronous*, begitu pula dengan Kewarganegaraan dimana substansi mata kuliah dilaksanakan melalui *Learning Management System (LMS) LIVE* milik Unpad. Pada sesi-sesi *sinkronous*, dilakukan fasilitasi berupa refleksi terhadap upaya yang dilakukan pada proyek di mata kuliah Agama, melakukan proses kontekstualisasi dengan sesi-sesi debat di Kewarganegaraan, serta penulisan diseminasi informasi di Bahasa Indonesia. Sementara itu, Pancasila dilakukan sebagai pemimpin proyek dimana substansi disampaikan melalui LMS dengan materi substansi Pancasila dan panduan proyek hingga selesai. Olah Kreativitas dan Kewirausahaan (OKK) melakukan aktivitas sosial kemasyarakatan dipandu oleh mentor khusus dengan 17 topik Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan rubrik penilaian nilai-nilai Ke-Unpad-an Jawara 5.0. Gambaran hasil perancangan sinergitas MKWK dalam Pembelajaran Berbasis Proyek di Unpad, dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Konsep MKWK di Universitas Padjadjaran

2. Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW)

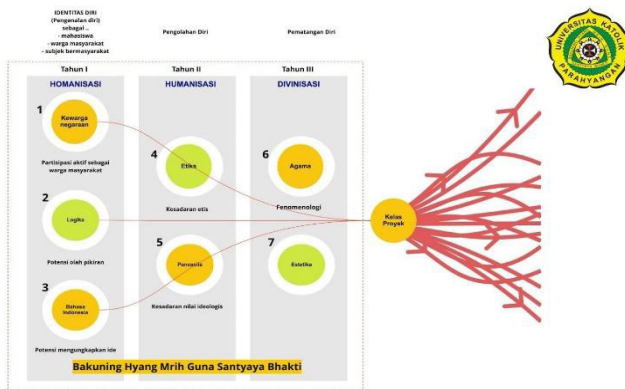
Dalam hasil diskusi terpumpun, UKDW memungkinkan penyelenggaraan MKWK dengan pendekatan *Double Diamond Design Thinking* (Purnomo, 2021). Klaster berlian pertama yakni pemahaman dilakukan oleh tiga mata kuliah MKWK yakni Agama, Kewarganegaraan dan Pancasila. Proyek mahasiswa dilakukan dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yang juga mengarahkan pembelajaran untuk dapat mengkomunikasikan pengalaman dan nilai-nilai yang sudah didapat dari tiga mata kuliah sebelumnya. Mata kuliah Agama ditujukan untuk menumbuhkan nilai spiritualitas. Kewarganegaraan akan menekankan pada pluralisme kemasyarakatan dan multikulturalisme yang mengarahkan pembelajar untuk hidup berdampingan mengutamakan toleransi, sedangkan Pancasila membawa pembelajar untuk melakukan proses internalisasi 5 sila melalui proyek-proyek yang diselenggarakan. Adapun gambaran hasil perancangan sinergitas MKWK dalam Pembelajaran Berbasis Proyek di UKDW, dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini:



Gambar 2. Konsep MKWK di Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW)

3. Universitas Katolik Parahyangan (Unpar)

Unpar memiliki karakteristik yang menarik dimana mata kuliah MKWK tersebar pada semester yang berbeda. MKWK disinergikan dengan mata kuliah penciri universitas dan dijadikan empat tahapan dimana pembentukan karakter dilakukan sepanjang mahasiswa berkuliah di kampus. Gambaran hasil perancangan sinergitas MKWK dalam Pembelajaran Berbasis Proyek di Unpar, dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah ini.



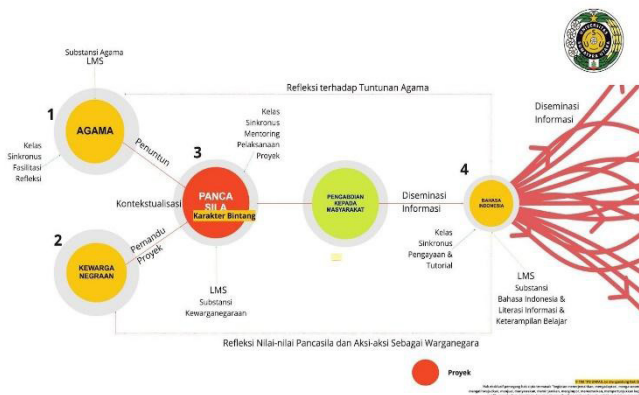
Gambar 3. Konsep MKWK di Universitas Katolik Parahyangan (Unpar)

Empat tahapan ini dibagi menjadi 1) Homanisasi, pada tahap ini dilakukan proses pengenalan diri sebagai mahasiswa, warga negara dan subjek masyarakat. Pada tahapan ini terlibat tiga mata kuliah, yakni Kewarganegaraan untuk meningkatkan kesadaran berpartisipasi aktif sebagai warga negara masyarakat, Logika sebagai dasar berpikir dan membangkitkan potensi oleh pikiran, serta Bahasa Indonesia yang akan menjadi wadah dalam mengungkapkan ide-ide. 2) Tahap Humanisasi, Mata kuliah yang bertujuan agar mahasiswa dapat mengolah diri. Terdiri dari dua mata kuliah yakni Etika dan Pancasila yang menekankan pada kesadaran etis serta kesadaran nilai ideologis.

4. Universitas Sumatera Utara (USU)

Sesi diskusi terpumpun di USU melahirkan model pelaksanaan MKWK yang memadukan mata kuliah di MKWK dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Model ini menunjukkan bahwa MKWK memiliki potensi untuk menjadi wadah penumbuhan karakter yang topik-topiknya diturunkan dari proses riset serta diimplementasikan dalam proses pengabdian kepada masyarakat. Seperti model yang disajikan dibawah ini, Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi kegiatan proyek diimplementasikan.

Gambaran hasil perancangan sinergitas MKWK dalam Pembelajaran Berbasis Proyek di USU, dapat dilihat pada Gambar 4 dibawah ini.



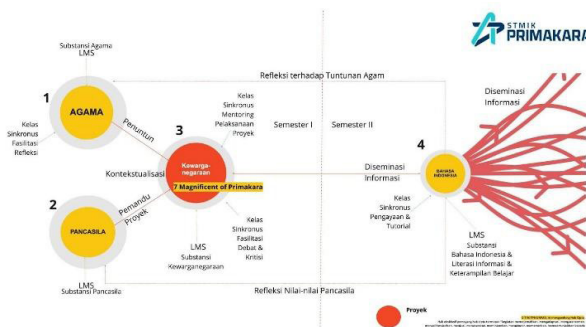
Gambar 4. Konsep MKWK di Universitas Sumatera Utara (USU)

Mata kuliah Agama dijadikan sebagai penuntun, proyeknya dipimpin oleh mata kuliah Kewarganegaraan kemudian dikontekstualisasikan dalam mata kuliah Pancasila. Karakter mahasiswa USU yang dijadikan target adalah Karakter Bintang (Beriman, Inovatif, Tangguh, Arif, Berkesadaran Lingkungan). Proyek diimplementasikan pada Pengabdian Kepada Masyarakat, mengambil topik-topik riset dan didiseminasikan informasinya melalui Mata Kuliah Bahasa Indonesia. Integrasi ini diharapkan akan mendatangkan keterpaduan setelah sebelumnya setiap mata kuliah ini memiliki proyek masing-masing yang belum sinergi satu sama lainnya. Konsep memadukan dengan pengabdian kepada masyarakat akan sangat baik karena akan menjawab pada tantangan sumber daya yang perlu disediakan dalam proyek MKWK serta keefektifan pencapaian tujuan institusi untuk memberi dampak baik bagi masyarakat.

5. STMIK Primakara Bali

MKWK di STMIK Primakara diselenggarakan dalam dua semester, Agama, Pancasila dan Kewarganegaraan dilakukan pada semester I, sedangkan Bahasa Indonesia akan menjadi bagian dimana mahasiswa melakukan pembelajaran untuk mendiseminasi informasi terkait pada proyek yang dilaksanakan pada semester sebelumnya. Mata kuliah yang dipilih sebagai pemimpin proyek adalah Pancasila dilakukan secara *asinkronus*, sedangkan mata kuliah yang menjadi media dimana proyek dijalankan adalah Kewarganegaraan, karakter yang dituju adalah *7 magnificent of Primakara*.

Berikut gambaran hasil perancangan sinergitas MKWK dalam Pembelajaran Berbasis Proyek di STMIK Primakara Bali, dapat dilihat pada Gambar 5 dibawah ini.



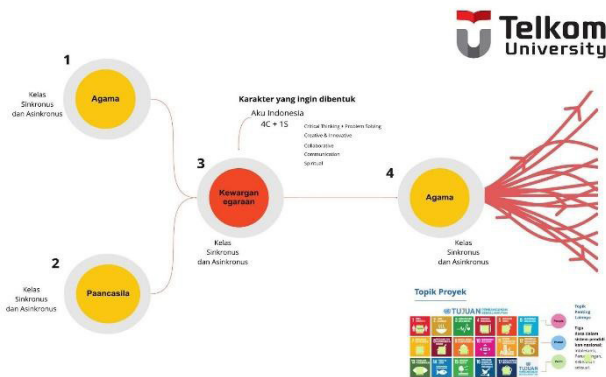
Gambar 5. Konsep MKWK di STMIK Primakara Bali

6. Universitas Telkom

Universitas Telkom memiliki kompleksitas yang lebih besar. Dalam model ini terdapat variabel lain dimana proses pelaksanaan MKWK yang berada di tingkat prodi belum dikelola secara bersama di tingkat universitas. Begitu pula dengan kondisi dosen pengampunya yang memiliki variasi tinggi, apakah diambil dari dosen tetap atau luar biasa.

Konsekuensi ini membawa model yang mengerucut bagaimana melaksanakan proyek MKWK dengan variabel kompleks yang dilaksanakan dalam program studi, semester, dan status dosen pengampu yang berbeda-beda. Model yang diusulkan adalah memastikan setiap program studi untuk menyinergikan antara mata kuliah, kelas-kelas juga masih menggunakan kelas sinkronus untuk mengakomodir kehadiran dosen pengampu yang ada dan memberikan kualitas pembelajaran yang baik (He, dkk; 2021). Universitas Telkom memilih mata kuliah kewarganegaraan sebagai wadah pelaksanaan proyek untuk menghadirkan karakter Aku Indonesia 4C1S, Critical Thinking, Problem Solving, Creative, Innovative, Collaborative, Spiritual.

Gambaran hasil perancangan sinergitas MKWK dalam Pembelajaran Berbasis Proyek di Universitas Telkom, dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Konsep MKWK di Universitas Telkom

PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan pola rancangan MKWK masing-masing dengan tetap mengutamakan pencapaian pembelajarannya untuk menghadirkan karakter unggul pada setiap mahasiswanya. Model-model ini juga dapat dijadikan rujukan model sinergitas pelaksanaan MKWK dengan pendekatan berbasis proyek. Proses perancangannya mempertimbangkan kesiapan universitas, nilai dan penciri universitas serta harapan yang ingin dicapainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrini, V. S. (2016). The Effectiveness of Inquiry Learning Method to Enhance Students' Learning Outcome: A Theoretical and Empirical Review. *Journal of Education and Practice*, 7(3), 38-42.
- Apriani, A. N., Suwandi, I. K., Ariyani, Y. D., & Sari, I. P. (2021). Penguatan Pendidikan Karakter pada Masa New Normal Covid-19 melalui Flipped Classroom. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 14(2), 102-113.
- Bulturbayevich, M. B. (2021). Challenges of Digital Educational Environment. *Academic Journal of Digital Economics and Stability*, 4, 54-60.
- He, L., Yang, N., Xu, L., Ping, F., Li, W., Sun, Q., ... & Zhang, H. (2021). Synchronous distance education vs traditional education for health science students: A systematic review and meta-analysis. *Medical Education*, 55(3), 293-308.
- Morrison, K., & Camargo-Borges, C. (2016). The opportunities and challenges of using digital learning environments in educational organizations. *Reimagining the purpose of schools and educational organisations*, 161-172.
- Purnomo, D., Bunyamin, A., Gunawan, W., Widianingsih, I., Sulistyani, W., & Firmansyah, I. (2021). Rancangan Pembelajaran Transformatif Pada Mata Kuliah Wajib Kurikulum (Mkwk) Dan Penciri Universitas Dalam Blok Tahap Pembelajaran Bersama. *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 31(3), 371-379
- Purnomo, D. 2021. *Double Diamond Design Thinking*. dwipurnomo.id, diakses 20 Agustus 2022. <https://www.dwipurnomo.id/double-diamond-design-thinking/>
- Rujukan yang diutamakan adalah sumber primer berupa manuscript dalam jurnal dan hasil penelitian, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi. Manuscript yang dimuat di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional sangat disarankan/diprioritaskan untuk dijadikan rujukan.

Saroyan, A., & Trigwell, K. (2015). Higher education teachers' professional learning: Process and outcome. *Studies in educational evaluation*, 46, 92-101.

Tawafak, R. M., Mohammed, M. N., Arshah, R. B. A., & Romli, A. (2018, February). Review on the effect of student learning outcome and teaching Technology in Omani's higher education Institution's academic accreditation process. In *Proceedings of the 2018 7th International Conference on Software and Computer Applications* (pp. 243-247).

**MODEL PENERAPAN SIKAP
ANTI KORUPSI DI PERGURUAN
TINGGI MENURUT PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
BERBASIS COMPANY'S
ANTI CORRUPTION SYSTEM**

Martini

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta

Efridani Lubis

Fakultas hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Besarnya harapan akan pemerintahan yang transparan, jujur, dan menjauhi praktik korupsi merupakan salah satu pesan yang diusung dalam gerakan reformasi.

Namun ternyata, harapan itu masih jauh dari kenyataan. Beberapa data menunjukkan pergerakan korupsi di Indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun, bahkan sampai dengan tahun 2016 yang lalu. Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW), kasus korupsi di Indonesia terus meningkat, baik oknum maupun dan jumlah uang. Selain itu, beragamnya latar belakang pihak yang terlibat semakin luas, tidak terbatas pada kalangan pengguna anggaran dan belanja negara, namun juga pihak swasta.

Tabel 1: Hasil Verifikasi KPK atas Laporan Korupsi

JNS	BULAN												JML
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
Indikasi Non TPK	200	242	282	285	360	319	208	282	274	366	321	264	3,403
Indikasi TPK	295	296	375	356	367	322	246	306	295	336	329	345	3,868

Sumber: Laporan Tahunan KPK Tahun 2016

Jika dilihat dari nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi menunjukkan angka yang besari. Menurut hasil kajian Laboratorium Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), nilai kerugian yang dihadapi oleh negara Indonesia selama kurun waktu 2001-2015 mencapai Rp203,9 triliun. Sedangkan nilai yang berhasil dikembalikan dari jumlah tersebut berdasarkan penghitungan hukuman denda dan sita aset hanya terkumpul Rp 21,26 triliun, yaitu sekitar 10,43%.

Secara proporsional, kasus korupsi terbanyak berpusat di Jakarta. Sepanjang tahun 2004-2011, kasus korupsi di Jakarta mencapai 142 kasus.

Ukuran tingkat korupsi Indonesia juga dapat dilihat dari angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Pada tahun 2010, angka IPK Indonesia berada pada 2,8 dan menempati peringkat ke 110 dari 178 negara yang disurvei. Nilai ini sama persis dengan tahun sebelumnya. Nilai ini jauh berada di bawah Singapura yang skornya 9,3 dan merupakan negara dengan IPK tertinggi di ASEAN, lebih rendah dari Malaysia dengan total 4,4, dan sedikit lebih tinggi dari Vietnam dengan total 2,7 juga Timor Leste dengan total 2,5. Berkaitan dengan hal ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merencanakan agar capaian skor IPK Indonesia berada di angka 5,0 pada tahun 2015.

Sementara itu, kerangka hukum untuk mencegah dan menanggulangi korupsi telah diatur dalam 5 Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003; UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kerangka hukum ini bersifat nasional dan internasional. Dengan demikian, terlihat jelas komitmen bangsa Indonesia yang kuat untuk menghapus korupsi dari ibu pertiwi. Namun, kerangka hukum yang sudah disusun dengan baik setelah gerakan reformasi tersebut belum berlaku secara efektif. Hal ini ditandai dengan *trend* yang meningkat mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia.

Diktum Kesebelas angka 7 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi menugaskan Menteri Pendidikan Nasional untuk menyelenggarakan pendidikan yang mengandung substansi penanaman semangat dan perilaku anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan, baik formal dan non formal.

Namun demikian, dari pelaku korupsi di atas, kebanyakan adalah lulusan perguruan tinggi. Sehingga dapat dikatakan, kurikulum pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi tidak bisa lagi menggunakan sistem tradisional dan konvensional. Kurikulum tersebut perlu diperkaya dengan berbagai kemungkinan pengembangannya.

Di sisi lain, perusahaan-perusahaan swasta terutama yang bertaraf internasional telah merumuskan dan melaksanakan tindakan preventif untuk mencegah pelaksanaan korupsi yang dikenal dengan tindakan *compliance*. Sejauh ini, sistem yang dilaksanakan di dunia usaha ini dianggap efektif. Oleh karena itu, identifikasi nilai-nilai dalam pencegahan korupsi dalam dunia bisnis yang diintegrasikan dengan kurikulum anti korupsi di perguruan tinggi akan menghasilkan kurikulum yang sifatnya tidak lagi utopia melainkan lebih realistis dan aplikatif.

Dalam *compliance* anti korupsi, beberapa langkah diambil untuk memastikan adanya tindakan korupsi dan kemudian diputuskan tindakan selanjutnya. Langkah-langkah yang dimaksud antara lain:

Gap analysis, yaitu penilaian mendalam atas sistem dan regulasi internal perusahaan terhadap berbagai peraturan anti korupsi baik di tingkat nasional maupun internasional atau menilik tingkat kesesuaian regulasi dengan peraturan-peraturan lainnya. Selanjutnya dilakukan pula analisis atas regulasi perusahaan dengan segala aktivitas transaksi dan

bisnis perusahaan baik melibatkan pegawai, direksi, komisaris, pemegang saham, vendor, kontraktor, dan/atau pihak lain yang terlibat langsung maupun tidak langsung.

Diagnostic protocol, yaitu pengembangan hasil *gap analysis* untuk melakukan analisis mendalam terkait implementasi sistem internal perusahaan secara faktual, seperti melakukan penjabaran atas proses identifikasi, verifikasi, *monitoring*, dan pemeliharaan data pelanggan dan/atau *supplier* yang tunduk pada peraturan perundang-undangan anti korupsi, baik tingkat nasional maupun internasional.

Melihat fenomena di atas, maka perlu dilakukan kajian untuk mengintegrasikan sikap anti korupsi di kalangan mahasiswa yang merupakan calon-calon pemimpin masa depan dan akan menjadi pengambil keputusan penggunaan anggaran yang memiliki akses terhadap anggaran dimaksud, melalui kurikulum dengan target capaian karakter yang lebih jelas. Integrasi yang demikian akan bersifat strategis jika dilakukan melalui pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan dan dipadukan dengan prinsip anti korupsi yang diterapkan dalam dunia bisnis, dan juga mengemban misi untuk membangun karakter bangsa Indonesia yang lebih beradab dan humanis serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, fokus penelitian terletak pada telaah literatur mengenai pengembangan kurikulum Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi berbasis *compliance* anti korupsi dalam dunia bisnis.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa poin yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pencegahan dan penanggulangan korupsi dalam peraturan perundang-undangan, apa saja karakter nilai dan sikap yang dikehendaki dan dibutuhkan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi baik secara regulasi dan edukasi, dan bagaimana mengintegrasikan sistem anti korupsi dalam *compliance* anti korupsi di perusahaan ke dalam kurikulum sistem pendidikan di perguruan tinggi untuk pendidikan anti korupsi lebih efektif.

METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif *sociological-jurisprudence* yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan studi dokumen yang bertujuan membandingkan hukum dalam peraturan (*law in book*) dengan hukum dalam praktiknya (*law in action*). Karena penelitian ini menggunakan pendekatan studi dokumen, maka data yang digunakan sebagian besar adalah data sekunder dan tersier.

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan melakukan studi literatur yang dilakukan baik pada pra penelitian dan selama penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem *Compliance* Anti Korupsi di Dunia Bisnis

Marak dan kian mencemaskannya perilaku korupsi di kalangan masyarakat mendorong dunia bisnis untuk bergerak dalam upaya menata sistem tata kelola perusahaannya (*corporate governance*). *Compliance* anti korupsi pada dunia bisnis mendapat perhatian di dunia internasional dengan disahkannya *the Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions* pada tahun 1999 yang diikuti oleh 40 negara. Baru pada tahun 2005, disahkan pula *the United Nations Convention against Corruption* yang diikuti oleh 168 negara. Dengan demikian, pemikiran tentang anti korupsi terlebih dahulu datang dari dunia bisnis, yang kemudian dirumuskan langkah dan strategi untuk itu.

Untuk mengaplikasikan konvensi di atas ke dalam dunia bisnis, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) bekerjasama dengan *the United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), dan *World Bank* menyusun *Anti-Corruption, Ethics and Compliance Handbook for Business* pada tahun 2013. *Handbook* ini membahas tentang:

1. Kerangka kerja anti korupsi secara internasional yang harus diterapkan dalam kegiatan bisnis internasional;
2. Panduan bagi perusahaan tentang bagaimana mengevaluasi atau menilai risiko perusahaan dalam upaya mengembangkan program *compliance* dan etika anti korupsi di perusahaannya;
3. Membangun dan membentuk instrumen panduan bisnis untuk *compliance* dan etika anti korupsi di perusahaan.

Pada perkembangannya, beberapa perusahaan besar menyusun dan membentuk etika bisnis melawan korupsi yang menjadi salah satu parameter kesehatan dan terpercayanya sebuah perusahaan, baik di mata konsumen, sesama pelaku bisnis, maupun oleh pengawas kegiatan bisnis (pemerintah/otoritas). Coca-cola misalnya telah mengembangkan *Code of Business Conduct* dan *Anti Bribery Policy* untuk mendorong kegiatan bisnis yang lebih adil, beretika, dan legal. Sistem kerja Coca-cola untuk *compliance* anti korupsi adalah dengan memadukan sistem manajemen risiko dengan data dari Transparency International yang kemudian model risiko korupsi dan penyuluhan ini disusun. Inti tugasnya adalah memahami budaya dan tingkat risiko sehingga dapat mencegah akar perilaku korupsi paralel dengan penghormatan dengan budaya setempat.¹

1. Lihat, <http://www.coca-colacompany.com/our-company/governance-ethics/anti-corruption>.

2. *Compliance* Anti Korupsi Pada Perusahaan Total

Total adalah perusahaan Perancis di bidang minyak dan gas dunia yang beroperasi di 130 negara dan memiliki 98.000 pegawai. Perusahaan ini memiliki kegiatan di bidang eksplorasi untuk memproduksi, mengubah, memasarkan, dan mendistribusikan energi dalam berbagai bentuk. Strategi Total adalah menyediakan energi utama secara bertanggungjawab; menyediakan energy terjangkau, terpercaya, dan bersih bagi sebanyak mungkin orang. Dengan latar belakang demikian, salah satu program yang dikembangkan oleh Total adalah program *compliance* atau anti korupsi, atau disebut juga program kepatuhan yang disosialisasikan secara berkala dan berkelanjutan untuk mempertahankan eksistensi bisnisnya.

Total Indonesia atau disebut juga dengan Total E&P Indonesia (TEPI) menjalankan program kepatuhan anti korupsi. Selain merujuk ketentuan internasional dan negara-negara dimana Total beroperasi, perusahaan ini juga memperhatikan dan memenuhi peraturan-peraturan yang terkait dengan pencegahan dan penindakan korupsi di Indonesia. Salah satu peraturan Indonesia yang paling akhir yang menjadi pertimbangan TEPI adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang menetapkan bahwa korporasi atau perusahaan bisnis swasta dapat menjadi pelaku korupsi yang merugikan negara apabila:

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana korupsi tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, atau
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlakukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dengan ketentuan yang jelas dan tegas di atas, maka korporasi harus melakukan langkah-langkah nyata yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi baik secara aktif dan responsif. Program yang dikembangkan Total dirancang secara bertingkat dan meliputi berbagai aspek. Pada tingkat tertinggi Total mengeluarkan PIAGAM ETIKA yang berisikan:

1. Komitmen terhadap tingkat tertinggi keselamatan dan keamanan dalam operasi serta melindungi kesehatan dan lingkungan;
2. *Compliance* dengan standar integritas tertinggi, khususnya dengan pencegahan korupsi, fraud dan praktik anti-kompetitif;
3. Menghormati standar internasional hak asasi manusia.

Pada tingkat di bawahnya, dikembangkan PEDOMAN TINGKAH LAKU yang merupakan *Code of Conduct* berperilaku bagi karyawan Total. Diantara prinsip pedoman perilaku dimaksud adalah:

1. Menolak suap dan korupsi dalam segala bentuk, baik secara umum atau pribadi, aktif maupun pasif;
2. Program compliance anti-korupsi didesain untuk menerapkan prinsip “*zero tolerance*”;
3. Aturan dan prosedur internal menjelaskan tindakan dan perilaku yang diharapkan dari karyawan TEPI dan *stakeholder* yang lain.

Untuk melaksanakan Pedoman Tingkah Laku di atas, dikembangkan pula Kerangka Kerja Kepatuhan yang disebut dengan *Comprehensive Compliance Program*, yang terdiri dari tujuh elemen yang dikembangkan menggunakan nilai-nilai perusahaan dan referensi hukum perusahaan. Tujuh elemen tersebut adalah (1) *Top level commitment*; (2) *Policies and procedures*; (3) *Awareness and training*; (4) *Risk assessment and due diligence*; (5) *Monitoring, auditing, and alerts*; (6) *Reporting*; dan (7) *Sanction*. Ketujuh elemen bekerja secara berjenjang dan bertahap. Dalam setiap tahapannya, terdapat syarat dan tindak lanjut jika ditemukan indikasi pelanggaran. Dengan demikian, merujuk pada gambar dibawah, maka sanksi adalah tahapan paling akhir dari program *compliance* secara lengkap.



Gambar 1: Comprehensive Compliance Program TEPI

Di samping program *compliance* anti korupsi, Total juga mengembangkan program anti korupsi menggunakan sistem International Standard Organization (ISO) 37001. Pada sistem ISO, terdapat *checklist*

yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa perilaku di perusahaan tersebut telah berorientasi pada manajemen anti korupsi.

Dari program *compliance* anti korupsi pada perusahaan Total, terlihat bahwa efektifnya pembangunan sikap dan budaya anti korupsi terletak pada pembangunan komitmen dan tindakan tepat untuk setiap gejala, sehingga tindakan relevan bisa diambil dan pada akhirnya dapat mencegah tindakan korupsi. Prinsip ini yang akan diadopsi dan dikembangkan dalam kurikulum pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, sehingga gerakan ini bukan hanya sekedar slogan, melainkan sudah menjadi sikap yang nyata dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

3. Karakter, Nilai, Sikap Membangun Budaya Anti Korupsi

Pendidikan antikorupsi pada dasarnya adalah penanaman dan penguatan nilai-nilai dasar yang diharapkan mampu membentuk sikap antikorupsi pada diri peserta didik. Ada beberapa pemikiran mengenai karakter yang perlu dibangun dan dikembangkan agar sikap anti korupsi terbentuk dengan baik.

Pada tatanan regulasi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, karakter yang ingin dicapai dari sistem pendidikan adalah peserta didik yang: (1) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) berakhlak mulia, (3) sehat, (4) berilmu, (5) cakap, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, dan (9) bertanggungjawab. Sekalipun karakter ini masih bersifat umum, pada prinsipnya, karakter baik ini juga dapat menjadi karakter yang menumbuhkan sikap anti korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi juga mengembangkan sembilan nilai dasar yang perlu ditanamkan dan diperkuat melalui pelaksanaan pendidikan antikorupsi di sekolah, yaitu (1) jujur, (2) adil, (3) berani, (4) hidup sederhana, (5) tanggung jawab, (6) disiplin, (7) kerja keras, (8) hemat, dan (9) mandiri.²

Proses internalisasi menurut Budiningsih (2004) harus memperhatikan empat hal, yaitu (1) pengertian atau pemahaman terhadap karakter integritas, (2) perasaan integritas, (3) tindakan integritas, dan (4) internalisasi nilai-nilai (keimanan, etika, dan moral). Keempat komponen tersebut juga sekaligus mencakup domain kognitif, afektif dan psikomotorik yang dicapai melalui materi dan metode pembelajaran yang tepat.

Dengan demikian, perilaku anti korupsi merupakan karakter 'bentukan' yang memang direncanakan dengan seksama melalui proses internalisasi yang dimaksud. Oleh karena itu metode pembelajaran yang

2. Maria Montessori, Pendidikan Antikorupsi Sebagai Pendidikan Karakter Di Sekolah, h.295

paling tepat untuk perilaku ‘bentukan’ tadi adalah metode *planned behavior* dari Fishbein dan Ajzen (1975).

4. Gambaran Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi di Universitas Negeri Jakarta Efektif Berbasis *Compliance Program* Perusahaan

Berdasarkan studi terdahulu dan prinsip-prinsip dalam *compliance* program pada perusahaan dalam melakukan bisnis beretika dan anti korupsi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa inti dari pendidikan korupsi meliputi:

1. pengetahuan tentang korupsi,
2. pengembangan sikap anti korupsi,
3. perubahan sikap menuju anti korupsi,
4. perspektif moral, agama, dan sosial atas korupsi,
5. perspektif internasional,
6. sistem *risk assessment* untuk identifikasi ada tidaknya perilaku korupsi, dan
7. sistem sanksi efektif bagi yang melakukan tindak korupsi.

Berdasarkan 7 topik di atas, maka dapat disusun kurikulum Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi secara umum, dan di UNJ secara khusus yang diusulkan bermuatan 2 SKS dengan 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pencegahan dan penanggulangan korupsi dalam tataran peraturan perundang-undangan sudah cukup lengkap; mencakup tidak kurang dari 11 peraturan setingkat Undang-Undang yang berevolusi dari tahun 1957 sampai dengan 2006.

Pendidikan anti korupsi dinilai banyak kalangan sebagai salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan untuk membangun budaya anti korupsi. Perguruan tinggi sebagai jenjang tertinggi dalam menempuh pembelajaran dan sebagai bekal menjalani hidup selanjutnya dinilai sebagai momen yang tepat untuk mengenalkan, mendiskusikan dan menerapkan budaya anti korupsi. Selain diharapkan sebagai *agent of change*, fase mahasiswa juga masuk dalam tahapan melaksanakan nilai yang menurut pertimbangan mereka sebagai pilihan dalam menjalani hidup. Agar Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi dapat berjalan

dengan efektif, perlu disusun suatu materi pembelajaran yang terstruktur dan berkesinambungan sehingga sasaran pembentukan karakter dapat dicapai. Namun demikian, sebelum menyusun kurikulum dimaksud, perlu dielaborasi terlebih dahulu karakter atau sikap yang dapat mendukung pembentukan sikap anti korupsi. Berbagai pendapat diusulkan sebagai karakter dasar yang harus dikuatkan untuk dapat membangun sikap anti korupsi.

Selain dari perspektif teori yang mengembangkan sikap anti korupsi, perlu juga mengidentifikasi program dalam dunia bisnis yang mengatur dan memonitor perilaku anti korupsi yang dinilai efektif. Dengan menggunakan pendekatan yang sama, maka dapat dikembangkan kurikulum pendidikan anti korupsi di Perguruan Tinggi yang efektif dan komprehensif. *Compliance* program atau program kepatuhan pada program anti korupsi pada dunia bisnis menekankan aspek motorik dengan metode pendekatan edukasi, *monitoring*, dan tahapan yang terakhir adalah sanksi sesuai dengan kesalahan. Namun demikian, program yang dikembangkan lebih menekankan tindakan preventif daripada kuratif. Oleh karena itu, aspek ini perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi.

2. Saran

Pemberian mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi di perguruan tinggi secara umum dan di Universitas Negeri Jakarta perlu segera diwujudkan. Untuk itu penulis berharap kepada pihak berwenang di Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini Pembantu Rektor I yang membidangi akademik untuk dapat memasukkan dan memformalkan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi sebagai mata kuliah yang mandiri. Jika dirasakan belum memungkinkan, pendidikan anti korupsi dapat diintegrasikan ke dalam mata kuliah Kewarganegaraan sebagai langkah awal.

Mengingat sumber daya yang terbatas dalam melaksanakan penelitian ini, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengembangkan kurikulum Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi yang memuat metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pemberian mata kuliah dimaksud, yaitu pembentukan karakter, serta dilengkapi dengan bahan ajar yang sesuai dan disertai panduan pengajarannya sehingga keseragaman pemberian mata kuliah dapat terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwary, 2012, Perang Melawan Korupsi di Indonesia – Studi Kasus Maraknya Tindak Pidana Korupsi, Penindakan dan Strategi Pemberantasannya, Institut Pengkajian Masalah-Masalah Politik dan Sosial Ekonomi, Jakarta.
- Dreher, Axel, Christos Kotsogiannis, Steve McCorrison, 2004, *Corruption Around the World: Evidence from a Structural Model*.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*.
- Hamzah, Andi, 2002, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti.
- Hartanti, Evi, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Indriati, Ety, 2014, Pola dan Akar Korupsi – Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Kaligis, OC, 2008, *Praktik Tebang Pilih Perkara Korupsi*, PT Alumni Bandung.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2011, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi.
- Kurniawan, Luthfi J dan Hesti Purspitosari, 2012, Negara, Civil Society, dan Demokratisasi, Intrans Publishing, Malang.
- Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Di Madrasah, makalah dapat diunduh di <http://www.kemenag.go.id/file/file/ProdukHukum/ftec1380095521.pdf>
- Poerwadarminta, WJS, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Martono, Nanang, 2012, Sosiologi Perubahan Sosial – Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Montessori, Maria, Pendidikan Antikorupsi Sebagai Pendidikan Karakter Di Sekolah.
- Rokhmad, Ali, Birokrasi Tanpa Korupsi, 2013, Sains Press, Sarana Komunikasi Utama Bogor.
- Tim Pengkajian SKPN Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, 2002, Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan APBN/ APBD.
- Tindakan Preventif Dan Represif Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, dapat diunduh di http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=1546

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Instruksi Presiden No. 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.

**PERAN FIQIH PADA
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN
GOOD GOVERNANCE
DALAM BINGKAI HALAL CITY**

*Khalid Rahman, Abdul Madjid ,
Albar Adetary Hasibuan*

Universitas Brawijaya

Problem korupsi merupakan bagian dari problem tatanan nilai yang tidak kunjung usai. Karena semakin akutnya permasalahan tersebut, sebagian orang menganggap korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya yang harus diperangi bersama.

Menurut indeks persepsi korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh Transparency International Indonesia pada Januari 2022, saat ini posisi Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara. (Wibowo, 2022) Jumlah kasus korupsi yang ditemukan aparat penegak hukum (APH) pada semester pertama tahun 2021 adalah sebanyak 209 kasus dengan jumlah 482 tersangka yang diproses hukum. Sedangkan kerugian akibat korupsi yang timbul, menurut laporan *Indonesian Corruption Watch* (ICW), mencapai Rp 26,83 triliun pada semester 1 2021. Jumlah ini meningkat 47,63% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 18,17 triliun (Annur, 2021).

Berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah dan menghilangkan praktek korupsi di Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini. Namun realitanya, korupsi tetap saja menjamur. Bahkan di era otonomi daerah sekarang ini, korupsi sudah menyebar di berbagai daerah lokal. Pada tingkatan birokrat pusat pun korupsi menyebar luas.

Salah satu strategi yang dilakukan untuk memerangi korupsi adalah dengan dirancangnya pendidikan antikorupsi oleh beberapa lembaga pendidikan. Gagasan ini lahir dimaksudkan untuk membasmi korupsi melalui persilangan (*intersection*) antara pendidikan watak dan pendidikan kewarganegaraan.

Sektor pendidikan formal di Indonesia dapat berperan dalam upaya pencegahan korupsi. Langkah preventif (pencegahan) tersebut secara tidak langsung bisa melalui dua pendekatan, *pertama*: menjadikan peserta didik sebagai target, dan *kedua*: menggunakan pemberdayaan peserta didik untuk menekan lingkungan agar tidak *permissive to corruption*. Oleh karenanya, pendidikan perlu mengembangkan nilai antikorupsi.

Fiqh sebagai khazanah pemikiran intelektual muslim, selama ini telah mengkaji secara serius dan mendalam isu-isu korupsi, Beberapa istilah fiqh untuk korupsi, diantaranya *risywah*, *suht*, *akl al-amwal bi al-batil* (makan harta secara tidak legal), *ghulul*, *ikhtilas*, dan *al-fasad al-mali*.

1. Pemahaman Fiqh dalam Pemberantasan Korupsi

Tidak ada pengertian khusus tentang korupsi dalam fiqh. Korupsi juga belum disebut dalam rentetan *jarimah* dalam Fiqh Jinayah. Korupsi

diwadahi paling tidak oleh 9 jenis *jarimah* yang ada dalam pembahasan fiqh, yakni: *sariqah* (pencurian), *ghulûl* (penggelapan), *ar-risywah* (gratifikasi/penyuapan), *al-gashab* (penguasaan illegal), *al-hirâbah* (perampokan), *khiyânat*, *al-amanah* (penyalahgunaan wewenang), *aklu as-suht* (makan harta haram), *al-intihâb* (perampasan/ penjarahan), dan *ghasl al-amwal al-muharramah* (mengaburkan asal usul harta yang haram).

Dari Yahya bin Sa'îd al-Anshari, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari Abu Amrah dari Zaid bin Khalid al-Juhani, dalam riwayat al-Imam Ahmad disebutkan: "Salah seorang pemberani dari sahabat Nabi SAW mati pada hari Khaibar (maksudnya dalam perang Khaibar). Lalu para sahabat menyampaikan hal itu, (maksudnya berita kematian dan mengenai urusan menyolatinya) pada Rasulullah SAW, lalu beliau SAW menjawab: "Shalatihlah teman kalian." Maka berubahlah roman muka para sahabat (karena penolakan beliau SAW), Lalu beliau (Rasulullah SAW) menjelaskan: "Sesungguhnya teman kalian ini telah berbuat curang dalam perjuangan di jalan Allah, (yakni terkait dengan harta yang diperoleh dari peperangan, karenanya aku tidak mau menyolatinya). Maka kami pun memeriksa barang bawaannya, lalu kami temukan suatu *kharaz* dari orang Yahudi yang nilainya tidak lebih dari dua dirham. Dalam kitab *al-Qamus* al-Fairuz Abadi berkata: "Dan *kharazah* dengan huruf *ra'* yang berharakat, bermakna intan dan yang telah terangkai. Zaid bin Khalid al-Juhani menisbatkan *kharaz* itu kepada kaum Yahudi, karena diambil dari mereka dan tidak dimiliki orang Madinah. Maka dengan hal itu diketahui bahwa barang tersebut berasal dari *ghulul* (kecurangan/korupsi)."

Penodaan terhadap amanat rakyat (*ghulul*) menurut *ijma'* para ulama termasuk salah satu dosa besar. Ini dinukil oleh Imam Muhyiddin Syaraf an-Nawawi:

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ وَأَنَّهُ مِنَ الْكَبَائِرِ

Disepakati bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak kejahatan luar biasa (*extra ordinary*) melawan kemanusiaan, hukum, dan syari'at Islam. Ada dua alasan utama mengapa korupsi dikategorikan tindak pidana luar biasa:

Pertama, sumber-sumber ajaran Islam yang disepakati (al-Quran, al-Hadits, al-Ijma' dan al-Qiyas) mengharamkan tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuknya;

Kedua, korupsi menimbulkan dampak buruk yang luar biasa dan berjangka panjang terhadap kemanusiaan, bangsa, dan agama.

2. Konsep *Good Governance*

Secara konseptual dapat dipahami bahwa *good governance* menunjukkan suatu proses yang memposisikan rakyat dapat mengatur ekonominya. Institusi serta sumber sosial dan politiknya tidak hanya sekedar dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan integrasi bagi kesejahteraan rakyat. *Good Governance* juga dipahami sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar, pemerintahan yang efisien, serta pemerintahan yang bebas dan bersih dari kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). (Yunus, 2006)

Sedangkan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip keperintahan yang baik terdiri atas: (1) Profesionalitas, (2) Akuntabilitas, (3) Transparansi, (4) Pelayanan prima, (5) Demokrasi dan partisipasi, (6) Efisiensi dan efektivitas, (7) Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. (Maryam, 2016)

METODE

Penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian pustaka (*library research*) dalam mengkaji konsep fiqh dalam pendidikan anti korupsi, yaitu penelitian dengan mengambil data dari literatur yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat, maupun penemuan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan untuk mengetahui fenomena pemahaman masyarakat kota Malang tentang *halal city*, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini juga melakukan survei untuk mendapatkan data tentang fenomena masyarakat memahami tentang konsep *halal city*, analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rumusan Fiqh dalam Pendidikan Anti Korupsi di kota Malang

Sesuai hasil wawancara dan survei penelitian yang telah dilakukan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Malang tentang pemahaman fiqh pada pendidikan anti korupsi. Maka didapatkan hasil sebagai berikut.

Wakil Ketua MUI kota Malang, KH. Drs. Chamzawi Syakur, M.Hi., menjelaskan bahwa *Halal City* yang sudah dilakukan di kota Malang masih berfokus pada penanganannya penjaminan produk halal pada kuliner

dan makanan-makanan yang diperjualbelikan di kota Malang. MUI kota Malang bersama dengan BPJPH Kementerian Agama terus berusaha mengawasi dan mengedukasi masyarakat kota Malang untuk berkomitmen menjalankan kuliner halal. MUI kota Malang pernah mengerahkan bantuan pada usaha-usaha kecil untuk membuat Sumpah Produk Halal. MUI kota Malang tidak berhak mengeluarkan sertifikat Halal, yang mengeluarkan adalah MUI Pusat dan Provinsi. Hal ini dilakukan awalnya karena mahalnya biaya sertifikasi halal. MUI kota Malang lebih aktif untuk menyurati pemerintah daerah atau legislatif untuk terus berkomitmen pada penyediaan produk halal pada masyarakat. Saat ini MUI kota Malang sedang difasilitasi oleh pemda kota Malang dengan *Islamic Center* di Kedungkandang kota Malang. Menurut sekretaris MUI, Ir. Baroni, MM. bahwa kata halal berkaitan dengan makanan, layanan hotel, dan kuliner tidak menjadi masalah. Namun kata halal jika disandingkan dengan aktivitas *government*, hal itu akan menjadi agak sensitif yang kadang sebagian orang beranggapan bahwa aktivitas tersebut mengarah pada pemerintahan *syar'i* atau dianggap mengarah pada konsep pemerintahan *khilafah*. Padahal tujuan utamanya untuk komitmen mengutamakan amanah pemerintahan baik akhlak, kebijaksanaan dan tanggung jawab menjalankan amanah rakyat terutama melawan korupsi yang menyengsarakan dan merugikan rakyat.

Dalam kitab *Ar-Risalah* karangan Imam Syafi'i, beliau menjelaskan bahwa "*Tidak ada sesuatu yang haram dimakan selain yang telah dikecualikan oleh SWT.*" (Mesir, 1938) Maksud makanan yang diharamkan adalah zatnya atau cara memperolehnya. Jika berkaitan dengan zatnya itu sudah dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 145, bahwa makanan yang haram, di situ ada kandungan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan selain nama Allah SWT. Begitu pula makanan yang diperoleh dengan cara mencuri, atau dengan uang hasil korupsi.

Halal City di kota Malang masih bergerak pada wisata halal di kota Malang, karena banyaknya wisatawan yang masuk kota Malang yang berasal dari berbagai daerah. Pada persoalan korupsi, menurut sekretaris MUI kota Malang, Ir. Baroni, MM. Bahwa piranti-piranti pemberantasan korupsi harus dipersiapkan, tidak hanya memerangi saja, namun sistem demokrasi kita yang kadang masih membiarkan *money politic*. Komisi fatwa MUI kota Malang secara intens juga terus menyuarakan *amar ma'ruf nahi munkar*, meskipun secara teknis belum ada gerakan taktis.

Dalam kaidah hukum fiqih menurut empat mazhab, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, "*Seseorang yang melewati kebun orang lain yang tidak berpagar, dan di dalamnya terdapat buah-buahan*

yang ranum, maka ia tidak diperbolehkan memakannya kecuali mendapat izin dari pemiliknya jika tidak terpaksa. Sedangkan jika terpaksa, ia boleh memakannya dengan syarat akan menggantinya.” Demikian menurut pendapat Hanafi, Maliki dan Syafi’i (Muhammad bin ‘Abdurrahman Ad-Dimasyqi, 2012).

Namun, dari mazhab Hambali, diperoleh dua riwayat. *Pertama*, boleh ia memakannya, meskipun tidak dalam keadaan darurat dan tidak akan menggantinya. *Kedua*, boleh dimakan jika terpaksa dan tidak diwajibkan menggantinya. Adapun jika kebun itu dipagari, maka tidak boleh memakan buah-buahnya, kecuali mendapat izin dari pemiliknya. Demikian menurut ijma para imam mazhab (Muhammad bin ‘Abdurrahman Ad-Dimasyqi, 2012).

Kajian fiqh membahas tentang halal haramnya makanan selain sebab zatnya tidak terkecuali cara memperolehnya. Sebagaimana dijelaskan ijtihad para ulama di atas, bahwa kehalalan makanan tergantung pada tindakan kita dalam memperolehnya, seperti jika makanan itu bersumber dari harta rakyat maka kita harus mendapat restu dari rakyat, namun jika tidak, kita wajib menggantinya dan menerima sanksi hukum yang berlaku. Hal ini sangat berkaitan dengan perilaku korupsi yang merupakan salah satu bentuk memperoleh harta yang haram. Dari harta yang haram itu tentu jika diwujudkan untuk memperoleh makanan, maka makanannya pun jadi haram seperti ijtihad para Imam Mazhab di atas.

Harapan MUI kota Malang untuk bisa mencapai *Halal City*, maka seorang pemimpin harus jujur, amanah, tanggung jawab dan terus melakukan moratorium untuk mengevaluasi bawahan-bawahan agar tidak melanggar aturan, serta memperkuat usaha-usaha mensejahterakan rakyat. Menurut wakil ketua MUI, KH. Drs. Chamzawi Syakur, M.Hi. bahwa sekecil apapun kemungkarannya itu tidak bisa diberi tempat, misal seperti lokalisasi di pulau terpencil pun tetap tidak diperbolehkan (W/MUI/1-09-2022).

2. Peran Fiqh pada Pendidikan Anti Korupsi untuk Mewujudkan Good Governance di kota Malang

Fiqh yang merupakan pemahaman melalui ijtihad ulama dalam menghukumi korupsi sudah sangat jelas yaitu haram, bahkan termasuk tindak kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Selanjutnya peran fiqh mewujudkan *good governance* adalah dengan mencegah agar tiap orang ataupun pejabat tidak melakukan kejahatan tersebut. Dalam fiqh,

diberikan ancaman hukuman yang berat untuk para pelakunya, dari mulai hukum mati, *hudud*, *ta'zir*, kurungan, diasingkan, denda atau bahkan yang paling ringan yaitu teguran.

Dengan adanya pemahaman fiqh yang baik yang terus diedukasikan pada masyarakat luas, kota Malang akan mengantarkan pada *Good Governance* Syariah, yaitu etika kerja Islami yang mengacu pada sifat dan perilaku Nabi Muhammad saw, yaitu *shiddiq*, *amanah*, *tabligh* dan *fathanah*. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat terinternalisasi dan melembaga dalam sebuah organisasi sebagai sistem budaya yang baik. Apabila nilai kerja Islami dijalankan dengan baik, maka akan lebih mudah untuk memerangi korupsi yang merugikan rakyat. Karena nilai-nilai fiqh anti korupsi selaras dengan prinsip tata kelola yang berlaku umum, yaitu transparansi, *accountability*, *responsibility*, profesional, dan *fairness* (Hamdani, 2019).

Kaepala bagian kesejahteraan rakyat (Kabag Kesra) kota Malang, Pak Maburr, dalam hal ini yang diminta mewakili Walikota Malang untuk menjadi informan tentang pembinaan pegawai tentang pendidikan karakter anti korupsi, mengatakan bahwa pendidikan anti korupsi dilakukan dengan pembinaan birokrasi melalui BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pembinaan Sumber Daya Manusia) kepada seluruh ASN di kantor pemerintah kota Malang. Pada Dinas Pendidikan, Walikota Malang menekankan pendidikan karakter pada anak-anak sekolah. Untuk pengadaan proyek-proyek seperti *Islamic Center* dan Gedung UMKM di Blimbing, semua dilaksanakan sesuai prosedur tidak ada korupsi sedikitpun. Semua orang bisa menelusuri dan mengeceknya karena terlihat (W/KKS/27-09-2022).

Begitu pula literasi halal terus disampaikan oleh Pak Walikota di setiap kesempatan agar masyarakat bisa dengan jelas memahami *Halal City*. Kota Malang telah mendapatkan predikat barometer kota toleransi secara nasional. Sehingga *halal city* tidak mungkin mengarah pada kota *syar'i* atau *khilafah* (W/SKS/14-09-2022).

3. Analisis Data terkait Respon Masyarakat terhadap *Good Governance* dalam Bingkai *Halal City* di Kota Malang

Peneliti telah membagikan kuesioner kepada masyarakat Kota Malang. Kuesioner ini menggunakan tiga indikator pemahaman masyarakat terhadap kinerja pemerintah kota Malang, yaitu: 1) Peraturan pemerintah yang telah disepakati dan disahkan, 2) Penerapan peraturan pemerintah, 3) Evaluasi pelaksanaan peraturan tersebut. Sedangkan indikator independen penelitiannya adalah pengetahuan umum masyarakat mengenai konsep *halal city* di Kota Malang.

Dari hasil analisis dengan menggunakan *Structural Equation Model* (SEM), ditemukan beberapa hal yang berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap variabel literasi masyarakat.

Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,16. Artinya, peraturan yang dibuat oleh pemerintah memiliki signifikansi 0,16. Dalam hal regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya pemerintah Kota Malang tidak selalu mendapat respon positif dari masyarakat.

Sementara itu, indikator terkait implementasi kebijakan *Halal City* selama ini berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan dan persepsi masyarakat dengan nilai koefisien sebesar 0,93. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Kota Malang telah mempraktekkan konsep halal, kebiasaan halal, dan wisata halal dalam kehidupan sehari-hari.

Pada indikator evaluasi terkait hasil pelaksanaan konsepsi *Halal City* selama ini di Kota Malang diperoleh nilai koefisien -0,64. Harapan yang diinginkan masyarakat berdampak pada implementasi kebijakan konsep *Halal City* di Kota Malang. Terbukti dari hasil analisis ditemukan nilai koefisien sebesar 0,62. Sedangkan data dari setiap pertanyaan yang mewakili setiap indikator telah dinyatakan valid untuk menjawab tujuan penelitian yang telah direncanakan.

4. Pembahasan Analisis Data terkait Respon Masyarakat terhadap *Good and Clean Governance* dalam Bingkai *Halal City* di Kota Malang

Konsep *Halal City* di Kota Malang sendiri adalah konsep kota yang menerapkan pariwisata dengan mengedepankan syariat Islam yang telah tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Konsep halal bahkan memiliki visi bahwa pariwisata dilakukan tanpa melanggar nilai dan etika dalam ajaran Islam.

Wakil Ketua MUI kota Malang, KH. Drs. Chamzawi Syakur, M.Hi., menjelaskan bahwa *Halal City* yang sudah dilakukan di kota Malang masih berfokus pada penanganan penjaminan produk halal pada kuliner dan makanan-makanan yang diperjualbelikan di kota Malang. *Halal city* di kota Malang masih bergerak pada wisata halal di kota Malang, karena banyaknya wisatawan yang masuk kota Malang dari berbagai daerah. Pada persoalan korupsi, menurut sekretaris MUI kota Malang, Ir. Baroni, MM, mengatakan bahwa piranti-piranti pemberantasan korupsi harus dipersiapkan, tidak hanya memerangi saja namun sistem demokrasi kita yang kadang masih

membiarkan *money politic*. Komisi fatwa MUI kota Malang secara intens juga terus menyuarakan *amar ma'ruf nahi munkar*, meskipun secara teknis belum ada gerakan taktis untuk persoalan korupsi. Maka menggalakkan pendidikan anti korupsi adalah usaha untuk mewujudkan *good and clean governance* di kota Malang.

Walikota Malang yang diwakili Kabag Kesra, Mabruur, mengatakan bahwa *halal city* adalah pasti sehat dan baik terutama dalam hal pekerjaan. Termasuk halal dalam layanan umum, pariwisata, dan produk makanan maupun souvenir. Sertifikasi halal juga meningkatkan promosi bagi produk-produk usaha.

1. Peraturan Halal City di Kota Malang

Tingkat intelektualitas seseorang terhadap sesuatu menjadi penting ketika dikaitkan dengan kehidupan sosial secara umum. Kebijakan *Halal City* yang digagas oleh pemerintah kota Malang menuai berbagai tanggapan pro dan kontra. Hal ini wajar ketika suatu kebijakan menjadi norma kehidupan masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat Kota Malang. Walikota Malang melalui enam konsep utama telah disampaikan untuk mewujudkan Kota Malang sebagai Pusat Pariwisata Halal. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023 dan juga diatur dalam ketentuan yang telah diubah yang tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 2021 .

2. Implementasi Konsep Halal City di kota Malang

Berdasarkan *Global Muslim Travel Index* (GMTI), Indonesia merupakan destinasi wisata halal terbaik. Predikat ini diperoleh karena beberapa faktor yang telah terpenuhi antara lain; program pelaksanaan bimbingan teknis dan penyelenggaraan workshop di sepuluh destinasi wisata halal unggulan yang tersebar di Indonesia. Salah satu destinasi wisata halal unggulan Indonesia adalah kota Malang. Pemerintah kota Malang dinyatakan siap menerapkan *halal city*. Hal ini tentunya juga didukung oleh beberapa aspek lain seperti konsep wisata halal yang matang dan jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara di Malang membuat sektor pariwisata semakin berkembang.

Ditetapkannya Malang sebagai salah satu destinasi wisata religi unggulan dan juga wisata halal di Indonesia merupakan peluang sekaligus tantangan yang akan dihadapi oleh para pelaku industri pariwisata. Kota

Malang akan bersungguh-sungguh meningkatkan penyelenggaraan wisata halal untuk mewujudkan program wisata halal terpadu. Beberapa data dan fakta yang ada mendasari penelitian ini dalam menganalisis peluang dan tantangan wisata halal di kota Malang. *Halal city* di kota Malang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tidak hanya umat Islam karena halal bermakna universal.

3. Evaluasi Pelaksanaan Halal City oleh Masyarakat Kota Malang

Masyarakat umum khususnya masyarakat kota Malang masih memiliki persepsi yang samar tentang *halal city*. *Halal city* masih sulit dipahami oleh masyarakat awam. Hal ini terjadi karena masyarakat beranggapan bahwa *halal city* sama dengan kota religi, padahal keduanya adalah dua hal yang berbeda. *Halal city* bertujuan untuk mengakomodir nilai kehidupan bagi setiap orang agar setiap orang dapat melakukan aktivitas yang berkaitan dengan norma kehidupan agamanya dengan tenang dan nyaman.

Selain itu, sertifikasi halal di kota Malang bertujuan untuk mendongkrak potensi wisata halal, meski tidak wajib, sertifikasi ini juga menjadi nilai tambah. Kemenpar 2019 telah menyiapkan pedoman wisata halal yang meliputi 4 bidang usaha, antara lain; kuliner, hotel, biro perjalanan, dan spa. Menurut Menteri pariwisata, sertifikasi halal penting sebagai nilai tambah bagi pelaku wisata dan produk wisata itu sendiri. Menteri Pariwisata berpesan kepada para pelaku usaha untuk tidak ragu dalam melakukan sertifikasi halal pada bidang usahanya masing-masing, karena keuntungan yang diperoleh merupakan jaminan bahwa produk pelaku usaha tersebut halal dan sesuai standar.

PENUTUP

Halal City di kota Malang sangat diharapkan oleh masyarakat lebih-lebih para wisatawan yang berdatangan di kota Malang, apakah mereka sedang menempuh pendidikan sambil berwisata, atau sekedar berwisata saja. *Halal City* yang sudah dilakukan di kota Malang masih berfokus pada penanganan penjaminan produk halal pada kuliner dan makanan-makanan yang diperjualbelikan di kota Malang, sementara *halal city* dalam bentuk habitus masih menjadi persoalan bersama. Lebih-lebih berkaitan dengan perilaku dan *attitude* pejabat maupun masyarakat yang seharusnya mencerminkan nilai-nilai halal yang universal.

Namun kata halal jika disandingkan dengan aktivitas *government* menjadi agak sensitif yang kadang sebagian orang menganggap hal itu mengarah pada pemerintahan *syar'i* atau dianggap mengarah pada konsep pemerintahan *khilafah*. Padahal tujuan utamanya untuk komitmen mengutamakan amanah pemerintahan baik akhlak, kebijaksanaan dan tanggung jawab menjalankan amanah rakyat terutama melawan korupsi yang menyengsarakan dan merugikan rakyat.

Good governance di kota Malang akan mudah terwujud jika disertai dengan budaya-budaya anti korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah maupun masyarakatnya. Dengan melibatkan semua elemen masyarakat baik LSM, OPD, legislatif dan yudikatif kota Malang untuk bersama-sama memakmurkan rakyat di kota Malang dengan selalu mengedepankan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesionalitas dan *fairness*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. (2014). Fiqih Anti-Korupsi Mazhab Negara: Memadu Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, Nomor 1, Juni 2014*, 26.
- Alfarhan, U. F., Nusair, K., Al-Azri, H., Al-Muharrami, S., & Hua, N. (2021). *Measuring the effects of tourists' relative willingness to spend and third-degree price discrimination on inbound tourism expenditure differentials*. *Tourism Economics*, (0), 13548166211030016. <https://doi.org/10.1177/13548166211030016>
- Annur, C. M. (2021, September 13). Retrieved Februari 28, 2022, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-268-triliun-pada-semester-1-2021>
- Asikin, A. d. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamdani. (2019). *Konsep Corporate Governance Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ilmi, S. (2011). Melacak Term Korupsi dalam Al-Qur'an sebagai Epistemologi Perumusan Fikih Antikorupsi. *Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies Volume 1 Nomor 1 Maret 2011*, 2.
- Imam Syafi'i. (1938). *Ar-Risalah*. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi.
- Kamarulzaman, Y., Veeck, A., Mumuni, A. G., Luqmani, M., & Quraeshi, Z. A. (2015). *Religion, Markets, and Digital Media: Seeking Halal Food in the U.S*. *Journal of Macromarketing*, 36(4), 400–411. <https://doi.org/10.1177/0276146715622243>

- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *JIPSI: Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VI No. 1/Juni 2016* , 1-17.
- Rahim, A. (2019). Kepemimpinan Pendidikan Anti Korupsi dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Al Falah, Vol. XIX No. 1 Tahun 2019* , 211.
- Rauf, A. A. (2022). *Fahm-ul-Halal Versus Taqwa Industries: Investigating Ethical (Mis-) Conduct in Pakistan's Beverage Industry. Asian Journal of Management Cases, 0(0)*, 9728201221097768. <https://doi.org/10.1177/09728201221097769>
- Rusdiyanto, dkk. (2019). Good Corporate Governance: Teori dan Implementasinya di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sudiro. (2020). *Pemerintahan ang Bersih: Antara Asa dan Realita*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqih Empat Mazhab: Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil Aimmah*. Jeddah: Al-Haramain li ath-Thiba'ah wa an-Nasya wa at-Tawzi'. (Terj.) 'Abdullah Zaki Alkaf. (2012). Bandung: Hasyimi.
- Wibowo, E. A. (2022, Januari 25). Retrieved Februari 28, 2022, from <https://nasional.tempo.co/read/1553924/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-peringkat-96-dari-180-negara/full&view=ok>
- Yunus, N. R. (2006). Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah dalam Tata Kelola Pemerintahan Republik Indonesia. *Nur El-Islam, Volume 3 Nomor 1 April 2016* , 143-175.

**PENTINGNYA
KESADARAN LINGKUNGAN
SEBAGAI SALAH SATU
NILAI KEBUDAYAAN DALAM
KARYA SASTRA INDONESIA**

Venus Khasanah

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta

Teguh Prakoso

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Terbuka

Kesadaran akan pentingnya sikap menjaga keseimbangan alam kini mulai tumbuh. Pembicaraan berbagai isu tentang *ecolife* telah hadir dalam ruang-ruang terbuka. Masyarakat di beberapa kota di Indonesia sudah mulai terbiasa dengan tidak adanya lagi kantong belanja plastik. Beberapa hotel juga telah menerapkan kebijakan bahwa para tamu hanya disediakan tempat air minum isi ulang. Sebagai gantinya, disediakan banyak galon isi ulang dalam setiap lorong kamar. Air mineral kemasan botol juga turut ditiadakan. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi sebuah aktivitas yang diterima masyarakat sebagai pembiasaan. Era baru berbelanja di minimarket dan tata aturan minuman isi ulang di hotel menciptakan budaya baru yang bernilai positif.

Dalam dunia sastra, artikel yang ditulis Sardari (2020) memberikan pencerahan betapa pentingnya kesadaran ekologis (ekokritik) dalam kehidupan. Dengan objek *The Enchanted Bluff* karya Willa Cather, Sardari menyimpulkan bahwa melestarikan alam memang menjadi prasyarat untuk perlindungan umat manusia. Hal yang kurang lebih sama juga menjadi fokus penelitian Serrano (2020), Alvi, dkk (2019), dan juga Khan (2019). Dengan objek puisi, mereka memberikan satu pandangan yang kurang lebih sama bahwa pemaknaan puisi secara mendalam tidak hanya memberikan kesan bagi pembaca, tetapi juga menjadikan seorang pembaca mendalami kehidupan lingkungan alam yang ada di bumi.

Dalam konteks karya sastra Indonesia, khususnya novel *Di Kaki Bukit Cibalak* dan *Orang-Orang Proyek* karya Ahmad Tohari, pesan penyelamatan lingkungan tergambar dalam beberapa penggal ceritanya. Berbagai fenomena alam dirangkai menjadi sebuah latar yang menguatkan kisah yang disampaikan. Dalam novel *Orang-Orang Proyek* misalnya, kerusakan sebagian ekosistem alam karena pembangunan jembatan sungai Cibawor yang dilaksanakan pada musim hujan menjadi sebuah sorotan. Demikian juga dengan semakin berkurangnya habitat flora dan fauna akibat ekosistem yang terganggu di Bukit Cibalak, sebagaimana terlihat pada novel *Di Kaki Bukit Cibalak*. Pada kedua novel tersebut, narasi serba tahu sang pengarang hadir memberikan ulasan. Muaranya jelas, yakni pesan untuk memperhatikan keselarasan dan harmonisasi lingkungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelusuran lebih dalam atas pentingnya kesadaran alam sebagai salah satu nilai kebudayaan. Nilai kebudayaan yang dimaksud merujuk pada kebiasaan positif yang tumbuh di masyarakat, seperti membawa kantong belanja sendiri ketika berbelanja. Kesadaran tersebut adalah upaya menyelamatkan lingkungan, karena menyetujui penggunaan kantong belanja berbahan plastik berarti tidak sejalan dengan upaya menjaga

lingkungan. Sementara itu, objek kajian yang peneliti pilih adalah karya sastra novel, yakni *Di Kaki Bukit Cibalak* dan *Orang-Orang Proyek* karya Ahmad Tohari. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian ini berfokus pada kesadaran lingkungan sebagai nilai kebudayaan dalam dua novel karya Ahmad Tohari.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian strukturalisme genetik dengan pendekatan sosiologi sastra. Dalam melakukan analisis, peneliti juga menggunakan beberapa prinsip terkait dengan ekologi sastra. Relasi yang terbangun di antara ketiga hal tersebut dijumpai dengan metode dialektik (Faruk, 166-167).

Berkaitan dengan data-data yang digunakan, kedua novel Ahmad Tohari, yakni *Di Kaki Bukit Cibalak* dan *Orang-Orang Proyek* merupakan data primer. Sementara itu, yang menjadi data sekunder adalah beberapa hal yang berkaitan dengan struktur sosial yang melatarinya, pemikiran-pemikiran Ahmad Tohari, dan konstruksi-konstruksi yang terbentuk seperti kesadaran alam dan nilai kebudayaan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah mengungkap pandangan dunia Ahmad Tohari yang diperoleh melalui struktur karya yang ada. Setelah itu, peneliti menghubungkannya dengan struktur sosial yang melingkupi lahirnya karya tersebut. Dalam proses ini, pengintegrasian terhadap kesadaran lingkungan sosial sebagai nilai kebudayaan ditelusuri dengan bantuan ekologi sastra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai penelitian sosiologi sastra, penelusuran struktur karya guna menemukan pandangan dunia Ahmad Tohari menjadi analisis awal yang dilakukan. Oleh karena itu, sistematika artikel ini terbagi atas beberapa hal, yakni (1) struktur cerita *Di Kaki Bukit Cibalak* dan *Orang-Orang Proyek*, (2) pandangan dunia Ahmad Tohari, (3) struktur sosial yang melatarbelakangi lahirnya *Di Kaki Bukit Cibalak* dan *Orang-Orang Proyek*, dan (4) kesadaran alam sebagai salah satu nilai kebudayaan dalam *Di Kaki Bukit Cibalak* dan *Orang-Orang Proyek*.

Struktur Cerita Novel *Di Kaki Bukit Cibalak* dan *Orang-Orang Proyek*

1. Struktur Cerita Novel *Di Kaki Bukit Cibalak*

Sebagai produk subjek kolektif dan fakta kemanusiaan, figur-figur yang diteliti dalam novel *Di Kaki Bukit Cibalak* adalah Pambudi, Mbok Mus, Pak Dirga, Poyo, Mbok Ralem, Pak Barkah, Topo, Sanis, Pak Modin, Ayah Pambudi, Bu Runtah, Pak Camat, Bambang Sumbodo, Jirah, Eyang Wira, Akiat, Nyonya Wibawa (Oei Eng Hwa), Mulyani, Pendi Toba, Pak Danu, dan Hadi. Interaksi yang terjadi di antara mereka ditopang dengan kisah menarik dalam bingkai lingkungan-lingkungan yang melatarinya (alam, kultural, sosial, dan ideologis) sehingga memunculkan relasi-relasi oposisional.

a. Lingkungan Alam

Lingkungan alam dalam novel *Di Kaki Bukit Cibalak* adalah penggambaran pedesaan yang berbukit-bukit. Jalan-jalan setapak yang diselimuti belukar menghiasi beberapa lorong jalanan di desa tersebut. Penggambaran suasana ini diceritakan pada bagian awal novel *Di Kaki Bukit Cibalak*. Bukit Cibalak sendiri merupakan stereotip harmonisasi antara komunitas flora dan fauna yang ada di dalamnya (*Di Kaki Bukit Cibalak*, 2014: 67-69).

b. Lingkungan Kultural

Lingkungan kultural dalam *Di Kaki Bukit Cibalak* adalah kultur desa. Sebagaimana ciri khas masyarakat pedesaan, mereka memiliki perilaku yang dipengaruhi adat dan budaya yang ada, yakni Jawa. Mereka menghormati kepala desa dan tokoh masyarakat yang ada.

c. Lingkungan Sosial

Karena lingkungan kultural adalah desa, maka lingkungan sosial yang digambarkan dalam *Di Kaki Bukit Cibalak* adalah lingkungan sosial masyarakat pedesaan. Di antara mereka adalah kaum religius yang patuh pada ajaran Tuhan. Namun, ada pula yang masih percaya mistis.

d. Lingkungan Ideologis

Lingkungan ideologis dalam *Di Kaki Bukit Cibalak* adalah perpaduan Islam – Jawa. Dalam rangkaian cerita, komposisi antara Keluarga Pambudi dan Pak Modin yang muslim, berbaur dengan sebagian lagi yang masih percaya tahayul.

Berdasarkan lingkungan-lingkungan yang terbentuk, relasi oposisional kemudian hadir sebagai sebuah semesta imajiner dengan pendeskripsian sebagai berikut.

a. Oposisi Kultural

Oposisi kultural dalam novel *Di Kaki Bukit Cibalak* merupakan kultur religius-nonreligius. Kultur religius diwakili oleh Pambudi, sedangkan kultur nonreligius diwakili Pak Dirga (juga Poyo). Selain kultur tersebut, terdapat pula kultur desa-kota. Kultur ini lebih menggambarkan pada pola perilaku. Sikap yang ditunjukkan Pak Danu yang memamerkan parfum, misalnya, mewakili kultur kota. Sebaliknya, sikap-sikap para penderes yang terima begitu saja atas berita harga gula merah dari Mbok Sum. Keluguan sebagian besar dari mereka adalah karakter kultur desa.

b. Oposisi “Alamiah”

Oposisi alamiah yang dimaksud pada artikel ini adalah oposisi yang terjadi secara sewajarnya atau sebenarnya. Jadi, tidak merujuk pada kondisi penanda geografis. Pada novel *Di Kaki Bukit Cibalak* oposisi alamiah dapat dilihat pada sikap Pak Dirga yang berbeda dengan Pambudi. Berawal dari perselisihan keduanya, cerita menjadi menarik dan beberapa hal kemudian menimbulkan efek oposisi-oposisi lainnya.

c. Oposisi Sosial

Oposisi sosial novel *Di Kaki Bukit Cibalak* ditemukan pada berbagai peristiwa yang berujung pada perubahan pola perilaku. Oposisi tersebut diawali agitasi Pak Danu yang memamerkan parfum curian milik Akiat. Parfum itu menjadi simbolisasi perubahan bahwa parfum menjadi satu bagian kehidupan yang baru. Berawal dari parfum, perubahan pola pikir lainnya diceritakan, termasuk penggantian kerbau dengan mesin traktor sebagai pembajak sawah dan cara pandang warga Desa Tanggir yang mulai terbuka pasca insiden perseteruan Pambudi dengan Pak Dirga.

d. Oposisi Ideologi

Oposisi ideologi dalam *Di Kaki Bukit Cibalak* ditandai pada dua hal, yang muaranya pada karakteristik religius dan non-religius. Tatanan karakter religius ditunjukkan dengan kisah penceritaan yang menampilkan Pambudi dan juga Pak Modin yang disimbolkan dengan tugasnya sebagai penjaga tempat ibadah berupa surau.

e. Oposisi Manusia

Oposisi manusia dalam novel *Di Kaki Bukit Cibalak* ditemukan pada beberapa perilaku sebagai tercermin pada Pambudi dengan Pak Dirga, Bu

Runtah dengan Sanis, atau Nyonya Wibawa dengan Pambudi. Apa yang mereka lakukan menimbulkan stereotip hitam dan putih yang melahirkan harmonisasi. Tentu saja harmonisasi tersebut lahir jika perbedaan tersebut dimaknai sebagai keselarasan hidup manusia.

2. Struktur Cerita Novel *Orang-Orang Proyek*

Sebagai subjek kolektif dan fakta kemanusiaan, para figur yang diteliti pada novel *Orang-Orang Proyek* adalah Kabul, Pak Tarya, Dalkijo, Basar, Mbok Sumeh, Wati, dan beberapa tokoh lain seperti Wircumplung, Martasatng, dan Sawin. Interaksi yang terjadi di antara mereka melahirkan kisah cerita yang menarik sebagai kesatuan makna yang padu. Interaksi ini kemudian menandai hadirnya lingkungan-lingkungan sebagaimana yang diuraikan juga pada novel *Di Kaki Bukit Cibalak*:

a. Lingkungan Alam

Lingkungan alam novel *Orang-Orang Proyek* adalah lingkungan pedesaan. Di desa tersebut, mengalir sungai Cibawor. Tidak jauh dari sungai adalah tempat bermukim warga desa yang lurahnya bernama Basar. Lingkungan pedesaan itu digambarkan masih kaya akan flora dan fauna sehingga tiap kali memancing, Pak Tarya tak pernah pulang dengan tangan kosong.

b. Lingkungan Kultural

Lingkungan kultural dalam *Orang-Orang Proyek* mewakili kultur pekerja keras yang mengandalkan fisik. Sebagai pekerja, mereka berasal dari daerah yang beragam. Dari sisi domisili, mereka ada yang dari Batak, Madura, Jawa, dan Sunda. Dari sisi religius, mereka juga ada yang abangan. Heterogenitas mereka adalah simbol kebhinekaan dan mewakili heterogenitas yang ada.

c. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial novel *Orang-Orang Proyek* adalah simbolisasi kerasnya kehidupan. Bagi para pekerja proyek, tolok ukur mereka adalah bekerja sekeras-kerasnya agar target dapat selesai sesuai jadwal. Bagi para pemimpinnya, seperti Kabul, tekanan Dalkijo untuk mengikuti irama korupsi adalah tantangannya. Pengorbanan mereka berada pada tataran yang berbeda. Namun, muaranya tetap sama, yakni simbol kerasnya hidup.

d. Lingkungan Ideologis

Lingkungan ideologis novel *Orang-Orang Proyek* adalah ideologi Islam. Sentral cerita yang menjadi zona penceritaan berkuat pada perilaku

koruptif. Uniknya, perilaku curang mereka justru seperti hal biasa dan harus diikuti langgamnya. Dalam konteks yang demikian, melalui pandangan-pandangan yang berpusat pada profetisme, Pak Tarya, Kabul, dan Basar berdiskusi tentang pentingnya kesalehan sosial.

Berdasarkan lingkungan-lingkungan yang terdeskripsikan, muncullah relasi-relasi oposisional yang terbentuk. Relasi tersebut merupakan semesta imajiner yang terdiri atas hal-hal sebagai berikut.

a. Oposisi Kultural

Oposisi kultural dalam novel *Orang-Orang Proyek* merupakan kultur religius-nonreligius. Kultur religius diwakili Pak Tarya, Kabul, dan Basar. Sementara itu, kultur non-religius diwakili oleh Dalkijo dan kawan-kawan. Pemikiran-pemikiran di antara kedua kultur ini menggambarkan realitas dunia nyata.

b. Oposisi “Alamiah”

Pada novel *Orang-Orang Proyek*, oposisi alamiah dapat dilihat pada sikap perlawanan yang dilakukan Kabul ketika diminta Dalkijo menerima besi bekas untuk konstruksi pengecoran. Demikian juga dengan sikap Kabul yang menolak permintaan anak buah Dalkijo untuk meminta bantuan dana proyek jembatan untuk pembangunan masjid.

c. Oposisi Sosial

Oposisi sosial novel *Orang-Orang Proyek* ditemukan pada dua aktivitas. Aktivitas proyek menjadikan Kabul dan para pekerjanya berada status sosial yang berbeda. Namun, perbedaan tersebut dijumpai dengan sikap Kabul yang tetap berbaur dengan mereka pada saat istirahat dan juga menemani para pekerja bernyanyi bersama setelah mendapat upah di akhir pekan. Dalam aktivitas pertemanan, terdapat pula oposisi sosial yang menempatkan posisi Pak Tarya sebagai orang yang dituakan dengan Kabul-Basar sebagai pribadi yang lebih muda dari sisi spiritual. Status ini tidak menjadikan mereka terpisah karena sikap yang ditunjukkan Pak Tarya adalah mengayomi meski secara pendidikan Kabul dan Basar adalah sarjana.

d. Oposisi Ideologi

Oposisi ideologi dalam *Orang-Orang Proyek* ditandai dengan pandangan yang berafiliasi pada partai Golongan Lestari Menang. Ideologi ini mengarah pada orde baru yang selalu mengkambing hitamkan komunis sebagai senjata terakhir. Ketika Dalkijo berseteru dengan Kabul, sang atasan Kabul tersebut mengancam “bersih diri” Kabul. Bersih diri adalah istilah yang digunakan untuk menggiring opini tentang keterkaitan yang

bersangkutan dengan organisasi terlarang, yakni Partai Komunis Indonesia (PKI). Pemikiran tersebut berbeda dengan apa yang ada dalam pikiran Pak Tarya, Basar, dan tentu Kabul.

e. Oposisi Manusia

Oposisi manusia dalam novel *Orang-Orang Proyek* terdapat dalam skop yang makro sampai pada mikro. Dalam tataran mikro, cara pandang Martasatang dan Wircumplung tentang menghilangnya Sawin sangat menarik. Pemikiran mereka bahwa Sawin dijadikan tumbal beroposisi dengan sikap Kabul yang terpelajar. Dalam tataran makro, sikap Dalkjo dan Baldun yang selalu menghalalkan segala cara beroposisi dengan Kabul, Pak Tarya, dan Basar yang mengedepankan spiritual sebagai manifestasi kepatuhannya kepada Tuhan YME.

3. Pandangan Dunia Ahmad Tohari

Berdasarkan struktur cerita yang disampaikan, dapat diperoleh suatu pandangan bahwa Ahmad Tohari memiliki perhatian pada harmonisasi dan keselarasan dalam segala hal. Dalam konteks problematika yang terjadi antara Pambudi dengan Mulyani dalam novel *Di Kaki Bukit Cibalak*, misalnya, Ahmad Tohari berpikiran bahwa keduanya tidak dapat dipersatukan. Namun, harmonisasi tetap diberikan dengan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk menentukan pilihan hidup yang akan dilalui. Demikian juga terkait dengan perbedaan pandangan perihal sumbangan untuk masjid yang dimintakan oleh Partai GMS dalam novel *Orang-Orang Proyek*. Dalam kebuntuan yang terjadi antara Kabul, Basar, dan Pak Tarya, muncul ide dari Pak Tarya untuk memberikan sumbangan bukan dari sisa proyek jembatan Sungai Cibawor. Ide ini diikuti juga oleh Basar.

Dalam hal menjaga alam, pemikiran tentang kelestarian ekosistem juga sangat kuat. Pandangan-pandangan Ahmad Tohari tentang bahaya sampah plastik, kerusakan hutan, dan punahnya fauna di seputaran Bukit Cibalak dalam novel *Di Kaki Bukit Cibalak* menjadi keprihatinannya. Hal yang sama juga cara menanamkan pemahaman tentang kesehatan warga Desa Tanggir akan pentingnya kakus keluarga. Ahmad Tohari menyelipkan pesan bahwa membakar daun angšana kering juga dapat mendatangkan bahaya. Kebiasaan ini dilakukan sebagian masyarakat Desa Tanggir yang belum paham bahaya yang ditimbulkannya (*Di Kaki Bukit Cibalak*, 2014: 70).

Begitu pun dengan pembangunan jembatan Sungai Cibawor yang tidak dirancang dengan baik sebagaimana diceritakan pada novel *Orang-Orang*

Proyek. Pembangunan jembatan pada musim hujan jelas bukan keputusan yang bijak. Kerusakan alam akan terjadi dan hal itu juga berimbas pada terganggunya proses konstruksi akibat kesembronan tersebut.

4. Struktur Sosial yang Melatarbelakangi Lahirnya Novel *Di Kaki Bukit Cibalak* dan *Orang-Orang Proyek*

Sebagaimana karya-karya Ahmad Tohari yang lain, lingkungan pedesaan merupakan sumber inspirasi dalam bersastra. Hampir semua karya Ahmad Tohari selalu membicarakan kehidupan orang-orang desa dengan pelbagai persoalannya (lihat Yudiono, K.S., 2003: 8). Demikian juga dengan novel *Di Kaki Bukit Cibalak* dan *Orang-Orang Proyek*. Kedua novel tersebut juga mengisahkan kehidupan masyarakat pedesaan.

Berkenaan dengan lahirnya novel *Di Kaki Bukit Cibalak*, ketika karya itu lahir, yakni tahun 1978 sampai dengan penerbitan perdana tahun 1986, Indonesia mulai memasuki era modernisasi pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Di sisi lain, ketidakadilan dalam berbagai aspek mulai tumbuh. Kritik terhadap kesewenang-wenangan aparaturnegara hadir dalam bentuk yang berbeda. Simbolisasinya dipotret dengan latar belakang konflik antara kepala desa dengan warganya di Desa Tanggir. Visualisasi konflik diperkaya dengan perubahan zaman yang mulai terlihat, seperti penggunaan traktor sebagai alat pembajak sawah dan berbagai material rumah tangga yang berbentuk plastik. Dengan kata lain, struktur sosial yang melatarbelakangi lahirnya *Di Kaki Bukit Cibalak* telah mewakili semangat zaman yang ada. Kemajuan teknologi yang mulai tumbuh, disadari atau tidak, ikut juga memengaruhi kehidupan masyarakat Tanggir. Kegagalan mereka, salah satunya, divisualkan dengan “parfum” curian milik Akiat yang dipromosikan Pak Danu. Selain itu, mulai tumbuhnya kecintaan pada kemasan plastik selesai pakai juga menjadi episode selanjutnya.

Berkenaan dengan lahirnya novel *Orang-Orang Proyek*, dalam peristiwa yang diceritakan tahun-tahun tersebut, kejayaan orde baru masih sangat kuat. Meski terbit perdana tahun 2002, tetapi rentetan peristiwa digambarkan terjadi pada era 90-an. Kejayaan tersebut divisualkan dengan munculnya partai Golongan Lestari Menang yang saat itu sangat berkuasa, termasuk dalam urusan pembangunan jembatan sungai Cibawor. Perilaku koruptif tersebut dimulai dari penyusunan desain sampai dengan pembangunannya. Hal yang sama juga dapat ditemui dalam perilaku penanggung jawab proyek, Ir. Dalkijo.

Pesan ‘perlawanan’ dimunculkan melalui figur Kabul yang berkedudukan sebagai pemimpin lapangan proyek tersebut. Konflik di

antara keduanya menjadi menarik ketika Ahmad Tohari menghadirkan figur Pak Tarya. Pesan dan karakter Pak Tarya memberikan pencerahan dan di sisi itulah pesan-pesan lain diselipkan, termasuk pesan pentingnya kesalehan sosial. Bahkan, korban-korban politik Partai Komunis Indonesia terus disuarakan partai penguasa saat itu, Golongan Lestari Menang, bahwa mereka yang tidak mendukung proyek negara dianggap keturunan komunis.

Kontek struktur sosial tersebut menggambarkan suasana kebatinan yang saat itu memang dirasakan. Pembangunan gencar dilakukan, tetapi intimidasi dan perilaku koruptif terus terjadi. Bahkan, untuk urusan renovasi tempat ibadah pun menggunakan sarana tersebut. Karena alasan yang tidak logis, pembangunan tiang pancang pun dilakukan pada saat musim penghujan. Efek yang ditimbulkan jelas merusak ekosistem di sekitar sungai Cibawor. Aliran sungai dengan volume tinggi terhambat tiang pancang yang tertancap di sungai Cibawor. Akibatnya, terjadi erosi di sekitar pembangunan jembatan yang sedang dipersiapkan. Alih-alih sebagai kado ulang tahun partai Golongan Lestari Menang, justru imbas kerusakan alam terjadi di situ.

5. Kesadaran Alam sebagai Salah Satu Nilai Kebudayaan dalam Novel *Di Kaki Bukit Cibalak dan Orang-Orang Proyek*

Menurut E.B Taylor (Hashina, 2022), kebudayaan merupakan pengetahuan kompleks yang mencakup kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan berbagai kemampuan serta kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut, nilai kebudayaan adalah sesuatu yang berbentuk nilai yang telah tertanam dan disepakati oleh masyarakat berupa kebiasaan sebagai bentuk perilaku dan tanggapan terhadap sesuatu keadaan sesudah atau sebelum terjadi (Ramadinah, dkk, 2022). Atas dasar tersebut kesadaran alam sebagai salah satu nilai kebudayaan dalam novel *Di Kaki Bukit Cibalak dan Orang-Orang Proyek* pada artikel ini merujuk pada pesan kesadaran alam sebagaimana yang disampaikan Ahmad Tohari pada kedua novelnya tersebut. Pesan ini ditemukan setelah peneliti melakukan analisis atas dasar teori strukturalisme genetik Lucien Goldmann sehingga genesis munculnya sikap kesadaran alam dapat diketahui. Oleh karena itu, setakat dengan hal tersebut, terkait pandangan dunia dan struktur sosial yang melingkupinya, pesan tentang kesadaran alam hadir dalam novel *Di Kaki Bukit Cibalak dan Orang-Orang Proyek* dapat diidentifikasi.

Pada novel *Di Kaki Bukit Cibalak*, perubahan pola pikir masyarakat Tanggir tentang kepedulian lingkungan menjadi keprihatinan Ahmad Tohari. Pada satu sisi, modernisasi adalah hal yang tidak dapat dihindari sehingga kerbau-kerbau di sawah berganti dengan mesin traktor. Di sisi yang lain, gaya hidup masyarakat mulai mengarah pada hedonisme. Parfum yang diperkenalkan Pak Danu adalah momen penting untuk simbolisasi sikap materialistis tersebut. Pada bagian selanjutnya, kesukaan sebagian masyarakat pada penggunaan plastik sekali pakai, adalah ancaman yang nyata. Demikian juga berbagai kebiasaan lainnya. Keprihatinan Ahmad Tohari diungkapkan dengan lugas pada kecintaan para masyarakat Tanggir akan barang plastik yang tentu memiliki kelemahan karena kesulitan dalam daur ulang (*Di Kaki Bukit Cibalak*, 2014: 7). Selain itu, secara menarik Ahmad Tohari juga memberikan wawasan tentang pentingnya jamban keluarga (*Di Kaki Bukit Cibalak*, 2014: 111). Kebiasaan masyarakat Tanggir dalam hal ini belum selaras dengan bualan Pak Danu tentang parfum.

Khusus tentang kebiasaan masyarakat Tanggir yang suka membakar daun angkana kering, Ahmad Tohari juga memberikan argumen ilmiah. Bahkan, dalam bagian tersebut diceritakan tentang keterlibatan mahasiswa institut pertanian di Bogor (*Di Kaki Bukit Cibalak*, 2014:70). Selain hal-hal tersebut, habitat fauna di Bukit Cibalak yang sudah mulai berkurang juga menjadi keprihatinan sang pengarang.

Pada novel *Orang-Orang Proyek*, musibah banjir bandang menjadi awal pembuka yang menarik sebagaimana kutipan berikut ini:

“Pagi ini sungai Cibawor kelihatan letih. Tiga hari yang lalu hujan deras di hulu membuat sungai ini banjir besar.... Cibawor seperti sedang digelontor dari hulu dengan segala macam sampah, dari sandal karet, bekas botol plastik, batang pisang, sampai batang mahoni” (*Orang-Orang Proyek*, 2019:5).

Kutipan tersebut menggambarkan bahwa ekosistem pedesaan telah berubah. Adanya sampah sandal karet bekas, botol plastik, sampai batang-batang pohon yang ikut mengisi arus sungai adalah bukti ketidakselarasan alam yang nyata. Hal itu menunjukkan terdapat ketidakseimbangan karena penebangan, atau hal yang sifatnya konsumtif sebagaimana yang diidentikkan dengan sampah sandal dan botol plastik. Meski demikian, dalam menanggapi fenomena tersebut, Ahmad Tohari berusaha mengharmoniskannya dengan suasana ketenangan di bawah pohon Mbulu, sebuah pohon yang masih kokoh bertahan karena tumbuh di tanah cadas dan terlindung batu-batu besar. Itulah tempat yang nyaman bagi para pemancing dan menjadi hinggapnya burung emprit (*Orang-Orang Proyek*, 2019:6).

Berkaitan dengan proyek yang dipimpin Kabul, pembangunan jembatan Sungai Cibawor juga terkena dampak banjir bandang. Tiang pancang jembatan menjadi miring dan itu berarti pekerjaan konstruksi dasar harus diulang. Peristiwa ini menarik karena pembangunan itu mengabaikan harmonisasi alam. Pembangunan dilaksanakan dengan perhitungan yang tidak matang, yaitu dilaksanakannya saat musim hujan. Miringnya konstruksi jembatan sungai Cibawor adalah siklus negatif pembangunan yang mengabaikan analisis secara mendalam dengan alasan kejar tayang. Dari sisi kualitas material, kongkalikong yang saat itu dianggap biasa dipatahkan oleh kegigihan Kabul sebagai pemimpin proyek. Pembangunan jembatan diskenariokan harus selesai ketika perayaan ulang tahun partai Golongan Lestari Menang yang akan dipusatkan di area tersebut. Akibatnya, keselarasan alam pun diterabas.

Perilaku-perilaku yang digambarkan tersebut, baik pada novel *Di Kaki Bukit Cibalak* maupun *Orang-Orang Proyek*, merupakan deretan sikap yang implementasinya mengarah pada kesadaran alam. Jika itu dilaksanakan dan menjadi salah satu nilai kebudayaan, maka segala keselarasan hidup akan terjadi. Ekosistem yang ada adalah sebuah lingkaran yang berputar dan membentuk harmonisasi sebagaimana pandangan dunia Ahmad Tohari.

PENUTUP

Berdasarkan analisis yang dilakukan, setidaknya terdapat beberapa catatan yang penjelasannya adalah sebagai berikut.

Pandangan dunia yang diperoleh melalui struktur cerita novel *Di Kaki Bukit Cibalak* dan *Orang-Orang Proyek* merujuk pada pemikiran Ahmad Tohari tentang harmonisasi dan keselarasan hidup. Aktualisasi atas pandangan tersebut mengacu juga pada pentingnya keselarasan alam. Keselarasan alam yang tercipta dapat menjadi salah satu nilai kebudayaan yang memberikan peran kepada masyarakat untuk terlibat aktif di dalamnya.

Jika dikaitkan dengan strukturalisme genetik, kelahiran novel *Di Kaki Bukit Cibalak* dan *Orang-Orang Proyek* berada pada bingkai struktur sosial yang saat itu memang terjadi di masyarakat. Dalam novel *Di Kaki Bukit Cibalak*, perubahan zaman yang tidak sebanding dengan perubahan sikap masyarakat Desa Tanggir menjadi contoh bahwa beberapa kebiasaan mereka ternyata harus berhadapan dengan zaman. Perubahan tersebut membuat mereka gagap sehingga efek rusaknya lingkungan menjadi pertarungan. Sementara itu, pada novel *Orang-Orang Proyek*, euforia moto pembangunan ternyata harus mengabaikan lingkungan. Karena

kepentingan politik yang sesaat, kerusakan alam menjadi pertaruhan. Apa yang melatarbelakangi lahirnya *Orang-Orang Proyek* adalah bentuk narasi pencerahan agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

Keselarasn alam sebagai salah satu nilai kebudayaan dalam novel *Di Kaki Bukit Cibalak* dan *Orang-Orang Proyek* adalah bentuk edukasi dengan cara yang berbeda. Dalam kajian-kajian terkini, bahasan ini menjadi satu kupasan yang menarik tentang studi ekokritik. Jelasnya, sebagai pengemban misi *dulce et utile*, karya sastra Indonesia memiliki fungsi yang bermartabat. Melalui *Di Kaki Bukit Cibalak* dan *Orang-Orang Proyek*, terbukti bahwa fungsi sastra yang menyenangkan dan mendidik dapat dibuktikan serta diderivasikan dalam wujud yang lebih menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvi, Amateulhafeez dan Amrah Abdul Majid. (2019). "The Philosophy of Nature in the Poetry of Gulman Sarwar Yousuf and William Wordsworth: A Comparative Ecocritical Analysis" dalam *GEMA Online: Journal of Language Studies*, Volume 19 (4). November 2019. <https://doi.org/10.17576/gema-2019-1904-17>
- Faruk, H.T. (2017). *Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasina, Nika Halida. (2022). "Pengerian Kebudayaan, Arti, Wujud, dan Unsur-Unsurnya" dalam <https://tirto.id> Kamis 23 Juni 2022 12.50 WIB. <https://tirto.id/pengerian-kebudayaan-arti-wujud-dan-unsur-unsurnya>
- Khan, Jalal Uddin. (2019). "Green Romantic Tradition and Ecocriticism" dalam *International Journal of Linguistics, Literature and Translation (IJLLT)*, Vol 2, Issue 4, DOI: 10.32996/ijllt.2019.2.4.11. ISBN 2617-0299 <https://www.ijllt.org>
- Ramadinah, Desy, Farid Setiawan, Sintia Ramadanti, dan Hasanah Sulistyowati. (2022). "Nilai-Nilai Kebudayaan dan Upaya Pembinaan Aktivitas Keagamaan bdi MTs N 1 Bantul" dalam *PANDAWA: Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, Volume 4, Nomor 1 Januari 2022:84-95. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pandawa>
- Sardari, Alireza. (2020). "Rhe River Exist, Therefore I Am: Ecocriticism, Nature and Human Nature on Willa Cather's *The Enchanted Bluff*" dalam *Rainbow: Journal of Literaure, Linguistics and Cultural Studies*, Vol. 9 (2) 2020. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/rainbow>
- Serrano, Leonor Maria Martinez. (2020). "The fragility of a more-than-human world: Ecological awareness in the poetry of Robert Bringhurst" dalam *Journal of Postcolonial Writing*, DOI: 10.1080/17449855.2020.1766267. Published 28 May 2020. <https://doi.org/10.1080/17449855.2020.1766267>
- Tohari, Ahmad. (2014). *Di Kaki Bukit Cibalak* (cetakan Keempat). Jakarta: PT Gramedia.
- _____. (2019). *Orang-orang Proyek* (cetakan kelima). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yudiono, K.S. (2003). *Ahmad Tohari: Karya dan Dunianya*. Jakarta: Grasindo.

**PEMAHAMAN
PENDIDIKAN DEMOKRASI
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN
KESADARAN BERPOLITIK**

*Sri Hudiarini, Galuh Kartiko
Hudriyah Mundzir, Moh Sinal*

UPT MKU Politeknik Negeri Malang

A danya kekeliruan paham tentang demokrasi dan nilai-nilai demokrasi yang seringkali terjadi di Indonesia, bahwa demokrasi merupakan ajaran tentang kebebasan yang seluas-luasnya, telah menimbulkan ketidaknyamanan, baik itu berupa tindakan kekerasan, perusakan fasilitas umum, konflik horizontal dan vertikal yang mengatasnamakan kebebasan. Selain itu banyak masyarakat yang masih tidak mengerti dan mengamalkan perilaku demokrasi secara benar sehingga akan berpengaruh pada tingkat partisipasi politik dari warga masyarakat.

Ketika kita berbicara masalah demokrasi tidak akan terlepas begitu saja dengan masalah politik yang ada di negeri ini. Dalam pandangan kaum muda, politik bukanlah jalan untuk memperjuangkan kebaikan bersama, keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan. Banyak pandangan yang mengatakan bahwa politik merupakan cara untuk merebut kekuasaan dan sarana memperkaya diri semata. Memang sulit untuk menghindari persepsi negatif di negeri ini. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus korupsi, penyelewengan kekuasaan, perilaku tidak etis dari politisi, serta beberapa hal negatif lainnya dari dunia politik yang dapat kita lihat secara nyata di segala media. Tidak sedikit drama dari para pelaku politik yang muncul di publik, sehingga membuat anak muda menjadi enggan berpolitik. Berangkat dari opini tersebut, terbersit untuk berpikir kembali akan pentingnya upaya untuk menumbuhkan partisipasi politik. Sudah sepantasnya anak muda membuka wawasan politik agar segala opini publik yang diberikan terkait proses politik tidak diterima begitu saja. Perlu upaya melihat sisi lainnya, sebab satu suara dalam pemilihan umum akan menentukan arah bangsa ini nantinya. Memilih bukanlah hal yang mudah, namun tidak memilih bukanlah sikap yang bijak. Anak muda juga memiliki peran politiknya. Sebagai mahasiswa, hal ini perlu dipahami agar mereka tidak mudah terombang ambing atau hanya dimanfaatkan belaka. Maka dari itu, perlu kiranya memasukan pendidikan demokrasi pada kaum muda secara intensif agar kesadaran politik yang tinggi dan demokrasi dalam proses politik terwujud. Hal ini dirasa penting bagi anak muda untuk diberikan wawasan dan pengajaran yang berfungsi mencapai kebijakan bersama karena mereka adalah generasi pemilih di masa yang akan datang. Pendidikan sangat berperan dalam memberikan pengetahuan tentang pentingnya politik dan partisipasi politik bagi generasi kedepan. Partisipasi politik mendorong setiap individu untuk bertindak menegosiasikan kepentingan masing-masing agar kemudian melahirkan kesepakatan bersama tanpa merugikan pihak manapun. (Annisah NZ, tt)

Di samping itu, penafsiran demokrasi akan kebebasan yang berlebihan dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan

penyimpangan terhadap norma yang ada di masyarakat. Demokrasi yang sebenarnya adalah seluruh masyarakat dapat menyalurkan aspirasi mereka tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari pihak manapun. Sebab, demokrasi tidak dapat terjadi tanpa perilaku yang demokratis dari masyarakat. Melalui Lembaga Lembaga pendidikan, khususnya materi Pendidikan, demokrasi diharapkan dapat memecahkan permasalahan hidup, untuk kemudian mengantisipasi terjadinya perubahan dan kemajuan di hari-hari mendatang. Pendidikan demokrasi yang merupakan cakupan dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan akan membina dan mengembangkan pengetahuan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan khususnya di bidang politik, guna meningkatkan kesadaran dan juga partisipasi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari permasalahan di atas, penulis akan membahas mengenai arti penting pemahaman pendidikan demokrasi bagi mahasiswa Polinema sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dalam berpolitik.

METODE

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang tujuannya untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu peristiwa, keadaan, dan objek, baik orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik menggunakan angka - angka maupun bisa juga dengan memakai kata-kata (Punaji: 2010).

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011: 73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang berasal dari hasil pengamatan di kampus dan pengalaman peneliti sebagai pengajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta data sekunder dilakukan dengan pendekatan *library research* menggunakan literatur atau kepastakaan baik berupa buku, catatan, dokumen, jurnal dan laporan hasil penelitian sebelumnya.

Langkah yang paling utama dalam penelitian adalah teknik atau cara pengumpulan data, karena pada dasarnya tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Hal ini bisa dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber dan juga cara (Sugiyono, 2015: 137). Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data menggunakan *triangulasi*

atau gabungan. Selanjutnya, bila dilihat dari cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, yaitu teknik yang mendasar dalam penelitian dan dilakukan dengan pengamatan yang jelas, rinci, lengkap, dan sadar tentang perilaku individu sebenarnya di dalam keadaan tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu investasi, hal ini dikarenakan hasilnya tidak dapat kita ketahui secara langsung dengan cepat. Menurut Nadiroh, (2015:263) pembelajaran yang terdapat dalam Pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan di pendidikan tinggi dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan dimana bertujuan untuk menumbuhkembangkan budaya yang demokratis, keterampilan, dan kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam pengambilan keputusan secara rasional pada diri peserta didik. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi harus mampu menghasilkan peserta didik yang berfikir kritis dan bertindak demokratis yang cakupan materinya adalah segala hal yang ada dan berkaitan dalam kehidupan warga masyarakat sehingga akan menampilkan realita atau kenyataan yang memang benar-benar hidup dalam kehidupan masyarakat, pemerintahan maupun politik.

Maka daripada itu, *outcome* dari Pendidikan Kewarganegaraan ini selalu berkaitan dengan pengetahuan, perilaku, sikap mental, nilai yang menjunjung tinggi demokrasi sehingga akan menjadi warga masyarakat yang siap selalu menjaga integritas bangsa untuk terwujudnya negara yang demokratis, tangguh, dan sejahtera.

Dengan memahami latar belakang Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, diharapkan pelaksanaan Pendidikan kewarganegaraan dapat dipertanggungjawabkan. Alasannya adalah pembelajaran tersebut memuat paradigma pendidikan demokrasi secara sistematis dengan perkembangan *civic intelligence, civic participation and civic responsibility* dari "*civic education*" yang merupakan wahana pendidikan demokrasi yang diharapkan dapat menghasilkan manusia berkualitas dengan keahlian profesional serta keberadaban khas Pancasila. (Nadiroh : 2015)

Pendidikan demokrasi perlu untuk diterapkan di Lembaga-lembaga pendidikan dalam rangka meningkatkan kemelekakan masyarakat dalam berpolitik atau literasi politik. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Literasi Politik atau *political literacy* mempunyai makna sebagai suatu pemahaman atau pengetahuan dari warga negara mengenai proses dan isu-isu politik yang berkembang, dimana pemahaman ini yang

akan memungkinkan setiap warga masyarakat dapat secara efektif melaksanakan perannya sebagai warga negara. Dengan demikian, seperti dikemukakan Heryanto dalam Bakti (2012:109), literasi politik bukan hanya sebagai konsep normatif semata, melainkan meliputi perpaduan antara pengetahuan, skill dan sikap politik. (Bambang Yuniarto, 2020)

Menurut Sigit Kusrahmadi, adanya pendidikan demokrasi adalah untuk melahirkan “budaya demokrasi baru” dalam rangka untuk mewujudkan tatanan demokrasi yang lebih ideal. Sehingga demokrasi itu tidak hanya sekedar dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ataupun sekedar partisipasi langsung dari rakyat dalam pengambilan keputusan. Demokrasi seharusnya menyangkut suatu kondisi yang kondusif untuk menanamkan nilai nilai positif dari pendidikan yang nantinya akan dijadikan sebagai harapan atau cita cita. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya fokus merujuk pada kondisi realitas tatanan yang sudah ada, namun seharusnya mampu untuk melakukan inovasi yang baru untuk kemajuan dan perkembangan dari demokrasi itu sendiri. Dalam arti lebih spesifik, hal ini bisa diartikan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar terkait perubahan proses sosialisasi dari demokrasi dalam masyarakat sehingga mereka memahami sistem demokrasi yang ideal dan akan diwujudkan secara nyata dalam kehidupannya.

Kesadaran ini adalah suatu potensi seseorang atau kelompok yang mencakup aspek pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap demokrasi. Oleh karena itu, adanya kesadaran seseorang terhadap demokrasi tampak dari sikap dan tingkah lakunya, yang dalam diri seseorang memiliki tingkatan yang berbeda-beda (Bambang: 2020). Kesadaran politik masing-masing individu memiliki tiga aspek. *Pertama*, aspek kognitif, yaitu memahami peran lembaga politik, pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara, serta kepentingan dan keterpaparan politik. *Kedua*, Aspek afektif yang terdiri dari sikap terhadap perolehan hak dan kewajiban warga negara, kesetiaan kepada negara, keterkaitan antara budaya dan identitas dengan sikap politik. *Ketiga*, aspek psikomotor yang terdiri atas kemampuan menjalankan hak dan kewajiban warga negara, dan kemampuan menghadapi perubahan, dan kemampuan mengatasi problematika/masalah persatuan bangsa.

Setidaknya mahasiswa harus berpartisipasi aktif dan tidak golput saat pemilu berlangsung, karena suara mereka sangat penting dalam memilih pemimpin yang mungkin bisa berdampak baik untuk negara. Tidak berpartisipasi dalam pemilihan adalah pemborosan hak pilih. Berdasarkan pendapat tersebut, muncul refleksi baru tentang pentingnya partisipasi politik bagi terwujudnya demokrasi politik. Sudah sepatutnya anak muda

membuka wawasan politik dan memastikan opini publik tentang proses politik sehingga tidak diterima begitu saja.

Sebagai mahasiswa, perlu dipahami mengenai demokrasi dan politik agar tidak mudah terpengaruh, terprovokasi, atau dimanfaatkan. Oleh karena itu, pendidikan politik bagi kaum muda perlu dilakukan secara intensif untuk memastikan kesadaran politik dan demokrasi yang tinggi diwujudkan dalam proses politik. Pendidikan politik penting bagi kaum muda karena kaum muda adalah generasi pemilih berikutnya. Pembekalan pendidikan kewarganegaraan sangat diperlukan untuk membekali generasi muda dengan wawasan dan pelajaran politik yang akan digunakan sebagai dasar untuk mencapai kebijakan bersama. Pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam mengkomunikasikan pengetahuan tentang politik dan pentingnya partisipasi politik kepada generasi mendatang. Pendidikan politik dapat dilakukan melalui media sosial, karena penyebarannya lebih cepat daripada surat kabar. Hal ini disebabkan karena media sosial banyak digunakan oleh kaum muda dan kebanyakan orang merasa sulit untuk membaca informasi dari surat kabar dan buku.

Partisipasi politik sangat erat kaitannya dengan kesadaran. Semakin banyak orang yang sadar bahwa dirinya berada di bawah seorang pemerintah, semakin mereka menuntut suara dalam pemerintahan. Secara umum, dalam demokrasi seperti Indonesia, semakin banyak peserta, semakin baik. Di sisi lain, partisipasi yang rendah umumnya dipandang sebagai pertanda buruk, karena dapat diartikan tidak memperhatikan masalah pemerintah.

Menurut Akram dan Marsh (2018), partisipasi politik memiliki ciri-ciri utama, *pertama* yaitu partisipasi politik pada awalnya dipahami sebagai suatu aktivitas atau tindakan. *Kedua*, partisipasi politik bersifat sukarela dan tidak diwajibkan oleh elit kelas penguasa atau hukum tertentu. *Ketiga*, partisipasi mengacu pada kegiatan orang-orang sesuai dengan perannya sebagai warga sipil atau sipil dalam politik. *Keempat*, partisipasi politik tidak hanya relevan dengan pemerintahan, politik, atau negara, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas, artinya, tidak terbatas pada fase atau wilayah tertentu. Tingkat partisipasi politik sebagai salah satu wujud peran warga negara disebabkan oleh beberapa faktor berupa tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan, aktivitas masyarakat, peran pejabat pemerintah, pengaruh kaum intelektual, dan konflik antar pemimpin politik.

Howard menegaskan apabila dikehendaki tercapainya luaran pendidikan sebagai warga negara yang baik maka kompetensi kewarganegaraan yang terdiri atas pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) perlu diintegrasikan ke dalam praktik pendidikan secara terencana sejak pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi (Stokamer, 2013).

PENUTUP

Salah satu metode yang cukup mendasar dalam mengikuti kemajuan dan reformasi adalah melalui pendidikan. Pentingnya pendidikan demokrasi bagi mahasiswa tidak terlepas dari peran penting mahasiswa itu sendiri dalam sosial politik. Pendidikan demokrasi yang merupakan bagian dari materi Pendidikan Kewarganegaraan dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki keterampilan pribadi dan sosial sehingga dapat menjadi warga negara yang baik (*good care* atau *good citizen*).

Sebagai agen perubahan, mahasiswa perlu memiliki kesadaran politik. Dengan tingkat kesadaran politik yang tinggi, mahasiswa menyadari posisinya dalam tatanan kehidupan bernegara, yang akan semakin memperkuat sistem demokrasi negara.

Upaya peningkatan kesadaran berpolitik ini dilakukan dalam pembelajaran pendidikan demokrasi yang memuat aspek materi tentang penanaman nilai moral yang menuntun peningkatan kesadaran warga Negara tentang arti penting dari demokrasi, politik dan hak-hak warga negara, dan hal ini menggunakan pendekatan pembelajaran yang mengkorelasikan antara materi belajar dengan realita dalam kehidupan.

Pendidikan demokrasi yang diberikan kepada generasi penerus merupakan salah satu solusi alternatif untuk mengantisipasi terjadinya konflik masa depan di Indonesia. Penanaman nilai demokrasi, diharapkan akan mampu meningkatkan kesadaran politik mahasiswa tentang kedudukannya sebagai warga negara yang baik, sehingga akan mampu memahami dan menjawab setiap permasalahan yang dihadapi bangsa dan dapat membangun kehidupan politik bangsa yang sehat dan konsisten sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah NZ dkk, *Meningkatkan Kesadaran Politik di Kalangan Anak Muda* dalam file:///D:/PER%20SEMESTER/Prosiding%2010%20juli/Literatur%20prosiding%20dari%20kompen/jawaban%201%20Meningkatkan%20Kesadaran%20Politik%20di%20Kalangan.pdf
- Akram, S., & Marsh, D. (2018). What is “Political” Participation. *Democratic Theory*, 5(2), 99–107. <https://doi.org/10.3167/dt.2018.050208>
- Bambang Yuniarto, 2020, *Membangun Kesadaran Demokrasi Melalui Pendekatan Kontekstual Pada Pembelajaran Pendidikan KWN*, EDUEKSOS : Jurnal Pendidikan Sosial dan Ekonomi p-IISN: 2252-9942 e-ISSN: 2548-5008, vol 8 no.1
- A'rafiyah, Nisa dkk, 2019, *Hubungan Pengetahuan Kewarganegaraan Dengan Partisipasi Politik Mahasiswa The Correlation Of Civic Knowledge Towards Political Participation*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 4, Nomor 2, Hal. 361-367 ISSN: 2528-0767 (p) dan 2527-8495 (e)<http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>
- Nadiroh, 2015, *Membangun Masyarakat Demokrasi*, Trihayu: *Jurnal Pendidikan Ke-SD-an Vol. 2*, Nomor 1, hlm. 263-266
- Punaji, Setyosari, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pengembangan*, Jakarta, Kencana
- Stokamer, S. (2013). Pedagogical Catalysts of Hubungan pengetahuan kewarganegaraan dengan ... 367 Civic Competence : The Development of a Critical Epistemological Model for Community-Based Learning. *Journal of Higher Education Outreach and Engagement*, 17(1), 113–122.
- Sigit Dwi Kusrahmadi, Pentingnya Pendidikan Demokrasi Dalam Mewujudkan Masyarakat Sipil (Civil Society) dalam <https://adoc.pub/pentingnya-pendidikan-demokrasi-dalam-mewujudkan-masyarakat-.html>
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya

**PERSPEKTIF
PENDIDIKAN KARAKTER
DALAM NILAI-NILAI PANCASILA
MENUJU PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN**

Izuddinsyah Siregar

AP3KnI Wilayah Sumatera

Salmah Naelofaria

Universitas Negeri Medan

Hal yang sangat pokok mendasar dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah karakter. Jika karakter hilang, sebuah bangsa akan kehilangan segalanya. Billy Graham mengatakan: *“ketika kehilangan kekayaan, seseorang tidak kehilangan apa-apa. ketika kehilangan kesehatan, seseorang kehilangan sesuatu, dan ketika kehilangan karakter, seseorang kehilangan segalanya”*.

Sebuah karakter tidak datang dengan sendirinya. Ia harus dibangun dan diatur untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang bermartabat. Usaha memperoleh karakter perlu diwujudkan melalui langkah-langkah tertentu. Pendidikan merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam membangun sebuah karakter.

Pengembangan pendidikan karakter dan kepribadian pada peserta didik bertujuan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi peserta didik. Pendidikan karakter yang terintegrasi dalam proses pembelajaran dilakukan dengan menginternalisasikan nilai-nilai luhur pada perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila sebagai ideologi bangsa, dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan pemersatu bangsa perlu diajarkan kepada peserta didik sejak dini. Hal ini dikarenakan Pendidikan Pancasila memuat nilai-nilai karakter Pancasila yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan Pancasila berisi elemen Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pendidikan karakter yang digali dari nilai-nilai Pancasila terdapat fakta, konsep, prinsip, dan tata cara yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar kehidupan sebagai hubungan antara pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral, dalam membentuk karakter generasi muda yang diterapkan dalam kehidupan peserta didik baik dalam keluarga, masyarakat, dan negara.

Tercapainya tujuan pendidikan karakter berarti tercapai pendidikan berkualitas sebagai salah satu poin dari tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). *Education for Sustainable Development (ESD)* atau pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan adalah sebuah konsep yang mengacu pada semua pengajaran, pembelajaran, dan pengembangan kapasitas yang berupaya mengembangkan warga negara agar dapat hidup lebih berkelanjutan. Pendidikan berkelanjutan berfokus pada proses pembelajaran dan lingkungan belajar dengan menumbuhkan kualitas dan kompetensi yang dibutuhkan oleh orang lain sebagai kontribusi pada kehidupan makhluk hidup berikutnya.

Dengan demikian, pendidikan dalam sistem pembangunan berkelanjutan merupakan pondasi utama yang dapat dikembangkan melalui pendidikan karakter yang relevan dengan nilai-nilai Pancasila, dalam rangka membangun negara yang berkarakter dinamis, inklusif, dan adaptif yang didasarkan pada tiga pilar; sosial, lingkungan dan ekonomi dengan mengintegrasikan nilai-nilai yang melekat dalam pembangunan berkelanjutan ke dalam semua aspek dan tingkat pembelajaran.

PEMBAHASAN

1. Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang berguna untuk membangun karakter setiap individu yang dapat memberikan manfaat, baik untuk individu itu sendiri maupun lingkungan masyarakat sekitarnya.

Pendidikan karakter juga merupakan pendidikan yang menanamkan nilai karakter, meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan tindakan untuk melakukan nilai-nilai positif (Omeri, 2015).

Pendidikan karakter dapat diwujudkan melalui dunia pendidikan yang dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter pada peserta didik, sehingga mereka memiliki dan mampu menerapkan nilai-nilai karakter dalam dirinya, dengan tujuan agar menjadi anggota masyarakat atau warga negara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif (Ananda, 2012).

Sebagai salah satu unsur yang kuat dalam terciptanya negara atau bangsa yang kuat, setiap individu harus memiliki karakter yang baik. Menurut Lickona (1992) seseorang dikatakan memiliki karakter yang baik apabila mereka mengetahui hal-hal baik (pengetahuan moral), memiliki ketertarikan terhadap hal-hal baik (perasaan moral) dan melakukan tindakan baik (tindakan moral).

Untuk itu seorang warga negara yang berkarakter tentunya dapat mengerti, memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang membuat warga negara tersebut diterima serta dapat hidup dengan baik di tengah lingkungan keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa. Nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai objek enkulturasi dalam pendidikan karakter pada semua lingkungan dan jenjang pendidikan di Indonesia.

2. Pendidikan Karakter dalam Nilai-nilai Pancasila

Di Indonesia, mata kuliah atau mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok bidang studi yang diajarkan dengan tujuan agar peserta didik memiliki karakter bangsa Indonesia.

Adapun tujuan dari pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan adalah sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mewujudkan generasi yang cerdas dan mandiri dengan karakteristik Pancasila.

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Agar nilai-nilai Pancasila tetap kokoh, diperlukan pengokohan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga jenjang perguruan tinggi. Hal tersebut dapat diupayakan dengan mempelajari Pancasila, kewarganegaraan, dan pendidikan karakter. Hal tersebut telah dilakukan di berbagai jenjang pendidikan dengan dimuatnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila.

Menurut Dariatun dan Daryanto (2013) pendidikan karakter dapat menumbuhkan sikap bangsa yang tangguh, bermoral, toleran, berakhlak mulia, berjiwa politik, yang berorientasi pada pengetahuan teknologi, yang semuanya dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pendidikan di sekolah juga harus menekankan pada penerapan nilai-nilai Pancasila yang telah dipelajari melalui Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Selain itu, sekolah juga harus menanamkan nilai toleransi dan cinta tanah air. Sekolah memiliki berkewajiban untuk memberikan pendidikan moral agar peserta didik tidak menyerap hal negatif yang dapat mengancam ketahanan bangsa Indonesia. Karena dalam kenyataannya banyak peserta didik yang terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif, seperti pergaulan bebas, narkoba, minuman keras, seks bebas, dan hal negatif lainnya yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia (Herlinaa dan Dewi, 2021).

Sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat yang di dalamnya termaktub lima sila yang saling berkaitan dan tak terpisahkan dan memiliki esensi yang utuh. (Rahayu, 2013). Meskipun dalam setiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya, namun kesemuanya itu merupakan suatu kesatuan yang sistematis yang tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan sila-sila lainnya. (Kaelan dan Achmad, 2013).

Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang mengandung nilai karakter. Nilai-nilai Pancasila tersebut adalah:

1. Nilai Ketuhanan

Sila pertama mengandung nilai Ketuhanan atau nilai religius yang salah satu isinya yaitu mempercayai bahwa Tuhan itu Esa. Dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 2. Nilai Ketuhanan pada sila pertama juga berarti setiap warga negara Indonesia bebas untuk memeluk agama dan menjalankan syariat agama dan kepercayaannya masing-masing. Implementasi sila Ketuhanan dapat dilakukan dengan memperkuat hubungan vertikal kepada Tuhan dengan cara beribadah sesuai agamanya masing-masing. Selain itu, menjalin toleransi dan hubungan saling menghormati antar umat beragama agar tidak terjadi intoleransi yang dapat menimbulkan perpecahan. Bertakwa kepada Tuhan sebagai nilai religius merupakan salah satu cara untuk menghindarkan diri dari hal-hal negatif. Nilai Ketuhanan dianggap penting untuk dijadikan landasan kehidupan dan landasan dalam bernegara sebagaimana yang telah tercantum dalam sila pertama Pancasila (Meinarno dalam Herlinaa dan Dewi, 2021).

2. Nilai Kemanusiaan

Nilai Kemanusiaan menjelaskan bahwa manusia Indonesia adalah bagian dari warga dunia yang meyakini adanya prinsip persamaan harkat, derajat, dan martabat sebagai hamba Tuhan, serta menegakkan keadilan sesama manusia (Komalasari, 2007). Nilai Kemanusiaan menekankan hubungan antara individu dengan individu lainnya yang dapat diimplementasikan dengan mencintai satu sama lain sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan sebagai saudara sebangsa dan masyarakat dunia, menghormati hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang agar tidak terjadi pelanggaran hak, dan tolong menolong dengan sesama. Seluruh warga negara memiliki kesamaan hak dalam memperoleh kesejahteraan sosial, penghidupan yang layak, persamaan hak dan kewajiban, hak berpolitik, dan kesetaraan hukum tanpa pandang bulu atas perbedaan suku dan ras.

Sosial	Lingkungan	Ekonomi
Stabilitas Penduduk	Integritas tatanan lingkungan	kepemimpinan dan perubahan
Memerangi kemiskinan	Sistem produktivitas, adaptabilitas, dan pemeliharaan tanah, air, udara	Kebijaksanaan sektoral, organisasi pembelajaran, tanggung jawab sosial perusahaan
Keanekaragaman budaya, demokrasi dan partisipatif	Keanekaragaman hayati pada keanekaragaman kehidupan	Konsumerisme dan perdagangan, serta globalisasi ekonomi
HAM, kesehatan, dan rasa keadilan sosial	-	Akuntabilitas dan etika

3. Nilai Persatuan

Rukiyati, dkk (2013) menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia adalah nasionalisme, cinta bangsa, cinta tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, dan menghilangkan penonjolan atau kekuasaan keturunan dan perbedaan warna kulit, serta menumbuhkan rasa senasib dan sepejuangan. Menurut (Meinarno dalam Herlina dan Dewi, 2021) perbedaan merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri keberadaannya karena keberagaman dan perbedaan menjadikan negara Indonesia kaya akan budaya, hingga perbedaan tersebut disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan di antara suku, agama, ras, dan antar golongan, seharusnya bukanlah hal yang memicu terjadinya konflik yang mengakibatkan perpecahan bangsa. Perbedaan harus diikat dengan rasa persatuan. Dengan adanya rasa persatuan yang kuat menyebabkan bangsa Indonesia jauh dari perpecahan dan disintegrasi bangsa.

4. Nilai Kerakyatan

Kaelan (2017) menyatakan bahwa dalam nilai Kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup bernegara. Rukiyati (2013) juga menyatakan bahwa hakikat utama pada sila keempat bernilai demokrasi dan permusyawaratan. Nilai Kerakyatan mengandung nilai tanggung jawab dan harmoni yang merupakan nilai kental dari bangsa Indonesia sebagai negara demokrasi (Kariadi, 2017). Indonesia merupakan negara yang demokratis dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Karena itu, dalam mengeluarkan kebijakan, seorang pemimpin tidak boleh menguntungkan diri dan kelompoknya sendiri. Dengan kata lain setiap kebijakan yang dikeluarkan haruslah menguntungkan bagi masyarakat atau orang banyak. Nilai Kerakyatan juga mengandung nilai kekeluargaan

dan nilai gotong-royong yang memiliki pengaruh positif untuk mencapai tujuan nasional.

5. Nilai Keadilan

Rukiyati, dkk (2013) menyatakan bahwa nilai Keadilan harus tercermin dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan dapat diwujudkan dengan memberikan hak orang lain, berlaku adil, tidak menggunakan hak milik untuk merugikan kepentingan umum, dan suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, kesetaraan dan kesejahteraan sosial, penghormatan HAM, serta persamaan hak dalam segala bidang. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan unsur nilai Keadilan agar terhindar dari kesenjangan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian, kelima nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mengandung nilai karakter yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila memiliki hierarki piramidal alam, artinya sila-sila itu saling berhubungan satu sama lain. Sila pertama menjiwai sila kedua, sila ketiga, sila keempat dan sila kelima. Sila kedua dijiwai dengan sila pertama dan menjiwai sila ketiga, sila keempat dan sila kelima. Sila ketiga diilhami oleh sila pertama dan sila kedua yang menjiwai sila keempat dan sila kelima. Sila keempat diilhami oleh sila pertama, sila kedua dan ketiga dan menjiwai sila kelima. Sedangkan sila kelima dijiwai dengan sila pertama, sila kedua, sila ketiga dan sila keempat.

6. Pendidikan Karakter Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan didasarkan pada dua konsep yaitu pendidikan dan pembangunan berkelanjutan. Dalam arti sempit, pendidikan mengacu pada proses mewariskan pengetahuan dan keterampilan untuk dipelajari, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam arti luas, pendidikan mengacu pada tindakan atau pengalaman apa pun yang mempengaruhi pikiran, karakter, dan kemampuan fisik seseorang (Jeronen, 2012).

Sementara itu, pembangunan berkelanjutan, menurut Brundtland, adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan memiliki tiga dimensi, yaitu:

1. Sosial

Untuk meningkatkan pemahaman kajian institusi sosial dan peran warga negara pada tatanan perubahan dan pengembangan dalam rangka menyuarkan sistem demokratis dan partisipatif, hak asasi manusia, perawatan kesehatan, dan rasa keadilan sosial.

2. Lingkungan

Untuk meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan lingkungan atas segala pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati.

3. Ekonomi

Untuk menciptakan kepekaan terhadap potensi dan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada masyarakat dan lingkungan.

Tilbury dan Wortman dalam (Tristananda, 2018) menguraikan tema-tema kurikuler indikatif yang relevan untuk setiap bidang disiplin dan yang mungkin digunakan dan diadaptasi sebagai titik poin dalam mengembangkan pendidikan berkelanjutan lebih lanjut.

Tentunya kebijakan umum pembangunan berkelanjutan dipengaruhi oleh dimensi pendidikan yang kuat. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan membutuhkan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan, dan sektor pendidikan adalah titik yang paling vital dan strategis.

Pendidikan dan pembangunan berkelanjutan adalah dua arah yang beriringan, yaitu bahwa pembangunan berkelanjutan menjadi bagian dalam pendidikan, dan pendidikan memberi ruang sosial untuk melatih sikap dan praktik yang konsisten atas keberlanjutan hidup warga negara, dengan menyuarkan proses interdisipliner, intersektoral, dan partisipatif terutama dalam pengaturan pendidikan.

PENUTUP

Pendidikan karakter merupakan suatu proses pendidikan yang baik dan memiliki prinsip yang dapat dipertanggung jawabkan. Tercapainya tujuan pendidikan karakter artinya tercapai pendidikan berkualitas sebagai salah satu poin dari tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pendidikan karakter sebagai pendidikan bermutu menuju pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar yakni sosial, lingkungan, dan ekonomi, yang memungkinkan setiap warga negara untuk dapat menumbuhkan kualitas dan kompetensi yang dibutuhkan sebagai kontribusi pada kehidupan makhluk hidup berikutnya.

Pendidikan karakter untuk pembangunan berkelanjutan merupakan pondasi utama untuk pembangunan berkelanjutan yang dikembangkan dengan nilai-nilai Pancasila dalam rangka membangun negara yang berkarakter dinamis, inklusif, dan adaptif dengan mengintegrasikan nilai-nilai yang melekat dalam pembangunan berkelanjutan ke dalam semua aspek dan tingkat pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- .(2003). Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Ananda, A. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Pendidikan Karakter Bangsa dan Strategi Pembelajaran Nilai*. Padang: UNP Press.
- Darmiatun & Daryanto. (2013). *Pendidikan Karakter di Sekolah*. Yogyakarta: Gava.
- Herlinaa, Lin., & Dewi, Dinie Anggraeni. (2021). Implementasi Pancasila Di era Globalisasi. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 70-78. 10.36412/ce.v5i2.2595
- Jeronen, E. (2012). Education. In S. O. Idowu, N. Capaldi, L. Zu, & A. Das Gupta (Eds.), *Encyclopedia of corporate social responsibility*. Berlin: Springer. ISBN 978-3-642-28036-8.
- Kaelan & Zubaidi, Achmad. (2013). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. (2017). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kariyadi, D. (2017). Membangun Kepemimpinan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Masyarakat Multikultural. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 86-96. <http://doi.org/10.25273/citizenship.v5i2.1560>
- Lickona, Thomas. (1992). *Educating For Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Omeri, N. (2015). Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Manajer Pendidikan*, 9(3), 464-468. <https://doi.org/10.33369/mapen.v9i3.1145>
- Rahayu, Ani Sri. (2013). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rukiyati, Purwastuti, & L.A., Dwikurniani., et.al. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: UNY Press.

- Siregar, I., & Naelofaria, S. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) Tingkat Sekolah Dasar (SD) Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 7(2), 130-135. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v7i2.13>
- Tristananda, PW. (2018). Membumikan Education For Sustainable Development (ESD) di Indonesia Dalam Menghadapi Isu-Isu Global. *Purwadita: Jurnal Agama dan Budaya*, 2(2), 42-49. <https://doi.org/10.55115/purwadita.v2i2.86>

**MAKNA AKU (INDIVIDU)
DALAM KONSEP
MANUSIA INDONESIA
Y.B. MANGUNWIJAYA**

Kurniawan, Emi Setyaningsih

UPT. Pengembangan Kepribadian Mahasiswa, Universitas Brawijaya, Malang

Manusia Indonesia sejak awal peradaban lingkungan hidupnya memang dipinggirkan. Yang eksis adalah institusi semacam raja dan kerajaan, sultan dan kesultanan, atau presiden dan negara. Eksistensi manusia Indonesia, terutama sebagai individu, tidak memiliki keberanian untuk tampil ke muka. Ia selalu berlindung di balik massa dengan menyebut diri sebagai kami atau kita. Aku sebagai “diri” tenggelam dalam kerumunan, dalam kolektivitas. Tak ada aku selain raja: *sabda pandita ratu*. Dalam bahasa Radhar Panca Dahana (2001: 28), sejarah negara ini tidak mengenal proklamasi politik atau etik yang menegaskan eksistensi individu.

Tidak mengherankan jika kritik umum yang berkembang di kalangan pemikir Indonesia adalah bahwa manusia Indonesia itu tak lebih dari cap baru untuk karakter yang tradisional, terjerat dalam kebudayaan lama yang paternalistik dan feodalistik. Bagian dari kritik ini, seperti penulis singgung sebelumnya, adalah belum diapresiasi gagasan tentang aku atau individu. Semua tenggelam dan tersandera dalam kolektivitas, massa, kebersamaan, dan kerumunan.

Dengan sekian persoalan yang ada pada identitas diri manusia Indonesia, penelitian sistematis tentang makna aku (individu) yang hidup dalam lingkungan manusia Indonesia penting untuk dilakukan. Selain karena masih sedikitnya refleksi yang tersedia tentang hal tersebut, juga karena perubahan pascamodern menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Perubahan mutakhir telah menghapus jarak dan batas geografis sebuah negara, termasuk juga identitas manusianya. Akibatnya, sebuah “tanah air” kini pun menjadi satu pemahaman satu kesatuan administratif belaka, tempat seseorang memiliki kartu tanda penduduk (KTP), nomor pajak, alamat rumah, nomor telepon, dan lain sebagainya. Maka batas-batas tradisional, klaim kultural, kesejarahan, maupun kebangsaan menjadi kian kabur dan hampir lenyap.

Pada situasi ini, manusia Indonesia sedang menghadapi penentuan kembaliimbangan antara individualitas dan kolektivitasnya. Kalau manusia Indonesia tidak mau terasing dari perubahan yang menyertai hidupnya dan dari dirinya, mau tidak mau ia harus menegaskan kembali subjektivitasnya, keakuannya, yang menjadi landasan hidupnya. Keakuan, sebagai sebuah pilihan subjektif seseorang, menurut Soedjatmoko (2000: 9) tercermin dalam cita-cita dan aspirasinya, pandangannya tentang hari depan, penilaiannya tentang baik dan buruk, dalam hubungannya dengan orang lain, dalam keyakinannya atas kasih, kesetiaan, dan nilai dasar yang lain. Yang terpenting, semua itu sangat ditentukan oleh persepsi manusia terhadap individualitasnya.

Lewat penelitian ini, penulis akan merekonstruksi bagaimana Intelektual Y.B. Mangunwijaya memaknai aku/individu dalam konsep manusia Indonesiannya. Secara lebih spesifik, penelitian ini hendak mengkaji dua pokok persoalan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Apa konsep manusia Indonesia Y.B. Mangunwijaya sebagai bentuk idealisasinya tentang manusia Indonesia; 2) Bagaimana Y.B. Mangunwijaya memaknai aku/individu dalam konsep manusia Indonesiannya.

Beberapa penelitian terdahulu tentang pemikiran Y.B. Mangunwijaya penulis temukan dalam bentuk artikel, makalah maupun skripsi. Untuk tingkat skripsi, ada satu tulisan yang membahas konsep manusia menurut Y.B. Mangunwijaya. Skripsi tersebut adalah karya Farid Rachmad Saleh berjudul “Identitas Manusia Menurut Y.B. Mangunwijaya”. Secara garis besar, dalam skripsinya, Saleh mengatakan bahwa Y.B. Mangunwijaya mengharapkan lahirnya manusia Indonesia yang tidak lagi memandang sejarah kemerdekaan Indonesia sebagai perjuangan nasional semata, tetapi sebagai bagian dari perjuangan internasional kaum terjajah di seluruh dunia, sebagaimana yang sejak dulu juga sangat disadari oleh generasi Soekarno-Hatta (Saleh, 2005: 87-88).

Artikel yang juga layak disebut di sini adalah tulisan Pamela Allen, yang mencoba menelaah persoalan kebangsaan dalam tiga roman Y.B. Mangunwijaya: *Burung-Burung Manyar* (BBM), *Durga Umayi* (DU), dan *Burung-Burung Rantau* (BBR). Menurut Allen, dalam ketiga roman tersebut, Y.B. Mangunwijaya mengemukakan beberapa kemungkinan untuk menciptakan identitas Indonesia. Dalam BBM, Y.B. Mangunwijaya memeriksa peran “pembelot” dalam proses *nation building*, sambil mengisyaratkan isu-isu yang meliputinya dalam BBR—membuang unsur-unsur dari masa lalu yang feodal dan menghalangi pembentukan negeri yang modern. Sedangkan melalui DU—dengan gaya bahasa yang penuh plesetan, kejenaakaan, dan realisme magis—Y.B. Mangunwijaya berusaha mentransformasikan tentang pascanasioanalisme menjadi cerita tentang citra diri sebuah keluarga pascanasional (Allen, 1999: 2002-203).

Telaah tentang roman Y.B. Mangunwijaya, terutama tentang *Durga Umayi* (DU), juga dilakukan oleh Michel H. Bodden dengan titik tekan pada persoalan wanita dalam roman tersebut. Menurut Bodden (1999: 260-262), dalam DU, Y.B. Mangunwijaya berusaha untuk membenturkan suara-suara wanita tertindas beserta keluhan-keluhannya dengan proyek mereformulasikan basis dan batas-batas bangsa menurut visi satu segmen tertentu kelas menengah Indonesia. Melalui tokoh Iin, yang merepresentasikan diri sebagai wanita tertindas, Y.B. Mangunwijaya ingin menunjukkan bahwa sejarah pengalaman bangsa Indonesia tidak lepas

dari persoalan demikian. Melalui tokoh Iin pula, Y.B. Mangunwijaya menjadikannya sebagai simbol bangsa maupun wanita di bawah perwalian sejarah nasionalis dan tradisi intelektual yang dipresentasikan sebagai wilayah yang dikuasai oleh pria.

Tulisan Barbara Hatley menegaskan pandangan Bodden tentang tokoh Iin dalam roman *Durga Umayi*. Menurutnya, melalui tokoh Iin, Y.B. Mangunwijaya telah berusaha meretas harapan-harapan yang menentang representasi yang patriarkal tentang wanita Indonesia. Ketika masih anak-anak, tokoh protagonis Iin, sudah menolak perbedaan seksual yang memungkinkan saudara laki-lakinya keluyuran dan bermain, sementara ia harus tinggal di rumah untuk membantu ibunya mencuci pakaian si anak lelaki. Ketika dewasa ia juga menolak retorika yang menyebut wanita sebagai ibu bangsa, menolak peranan “dapur-sumur-kasur” wanita dan malah terlibat dalam masalah politik (Hatley, 1999: 336).

Dari pelbagai perspektif peneliti lain yang telah penulis telusuri menyangkut pemikiran Y.B. Mangunwijaya, dapat dikatakan bahwa hanya tulisan Farid Rachmad Saleh tentang konsep manusia Y.B. Mangunwijaya yang mempunyai keterkaitan gagasan secara langsung dengan penelitian ini. Sekalipun demikian, tulisan tersebut paling jauh hanya bersinggungan ketika pembahasan sampai pada usaha merumuskan konsep manusia Indonesianya, sama sekali belum menyentuh makna aku/individu.

METODE

Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*) atas pemikiran Y.B. Mangunwijaya. Dalam menganalisis pemikiran Y.B. Mangunwijaya, penulis menggunakan metode analisis filosofis dengan unsur metodis berupa interpretasi, deduksi, deskripsi, dan refleksi (Bakker dan Achmad Charris Zubair, 1990: 61).

1. Interpretasi: seluruh karya dari Y.B. Mangunwijaya yang berkaitan dengan topik penelitian ini ditelaah dalam rangka merumuskan makna aku (individu) dalam konsep manusia Indonesianya.
2. Deduksi: sebelum secara spesifik menelaah makna aku (individu), terlebih dahulu dibahas konsep manusia Indonesia Y.B. Mangunwijaya untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.
3. Deskripsi: penulis menguraikan pemikiran Y.B. Mangunwijaya dan semua hasil analisis terhadapnya secara sistematis sesuai batasan tema yang telah ditentukan.

4. Refleksi: untuk menghasilkan kesimpulan yang memadai, penulis merefleksikan secara kritis hasil temuan dari penelitian ini.

ISI DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Manusia Indonesia Y.B. Mangunwijaya

Penulis hanya akan menganalisis pemikiran Y.B. Mangunwijaya menyangkut manusia Indonesia. Penulis sengaja tidak memasukkan biografi Y.B. Mangunwijaya, sebab uraian pada penelitian ini dimaksudkan sebagai “pertemuan pikiran”, bukan “pertemuan pribadi”. Dengan kata lain, penelitian ini bukan membicarakan siapa Y.B. Mangunwijaya, melainkan apa pemikirannya menyangkut manusia Indonesia.

A. Manusia Pasca-Nasional, Pasca-Einstein, Pasca-Indonesia

Y.B. Mangunwijaya memberikan nama dan interpretasi baru pada generasi muda manusia Indonesia: manusia pasca-Nasional, pasca-Einstein, dan pasca-Indonesia. Sebelum menjelaskan ketiga istilah tersebut, penting untuk terlebih dahulu menguraikan arti pasca dalam ruang lingkup pembahasan ini.

Istilah pasca, seperti yang melekat pada kata pasca-Indonesia, menurut Y.B. Mangunwijaya, harus dimengerti dalam konteks kesejarahannya, bukan abstrak. Pasca berarti sama identitasnya tetapi meningkat pendalamannya. Pasca jauh lebih baik dan lebih bermakna daripada kata *post* dalam bahasa Inggris, seperti *post-industrial society*, *post-modernism*, *post-colonialism*, dan sebagainya. Kata *post* hanya menunjuk pada arti *sesudah*, belum menyatakan kontinuitas maupun diskontinuitas. Dengan pemahaman yang demikian, seorang pascasarjana bukan berarti orang *sesudah* menjadi sarjana lalu menjadi *bukan* sarjana, atau hilang sama sekali apa yang dipelajarinya semasa sarjana. Orang itu tetap sarjana, tetapi lebih dewasa, lebih mendalam, serta lebih multidimensional dimensi kesarjanaannya (Mangunwijaya, 1999a: 41; 1999b: 163).

Pasca, bagi Y.B. Mangunwijaya, adalah persoalan mental dan intelektual. Menjadi masalah mental karena pasca menuntut penghayatan yang mendalam terhadap kenyataan yang dihadapi. Misalnya, untuk menjadi ibu, perempuan terlebih dulu harus menghayati dirinya sebagai seorang istri. Sedangkan menjadi masalah intelektual karena dibutuhkan pemikiran atau cakrawala yang lebih eksploratif. Dalam konteks pasca-industri, misalnya, entah berkaitan dengan usaha yang terus-menerus

untuk menemukan industri baru atau untuk menyempurnakan metodologi atau filsafatnya (Saleh, 2005: 87).

Dengan pengertian pasca tersebut, Y.B. Mangunwijaya merumuskan Manusia Indonesia yang **pasca-Nasional** sebagai manusia yang mampu melampaui batas kesukuan, bahkan kebangsaan. Manusia yang mampu memekarkan penghayatan hidupnya dari tingkat nasional Indonesia ke tingkat yang lebih luas dan komprehensif, yakni dalam penghayatan pasca-Nasional. Hal ini bukan berarti manusia Indonesia kehilangan nasionalismenya, tetapi mendewasakan semua itu dalam kerangka pergaulan dan penghayatan Indonesia secara lebih luas dalam dunia (Mangunwijaya, 1999b: 163).

Dalam *Burung-Burung Rantau*, Y.B. Mangunwijaya melukiskan situasi kejiwaan manusia pasca-Nasional yang sedang merantau dalam arti fisik geografis maupun psikologis ke seluruh dunia. Manusia pasca-Nasional diandaikan mirip burung-burung rantau yang tidak terkurung atau terkekang oleh batas geografis nasional. Mereka sebagai manusia merdeka yang melanglang buana untuk pelbagai tujuan dan keperluan, sebagai pakar ilmu tertentu, tugas diplomatik, dan sebagainya. Dalam novel ini, manusia yang pasca-Nasional tercermin dalam tokoh Neti dan Wibowo (Mangunwijaya, 1992: 349).

Neti dan Wibowo, demi emansipasi memilih bebas dan menganggap dirinya hanya kebetulan lahir di Timur, tetapi rumahnya adalah penjuru dunia. Kehidupan mereka sepenuhnya melampaui batas tanah kelahirannya. Mereka telah mengambil rasa selalu ingin tahu peradaban Barat dengan segala kecanggihannya. Lebih dari itu, mereka mampu keluar dari kubangan lumpur eksistensi kolektif, dari isolasi mentalitas picik, dari batas satu negara, serta dari nasionalisme sempit. Sebab bagi mereka, yang terpenting adalah membuka diri kepada kebenaran dan kemungkinan baru.

Mengapa hanya manusia pasca-Nasional yang diandaikan sebagai burung-burung rantau oleh Y.B. Mangunwijaya? Bukankah jauh sebelum itu, sejak zaman prakolonial, penghuni Nusantara sudah sering merantau? Rupanya yang menjadi tolok ukur Y.B. Mangunwijaya adalah bidang keilmuan dan cara pandang yang lepas dari pola pikir masyarakat agraris. Seperti ditulis oleh Abdullah (1999: 387-388), generasi pasca-Nasional adalah label untuk generasi yang terpelajar dengan keilmuan bertaraf internasional, yang mampu membaur dan melampaui batas kehidupan yang disebut Barat dan Timur.

Sedangkan manusia yang **pasca-Einstein** dimaknai Y.B. Mangunwijaya sebagai manusia yang berkembang akibat kemajuan sains dan teknologi. Dalam hal ini, teori relativitas Albert Einstein menjadi basis panduan utama generasi ini guna memahami multidimensionalitas sebuah persoalan dengan pemahaman yang serba relatif. Dengan sudut pandang yang serba relatif itu, menurut Y.B. Mangunwijaya, tak heran jika manusia pasca-Einstein mengoreksi dan merevisi pandangan generasi sebelumnya yang cenderung bersifat mutlak. Tetapi, dalam penghayatan yang serba relatif itu, juga bukan berarti bahwa tidak boleh ada lagi yang disebut mutlak (Mangunwijaya, 1999a: 60&76).

Perkembangan sains dan teknologi telah membawa semangat baru bagi generasi pasca-Einstein. Semangat baru itu, di satu pihak telah membekali generasi ini dengan kepastian serba eksak dan serba objektif dalam melihat persoalan. Tetapi, di pihak lain, ia juga memberikan sebuah kesadaran akan kenisbian dan alternatif serba *pluriform* sehingga menggoyahkan pandangan dasar terhadap alam semesta, makna kehidupan, maupun terhadap manusia itu sendiri. Maka banyak asumsi, postulat, paradigma, moralitas, ideologi, bahkan pemahaman atas agama dan Tuhan sekalipun, yang selama ini cenderung sudah mapan dan dogmatis menjadi terguncang karena dipertanyakan kembali oleh generasi ini (Mangunwijaya, 1999a: 61).

Rupanya sains dan teknologi menggiring orang pada arah keseragaman, sekaligus juga menyadarkan orang akan kebutuhan pada anti-keseragaman. Melalui semangat keterbukaan yang dibawanya, beragam bentuk “kehadiran” dengan semangat perbedaan merayakan dirinya secara unik. Tak heran jika sesuatu yang unik semakin dicari orang, terutama oleh generasi muda, sebagai simbol kemerdekaan diri mengadopsi dan mengadaptasi kebudayaan industri dan teknologi. Tetapi keadaan ini juga berbahaya bagi generasi yang tidak mampu mengikuti langkah perkembangan sains dan teknologi, terutama generasi tua yang merasa terlalu lemah untuk merengkuhnya.

Bagi manusia pasca-Einstein sendiri, demikian Y.B. Mangunwijaya, semangat keterbukaan itu datang secara alami sebagai sebuah kesadaran baru. Maka manusia Indonesia yang pasca-Einstein semakin belajar berpikir, bercita rasa, berargumentasi, dan berkreasi dalam suasana jiwa yang semakin multidimensional, serta dalam gerak yang serba dialektis dan dialogis. Lain halnya bagi generasi tua, budaya pasca-Einstein ini dianggap telah menculik generasi muda dalam sebuah revolusi besar, dan generasi tua hanya diam teragap-gagap melihat semua itu. Generasi tua banyak yang tidak mampu memahami perkembangan kehidupan generasi muda

sekarang yang lebih dekat dengan bahasa komputer. Rupanya mereka tidak siap memasuki zaman baru yang serba teknologis dalam menyelesaikan perkara (Mangunwijaya, 1999a: 62-64).

Dari penjelasan Y.B. Mangunwijaya terhadap arti manusia yang pasca-Einstein, terlihat bahwa bagi bangsa Indonesia, sains dan teknologi adalah dimensi baru, perluasan horizon pengalaman dan budaya baru. Dikatakan baru karena dilihat dari periode kedatangannya, sains dan teknologi cukup terlambat memasuki budaya bangsa Indonesia dibanding bangsa lain. Sebuah hal yang perlu diasimilasi dan diinkulturasikan ke dalam potensi budaya bangsa Indonesia yang mungkin belum bersemi, tetapi mengandung potensi besar untuk berkembang.

Sedangkan manusia Indonesia yang **pasca-Indonesia** menjadi kata kunci Y.B. Mangunwijaya untuk melihat perkembangan bangsa Indonesia dalam era globalisasi. Globalisasi sendiri, secara sederhana, dapat dipahami lewat ilustrasi berikut ini: globalisasi adalah jika orang bisa meminjam modal di Bahama untuk menjahit pakaian boneka di Korea dengan mesin buatan Jepang berstandar Amerika, kemudian dirakit pada boneka di Meksiko, dan hasilnya dijual lagi di London (Simbolon, 1991). Globalisasi adalah jika orang Indonesia mengolah data seismik dengan perangkat lunak (*software*) buatan Perancis pada komputer buatan Amerika, untuk sebuah perusahaan minyak Inggris yang beroperasi di Laut China Selatan. Globalisasi adalah eklektisme: seseorang mendengarkan reggae, menonton film western, makan siang di McDonald, makan malam dengan menu lokal, memakai parfum buatan Paris di Tokyo dan mengenakan pakaian lama di Hongkong (Dewanto, 1991: 213).

Dalam kompleksitas globalisasi itulah, menurut Y.B. Mangunwijaya, generasi pasca-Indonesia hadir mengidentifikasi diri. Di dalamnya, identifikasi diri dan perjuangan lapangan kehidupan akan digabungkan dengan perjuangan sesama generasi muda di segala penjuru dunia yang sepaham, sealam pikir, secita rasa, seideal; jadi tidak hanya dengan orang-orang sebangsa, tetapi lebih universal, lebih jujur orientasi maupun ikhtiarnya (Mangunwijaya, 1999a: 57).

Generasi pasca-Indonesia ini tetap beridentitas Indonesia, namun meningkat dalam segala hal dengan bertambah luas cakrawala dan galaksi pandangannya. Generasi ini tidak hanya menghayati dirinya sebagai warga Indonesia, tetapi sekaligus menghayati dirinya sebagai warga planet-bumi yang satu (Mangunwijaya, 1995b: 21). Hal demikian sebenarnya sudah ditunjukkan oleh proses historis negeri ini di masa lampau. Pada masa itu, terlihat dengan jelas bahwa solidaritas kesukuan melewati konflik batin dan harus memberi tempat kepada pemahaman yang lebih luas dan lebih

esensial, ketika identifikasi diri serta pilihan solidaritas sudah melampaui batas-batas regional suku maupun golongan. Maka dalam analognya lebih lanjut, Y.B. Mangunwijaya berharap generasi muda sekarang tidak hanya melewati batas suku tadi, tetapi lebih jauh lagi dengan melewati batas negaranya dengan berpedoman pada hak asasi manusia universal (Mangunwijaya, 1999a: 57-58).

Apakah kecenderungan budaya pasca-Indonesia ini merupakan gejala dari erosi patriotisme? Y.B. Mangunwijaya tegas menjawab tidak. Bagi Y.B. Mangunwijaya, patriotisme yang dianut bangsa Indonesia berbeda dengan patriotisme gaya Hitler atau Mussolini, juga bukan patriotisme pribumi zaman kerajaan feodal yang tega menjual rakyatnya pada penjajah, melainkan patriotisme yang luas dan berperikemanusiaan yang adil dan beradab (Mangunwijaya, 1999a: 58).

2. Aku Dalam Konsep Manusia Indonesia Y.B. Mangunwijaya

Y.B. Mangunwijaya, sebagaimana telah penulis sarikan di atas, menyusun idealitas manusia Indonesia dalam tiga tipologi: manusia pasca-Nasional, pasca-Einstein, dan pasca-Indonesia. Ketiga tipologi manusia Indonesia itu, oleh Y.B. Mangunwijaya, diharapkan tercapai bukan hanya pada level sosial, tetapi terutama pada level individu. Pada titik ini, selaras dengan semangat *Aufklarung*, aku/individu mendapat perhatian penting Y.B. Mangunwijaya. Bagaimana Y.B. Mangunwijaya memaknai aku dalam tiga tipologi manusia Indonesianya?

A. Aku Mitik: Hidup dengan Sikap Tradisional

Membaca tafsir Y.B. Mangunwijaya atas manusia Indonesia, dapat dikatakan bahwa manusia Indonesia memasuki zaman modern tetapi masih disertai dengan sikap tradisional, sebuah tindakan yang memperlihatkan inkonsistensi manusia Indonesia dalam memahami realitas. Satu hal yang harus penulis tekankan di sini, bahwa menolak sikap tradisional tidak sama maknanya dengan menolak tradisi. Menolak sikap tradisional bisa dimaknai sebagai penolakan atas cara pandang yang menganggap sesuatu itu sebagai kebenaran mutlak, eksklusif, tidak dapat berubah, dan final. Jelas bagi Y.B. Mangunwijaya, bahwa sikap tradisional tidak dapat digunakan untuk membawa manusia Indonesia hidup di zaman globalisasi yang berarti harus membiasakan diri dengan berbagai cara pandang dan kemungkinan baru.

Refleksi kritis Y.B. Mangunwijaya di atas menunjukkan bahwa manusia Indonesia masih berada dalam cengkeraman budaya mitis yang sejak awal memang begitu meresapi kehidupan masyarakatnya. Cara pandang agraris dan hierarkis yang menyebabkan lahirnya sikap feodalistik, sebagaimana tercermin dalam kebudayaan Jawa, misalnya tidak lain adalah produk dari budaya mitis tersebut. Menurut van Peursen (1988: 34-43), budaya mitis dicirikan oleh kehidupan manusia yang masih bertopang pada hal-hal yang tradisional dan irasional, yang tergantung pada pertalian dengan suku atau kelompoknya.

Penulis meminjam analisis Gasset untuk memahami lebih jauh kehidupan budaya mitis. Gasset membedakan pribadi dengan kepribadian. Kepribadian adalah pola perilaku seseorang dalam dunia, sedangkan pribadi adalah akar struktural dari kepribadian itu. Menurut Gasset, hidup manusia akan menjadi hidup otentik atau hidup sejati apabila kepribadiannya sesuai dengan pribadinya. Sebaliknya, hidup manusia menjadi semu dan tidak otentik manakala kepribadiannya mengabaikan pribadinya. Ini terjadi, misalnya, bila seseorang secara teoritis maupun praktis menolak pendapat bahwa manusia itu pribadi (persona) sehingga orang itu terseret dalam arus massa, budaya ikut-ikutan, atau membiarkan kebebasannya dirampas (Bagus, 2000: 889-890).

Apa yang dikatakan Gasset tentang kehidupan yang tidak otentik adalah bentuk kehidupan yang ada dalam budaya mitis, sejalan dengan yang dikatakan Y.B. Mangunwijaya bahwa manusia Indonesia belum mampu keluar dari eksistensi kolektif karena masih begitu kuatnya pengaruh cara pandang agraris membentuk pola pikir masyarakat kita. Pada gilirannya kemudian, hidup tidak otentik itu bukan hanya mengabaikan keakuan manusia, melainkan juga menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bersama manusia dalam masyarakat.

Bagi masyarakat agraris, alam (tanah) bukan hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi juga basis pembentukan identitas kolektif. Secara hakiki, alam menjadi tempat manusia mengawali jejak kehidupannya, melangsungkannya, dan kelak menjadi tempatnya berakhir. Masyarakat agraris menganggap bahwa aktivitas mereka sebagai petani atau peladang, misalnya, bukan semata-mata menjadi sumber mata pencarian yang dapat dihitung secara nominal, melainkan lebih sebagai sebuah rangkaian aktivitas sosial budaya dan religi yang tidak ternilai harganya. Hal itu didasarkan atas pemahaman mereka bahwa di dalam alam terkandung nilai etis, norma, adat kebiasaan, dan pranata-pranata yang dipakai untuk mengatur hidup manusia sehingga tercipta keharmonisan antara manusia dengan alam. Di kalangan masyarakat agraris, bentuk-bentuk penghargaan

atas alam tampak dari perilaku religius yang terangkum dalam ritus dan mitos yang mereka yakini dari generasi ke generasi. Bahwa manusia harus menyatu dengan alam karena alam adalah bagian dari dirinya yang layak untuk dihargai dan dihormati (Merilyn, 2008: 130-131).

Manusia yang demikian, dalam terminologi Heraty (1984: 208), adalah wujud dari “aku mitik”, yaitu aku yang tidak dapat memisahkan diri dari pelbagai kekuatan lain di luar dirinya. Aku mitik selalu melihat kekuatan di luar dirinya dalam makna tunggal: sebagai penghayatan bersama antara dirinya dengan kekuatan lain itu, bahwa dirinya menyatu dan tidak dapat dipisahkan dari berbagai kekuatan di luar dirinya karena mempunyai kelemahan berupa potensi kegagalan kehendak.

Begitu menyadari bahwa dirinya mempunyai potensi kegagalan kehendak, manusia kemudian lari pada bentuk penghayatan kehidupan yang berbau mistik. Dengan kata lain, manusia seakan menemukan dirinya dalam berbagai simbol yang dikandung mitos sehingga dirinya menjelma jadi aku mitik. Bagi aku mitik, hanya bahasa simbol yang dikandung mitos lah yang mampu menjelaskan keterkaitan dirinya dengan entitas yang lain. Segala penjelasan rasional kemudian ditolaknya, karena rasionalitas dianggapnya menafikan dimensi mistik dari apa yang sudah terlanjur dipercayai dan diyakininya (Heraty, 1984: 196).

Sikap tradisional jelas dapat dilekatkan pada cara pandang aku mitik ini, dan sejalan dengan itu, kini penulis jauh lebih mengerti arti penolakan Y.B. Mangunwijaya terhadap sikap tradisional. Sebagaimana telah diketahui, rasionalitas bagi Y.B. Mangunwijaya bukan sesuatu hal yang harus ditolak, tetapi justru jadi sumber kekuatan untuk membantu manusia Indonesia keluar dari eksistensi kolektifnya. Rasionalitas, terutama yang dikandung oleh sains dan teknologi, baginya merupakan sesuatu yang harus diintegrasikan dan diinkulturasikan ke dalam kehidupan tanah air.

Dalam *Burung-Burung Manyar*, Y.B. Mangunwijaya telah menunjukkan dengan baik bagaimana sikap yang seharusnya dalam mengelola tradisi dalam konteks zaman modern. Melalui tafsir nalar modern, simbol-simbol wayang dipakai oleh Y.B. Mangunwijaya untuk menjelaskan fase perjalanan identitas manusia Indonesia dari olahan tradisi masa lalu menuju ke masa depan. Larasati—penjelmaan dari tokoh Rarasati dalam dunia wayang—yang secara kultural dibesarkan dalam tradisi keraton Jawa, ternyata dalam fase kehidupannya mampu berkembang menjadi seorang ahli biologi yang menampilkan perpaduan antara tradisi dengan kemodernan ilmu yang dimilikinya. Larasati telah menunjukkan bahwa dengan rasionalitas, manusia Indonesia justru dapat lebih menghargai tradisi (Mangunwijaya, 1981: 223). Dengan demikian, tradisi bukan sesuatu hal yang harus ditolak,

tetapi perlu diolah kembali dengan menggunakan pola pikir modern, bukan dengan pola pikir tradisional.

Untuk bisa melakukannya, menurut Y.B. Mangunwijaya (1981: 224), seseorang terlebih dulu harus menghayati jati dirinya, melepaskan diri dari kesemuan hidup yang sering dibawa arus kolektivitas. Menjadi modern berarti harus mampu melewati masa transisi dari nilai dan pola pikir tradisional menuju nilai serta pola pikir baru. Maka, individu yang dimaksudkan Y.B. Mangunwijaya bukanlah individu yang statis, namun individu yang secara terbuka mampu mengolah kemerdekaan dirinya; sebuah dinamika kemerdekaan diri berupa kemerdekaan jiwa yang mendalam. Sosok ini melekat pada diri Larasati.

Hal itu yang sebenarnya terkandung dalam konsep Y.B. Mangunwijaya tentang manusia Indonesia yang pasca-Nasional, pasca-Einstein, dan pasca-Indonesia. Melalui tiga prototipe manusia itu, Y.B. Mangunwijaya merumuskan ide-ide dan keyakinannya bahwa manusia Indonesia akan menjadi manusia baru dengan sosok pribadi yang mandiri, kritis, dan bertanggung jawab, bukan sebagai pribadi yang asal ikut-ikutan berdasarkan kewibawaan kolektif. Sosok yang secara eksistensial akan mampu menghayati kehidupan dan kemanusiaan secara lebih utuh melintasi sekat-sekat perbedaan.

B. Aku Fungsional: Sintesis Kreatif Individualitas dan Kolektivitas

Seperti telah penulis uraikan sebelumnya, konsep manusia yang pasca-Nasional, pasca-Einstein, dan Pasca-Indonesia adalah kritik sekaligus jawaban Y.B. Mangunwijaya pada manusia Indonesia yang menurutnya masih hidup dengan eksistensi kolektif. Dalam kehidupan berbangsa kita, kecenderungan demikian sejak awal sudah tercermin dari adanya argumen-argumen yang sangat kuat bahwa paham integralistik adalah satu-satunya pilihan terbaik untuk negara Indonesia. Paham ini dicirikan oleh penanganan yang ketat dan bersifat kolektif atas semua persoalan. Tidak mengherankan jika slogan kesatuan dan persatuan bangsa adalah doktrin pertama dan utama paham ini. Maka perbedaan antar etnis, antar agama, antar budaya, serta kekhususan partikularistik lainnya, bukannya dianggap sebagai kekayaan budaya yang penting, melainkan diredam melalui proses penyeragaman dengan alasan demi kepentingan bersama.

Goenawan Mohamad (dalam Sutrisno, 2004: 133) pernah memberikan ilustrasi yang sangat menarik terkait hal ini. Menurutnya, keindonesiaan yang semula digagas dengan keikhlasan dan kesetaraan oleh para *founding fathers*, kini diproses oleh kekuasaan menjadi alegori keikaan *sapu lidi*

dengan tali pengikatnya berupa pemaksaan dengan otoritas militer demi penyatuan. Sedangkan kemajemukan diseragamkan dalam perlakuan *lidi-lidi* yang menafikan keindahan, kekayaan keragaman suku, etnik, *local genius*, agama, seni, dan masing-masing. Alegori Goenawan ini terutama ditujukan pada pembangunan proyek Taman Mini Indonesia Indah pada zaman Orde Baru yang menafikan etnik minoritas dalam formalisasi model Taman Mininya itu.

Rasa persatuan, sebagaimana diakui oleh Y.B. Mangunwijaya, memang mampu memobilisasi berbagai kekuatan yang tercerai-berai dan saling bersaing secara tidak sehat menjadi potensi kolektif yang kuat. Akan tetapi, dalam konteks sekarang ketika fase konsolidasi persatuan dan kesatuan sudah tercapai, yang lebih diperlukan adalah individu-individu yang mandiri dan kreatif, bukan kolektivitas yang berlebihan sehingga membekukan dan membunuh potensi kreatif manusia Indonesia untuk mengembangkan diri. Karena masa depan Indonesia dan pembentukan manusia baru Indonesia yang sehat dan sejalan dengan gerak evolusi mondial, baru bisa berjalan secara wajar jika semua pihak secara arif memberikan kesempatan dan dukungan pada daya eksploratif dari sekian banyak potensi pribadi generasi muda (Mangunwijaya, 1999a: 304).

Berbagai kecenderungan negatif di atas memang menjadi fakta keras kehidupan kebangsaan kita sampai hari ini. Lalu apa yang diperlukan manusia Indonesia untuk keluar dari keadaan tersebut? Menurut Y.B. Mangunwijaya (1999a: 303-304), manusia Indonesia memerlukan pencerahan, *Aufklärung*. Pencerahan akan memungkinkan orang menghayati diri dan sesamanya sebagai manusia yang punya harga pada dirinya sendiri. Manusia yang sudah mengalami pencerahan diri, akan menghormati orang lain karena ia memang harus dihormati, lepas dari perbedaan ras, etnik, agama, rupa, status, dan sebagainya.

Rupanya Y.B. Mangunwijaya ingin mengatakan bahwa perkembangan kebangsaan Indonesia akan jauh lebih optimal jika dilakukan oleh pribadi yang mandiri dan eksploratif, yang mampu keluar dari kubangan kolektivisme sebagaimana dicirikan oleh manusia *Aufklärung*. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Y.B. Mangunwijaya menempatkan individu sebagai sebuah entitas yang harus diberikan ruang dan kesempatan untuk berkembang dan berkreasi dalam konteks kebangsaan Indonesia. Bahwa individualisme yang bertanggung jawab adalah sumber kreativitas, sehingga perlu didukung agar bangsa ini berkembang. Masyarakat seharusnya menyadari bahwa individu yang berwawasan luas dan berdiri di atas kakinya sendiri dalam mengembangkan dirinya, pada gilirannya kemudian akan menyumbang pada kesejahteraan bersama.

Dalam kenyataannya, yang terjadi selama ini dalam kebudayaan Indonesia modern menghambat peluang generasi mudanya untuk belajar berpikir. Berpikir tentang dirinya sendiri dianggap beroposisi, dan dengan demikian dianggap membahayakan kehidupan atau kepentingan bersama. Individu selalu dicekik oleh topeng sosial, individu selalu ditindas atas nama kolektivitas. Dengan mengatakan demikian, bukan berarti kolektivitas bangsa itu sesuatu yang tidak penting, tetapi semangat kolektivitas itu jangan sampai membunuh individu manusia Indonesia (Mangunwijaya, 1992:102).

Menurut Y.B. Mangunwijaya, tingkat kedewasaan sebuah bangsa pun dimaknainya sebagai sebuah pemahaman dan penerapan dialektik antara kolektivitas bangsa dan kepribadian mandiri manusia Indonesia, yang harus dihormati oleh setiap warga negara tersebut. Karena itu, manusia Indonesia harus belajar, kapan saatnya hal-hal yang individual (kontekstual, lokal, nasional) harus mendapat tempat utama, dan kapan hal-hal yang universal (global, internasional) kemudian menggantikannya. Maka, sintesis dialektis yang benar antara individualitas manusia dengan kolektivitas bangsa perlu diolah dan dikembangkan dengan baik. Cermin dari sikap tersebut adalah apabila kita sudah mengakui berbagai kewajiban dan hak asasi manusia yang berlaku universal pada semua manusia, sebagaimana halnya anggota tubuh manusia yang fungsinya juga berlaku universal pada diri manusia yang bersangkutan. Itulah yang dimaksud dengan proses pencerahan (Mangunwijaya, 1999a: 305).

Proses pencerahan sendiri sebagian besar datang melalui rasio yang semakin berkembang, tajam, dan berimbang (di sini sains dan teknologi berpengaruh), namun sewajarnya juga datang dari hati, pengalaman yang pahit, dan kadang lewat kemauan untuk menghayati semesta secara indah dan mulia. Iman yang jujur dan mental ilmiah dapat menjadi sumber inspirasi. Sebagaimana bibit unggul yang memerlukan tanah yang subur, manusia Indonesia juga memerlukan penataan dan pengolahan yang baik berbagian bentuk kekuasaan yang ada (ekonomi, politik, budaya, sosial, dan sebagainya) untuk mencapai pencerahan tersebut. Manusia yang belum mampu melewati ambang pencerahan, seperti manusia Indonesia saat ini, akan sulit untuk mantap dan selaras mengolah masa depannya (Mangunwijaya, 1999a: 306).

Namun, rasionalitas seseorang tidak mencukupi dengan sendirinya, tetapi perlu dilengkapi dengan kearifan. Berkaitan dengan kearifan ini, Y.B. Mangunwijaya banyak menyinggung soal religiositas yang ada pada diri seseorang. Menurut Y.B. Mangunwijaya, religiositas (sikap religius) tidak identik dengan agama tertentu. Dua orang yang menganut agama

berbeda bisa mempunyai religiositas yang sama, dan sebaliknya, dua orang yang menganut agama yang sama bisa mempunyai religiositas yang berbeda. Religiositas lebih menyentuh tataran esensi, berupa pandangan dan sikap dasar seseorang dalam memaknai hubungannya dengan Tuhan dan dengan sesama, bukan pada bentuk-bentuk ritual peribadatan dari masing-masing agama. Religiositas inilah yang juga berperan penting dalam menumbuhkan individu yang arif (Mangunwijaya, 1999b: 124-125).

Dalam *Burung-Burung Rantau*, misalnya, Y.B. Mangunwijaya menghadirkan religiositas melalui penghayatan manusia terhadap Tuhan dengan berani, serius, dan tajam. Tuhan, sebagai *noumena* yang sesungguhnya tak pernah dikenali itu, oleh Y.B. Mangunwijaya diposisikan sebagai “sesuatu” yang bisa dihayati dan direkonstruksi dengan cara apapun sejauh itu lebih bermakna bagi religiositas dan spiritualitas manusia, tentu dengan segala konsekuensi tertentu di belakangnya. Maka, Tuhan pun merelakan diri untuk tidak hanya dihayati oleh kalangan elit agama tertentu, tetapi juga oleh pelacur, orang miskin, dan orang-orang tidak beruntung lainnya (Mangunwijaya, 1992: 70).

Rupanya Y.B. Mangunwijaya memaknai relasi manusia dengan Tuhan bukan sebagai bentuk pelarian manusia atas kegagalannya menghadapi tantangan kehidupan, melainkan sebagai sebuah kesadaran rasional (baca: religiositas juga harus memiliki dimensi rasionalitas) bahwa sebagai “aku subjektif”, manusia juga harus merealisasikan “Ada absolut” yang secara imanen ada dalam dirinya. Dengan demikian, “aku subjektif” harus menyikapi orang lain juga sebagai “aku subjektif” karena secara imanen di dalam diri orang lain juga terdapat “Ada absolut”. Dalam perspektif inilah, terkandung keniscayaan untuk membangun relasi antar manusia dengan semangat kepedulian, keprihatinan, dan keberpihakan dalam bingkai kesetaraan.

Dari manusia yang memiliki religiositas dan sekaligus rasionalitas itu, demikian Y.B. Mangunwijaya, akan lahir individu yang mampu melihat multidimensionalitas (persoalan) kehidupan secara lebih utuh. Sebagai apapun ia dalam kehidupan, ia akan menghayati kehidupan dengan penuh kedewasaan. Kedewasaan ini, oleh Y.B. Mangunwijaya, dimaknai sebagai proses *sekularisasi*: yaitu “proses memperoleh sikap dewasa yang mengakui otonomi wilayah pengetahuan serta aktivitas manusia menurut bidang dan tingkatannya masing-masing”. Dalam pengertian ini, jika ia seorang ilmuwan maupun agamawan, maka ia seorang ilmuwan dan agamawan dalam pengertian yang sebenarnya, karena mampu menempatkan diri secara proporsional (Mangunwijaya, 1999b: 213-214). Inilah arti penting perkataan Y.B. Mangunwijaya di awal bahwa perkembangan kebangsaan

Indonesia akan jauh lebih optimal jika dilakukan oleh pribadi yang mandiri dan eksploratif, yang mampu memaknai secara arif konteks kehidupan berbangsa yang demikian luas ini.

Berangkat dari semua penjelasan yang ada, secara jelas terlihat bahwa Y.B. Mangunwijaya meletakkan aku sebagai bagian dari jejaring kehidupan. Bahwa denyut kehidupan manusia tidak terjadi dalam pribadi manusia semata, tetapi juga menyangkut banyak orang sekaligus banyak hal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa makna aku dalam konsep manusia Indonesia Y.B. Mangunwijaya adalah—meminjam analisis Heraty (1984: 37-38)—“aku fungsional”, yaitu aku yang mampu meneguhkan eksistensi dirinya sembari membuka pertautan yang luas dengan yang lain. Dengan aku fungsional, manusia membuka diri kepada yang lain dengan melibatkan segala gairah dan emosi yang dimilikinya.

KESIMPULAN

Segala usaha untuk merumuskan kembali identitas diri maupun identitas keindonesiaan seperti yang telah dilakukan oleh Y.B. Mangunwijaya, pun termasuk penelitian ini, harus dimaknai bukan sebagai jawaban permanen, melainkan jawaban sementara yang senantiasa perlu diperbarui dan dirumuskan kembali. Identitas diri dan keindonesiaan harus diterima dalam kesadaran sebagai proses “menjadi” yang berhubungan dengan masa lalu dan kekiniannya. Tetapi bukan berarti identitas diri dan keindonesiaan itu kita rumuskan dengan bersandar sepenuhnya pada masa lalu, berupa kehendak untuk mengembalikan diri dan keindonesiaan yang murni (puritanisme). Juga bukan berarti kita bergerak ekstrim menuju diri dan keindonesiaan kosmopolitanisme masa kini dengan sepenuhnya mengabaikan masa lalu. Mungkin yang lebih bijak adalah membiarkan identitas diri dan keindonesiaan selalu berada dalam ketegangan kreatif antara masa lalu dan masa kini, untuk kemudian secara optimis merancang masa depan.

Perlu ditekankan bahwa penelitian ini hanya sebatas membahas makna aku (individu) dalam konsep manusia Indonesia Y.B. Mangunwijaya. Sementara pemikiran Y.B. Mangunwijaya menyangkut persoalan relasi sains dan agama, serta tentang konsep federalisme misalnya, adalah topik lainnya yang sampai saat ini belum banyak disentuh dalam kajian ilmiah. Hal itu tentu dapat dilanjutkan untuk penelitian berikutnya, baik oleh penulis sendiri maupun peneliti lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Imran T. (1999). "Burung-Burung Rantau: Pengarang, Teks, Pembaca dalam Rangkaian Pemaknaan". dalam, Sindhunata (ed.). *Menjadi Generasi Pasca-Indonesia*. Kanisius. Yogyakarta.
- Allen, Pamela. (1999). "Kebangsaan dan Pencitraan dalam Tiga Roman Mangunwijaya". dalam, Sindhunata (ed.). *Menjadi Generasi Pasca-Indonesia*. Kanisius. Yogyakarta.
- Bagus, Lorens. (2000). *Kamus Filsafat*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Bakker, Anton, dan Achmad Charris Zubair. (1990). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Kanisius. Yogyakarta.
- Bodden, Michael H. (1999). "Wanita sebagai Bangsa dalam Durga Umayi". dalam, Sindhunata (ed.). *Menjadi Generasi Pasca-Indonesia*. Kanisius. Yogyakarta.
- Dahana, Radhar Panca. (2001). *Menjadi Manusia Indonesia*. LKiS. Yogyakarta.
- Dewanto, Nirwan. (1991). *Kebudayaan Indonesia: Pandangan Seorang Penyair*. Makalah untuk Kongres Kebudayaan. Jakarta.
- Hatley, Barbara. (1999). "Hibriditas, Otentisitas, dan Representasi Kewanitaan dalam Kesusasteraan Indonesia Modern". dalam, Sindhunata (ed.). *Menjadi Generasi Pasca-Indonesia*. Kanisius. Yogyakarta.
- Heraty, Toeti. (1984). *Aku dalam Budaya: Suatu Telaah Filsafat mengenai Hubungan Subjek-Objek*. Pustaka Jaya. Jakarta.
- Mangunwijaya, Y.B. (1981). *Burung-Burung Manyar*. Penerbit Djambatan. Jakarta.
- _____. (1992). *Burung-Burung Rantau*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- _____. (1995a). *Gerundelan Orang-orang Republik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- _____. (1995b). "50 Tahun Merdeka: Beberapa Sumbangan Pikiran dari Sudut Budaya". dalam, Alex Dinuth (ed.). *Menggapai Tantangan Masa Depan, Menyambut 30 Tahun Lemhannas*. Pustaka Sinar. Jakarta.
- _____. (1999a). *Pasca-Indonesia Pasca-Einstein: Esai-esai tentang Kebudayaan Indonesia Abad ke-21*. Kanisius. Yogyakarta.
- _____. (1999b). *Manusia Pascamodern, Semesta, dan Tuhan*. Kanisius. Yogyakarta.
- Merilyn. (2008). "Tanah (dan) Air Yang (akan) Hilang Di Balai Riam". dalam, Budi Susanto (ed.). *Ge(mer)lap Nasionalitas Postkolonial*. Kanisius. Yogyakarta.
- Peursen, C.A. van. (1988). *Strategi Kebudayaan*. terj. Dick Hartoko. Kanisius. Yogyakarta.
- Saleh, Farid Rachmad. (2005). *Identitas Manusia Menurut Y.B. Mangunwijaya*. Skripsi. Fakultas Filsafat UGM. Yogyakarta.
- Simbolon, Parakitri T. (1991). *Globalnya Globalisasi*. Kompas, Edisi 15 Juli.
- Soedjatmoko. (2000). "Kata Pengantar". dalam, Toety Herati. *Aku dalam Budaya: Suatu Telaah Filsafat mengenai Hubungan Subjek-Objek*. Pustaka Jaya. Jakarta.

**IDENTITAS PERSONAL KAPITA
DALAM CERITA RAKYAT
ORANG LOLODA PERANTAUAN**

Betsi Rooroh

Politeknik Negeri Manado

Kajian tentang identitas personal merupakan bagian dari kajian identitas budaya suatu subkultur masyarakat. Cerita rakyat memiliki kekayaan budaya yang mengangkat identitas personal tokoh leluhur dari subkultur cerita rakyat itu berasal. Tokoh leluhur yang arif dan bijaksana, tentu menjadi teladan dan dapat memandu semangat berkehidupan keturunannya di tengah kemajemukan budaya masyarakat. Kemajemukan budaya dalam satu ruang berkehidupan tanpa adanya teladan berkehidupan yang baik, dapat menimbulkan konflik seperti halnya kasus etnis Madura dan Dayak yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu (Iskandar, 2004).

Orang Loloda Perantauan yang berada di Pulau Lembeh Sulawesi Utara, adalah pemilik budaya Loloda, yakni subkultur masyarakat yang berasal dari Ternate. Kehidupan Orang Loloda Perantauan di Pulau Lembeh berada di tengah kemajemukan hidup dengan etnis lainnya. Rakyat Loloda perantauan memiliki tokoh leluhur yang unik namun arif dan bijaksana. Dari beberapa artikel yang mengulas tentang Orang Loloda Perantauan, diketahui bahwa kajian tentang budaya etnis Loloda ini sangat kurang. Dengan demikian dokumentasi tentang budaya etnis Loloda sangat kurang jumlahnya (Rahman, 2016, Mapanawang, 2012).

Pada era percepatan informasi ini, kandungan nilai-nilai identitas budaya dalam masyarakat, menyangkut pola hidup masyarakat yang telah ada sejak dahulu kala, kini mulai tergeser digantikan dengan pola hidup modern. Anggota komunitas tidak lagi mencari informasi dengan pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan di saung-saung, dan tempat favorit lainnya untuk berkumpul dan berkisah. Saat ini mereka cenderung melalui cara pintas dengan menggunakan alat komunikasi seperti telepon genggam dan atau perangkat komputer *portable* berkoneksi internet. Sikap anggota komunitas berubah sesuai perkembangan teknologi ini, terlebih kaum muda.

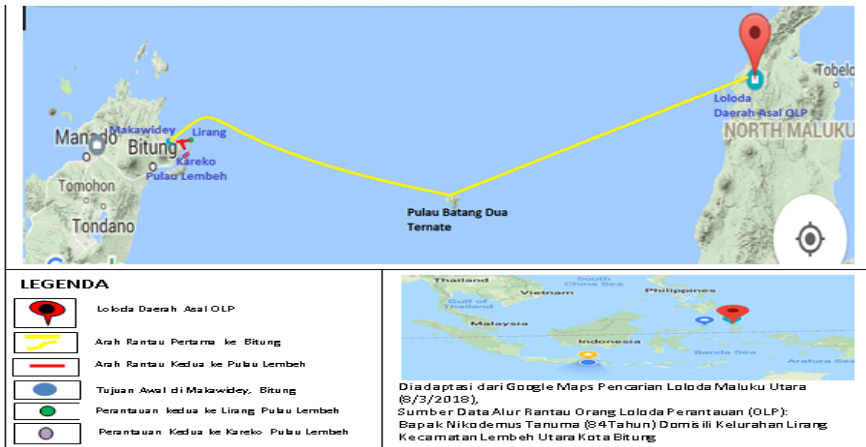
Indonesia memiliki budaya yang kaya akan nilai-nilai yang mampu meletakkan dasar kuat pada pondasi kehidupan bermasyarakat (Koentjaraningrat, 1981; Collier, 1994) Berdasarkan uraian tentang budaya di atas, penulis berpendapat bahwa budaya adalah sebuah pengakuan tentang penggolongan atau pengklasifikasian diri, komunal, dan hubungan keduanya didasarkan pada bentuk dan fungsi. Penggolongan ini tidaklah terlepas dari sejarah. Dengan demikian berbicara tentang budaya tidak terlepas dari pewarisan tradisi turun-menurun baik lisan maupun tulisan terkait identitas yang menyertai tradisi tersebut. Meminjam pendapat J.J. Jenkins, ia memuat definisi tradisi lisan seperti berikut ini:

Tradisi lisan terdiri dari informasi yang ada dalam ingatan. Sepanjang waktu, tradisi lisan berada di dalam ingatan dan hanya akan mencuat kembali saat dibutuhkan oleh keadaan, pada saat sekarang ataupun di masa depan. Informasi ini membentuk kelompok besar, yang meliputi seluruh warisan budaya-budaya yang tinggal di dalam ingatan. Tradisi dalam ingatan hanya dibedakan dari informasi terbaru lainnya oleh keyakinan bahwa mereka berasal dari generasi sebelumnya. Seperti halnya ingatan itu sendiri, hanya dibedakan dari informasi lain dari keyakinan bahwa suatu hal bisa diingat, tidak melalui mimpi atau fantasi. Keyakinan bisa saja keliru, tetapi pada umumnya mereka bertahan pada waktu yang lama dengan baik. Selain itu, ingatan tidak hanya merupakan sistem penyimpanan seperti alat perekam atau computer. Mengingat merupakan kegiatan, mencuatkan kembali yang telah terjadi di masa lampau. Kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan sedikit informasi namun juga untuk setiap informasi yang tersedia dan diperlukan, dimodifikasi sebanyak yang diperlukan untuk penciptaan kembali (J.J. Jenkins dalam Vansina, 2014: 231-232).

Tradisi lisan ada dalam usaha perorangan untuk mengenang sesuatu, membela sesuatu, membenarkan keterangan, melanjutkan kembali, dan kegiatan lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan memanggil kembali informasi yang ada dalam ingatan. Wujudnya menjadi aturan, tata nilai, agama, jenis makanan, bahasa, lagu, cerita, sejarah lisan, sastra lisan, dan lain-lain. Kesemuanya menjadi kekayaan yang sambung-menyambung dan hidup dalam masyarakat. Inilah budaya seperti dijelaskan sebelumnya. Tradisi lisan menjadi sebuah pewarisan tata cara berkehidupan atau berbudaya suatu komunitas yang penyampaiannya terjadi saat diinginkan atau muncul dalam situasi yang dibutuhkan. Berkaitan dengan diwariskan secara lisan, maka ada anggota dalam komunitas yang dituakan dan dipercaya untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang diketahui dari hal yang pernah dilihat dan didengarkan pada jamannya, yang bagi pendengar nantinya akan diolah menjadi berbagai bentuk untuk kepentingan komunitasnya dan diteruskan atau diwariskan kembali kepada generasi berikutnya (Vansina, 2014).

METODE

Kajian tentang tradisi lisan ini dilaksanakan di Kelurahan Lirang Kecamatan Bitung Selatan tepatnya di Pulau Lembeh Sulawesi Utara (Gambar 1). Sastra lisan legenda Masyarakat Loloda Perantauan berjudul *Asal Mula Nama Tempat Kora-Kora* penulis dapatkan dari sumber data lisan seorang responden tertua dan beberapa responden yang saat ini menjadi pelaku adat. Para responden memiliki profesi yang berbeda, mulai dari petani, pelaut, pengurus gereja, dan pengacara. Usia responden berada di rentang 50 tahun keatas. Responden tertua berusia 95 tahun bernama Nikodemus Tanuma. Responden tertua ini lahir di Bitung, Sulawesi Utara, tepatnya desa Naemunding pada 5 Juni 1922. Orang tua ayah dan ibunya berasal dari Loloda, Maluku.



Gambar 1. Peta Arah Rantau Orang Loloda di Pulau Lembeh (Rooroh,2020a)

Kajian ini menggunakan Pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif di antaranya mempunyai sifat *emic post-priori* dan *holistic kontekstual* (Bogdan dan Biklen, 1982: 10). Untuk mendapatkan analisis identitas personalnya, cerita reka-ulang yang digunakan dalam kajian ini dipilah-pilah dan diberi nomor. Pemilahan dan penomoran didasarkan pada satu gagasan makna yang tergambar dari uraian cerita yang menjadi data lisan tersebut. Uraian menggunakan penomoran dimaksudkan untuk memberi tanda pada adegan-adegan dalam cerita tersebut. Data aslinya menggunakan Bahasa Melayu Manado. Data dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia oleh penulis, setelah diverifikasikan dengan penutur asli.

Karakteristik identitas budaya menurut Collier(1884) menyangkut; 1) persepsi diri berupa proses pengakuan diri (avowal) dan pemberian (*ascription*, seperti: *stereotype*) orang lain; cara mengekspresikan identitas melalui simbol: inti, label, dan norma; 2) bentuk-bentuk identitas: individual, relasional, dan komunal; 3) kualitas identitas: tahan lama atau dinamis; 4) komponen kognitif, afektif, dan perilaku dari identitas; 5) tingkat isi dan hubungan interpretasi; 6) perbedaan-perbedaan kemononjolan dan intensitas.

Talcott Parsons (dalam Ritzer, 2011) menjelaskan tentang identitas personal sebagai sistem kepribadian (personal) yang menjalankan fungsi pencapaian tujuan dengan mendefinisikan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang digunakan untuk mencapainya, peranan aktor dalam sistem, di mana aktor memahami peranannya dan dengan pemberian diri sepenuhnya untuk mencapai tujuan sistem.

Melacak identitas personal yang menjadi bagian dari identitas budaya, yakni bentuk-bentuk identitas, dalam kajian ini difokuskan pada cerita reka-ulang kepahlawanan atau legenda dari Orang Loloda Perantauan yang berjudul *Asal Mula Nama Kora-Kora* (Rooroh, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identitas Personal Orang Loloda Perantauan

Komunitas Loloda perantauan yang berada di kota Bitung berasal dari tanah Loloda di Pulau Halmahera bagian utara dan Barat. Loloda secara umum terbagi atas dua bagian yaitu Loloda Utara di Halmahera Utara (Halut) dan Loloda Selatan di Halmahera Barat (Halbar). Keterkaitan antara Loloda dengan kekuasaan lain di Sulawesi, dapat dilacak dari sejarah raja-raja Bolaang Mongondow. Kajian sejarah yang ditulis oleh *W. Dunnebie*, menjelaskan bahwa asal-usul kerajaan Bolaang Mongondow berpangkal pada seorang tokoh legendaris yang hidup di abad ke XIV bernama *Loloda Mokoagow* – tokoh ini diduga merupakan anak dari raja Loloda yang melarikan diri ke *Sula Wessy* karena negerinya diserang oleh *Kumalo Poeloe*, penguasa Ternate. Peristiwa ini diperkirakan terjadi pada tahun 1380. Setibanya anak raja Loloda ini di suatu tempat yang dikenal dengan nama kuno: *Maadono* (*Kema*, Sulawesi Utara), tokoh ini merupakan cikal-bakal yang menurunkan raja-raja Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara. Dari rekaman sejarah ini dapat dipastikan bahwa pulau di sekitar Minahasa Utara termasuk pulau Lembe dikuasai oleh kerajaan *Maadono*. Di pulau Lembe, saat ini, ada tiga desa yang dihuni oleh suku Loloda yaitu

desa Lirang, Puloputus, dan desa Nusu campuran Loloda-Sangihe (Abdul Rahman, 2015; Abdul Rahman 2016).

Berdasarkan informasi dari tetua adat Orang Loloda Perantauan, Leluhur mereka berada di Sulawesi Utara mengikuti anak raja Loloda yang menjadi raja Mongondow dan setia mengabdikan kepada raja sebagai pasukan penjaga pantai yang gagah berani dan ditakuti perompak Mindanow (dikisahkan oleh Nikodemus Tanauma dan Alex Taliwunan, April 2018).

Kode nomor urut 1 - Ada lima orang Kapita (komandan): Kapita PaliHEMA, Kapita Saribu, Kapita Yogo, Kapita Toni, dan Kapita Baikole. Mereka adalah orang-orang pilihan karena memiliki kekuatan yang melebihi rakyat biasa. Tergambar bahwa masyarakat pemilik cerita ini dengan bangga mengatakan bahwa mereka sangat menghormati pribadi para kapita seperti terlihat pada kalimat “mereka adalah orang-orang pilihan” serta mengakui bahwa para kapita memiliki kemampuan lebih dari masyarakat biasanya. Kemampuan lebih ini diterjemahkan sebagai kemampuan adu kekuatan fisik. Pengakuan ini terkait kode dengan penomoran 6. Tetapi sejak dahulu kala, mereka hanya takut pada orang yang memiliki lobang anting yang besar pada telinga. Orang yang memiliki lobang seperti lobang anting pada telinga inilah si orang kuat dari Loloda. Besarnya lobang anting ini menjadi penanda pada seseorang di zaman itu bahwa dia telah lulus uji ketangkasan dan diakui memiliki kesaktian (Sumber: Responden).

Mereka juga memiliki keahlian masing-masing seperti dinyatakan pada nomor urut 13. Lima kapita ini punya keahlian masing-masing, dan nomor urut 14 - Kalau berperang di laut, itu tugas Kapita PaliHEMA. PaliHEMA memiliki arti berhadapan dengan musuh dari haluan. Kapita PaliHEMA memiliki kemampuan khusus berkaitan dengan pemanfaatan kekuatan angin, sehingga dipercaya untuk menangani musuh yang muncul dari arah haluan kapal. Pada nomor 23 - Untuk menghargai Kapita Saribu yang dikenal sebagai komandan pasukan, orang Makalisung dan orang Loloda yang sudah tinggal di Makalisung membuat sebuah patung Kapita Saribu di pinggir pantai Makalisung. Kapita Saribu adalah sosok yang memiliki keahlian lebih sehingga dipercaya mampu menjadi pemimpin pasukan dalam tugas mereka menjaga teritorial laut kekuasaan Raja Loloda.

Keahlian lebih dapat diterjemahkan sebagai memiliki kemampuan adu fisik dan kemampuan mengatur anak buahnya dalam tugas. Pada cerita ini, perahu mereka kandas dan rusak berat. Keahlian Kapita Saribu dan kawan-kawannya dipertaruhkan dengan kekuatan alam. Kapita Saribu mengakui bahwa sehebat-hebatnya kekuatan manusia, ada saat di mana manusia tidak dapat menahan dahsyatnya kekuatan alam. Keputusannya sebagai

pemimpin meminta anak buahnya menyelamatkan diri dan meninggalkan perahu adalah contoh pemimpin yang bijaksana.

Bagaimana seseorang memberdayakan segala kemampuan yang ada dalam dirinya dan menggerakkannya untuk mencapai tujuan sesuai yang diharapkan adalah sebuah usaha yang akan menggambarkan identitas personalnya. Seperti halnya para orang kuat dari Loloda ini mendapatkan identitas diri sebagai tokoh yang disegani karena usaha dari tokoh ini membuat dirinya memiliki kemampuan lebih untuk diberdayakan menjadi kekuatan dalam menjalankan tugas sebagai orang yang bisa mengatasi perampok dan kemungkinan dihadapkan dengan musuh dari atasan mereka. Kekuatan itu sebenarnya diperoleh dari mempotensikan segala unsur-unsur yang dimiliki tubuh dengan pelatihan yang mendalam dan berkelanjutan. Pengaktifan penuh semua komponen ini dapat menimbulkan energi yang kuat. Ketika energi yang kuat itu disalurkan dalam sebuah pertarungan, lawan yang tidak mempotensikan seluruh kemampuan tubuhnya pasti akan kalah telak dan pemenangnya disebut dengan *orang kuat*. Kata *orang kuat* juga bermakna mistis.

Pengetahuan untuk mengumpulkan energi dan mempotensikannya menjadi sebuah kekuatan penuh pada jaman dahulu belum diteliti dan dibicarakan sebagai sebuah ilmu tentang fisik, sehingga banyak yang beranggapan bahwa setelah dia bersemedi, seseorang akan mendapatkan ilmu yang kekuatannya berasal dari dunia mistis. Setelah mereka memiliki kecakapan fisik, orang Loloda melamar menjadi abdi raja dan bertugas sebagai anak buah raja. Sebuah kebanggaan tersendiri bagi orang Loloda jika dapat melayani raja sebagai penjaga keamanan dan dikirim untuk menjaga teritori terluar area kekuasaan suatu kerajaan. Demikian pula dengan para Kapita ini.

Peranan aktor dalam sistem, dimana aktor memahami peranannya dan dengan pemberian diri sepenuhnya untuk mencapai tujuan sistem, seperti yang disampaikan Parsons, semuanya tergambar pada tokoh cerita para Kapita, yakni semangat mereka mempotensikan seluruh kemampuan fisiknya untuk mengabdikan. Semangat pemberian diri sepenuhnya seperti yang ditunjukkan para Kapita ini selaras dengan slogan Pemerintah saat ini, yakni “Kerja, kerja, kerja”. Identitas personal yang ditemukan inilah yang nantinya menjadi penguat warisan nilai-nilai yang ada dalam tradisi lisan masyarakat Loloda perantauan untuk pemantapan pendidikan budaya generasi selanjutnya. Semangat yang muncul dalam diri masing-masing Kapita dan anak buahnya ini seharusnya menjadi sebuah panutan yang baik untuk generasi sekarang ini.

SIMPULAN

Identitas personal yang tergambar melalui tokoh cerita sebagai wujud nilai arif dari para leluhur yang ada dalam budaya pada suatu daerah akan sangat berguna bagi pembentukan karakter turunan mereka dalam berkehidupan yang lebih dinamis. Identitas budaya lokal perlu diwariskan terus menerus pada generasi muda Masyarakat Loloda Perantauan agar warisan identitas budaya lokal masyarakat setempat tidak punah seperti halnya berbagai kekayaan budaya kerajaan Loloda yang mulai terlupakan seperti yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya. Setelah cerita rakyat *Asal Mula Nama Kora-kora* dianalisis, dapat disimpulkan bahwa leluhur dalam tokoh cerita tersebut adalah figur tokoh leluhur yang gagah berani dan memiliki kesetiaan yang tinggi pada tugasnya. Figur yang selalu melatih diri untuk memiliki kemampuan yang tinggi. Figur tokoh pemimpin yang dapat mengambil keputusan tepat dalam kondisi genting. Semua ini menjadi kriteria ideal manusia yang dibutuhkan, baik dalam dunia kerja maupun dunia usaha. Dalam dunia kerja, dibutuhkan manusia yang loyal. Dalam dunia usaha, sangat dibutuhkan manusia-manusia yang pemberani. Figur tokoh pemberani dan loyal dari pasukan raja Loloda seperti dikisahkan di atas seharusnya menjadi identitas personal turunannya.

SARAN

Penelitian ini terbatas pada satu cerita rakyat yang dimiliki oleh Orang Loloda Perantauan. Masih banyak cerita rakyat Orang Loloda Perantauan yang belum terdokumentasi dan belum dikaji secara mendalam dari berbagai perspektif ilmu khususnya bidang sastra dan budaya untuk mendapatkan nilai-nilai berkehidupan di dalam cerita tersebut. Begitu juga dengan cerita rakyat dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan demikian kajian sejenis dapat dilanjutkan oleh peneliti lainnya..

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, R., dan Biklen. (1982). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Collier, Mary Jane, (1994), “*Cultural Identity and Intercultural Communication*”, dalam Samovar, Larry A. dan Porter, Ricard E. (eds), *Intercultural Communication: A Reader*, Berlmont: Wadsworth, h. 36-44
- Iskandar, D. (2004). “Identitas Budaya dalam Komunikasi Antar-Budaya: Kasus Etnik Madura dan Etnik Dayak.” *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 6(2), 119–140.
- Koentjaraningrat. (1981). *Kebudayaan, Mentalits, dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia
- Mapanawang, Arend L..(2012). *Loloda Kerajaan Pertama Moluccas Sejarah Kerajaan Loloda Maluku. Tobelo, Maluku Utara: Yayasan Medika Mandiri Halmahera*.
- Miles, M.B., dan Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. J. (1997). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Rosda Karya.
- Rahman, A.(2015). “Struktur Sosial Politik Kerajaan Loloda di Antara Minoritas Islam dan Mayoritas Kristen Abad XVII-XX” *Jurnal Al-Turas Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya, dan Agama* Vol. XXI No.2 Juli 2015 Penerbit: Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahman, A. (2016). “*Identitas Historis Orang Loloda di Pesisir Halmahera hingga Pasca Era Reformasi Indonesia 1999-2010*”. *Al -Turas*, XXII(2), 223–238
- Ritzer, George, dan Doughlas J. Goodman.(2011). *Teori Sosiologi Modern*. Edisi keenam. Jakarta: Kencana
- Rooroh, Betsi. (2020). “*Harmoni Kehidupan Orang Loloda Perantauan dalam Cerita Rakyat: Kajian Antropologi Sastra*”. *Disertasi*. Malang: Universitas Negeri Malang
- Rooroh, Betsi (2020). *Cerita Rakyat Orang Loloda Perantauan di Pulau Lembeh Kota Bitung*. Yogyakarta: Penerbit Tangga Ilmu
- Vansina, J. (2014). *Tradisi Lisan Sebagai Sejarah*. Penerbit Ombak.

**IMPLEMENTASI
PERMAINAN TRADISIONAL
DALAM MEMBENTUK
KARAKTER ANAK
USIA 5-6 TAHUN**

Nurhayati

Universitas Tadulako

Windasari AR. Haku

Pendidik TK Mantikulore Lasoani Kota Palu

Anak usia dini merupakan kelompok manusia yang berada pada proses pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini mengisyaratkan bahwa anak usia dini adalah individu yang unik yang memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan fisik, kognitif, sosio-emosional, kreativitas, bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak.

Berdasarkan Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Pendidikan Anak Usia Dini mengacu pada pendidikan yang diberikan kepada anak usia 0-6 tahun atau sampai dengan 8 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Aspek-aspek yang harus dikembangkan dalam pendidikan anak usia dini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini bahwa ada enam aspek yang harus dikembangkan pada anak yaitu aspek perkembangan nilai moral agama, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional dan seni anak. Salah satu bidang pengembangan yang harus dikembangkan dan distimulasi sejak dini adalah perkembangan moral atau nilai karakter anak.

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi (IT) hampir menggusur permainan tradisional. Anak-anak sekarang lebih banyak memainkan permainan berbasis IT seperti *play station*, *game online*, *facebook*, *twitter* dan masih banyak lagi permainan yang berbasis IT lainnya yang mengakibatkan tubuh anak menjadi pasif. Budaya tersebut tentunya tidak mendukung program pemerintah terkait pendidikan karakter. Permainan tradisional, secara perlahan tapi pasti, mulai ditinggalkan padahal banyak nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional, seperti kerja sama, keberanian, toleransi, kedisiplinan, sportivitas, percaya diri, kejujuran dan sebagainya.

Permainan tradisional gobak sodor dipilih untuk diimplementasikan kembali pada anak, melihat sebagian anak hanya diam di rumah untuk memainkan permainan yang ada di *smartphone*, dan permainan tradisional sudah jarang diimplementasikan di sekolah. Permainan gobak sodor tidak hanya dapat mengembangkan nilai karakter anak, tetapi juga dapat merangsang motorik anak, terutama pada motorik kasar. Tentunya pemberian ASI eksklusif akan membantu dan sangat berpengaruh

terhadap daya tahan tubuh dan perkembangan motorik anak. Seperti yang dikemukakan Al-Rahman dalam Nurhayati & Ramli (2021:83) bahwa anak-anak yang tidak menyusui ASI eksklusif akan berpeluang mengalami perkembangan psikomotor di bawah standar dua kali lipat dibandingkan anak yang mendapatkan ASI eksklusif.

Pembentukan karakter anak tidaklah lahir begitu saja, ada proses yang dilewatinya sehingga proses tersebut menjadi karakter yang melekat dalam diri seorang anak, mulai dari anak tersebut lahir dan tumbuh berkembang menjadi dewasa di lingkungan keluarga, bergaul dengan teman-teman dalam kelompok permainan, sekolah, sampai dengan masyarakat. Sebagai orangtua, tanpa disadari, sikap orang tua yang negatif pada anaknya justru akan menjatuhkan anak tersebut. Misalnya, ketika orang tua memukul dan memberikan tekanan yang menjadikan anak bersikap negatif, rendah diri, minder, penakut, dan tidak berani mengambil resiko, dan karakter-karakter tersebut akan dibawanya sampai ia dewasa. (Prasanti, D. & Fitrianti, D. R. 2018:14)

Pendidikan karakter merupakan cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara (Zubaedi dalam Fadillah & Khorida 2013:21). Pembentukan karakter pada anak usia dini sangat penting diterapkan melalui cara-cara yang sederhana di sekolah masing-masing. Misalnya dengan datang kesekolah tepat waktu, berpakaian dengan rapi, bersikap baik dengan guru dan teman, tidak memukul dan mengganggu teman, bermain permainan tradisional, dan masih banyak lagi cara-cara sederhana yang dapat diterapkan.

Dilansir oleh Tempo.co, terdapat fenomena penganiayaan kakak kelas terhadap adik kelasnya yang masih duduk di bangku Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Anak berusia empat tahun menjadi korban penganiayaan brutal kakak kelasnya. Akibatnya ia terluka di seluruh bagian wajah dan kepala dengan cukup parah. Penganiayaan terjadi saat ia pamit keluar kelas untuk buang air kecil di kamar mandi. Disaat bersamaan ada kakak kelasnya yang juga hendak ke kamar mandi yang sama. Diduga karena saling berebut, anak tersebut dihajar habis-habisan di kamar mandi. Hal ini membuktikan bahwa pentingnya pembentukan karakter anak sejak dini.

Permainan tradisional menurut Asep Ardiyanto (2019:173) ialah jenis permainan rakyat yang merupakan warisan kebudayaan nenek moyang bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkemabang dalam suatu komunitas masyarakat tertentu, diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Salah satu bentuk manfaat dari permainan tradisional yaitu

untuk penanaman nilai-nilai karakter. Menurut Rosdiani (2012:108) permainan tradisional adalah suatu aktivitas permainan yang tumbuh dan berkembang di daerah tertentu, yang sarat dengan nilai-nilai budaya dan tata nilai kehidupan masyarakat dan diajarkan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya”.

Kemudian menurut Banu Setyo Adi. dkk (2020:34) permainan tradisional merupakan warisan budaya bangsa yang sudah dimainkan sejak dulu. Permainan tradisional mampu menstimulasi berbagai aspek perkembangan anak sebagai bagian dari pendidikan. Guru sudah semestinya mengenalkan kepada anak tentang permainan tradisional tersebut. Terdapat beberapa macam permainan tradisional mulai dari olah pikir, bernyanyi dan ketangkasan. Permainan tradisional terbukti sarat dengan makna dan muatan nilai positif untuk membentuk karakter anak sebagai generasi penerus bangsa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara guru, karakter anak belum berkembang dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada saat proses pembelajaran sebagian anak masih ada yang tidak disiplin, ada anak yang tidak mau bekerja sama dan tidak jujur sehingga peneliti memilih permainan tradisional untuk membentuk karakter anak.

KAJIAN TEORI

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan pembinaan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dengan tujuan dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Ayat (14) tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini bahwa ada enam aspek yang harus dikembangkan pada anak yaitu aspek perkembangan nilai moral agama, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional dan seni anak.

Selanjutnya, Suyadi & Maulidya Ulfah (2013:17), “Pada hakikatnya pendidikan anak usia dini adalah “pendidikan yang diselenggarakan

dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada perkembangan seluruh aspek kepribadian anak”.

Sebagaimana Bambang Hartoyo dalam Fadillah (2016:66) mendeskripsikan pendidikan anak usia dini, sebagai berikut:

1. Pendidikan anak usia dini adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak.
2. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, emosi dan spiritual), sosial emosional (sikap, perilaku dan agama), bahasa dan komunikasi.
3. Sesuai dengan keunikan dan pertumbuhan pendidikan anak usia dini disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian anak usia dini merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak, karena masa emas atau *golden age* adalah masa yang tidak tergantikan pada masa mendatang.

2. Permainan Tradisional

Permainan tradisional merupakan permainan yang sangat dirindukan oleh generasi 90-an. Pasalnya memang di zaman ini sangat jarang sekali dijumpai dimainkan oleh anak-anak. Ada banyak manfaat dan filosofi yang tersirat di dalam permainan tradisional itu sendiri.

Selanjutnya, permainan tradisional adalah permainan tempo dulu yang biasa dimainkan oleh anak-anak jaman dulu dan menggunakan benda-benda alam, seperti batu, kayu, pasir, tanah, dan lain-lain. Permainan tradisional sangat populer dikalangan masyarakat sebab dapat dimainkan oleh anak-anak sampai orang berusia lanjut. Menurut Danandjaja dalam Achroni (2012:45) “Permainan Tradisional adalah salah satu bentuk permainan anak yang berbeda secara lisan diantara anggota kolektif tertentu berbentuk tradisional, dan diwarisi turun temurun serta banyak mempunyai variasi”. Permainan tradisional tidak memiliki aturan tertulis

namun jalannya permainan ditentukan oleh aturan yang telah disepakati.

Permainan tradisional merupakan hasil penggalian dari budaya Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu menurut ajaran turun temurun dari nenek moyang, yang di dalamnya banyak mengandung nilai-nilai pendidikan karena dalam kegiatan permainannya memberikan rasa senang, gembira, ceria dan bahagia pada anak yang memainkannya. Selain itu permainannya dilakukan secara berkelompok sehingga menimbulkan rasa demokrasi, kerjasama, dan toleransi antar teman main dan alat permainan yang digunakan relatif sederhana.

Selanjutnya permainan tradisional adalah permainan yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang yang harus dilestarikan dan diajarkan kepada anak-anak terutama anak usia dini, agar tidak terlupakan oleh kemajuan zaman dan ilmu teknologi. Menurut Dharmamulya, S (2012:18) bahwa “Permainan tradisional anak adalah proses melakukan kegiatan yang menyenangkan hati anak dengan mempergunakan alat sederhana sesuai dengan potensi yang ada dan merupakan hasil penggalian budaya setempat menurut gagasan dan ajaran turun-temurun dari nenek moyang”. Menurut Wahyuningsih (2013:5) bahwa “Permainan tradisional pada umumnya dimainkan secara berkelompok atau minimal dua orang “. Permainan tradisional yang telah diwariskan oleh nenek moyang sangatlah beragam dan bervariasi, baik dengan menggunakan alat permainan atau tidak dan melibatkan pemain baik seorang diri maupun sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa permainan tradisional adalah permainan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain sebagai sarana hiburan, permainan ini memiliki banyak keunggulan salah satunya dapat memberikan unsur pendidikan, dan dapat mngembangkan berbagai aspek (Fisik motorik kasar, karakter, moral dan sosial).

3. Permainan Tradisional Gobak Sodor

Permainan gobak sodor merupakan permainan menghalangi lawan untuk mencapai garis akhir. Permainan ini dimainkan oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari tiga orang. Satu tim sebagai penghalang dan satu tim sebagai penyerang. Gobak sodor dimainkan pada lapangan berbentuk bujur sangkar yang pembatasnya ditandai dengan kapur atau sejenisnya. Posisi penyerang dan penjaga ditukar ketika pemain penyerang disentuh oleh pemain penghalang. Gobak sodor merupakan permainan beregu. Dalam permainan ini, terdapat banyak gerakan yang tidak sederhana.

Selanjutnya permainan gobak sodor adalah sebuah aktivitas rekreasi dengan tujuan bersenang-senang, mengisi waktu luang, atau berolahraga ringan. Permainan gobak sodor biasanya dilakukan sendiri atau bersama-sama (kelompok). Sejarah permainan gobak sodor menurut Achroni (2012:55) dikenal pula dengan nama galasin atau galah asin. Ada beberapa dugaan terkait dengan nama permainan ini. Ada yang menduga bahwa permainan ini berasal dari Yogyakarta. Nama gobak sodor berasal dari kata *gobak* dan *sodor*. Kata *gobak* artinya bergerak dengan bebas, sedangkan *sodor* artinya tombak. Dahulu, para prajurit mempunyai permainan yang bernama *sodoran* sebagai latihan keterampilan dalam berperang. Sodor ialah tombak dengan panjang kira-kira 2 meter, tanpa mata tombak yang tajam pada ujungnya.

Menurut Sabitul Kirom (2017: 94-95) Permainan gobak sodor merupakan jenis permainan beregu. Dalam praktiknya, permainan ini melatih berbagai keterampilan yang berhubungan dengan taktik, fisik, dan mental. Permainan ini dilakukan pada area berbentuk bujur sangkar. Permainan ini dilakukan oleh dua tim yang terdiri atas tim penjaga dan tim pemain. Setiap anggota tim pemain berusaha mencapai garis belakang dari arena pertandingan, sedangkan tim penjaga berusaha mencegahnya. Jika ada salah satu tim pemain tersentuh oleh penjaga, maka kedua tim bergantian sebagai pemain dan penjaga.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa permainan tradisional gobak sodor merupakan sebuah aktivitas rekreasi dengan tujuan bersenang-senang, mengisi waktu luang, atau berolahraga ringan. Permainan ini dimainkan secara beregu atau berkelompok, permainan ini dilakukan oleh dua tim yang terdiri atas tim pemain dan penjaga.

4. Membentuk Karakter Anak

Pembentukan karakter dalam pendidikan tidak bisa hanya mengenali atau menghafal jenis-jenis karakter saja, tetapi harus melewati pembiasaan dan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga maupun di sekolah.

Selanjutnya karakter adalah istilah yang diambil dari bahasa Yunani yang berarti "*to mark*" (menandai), yaitu menandai tindakan atau tingkah laku seseorang. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, karakter diartikan sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang. Karakter identik dengan kepribadian karena kepribadian merupakan ciri, karakteristik, atau sifat khas pada diri seseorang yang

bersumber dari bentuk-bentuk yang diterima dari lingkungan seperti lingkungan keluarga pada masa kecil dan bawaan sejak lahir (Najib 2016:59).

Nilai pendidikan karakter yang harus diterapkan dalam setiap proses pendidikan karakter yaitu: 1) religius, 2) jujur, 3) toleransi, 4) disiplin, 5) kerja keras, 6) kreatif, 7) mandiri, 8) demokratis, 9) rasa ingin tahu, 10) semangat kebangsaan, 11) cinta tanah air, 12) menghargai prestasi, 13) ramah atau komunikatif, 14) cinta damai, 15) gemar membaca, 16) peduli lingkungan, 17) peduli sosial, dan 18) tanggung jawab (Nurhayati 2018:157-158).

Salah satu tempat terbaik dalam pembentukan dan pengembangan karakter anak berada di lingkungan sekolah. Pendidikan karakter bagian dari penanaman akhlak yang baik, yakni pengetahuan yang memberikan pengajaran, pembinaan, bimbingan dan pelatihan kepada peserta didik agar memiliki akhlak yang baik dan Islami merupakan bagian dari pengembangan ilmu dalam membina mental keberagaman dan perilaku seseorang (Salim dalam IW Wahyuni. & AA Putra. 2020:38).

Selanjutnya menurut Jito Subianto (2013:343) beberapa contoh pembentukan karakter yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah:

1. Membiasakan anak berbudaya salam, sapa dan senyum.
2. Tiba disekolah mengucapkan salam sambil salaman dan cium tangan guru.
3. Menyapa teman, satpam, penjual di kantin atau *cleaning service* di sekolah.
4. Menyapa dengan sopan tamu yang datang ke sekolah.
5. Membiasakan anak berbicara dengan bahasa yang baik dan santun.
6. Mendidik anak duduk dengan sopan di kelas.
7. Mendidik anak makan sambil duduk di tempat yang disediakan, tidak sambil jalan-jalan.
8. Membimbing dan membiasakan anak shalat Dhuha dan shalat Dzuhur berjamaah di sekolah.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa karakter identik dengan perilaku, akhlak, etika, dan moral, sehingga karakter merupakan nilai- nilai perilaku manusia yang universal meliputi seluruh aktivitas manusia, baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhan, dengan dirinya, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungannya, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tatakrama, budaya, dan adat istiadat.

5. Implementasi Permainan Tradisional dalam Membentuk Karakter Anak

Permainan tradisional yang juga merupakan budaya bangsa Indonesia telah terbukti dapat membentuk karakter positif pada anak. Menurut Tuti Andriani (2012:135) permainan tradisional mengandung banyak unsur dan persiapan bagi anak menjalani kehidupan bermasyarakat. Adapun manfaat permainan tradisional dalam membentuk karakter anak diantaranya yaitu: kejujuran, sportivitas, kegigihan dan kegotong-royongan. Dengan permainan tradisional, anak-anak bisa melatih konsentrasi, pengetahuan, sikap, keterampilan dan ketangkasan yang secara murni dilakukan oleh otak dan tubuh manusia. Selain itu, permainan tradisional dapat mengembangkan aspek pengembangan moral, nilai agama, sosial, bahasa dan fungsi motorik.

Menurut Nur dalam Rejeki H, dkk (2020:99) bermain permainan tradisional cublak-cublak suweng, dakon, gobak sodor, engklek dan jamuran. Nilai-nilai karakter akan tertanam secara otomatis pada permainan tradisional. Menurut Megawangi dalam Banu Setyo Adi. dkk (2020:38) anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter apabila tumbuh pada lingkungan yang berkarakter, sehingga fitrah setiap anak yang dilahirkan suci dapat berkembang secara optimal. Mengingat lingkungan anak bukan saja lingkungan keluarga yang sifatnya mikro, maka sekolah, masyarakat, media massa, atau komunitas lainnya juga ikut mengambil peran dalam perkembangan karakter anak. Mengembangkan generasi penerus bangsa yang berkarakter baik adalah tanggung jawab bersama, dan salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui penerapan permainan tradisional di sekolah.

Selanjutnya Cahyono dalam Haerani Nur (2018:91) mengemukakan sejumlah karakter yang dimiliki oleh permainan tradisional yang dapat membentuk karakter positif pada anak sebagai berikut:

1. Permainan tradisional cenderung menggunakan atau memanfaatkan alat atau fasilitas di lingkungan kita tanpa harus membelinya sehingga perlu daya imajinasi dan kreativitas yang tinggi. Banyak alat-alat permainan yang dibuat atau digunakan dari tumbuhan, tanah, genting, batu, atau pasir. Misalkan mobil-mobilan yang terbuat dari kulit jeruk bali, egrang yang dibuat dari bambu, permainan encrak yang menggunakan batu, telepon-teleponan menggunakan kaleng bekas dan benang nilon dan lain sebagainya.
2. Permainan anak tradisional melibatkan pemain yang relatif banyak.

Tidak mengherankan, kalau kita lihat hampir setiap permainan rakyat begitu banyak anggotanya. Sebab, selain mendahulukan faktor kesenangan bersama, permainan ini juga mempunyai maksud lebih pada pendalaman kemampuan interaksi antar pemain (potensi interpersonal). seperti petak umpet, congklak, dan gobak sodor

3. Permainan tradisional menilik nilai-nilai luhur dan pesan-pesan moral tertentu seperti nilai-nilai kebersamaan, kejujuran, tanggung jawab, sikap lapang dada (kalau kalah), dorongan berprestasi, dan taat pada aturan. Semua itu didapatkan kalau si pemain benar-benar menghayati, menikmati, dan mengerti sari dari permainan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permainan tradisional bermanfaat bagi anak, karena melalui permainan tradisional karakter anak dapat terbentuk dengan baik. Terutama dalam permainan gobak sodor anak dapat mengembangkan perilaku disiplin, kerja keras, kejujuran dan sportivitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif (Mulyana dalam Ditha Prasanti & Dinda Rakhma, R 2018:15). Subjek penelitian ini berjumlah 15 orang anak yang terdiri atas 8 orang anak laki-laki dan 7 orang anak perempuan. Teknik pengumpulan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik analisis data menggunakan teknik persentase dan deskriptif untuk memperoleh data kualitatif melalui rubrik penilaian. Jika sudah berkembang melampaui harapan guru maka diberikan skor bintang 4 (☆☆☆☆). Jika sudah mencapai perkembangan sesuai dengan harapan, maka diberikan skor bintang 3 (☆☆☆). sementara anak yang masih dalam proses berkembang diberikan skor bintang 2 (☆☆) dan anak yang belum sesuai dengan harapan guru diberikan skor bintang 1 (☆). (Depdiknas, 2010:11)

Untuk mengetahui persentase atau rerata dari aspek yang sudah diamati, data diolah secara kualitatif dengan menggunakan perhitungan berdasarkan persentase (%) sesuai dengan rumus yang dikemukakan oleh Sujiono (2012:43), sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Angka Persentase

f = Frekuensi Hasil Observasi

N = number of case (Jumlah frekuensi keseluruhan)

HASIL PENELITIAN

1. Analisis dan Deskripsi Data Pembentukan Karakter

Hasil pengamatan pembentukan karakter anak berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, disajikan pada tabel dibawah ini berdasarkan aspek yang diamati, sebagai berikut :

Tabel 1 Rekapitulasi Pembentukan Karakter Anak Pekan Pertama

Kategori	Pembentukan Karakter yang Diamati						Rerata (%)
	Disiplin		Kerja Keras		Kejujuran		
	F	%	F	%	F	%	
☆☆☆☆	0	0	0	0	0	0	0
☆☆☆	3	20	4	26,67	5	33,33	26,67
☆☆	8	53,33	8	53,33	7	46,67	51,11
☆	4	26,67	3	20	3	20	22,22

Berdasarkan tabel 1, dapat disimpulkan bahwa persentase tertinggi dengan aspek pengamatan disiplin terdapat pada skor bintang 3 (☆☆☆) dengan nilai 53.33%, sedangkan yang terendah yaitu pada skor bintang 4 (☆☆☆☆) dengan nilai 0%. Aspek pengamatan kerja keras, persentase tertinggi terdapat pada skor bintang 3 (☆☆☆) dengan nilai 53.33%, sedangkan persentase terendah terdapat pada skor bintang 4 (☆☆☆☆) dengan nilai 0%. Aspek pengamatan kejujuran, persentase tertinggi terdapat pada skor bintang 3 (☆☆☆) dengan nilai 46.67%, sedangkan persentase terendah terdapat pada skor bintang 4 (☆☆☆☆) dengan nilai 0%.

Tabel 2 Rekapitulasi Pembentukan Karakter Anak Pekan Kedua

Kategori	Pembentukan Karakter yang Diamati						Rerata (%)
	Disiplin		Kerja Keras		Kejujuran		
	F	%	F	%	F	%	
☆☆☆☆	2	13,33	3	20	3	20	17,78
☆☆☆	4	26,67	3	20	5	33,33	26,67
☆☆	6	40	7	47,67	6	40	42,22
☆	3	20	2	13,33	1	6,67	13,33

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat disimpulkan bahwa persentase tertinggi dengan aspek pengamatan disiplin terdapat pada skor bintang 3 (☆☆☆) dengan nilai 40%, sedangkan yang terendah yaitu pada skor bintang 4 (☆☆☆☆) dengan nilai 13.33%. Aspek pengamatan kerja keras, persentase tertinggi terdapat pada skor bintang 3 (☆☆☆☆) dengan nilai 46.67%, sedangkan persentase terendah terdapat pada skor bintang 1 (☆) dengan nilai 13.33%. Aspek pengamatan kejujuran, persentase tertinggi terdapat pada skor bintang 3 (☆☆☆) dengan nilai 40%, sedangkan persentase terendah terdapat pada skor bintang 1 (☆) dengan nilai 6.67%.

Tabel 3 Rekapitulasi Pembentukan Karakter Anak Pekan Ketiga

Kategori	Pembentukan Karakter yang Diamati						Rerata (%)
	Disiplin		Kerja Keras		Kejujuran		
	F	%	F	%	F	%	
☆☆☆☆	3	20	5	33,33	6	40	31,11
☆☆☆	8	53,33	6	40	7	46,67	46,67
☆☆	3	20	4	26,67	2	13,33	20
☆	1	6,67	0	0	0	0	2,22

Berdasarkan tabel 3 diatas, dapat disimpulkan bahwa persentase tertinggi dengan aspek pengamatan disiplin terdapat pada skor bintang 3 (☆☆☆) dengan nilai 53.33%, sedangkan yang terendah yaitu pada skor bintang 1 (☆) dengan nilai 6.67%. Aspek pengamatan kerja keras, persentase tertinggi terdapat pada skor bintang 3 (☆☆☆) dengan nilai 40%, sedangkan persentase terendah terdapat pada skor bintang 1 (☆) dengan nilai 0%. Aspek pengamatan kejujuran, persentase tertinggi terdapat pada skor bintang 3 (☆☆☆) dengan nilai 46.67%, sedangkan persentase terendah terdapat pada skor bintang 1 (☆) dengan nilai 0%.

Berdasarkan hasil rekapitulasi selama 3 pekan diberikan perlakuan yaitu dari ketiga aspek yang diamati, persentase rerata pada pekan pertama tidak ada anak pada skor bintang 4 (☆☆☆☆) dikarenakan anak belum mampu mengetahui indikator yang terdapat pada skor bintang 4. Sebaliknya persentase rerata terbanyak berada pada skor bintang 2 (☆☆) dengan nilai 51.11%. Kemudian pada pekan kedua pada skor bintang 4 (☆☆☆☆) sudah terjadi peningkatan dengan persentase rata-rata 17.78% dan persentase rerata terbanyak berada pada skor bintang 2 (☆☆) dengan nilai 42.22%. Selanjutnya pada pekan ketiga persentase rerata pada skor bintang 4 (☆☆☆☆) terjadi peningkatan dengan nilai 31.11% dan persentase rerata terendah terdapat pada skor bintang 1 (☆) dengan nilai 2.22%. Dilihat dari hasil rekapitulasi selama 3 pekan, persentase rerata pekan pertama dan kedua pada skor bintang 4 dan 3 (☆☆☆☆) – (☆☆☆) terjadi peningkatan dengan nilai 17.78% dan persentase rerata pekan kedua dan ketiga pada skor bintang 4 dan 3 (☆☆☆☆) – (☆☆☆) terjadi peningkatan dengan nilai 33.33%.

2. Wawancara

Hasil wawancara dengan guru penanggung jawab kelompok B1, ibu SR, mengatakan bahwa pembentukan karakter anak rata-rata sudah berkembang dengan baik, yang tadinya sebelum perlakuan masih banyak anak yang belum berkembang dengan baik, setelah diberikan perlakuan sudah banyak anak yang berkembang sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada saat anak bermain permainan tradisional gobak sodor yang menunjukkan bahwa karakter anak di kelompok B1 sudah terbentuk dengan baik. Kemudian ibu SR mengatakan bahwa permainan tradisional gobak sodor dapat memberikan pengaruh pada pembentukan karakter anak, dan juga bukan hanya pembentukan karakter anak yang dapat dikembangkan tetapi motorik kasar anak juga dapat berkembang.

PEMBAHASAN

1. Aspek Disiplin

Disiplin merupakan suatu ketaatan dan kepatuhan terhadap sesuatu yang telah disepakati, sehingga disiplin menjadi penting diajarkan pada anak usia dini supaya dapat belajar berperilaku dengan cara yang diterima oleh masyarakat dan oleh anggota kelompok sosial mereka. Tujuan disiplin bagi anak usia dini terbagi atas tujuan jangka pendek dan tujuan jangka

panjang. Adapun tujuan jangka pendek adalah membuat anak usia dini terlatih dan terkontrol, dengan mengajarkan bentuk perilaku yang pantas dan tidak pantas sedangkan tujuan jangka panjang adalah membentuk perkembangan pengendalian diri (Ernie Martsiswati dan Yoyon Suryono, 2014:188).

Aulina dalam Magfiroh, L dkk, (2019:56) berpendapat bahwa disiplin berasal dari kata yang sama dengan “*disciple*” di mana seseorang belajar secara sukarela mengikuti seorang pemimpin, yaitu orang tua dan guru sebagai pemimpin, dan anak sebagai murid yang belajar cara hidup menuju kehidupan yang berguna dan bahagia. Jadi, disiplin merupakan cara masyarakat mengajarkan anak berperilaku moral yang disetujui oleh kelompok.

Menurut Harlock dalam Choirun Nisa Aulina (2013:38-40) agar disiplin mampu mendidik anak untuk dapat berperilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh kelompok sosial mereka, maka disiplin harus memiliki empat unsur pokok yaitu:

1. Peraturan, adalah pola yang ditetapkan untuk tingkah laku, dimana pola tersebut ditetapkan oleh orang tua, guru atau teman bermain.
2. Hukuman, berasal dari kata kerja latin, *punire*, dan berarti menjatuhkan hukuman pada seseorang karena suatu kesalahan, pelanggaran atau pelanggaran sebagai ganjaran atau pembalasan.
3. Penghargaan, berarti tiap bentuk penghargaan untuk suatu hasil yang baik. Penghargaan tidak perlu berbentuk materi, tetapi dapat berupa kata-kata pujian, senyuman atau tepukan di punggung.
4. Konsistensi, berarti tingkat keseragaman atau stabilitas, peraturan hukuman dan penghargaan yang konsisten membuat anak tidak bingung terhadap apa yang diharapkan dari mereka.

Dalam permainan tradisional gobak sodor anak harus mempunyai dan menerapkan aspek disiplin. Bisa dilihat pada gambar 1 anak mematuhi ketentuan dan peraturan dalam permainan tradisional gobak sodor dengan menjaga garis dengan baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tabel persentase 1-3 dalam aspek disiplin dengan subjek penelitian yaitu anak yang berada di kelompok B1, di mana pada pekan pertama pada skor bintang 4 (☆☆☆☆) sebesar 0%, skor bintang 3 (☆☆☆) sebesar 20%, skor bintang 2 (☆☆) sebesar 53.33%, skor bintang 1 (☆) sebesar 26.67%. Pada pekan kedua terdapat 13.33% yang masuk pada skor bintang 4 (☆☆☆☆), skor bintang 3 (☆☆☆) sebesar 26.67%, skor bintang 2 (☆☆) sebesar 40%, skor bintang 1 (☆) sebesar 20%. Pada pekan ketiga terdapat 20% pada skor bintang 4

(☆☆☆☆), skor bintang 3 (☆☆☆) sebesar 53.33%, skor bintang 2 (☆☆) sebesar 20%, skor bintang 1 (☆) sebesar 6.67%.

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pembentukan karakter anak dalam aspek disiplin mulai berkembang dengan baik. Pernyataan tersebut didukung dari hasil rekapitulasi pekan pertama sampai dengan pekan ketiga terhadap aspek disiplin dimana persentase tertinggi terdapat pada skor bintang 2 (☆☆). Kesimpulan penjelasan diatas bahwa permainan tradisional gobak sodor memiliki pengaruh terhadap pembentukan karakter anak, terlihat pada aspek disiplin yang mulai berkembang setelah diberikan perlakuan berupa permainan tradisional gobak sodor di kelompok B1.

2. Aspek Kerja Keras

Kerja keras merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Makna dari kerja keras sendiri yaitu bahwa aktivitasnya dilakukan karena dorongan untuk mewujudkan sesuatu, sehingga tumbuh rasa tanggung jawab yang besar. Sedangkan makna kerja keras dalam konteks ini, secara terminologi adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukannya dikerjakan secara sungguh-sungguh, seperti yang disampaikan Totok Tasmara dalam Ismail Marzuki (2019:83).

Menurut Eri Purwanti (2016:9) kerja keras juga perlu ditanamkan mulai sejak kecil, dengan kerja keras anak akan terbiasa dan tidak bermanja-manja bahkan bermalas-malas dalam mengerjakan semua tugas yang diberikan kepadanya. Kerja keras identik dengan semangat yang besar tanpa mengenal lelah sedikitpun dan mau aktif dalam melakukan kegiatan yang bernilai positif.

Aspek kerja keras menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Dalam permainan tradisional gobak sodor, anak harus mempunyai dan menerapkan aspek kerja keras. Bisa dilihat pada gambar 2, anak yang menjadi tim jaga sangat bekerja keras untuk bisa menjaga garis agar tim lawan tidak bisa melewati garis, sebaliknya tim lawan juga sangat bekerja keras untuk bisa melewati garis agar mencapai kemenangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tabel persentase 1-3 dalam aspek kerja keras dengan subjek penelitian yaitu anak yang berada di kelompok B1, di mana pada pekan pertama pada skor bintang 4 (☆☆☆☆) sebesar 0%, skor bintang 3 (☆☆☆) sebesar 26.67%, skor bintang 2 (☆☆)

sebesar 53.33%, skor bintang 1 (☆) sebesar 20%. Pada pekan kedua terdapat 20% yang masuk pada skor bintang 4 (☆☆☆☆), skor bintang 3 (☆☆☆) sebesar 20%, skor bintang 2 (☆☆) sebesar 46.67%, skor bintang 1 (☆) sebesar 13.33%. Pada pekan ketiga terdapat 33.33% pada skor bintang 4 (☆☆☆☆), skor bintang 3 (☆☆☆) sebesar 40%, skor bintang 2 (☆☆) sebesar 26.67%, skor bintang 1 (☆) sebesar 0%.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, didapati bahwa pembentukan karakter anak dalam aspek kerja keras mulai berkembang dengan baik. Pernyataan tersebut didukung dari hasil rekapitulasi pekan pertama sampai dengan pekan ketiga terhadap aspek kerja keras dimana persentase tertinggi terdapat pada skor bintang 2 (☆☆). Kesimpulan penjelasan di atas bahwa permainan tradisional gobak sodor memiliki pengaruh terhadap pembentukan karakter anak, terlihat pada aspek kerja keras yang mulai berkembang setelah diberikan perlakuan berupa permainan tradisional gobak sodor di kelompok B1.

3. Aspek Kejujuran

Kejujuran adalah nilai kehidupan mendasar yang paling penting yang harus diajarkan pada anak sejak ia kecil. Mengajarkan anak untuk berkata, bersikap dan berperilaku jujur akan menjadi pembelajaran yang berguna untuk kehidupannya kelak. Sebab penanaman ilmu sejak dini umumnya akan cenderung lebih muda diserap anak dan ditanamkan hingga mereka dewasa sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Daviq Chairilisyah (2016:8)

Menurut Yoyo Zakaria Ansori (2022: 261) perilaku tidak jujur anak dapat ditemukan pada usia dua sampai tiga tahun dengan maksud untuk menyembunyikan perilaku mereka yang salah seperti belum mampu merawat dan menjaga mainan milik sekolah maupun anak mengambil barang milik sekolah. Kondisi tersebut akan berkembang dan menjadi karakter asli kalau terjadi pembiaran. Karena keberhasilan mewujudkan pembinaan karakter di usia itu merupakan parameter untuk membangun karakter anak pada jenjang selanjutnya.

Aspek kejujuran merupakan karakter yang akan membawa bangsa ini menuju pada kemajuan. Dilihat dari konteks pembangunan karakter di sekolah, kejujuran menjadi karakter yang penting pada anak karena pada hakikatnya anak adalah pewaris pembangunan masa depan.

Dalam permainan tradisional gobak sodor, anak harus mempunyai dan menerapkan Aspek Kejujuran. Bisa dilihat pada gambar 3 anak yang tertangkap oleh tim jaga, dengan jujur langsung keluar kotak permainan

menuju tempat yang sudah disiapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, data menunjukkan bahwa pada tabel persentasi 1-3 dalam aspek kejujuran dengan subjek penelitian yaitu anak yang berada di kelompok B1, di mana pada pekan pertama pada skor bintang 4 (☆☆☆☆) sebesar 0%, skor bintang 3 (☆☆☆) sebesar 33.33%, skor bintang 2 (☆☆) sebesar 46.67%, skor bintang 1 (☆) sebesar 20%. Pada pekan kedua terdapat 20% yang masuk pada skor bintang 4 (☆☆☆☆), skor bintang 3 (☆☆☆) sebesar 33.33%, skor bintang 2 (☆☆) sebesar 40%, skor bintang 1 (☆) sebesar 6.67%. Pada pekan ketiga terdapat 40% pada skor bintang 4 (☆☆☆☆), skor bintang 3 (☆☆☆) sebesar 46.67%, skor bintang 2 (☆☆) sebesar 13.33%, skor bintang 1 (☆) sebesar 0%.

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pembentukan karakter anak dalam aspek kejujuran sudah berkembang dengan baik. Pernyataan tersebut didukung dari hasil rekapitulasi pekan pertama sampai dengan pekan ketiga terhadap aspek disiplin dimana persentase tertinggi terdapat pada skor bintang 3 (☆☆☆). Kesimpulan penjelasan diatas bahwa permainan tradisional gobak sodor memiliki pengaruh terhadap pembentukan karakter anak, terlihat pada aspek kejujuran yang berkembang setelah diberikan perlakuan berupa permainan tradisional gobak sodor di kelompok B1.

SIMPULAN

Data hasil rekapitulasi selama 3 pekan, selanjutnya diberikan perlakuan dari ketiga aspek yang diamati. Persentase rerata pada pekan pertama tidak ada anak pada skor bintang 4 (☆☆☆☆) dikarenakan anak belum mampu mengetahui indikator yang terdapat pada skor bintang 4. Sebaliknya persentase rerata terbanyak berada pada skor bintang 2 (☆☆) dengan nilai 51.11%. kemudian pada pekan kedua pada skor bintang 4 (☆☆☆☆) sudah terjadi peningkatan dengan persentase rata-rata 17.78% dan persentase rerata terbanyak berada pada skor bintang 2 (☆☆) dengan nilai 42.22%. Selanjutnya pada pekan ketiga persentase rerata pada skor bintang 4 (☆☆☆☆) terjadi peningkatan dengan nilai 31.11% dan persentase rerata terendah terdapat pada skor bintang 1 (☆) dengan nilai 2.22%. Dilihat dari hasil rekapitulasi selama 3 pekan, persentase rerata pekan pertama dan pekan kedua pada skor bintang 4 dan 3 (☆☆☆☆) – (☆☆☆) terjadi peningkatan dengan nilai 17.78% dan persentase rerata pekan kedua dan ketiga pada skor bintang 4 dan 3 (☆☆☆☆) – (☆☆☆) terjadi peningkatan dengan nilai 33.33%.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahfudz, MP, Rektor Universitas Tadulako, Bapak Dr. Ir. Amiruddin Kade, S. Pd., M. Si, Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, kepala sekolah TK, guru, staf dan yang terlibat lainnya dalam penyelesaian artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achroni, K. (2012). *Mengoptimalkan Tumbuh Kembang Anak Melalui Permainan /* Cet. 1 Jogjakarta: Javalitera.
- Ardiyanto, A. (2019). *Permainan tradisional sebagai wujud penanaman nilai karakter anak usia dini. Prosiding Konferensi Pendidikan Nasional “Penguatan Karakter Bangsa Melalui Inovasi Pendidikan Di Era Digital”* ISSN:, 4, 173–176.
- Adi, B. S., Sudaryanti, S., & Muthmainah, M. (2020). Implementasi permainan tradisional dalam pembelajaran anak usia dini sebagai pembentuk karakter bangsa. *Jurnal Pendidikan Anak*, 9(1), 33–39. <https://doi.org/10.21831/jpa.v9i1.31375>
- Andriani, T. (2012). Permainan Tradisional Dalam Membentuk Karakter Anak Usia Dini. *Jurnal Sosial Budaya*, 9(1), 121–136.
- Aulina, C. N. (2013). Penanaman Disiplin Pada Anak Usia Dini. *Al-Misbah (Jurnal Islamic Studies)*, 1(1), 16–35. <https://doi.org/10.26555/almisbah.v1i1.83>
- Ansori, Y. Z. (2021). Strategi Pendidik dalam Menumbuhkan Karakter Jujur pada Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(1), 261–270. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i1.1208>
- Chairilisyah, D. (2016). *Metode dan Teknik Mengajarkan Kejujuran Pada Anak Sejak Usia Dini*. *Educhild*, 5(1), 8–14.
- Depdiknas. 2010. Pedoman penilaian. Jakarta :Kemendiknas dirjen mandas dan menengah direktorat Pembinaan TK SD
- Dharmamulya. (2012). Permainan Tradisional Jawa. Yogyakarta: Kepel Press
- Fadillah, M. 2016. *Desain Pembelajaran PAUD (Tinjauan Teoritik & Praktik)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Fadillah, M & Khorida, L.M. (2013). Pendidikan karakter anak usia dini. Jogjakarta: Arruz Media
- Kirom, S. (2017). Menanamkan Nilai Pendidikan Karakter Pada Siswa Melalui

- Pembelajaran Sastra Dengan Model Permainan Gobak Sodor. *Ibriez : Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains*, 2(2), 225–234. <https://doi.org/10.21154/ibriez.v2i2.39>
- Martsiswati, E., & Suryono, Y. (2014). Peran Orang Tua Dan Pendidik Dalam Menerapkan Perilaku Disiplin Terhadap Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 187.
- Marzuki, I., & Hakim, L. (2019). Strategi Pembelajaran Karakter Kerja Keras. *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 15(1), 79–87. <https://doi.org/10.31000/rf.v15i1.1370>
- Magfiroh, L., Desyanty, E. S., & Rahma, R. A. (2019). Pembentukan Karakter Disiplin Anak Usia Dini Melalui Metode Pembiasaan Di Tk Aisyiyah Bustanul Athfal 33 Kota Malang. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 14(1), 54. <https://doi.org/10.17977/um041v14i1p54-67>
- Najib,dkk , 2016. *Manajemen Strategi Pendidikan Karakter bagi Anak Usia Dini*. Yogyakarta : Gavamedia
- Nur, H. (2018). Membangun Karakter Anak Melalui Permainan Anak Tradisional. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 2 1(12), 1226–1231. <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2018.05.001>
- Nurhayati, R. (2021). *Indonesian Journal of Early Childhood Early Childhood : Motor Comparison of Breastfed and Formula-fed Children*. 10(2), 82–88.
- Nurhayati, N. (2018). Developing character in early childhood education based on constructivist learning. *Atlantis Press*, 244, 156–159. <https://doi.org/10.2991/ecpe-18.2018.34>
- Purwanti, E. (2016). Implementasi Penggunaan Ssp (Subject Specific Pedagogy) Tematik Integratif Untuk Menanamkan Tanggung Jawab, Kerja Keras, Dan Kejujuran. *Terampil : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 3(2), 1–23. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/terampil/article/view/1194>
- Prasanti, D., & Fitrianti, D. R. (2018). *Pembentukan Karakter Anak Usia Dini: Keluarga, Sekolah, Dan Komunitas*. *Pembentukan Anak Usia Dini : Keluarga, Sekolah, Dan Komunitas*, 2(1), 15.
- Rosdiani, D. (2012). *Dinamika olahraga dan pengembangan nilai*. Bandung: Alfabeta.
- Subianto, J. (2013). Peran Keluarga, Sekolah, Dan Masyarakat Dalam Pembentukan Karakter Berkualitas. *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 8(2), 331–354. <https://doi.org/10.21043/edukasia.v8i2.757>
- Rejeki, H. (2020). Implementasi permainan tradisional sebagai salah satu sarana pendidikan karakter di sekolah dasar. *Tadulako Journal Sport Sciences And Physical Education*, 8 (1)(96–106), <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index>.

php/PJKR/in.

Sujiono, Y. N. (2012). *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: PT Indeks

Suyadi, & Maulidya Ulfah. (2013), *Konsep Dasar PAUD*. Bandung: PT Remajarosdakarya.

Wahyuningsih. (2013). *Permainan Tradisional Untuk Anak Usia Dini*. Bandung Sandiarta Sukses

Wahyuni, I. W., & Putra, A. A. (2020). Kontribusi Peran Orangtua dan Guru dalam Pembentukan Karakter Islami Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 5(1), 30–37. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5\(1\).4854](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5(1).4854)

**KAJIAN HISTORIS REOG BULKIYO
DALAM PERSPEKTIF
MULTIPLE INTELLIGENCES
STRATEGI PENGUATAN
KARAKTER BANGSA
DI ERA DISRUPSI**

Mifdal Zusron Alfaqi, Rika Safitri Nur Azizah

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang

Era disrupsi ditandai dengan masifnya penggunaan teknologi sebagai pola interaksi yang memberi dampak positif dan negatif dalam segala bidang kehidupan. Pertumbuhan arus yang semakin kuat tersebut bagaikan dua sisi mata uang yang harus dihadapi, mulai dari munculnya resistensi terhadap perubahan demografi dan aspek sosial budaya (Fadlurrohman, 2019; Ristekdikti, 2018). Secara tidak langsung, perubahan ini dapat merubah pola komunikasi bahkan melunturkan perilaku berbudaya. Konteks tersebut menunjukkan dampak negatif dapat menjadi bom waktu yang datang dan membayangi masa depan generasi muda kapan saja (Widayani dan Astuti, 2020). Penelitian Wiratmaja (2021) memaparkan penguatan karakter dapat dilakukan melalui penggalian nilai kebudayaan masyarakat. Nilai budaya ditegaskan dalam penelitian Yenrizal (2017) bukanlah sesuatu yang statis namun dapat bergeser bahkan berubah dari satu generasi ke-generasi berikutnya (Yenrizal, 2017). Perspektif yang berbeda pada masing-masing orang terhadap nilai-nilai budaya juga berpotensi menjadi sebuah konflik sehingga perlu dilakukan penggalian agar menjadi kekuatan bersama. Hal ini didukung oleh penelitian Rejo (2022). Ia mengatakan bahwa penggalian nilai dapat memperkokoh dan menjadi benteng karakter dalam pelestarian kebudayaan pada generasi berikutnya. Konteks tersebut memiliki langkah komprehensif dalam penguatan kecerdasan spiritual dan emosional yang mengarah dalam proses penggalian karakter (Perveen, 2018).

Berdasarkan data penelitian Nurohmah (2021), terjadi penurunan kualitas karakter bangsa yang ditandai dengan munculnya kasus-kasus tentang penyimpangan nilai-nilai norma, berupa maraknya kasus korupsi yang semakin menjadi, kekerasan, juga kasus kenakalan remaja lainnya. Budaya lokal berpotensi memperkuat karakter generasi muda karena mengandung nilai-nilai, aktifitas-aktifitas dan simbol-simbol yang menjadi komitmen semua elemen masyarakat di tengah arus *digital technology*. Perlunya penanaman nilai dengan lebih menekankan kecerdasan emosional dan spiritual dimaksudkan agar tercipta karakter yang kuat dalam menghadapi pesatnya perubahan moral seperti yang mencakup dalam *Multiple Intelligences* (Masaong, 2013).

Erosi terhadap nilai-nilai budaya dan masuknya budaya asing lebih mampu menarik perhatian masyarakat (Nadya, 2022). Fenomena ini mengakibatkan luntarnya pemahaman masyarakat terhadap kebudayaan daerah lokal yang berdampak pada rendahnya minat masyarakat untuk melestarikan dan menjaga eksistensi kebudayaan daerah. Pemahaman yang terbentuk diharapkan memacu gerak kontrol yang mampu memperkuat interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Alternatif solusi dari permasalahan tersebut dengan memasukkan unsur budaya lokal dalam pendidikan untuk memperkuat pendidikan karakter sedini mungkin. Potensi penguatan pendidikan karakter dalam kearifan lokal salah satunya hadirnya reog bulkiyo sebagai sebuah tarian tradisional dari Kabupaten Blitar dengan pengkajian secara historis yang terdiri dari empat tahapan yaitu *heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi*. Tujuan penelitian ini 1) memaparkan nilai reog bulkiyo yang hadir dalam perspektif *multiple intelligences*, 2) menemukan strategi penguatan karakter yang sesuai dalam menghadapi era disrupsi. Penelitian Sumantri (2018) menegaskan bentuk partisipasi dalam tari reog bulkiyo dan belum menegaskan secara jelas nilai karakter apa yang dihadirkan (Sumantri,2018; Towaf,2021). Ketiga penelitian lain juga memaparkan hal yang berbeda dengan fokus pengembangan pembelajaran masa depan namun belum menjelaskan karakter apa yang ingin disampaikan (IP Sari,2020; Ratnasari;2021; Santoso,2016;). Penelitian sebelumnya keseluruhan belum mengungkapkan secara jelas makna simbolik karakter dalam kerangka *multiple intelligences* yang mampu memperkuat dalam penanaman nilai-nilai karakter kedepannya.

Perwujudan karakter akan budaya dapat memunculkan berbagai peluang positif yang senyatanya dipahami lebih awal melalui berbagai sudut pandang yang mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pemahaman yang mengacu sebagai usaha-usaha dalam bentuk pelestarian. Sejalan dengan nilai-nilai pembangunan karakter bangsa yang terkandung dalam kesenian daerah, reog bulkiyo mengandung nilai-nilai kearifan lokal berupa nasionalisme dan patriotisme yang ingin ditularkan.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi historis guna pencapaian kedua tujuan dengan keempat tahapan. Metode penelitian ini adalah metode historiografi menggunakan pendekatan *empirik*. Metode historiografi dipakai guna merekonstruksi suatu gambaran masa lampau berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Huda, 2021). Rekonstruksi yang dilakukan harus berpegang teguh pada kaidah penulisan sejarah secara ketat, rinci dan valid melalui pengalaman dan observasi (*empirical fact*).

Tahapan penelitian sejarah yang dituliskan oleh (Herlina, 2020) didasarkan atas 4 pokok prosedur yaitu: *heuristik; kritik; interpretasi; dan historiografi*. Tahap *heuristik* dilakukan untuk menggali sumber primer dan sekunder mengenai reog bulkiyo secara menyeluruh melalui wawancara

mendalam, kajian literatur dan dokumentasi. Informan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang dipilih secara khusus berdasarkan maksud dan tujuan penelitian dengan kriteria: 1) seseorang pelestari yang menjadi bagian genealogi dari pencetus tari reog bulkiyo; 2) penari reog bulkiyo yang dapat memberikan informasi tambahan atas nilai karakter apa yang ingin disampaikan; 3) mengetahui substansi isi yang ingin disampaikan dari reog bulkiyo. Sumber sekunder dilakukan melalui studi literatur melalui situs Sinta, *google scholar*, *microsoft academic*, dan *researchgate* dengan pencarian kata kunci reog bulkiyo, Kerentanan Karakter, *Multiple Intelligences*. Literatur yang telah diperoleh sebanyak 23 literatur terdiri atas 3 literatur terindeks scopus, 4 terindeks SINTA, 15 terindeks Google Cendekia, dan 1 berasal dari media online.

Kedua, dilakukan tahapan kritik sumber sebagai pengujian kebenaran data yang telah diperoleh dari sumber. Tahapan kritik terdiri dari dua yaitu kritik *ekstern* untuk menilai *otentisitas* (keaslian sumber) dan kritik *intern* (menilai kredibilitas sumber). Pada tahap ini dilakukan pembuktian terhadap sumber untuk menentukan sumber asli fakta berdasarkan asal sumber. Fakta yang telah diperoleh selanjutnya diinterpretasi menggunakan teori interaksionisme simbolik dengan tujuan mengetahui peristiwa dan kejadian yang nyata. Simbol ditemukan dari tari reog bulkiyo.

Ketiga tahap interpretasi yaitu menafsirkan fakta serta menetapkan makna dan hubungan dari fakta-fakta yang telah diperoleh secara objektif, deskriptif dan selektif Selanjutnya tahap interpretasi dengan proses yang objektif dan selektif mendeskripsikan makna atau bukti sejarah dari Tari reog bulkiyo. Setelah memperoleh fakta, hasil data heuristik disajikan dalam bentuk tulisan.

Keempat yaitu historiografi dengan melakukan penulisan sejarah berdasarkan data yang diperoleh dengan proses uji dan analisis secara kritis. Seluruh rangkaian fakta dituliskan menjadi kisah sejarah yang kronologis, mulai dari proses mengumpulkan data, memilih sumber, menginterpretasikan sumber hingga penulisan sumber.

Analisis data dilakukan dengan menafsirkan fakta sejarah yang didapatkan melalui teknik analisis data historis, yaitu mengklasifikasikan sumber-sumber yang berasal dari tradisi lisan, bergambar, dan tertulis dalam proses analisisnya. Di tahap ini, proses dilakukan secara objektif dan selektif mendeskripsikan makna simbolik dari tari reog bulkiyo. Analisis data dilakukan dengan menganalisis data historiografi secara konkrit dengan memfokuskan pada nilai apa saja yang kuat dan patut dijadikan penguatan karakter. Langkah terakhir yaitu melakukan penarikan kesimpulan dan menuliskannya dalam bentuk historiografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Nilai Reog Bulkiyo dalam perspektif *Multiple Intelligences*

Blitar sebagai salah satu bagian provinsi Jawa Timur turut menyumbang kultur budaya lokal yang masih kuat. Reog bulkiyo merupakan sebuah tarian tradisional yang berasal dari Kabupaten Blitar dan telah terdaftar sebagai warisan budaya tak benda. Tarian ini diciptakan oleh Khasan Muhtar yang merupakan seorang prajurit Pangeran Diponegoro dari Bagelen, Jawa Tengah, yang berhasil melarikan diri di daerah pelosok Blitar (Sumantri,2018). Pelarian tersebut sebagai bentuk strategi agar mereka selamat dari kejaran Belanda (Chan, 2017). Tarian ini menggambarkan pengaruh besar kehidupan masyarakat Jawa dalam melawan Belanda selama periode tahun 1825-1830. Dilihat dari namanya, pertunjukan ini termasuk jenis kesenian reog, namun memiliki makna yang berbeda. Secara umum istilah reog merupakan bentuk penyajian yang cukup dikenal di Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan ciri khas barong berkepala singa yang diiringi oleh sekelompok prajurit atau penunggang kuda (Wulansari & Admoko, 2021). Namun, reog bulkiyo tidak memakai barongan. Seragam dan aksesoris yang dikenakan berbeda dengan reog di Jawa Timur pada umumnya. Perbedaan yang paling terlihat adalah iringan musiknya, serta gerakan tariannya yang menggambarkan latar belakang peperangan yang berbeda. Menurut beberapa warga Desa Kemloko, Kabupaten Blitar, reog bulkiyo terbentuk dari pengaruh politik, agama, dan akulturasi budaya Arab dan Jawa yang terlihat dari gerak dan iringan musiknya (Saraswati & Narawati, 2017: 228). Politik peperangan saat itu menguatkan strategi mengalahkan belanda (Purwani,2017).

Kerangka *Multiple Intelligences* yang terbangun dalam reog bulkiyo tergambar dalam literasi budaya dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. *Multiple Intelligences* dalam reog bulkiyo

Literasi Budaya	Makna
Linguistik	Pengucapan, tuturan dari masyarakat atas hadirnya reog bulkiyo.
Logis	Mencermati dengan menelisik secara masuk akal pengetahuan yang diajarkan dalam pertunjukan.
Visual	Mengamati dengan panca indra setiap koreo dan gerak yang ditampilkan.

Musikal	Mengamati tempo yang disajikan dalam pertunjukan untuk mengetahui makna yang ingin disampaikan.
Interpersonal	Memahami nilai yang dihadirkan dari setiap pemain, melalui sifat yang disajikan secara eksplisit.
Kinestetik	Memahami maksud dari setiap gerak tubuh yang disajikan untuk mengetahui maknanya.
Naturalis	Penekanan setiap gerak secara natural dapat dipahami maknanya.

Sumber: Sumber data primer peneliti, 2022

Pemahaman dalam kerangka literasi budaya dapat mempermudah gambaran nilai yang ingin ditularkan melalui tarian reog bulkiyo. Kemloko sebagai desa rujukan pelestari reog bulkiyo memiliki konteks pertunjukan tarian yang berbeda dengan reog Ponorogo. Kesenian ini terbentuk dari tiga unsur budaya sehingga sifatnya unik. Desain Koreografi reog bulkiyo dibagi menjadi dua babak yang disebut pambuko dan perangan. Dalam babak pertama pencerminan prajurit dengan siap dan penuh loyalitas di bawah pemimpin masing-masing berangkat ke Baletua. Di babak kedua, para pemimpin melakukan perkelahian yang akhirnya dimenangkan oleh seorang pemimpi yang diceritakan sebagai orang yang berada di jalan kebajikan. Koreografi dalam gerak pitik irek-irek, rubuh gedhang, lincak gagak dan gerak jalan serta gerak melukis untuk mengasah senjata (pedang) merupakan koreografi yang tercermin atas sikap dan sifat keprajuritan (Saraswati & Narawati, 2017: 228).

Sejalan dengan nilai-nilai pembangunan karakter bangsa yang terkandung dalam kesenian daerah, reog bulkiyo mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dalam tarian ini layak dijadikan bahan ajar di sekolah yang mengajarkan karakter bangsa. Jawa Timur memiliki beberapa kesenian daerah dengan nama yang mirip, dimana daerah-daerah tersebut saling berdekatan, dan memiliki kesamaan dialek bahasa dan karakter sosial. Daerah daerah tersebut disebut *kulon* Jawa Timur yang terdiri dari Pacitan, Ponorogo, Madiun, Kediri, Tulungagung, Blitar. Ponorogo, Tulungagung dan Blitar memiliki jenis pertunjukan reog yang berbeda. Reog ponorogo telah dikenal dunia dengan bentuk penyajian tari massal dan memiliki angka dari Daha, kisah perang kerajaan Kadiri. Tulungagung juga memiliki reog dhodhog atau reog kendang. Berbeda dengan reog ponorogo, dalam reog dhodhog

para siswa yang memainkan pertunjukan membawa alat musik yang disebut dhodhog, kendang khas Tulungagung. Berdasarkan hasil analisis menggunakan interaksionisme simbolik, diperoleh makna simbol dalam kostum maupun gerakan tarian reog bulkiyo. Perlengkapan kostum dipilih berdasarkan makna dan simbol yang diyakini secara kolektif oleh masyarakat sebagai wujud dibawah ini:

Tabel 2. Makna Simbolik Kostum Penari Reog Bulkiyo

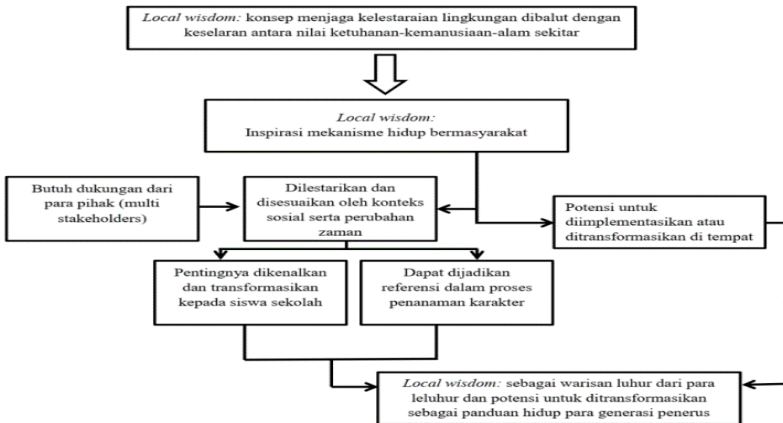
Simbolik	Letak
Udheng Bawang Sebungkul	Mencerminkan rasa nasionalisme
Baju putih	Kesucian
Sabuk (stagen)	Hidup membutuhkan ketekunan dan kesabaran.
Selempang	Perbuatan baik akan mampu mengalahkan perbuatan yang tercela.
Boro samir	Penopang hidup yang paling utama berasal dari perbuatan baik.

Sumber: Sumber data primer peneliti, 2022

Pemahaman hidup di dunia hanya sebentar yang dalam istilah jawa disebut *mampir ngombe* memberikan pemahaman bahwa manusia hidup di dunia untuk menegakan kebaikan (Ainia, 2021). Melalui penggambaran skenario tersebut, terdapat nilai-nilai yang tertanam melalui proses kreatif dengan tari reog bulkiyo: 1) Keteladanan, sikap positif yang dapat dijadikan acuan oleh masyarakat; 2) Rela berkorban, rela ikhlas, bahagia, tanpa mengharap imbalan, dan rela memberikan bagian yang dimiliki sekalipun itu menyebabkan penderitaan bagi dirinya sendiri; 3) Cinta tanah air, perasaan cinta bangsa dan negara sendiri; 4) Bekerja keras, berusaha dengan sepenuh hati dan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan keinginan mencapai hasil yang maksimal secara umum; 5) Kejujuran, keserasian atau berita yang disertai fakta; 6) Demokratis, pilihan di mana suatu bangsa menganut kebebasan berpendapat dengan hasil kesepakatan musyawarah; 7) Nasionalisme, sikap nasionalisme yang menempatkan loyalitas tertinggi individu terhadap bangsa dan tanah air dengan memandang bangsa sebagai bagian dari bangsa lain di dunia; 8) Patriotisme, sikap gagah berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara.

2. Strategi Penguatan Karakter di Era Disrupsi

Sistem pewarisan tradisi melalui kebudayaan berupa tarian mengalami penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Penjabaran pesan baik yang berkembang menjadi kewajiban untuk menjaga keselarasan hubungan manusia melalui *local knowledge* yang dimiliki masyarakat. Terciptanya pandangan baru dalam memahami suatu fenomena kebudayaan melalui penutur lisan mampu memperkaya dan meningkatkan kecintaan akan sejarah kebudayaan. Fungsi kebudayaan tidak hanya sebagai *local knowledge* namun juga memberikan ajaran baik. Rekomendasi kebijakan melalui kerja sama antara masyarakat dan pemerintah tergambarkan dalam bagan berikut:



Gambar 1. Model Strategi Pelestarian kebudayaan (Diolah dari berbagai sumber)

Seiring perkembangan zaman, sistem pewarisan tradisi melalui budaya semakin hilang. Diperlukan upaya membuat model strategi pelestarian baik untuk generasi kini maupun mendatang melalui kerja sama antara masyarakat dan pemerintah. Relevansi nilai-nilai karakter yang terwujud dalam reog bulkiyo, menggambarkan nilai luhur pada masa peperangan. Jika dilihat dari perspektif historis, tarian ini menggambarkan pasang surut perjalanan manusia untuk melawan nafsu dan perilaku tercela dan mengutamakan kebaikan. Keseluruhan kolaborasi yang dilakukan membuahakan harapan akan terciptanya suatu komitmen keberlanjutan penguatan karakter generasi muda di masa kini maupun mendatang.

PENUTUP

Menanggapi fenomena dan dampak era disrupsi atas kerentanan pendidikan karakter di tengah revolusi industri 4.0 yang semakin kuat, diperlukan strategi yang dapat membentengi generasi muda, khususnya peserta didik, agar tidak terbawa arus negatif. Agar pendidikan benar-benar mampu mencetak peserta didik yang berilmu dan berkarakter, maka pendidikan karakter perlu untuk lebih ditekankan kembali. Secara historis Tari reog bulkiyo tampil sebagai perwujudan karakter budaya yang memunculkan peluang positif yang dapat dipahami lebih awal melalui berbagai sudut pandang, serta mampu memberikan pemikiran logis dalam penguatan karakter kedepannya. Terdapat nilai-nilai dalam gerakan tari reog bulkiyo yang dapat difungsikan sebagai sarana komunikasi menyampaikan pesan secara kolektif: 1) Keteladanan; 2) Rela berkorban; 3) Cinta tanah air; 4) Bekerja keras; 5) Kejujuran; 7) Nasionalisme; dan 8) Patriotisme.

Model strategi pelestarian untuk daerah lain dapat memanfaatkan penggalian nilai budaya yang berkembang di masyarakat yang mengandung ajaran moral berisi pengetahuan yang membentuk sebuah kebiasaan dan membentuk nilai dan norma masing-masing. Aktualisasi nilai tersebut menjadi adat istiadat mempunyai fungsi sebagai sistem proyeksi, alat kontrol, alat pemaksa, dan alat pendidik. Dalam hal ini, masyarakat dan pemerintah dapat saling terintegrasi untuk bekerja sama sebagai strategi jangka panjang terjaganya kelestarian dan kearifan lokal berupa tradisi lisan yang dimiliki masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainia, D. K. (2021). Konsep Metafisika dalam Falsafah Jawa Hamemayu Hayuning Bawana. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(2), 195-201.
- Chan, C. (2017). *The politics of leisure and labor mobilities: discourses of tourism and transnational migration in Central Java, Indonesia*. *Mobilities*, 13(3), 325-336.
- Fadlurrohlim, I., Husein, A., Yulia, L., Wibowo, H., & Raharjo, S. T. (2019). Memahami Perkembangan Anak Generasi Alfa Di Era Industri 4.0. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(2), 178-186.
- Herlina, N. (2020). Metode Sejarah.
- Huda, M. N. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, 1(2), 135-148.
- Is, N. M. P. (2019). Analisis Ragam Gerak Khas Kesenian Reyog Bulkiyo. *Prosiding Seni Pertunjukan* 3, 1(1), 160-167.
- Masaong, A. K. (2013). Pendidikan karakter berbasis multiple intelligence. *MAKALAH*, 2(186).
- Nadya, A., & Adhari, N. R. (2022). Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Diradikalisasi Generasi Muda. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 6(2), 33-42.
- Nurohmah, A. N., & Dewi, D. A. (2021). Penanaman Nilai Moral dan Karakter di Era Pandemi melalui Pendidikan dengan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(1), 119-127.
- Perveen, A. (2018). Facilitating multiple intelligences through multimodal learning analytics. *Turkish Online Journal of Distance Education*, 19(1), 18-30.
- Purwani, O. (2017). Javanese cosmological layout as a political space. *Cities*, 61, 74-82. doi:10.1016/j.cities.2016.05.004
- Ratnawati, N., Ruja, I. N., Wiradimadja, A., & Bashofi, F. (2022). Pengembangan Desain Motif Batik Reyog Bulkiyo Dalam Mendukung Desa Wisata Kemloko, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, 5(1), 46-53.
- Rejo, U., Rahayu, I. K., & Kharisma, G. I. (2022). Revitalisasi Cerita Rakyat Masyarakat Timor Sebagai Penguatan Nilai Pendidikan Karakter Pada Era Tatanan Kehidupan Baru. *Jurnal Sastra Indonesia*, 11(1), 35-47.
- RISTEKDIKTI.(2018). Pengembangan Iptek dan Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0. Retrieved from <https://www.ristekdikti.go.id/>

[siaran-pers/pengembangan-iptek-danpendidikan-tinggi-di-era-revolusi-industri-4-0/](#)

- Santoso, I. (2016). Pasukan Khusus Pangeran Diponegoro Masih Menari (Studi Historis Kesenian Tari Tradisional Reyog Bulkiyo Blitar). *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 1(1), 21-27.
- Saraswati, A. R., & Narawati, T. (2017). Reog Bulkiyo Dance Learning to Increase Student Patriotism Values. *Jurnal Panggung*, 27(3), 225-35.
- Sari, I. P., & Mufarohah, L. (2020). Analisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kesenian Reog Bulkiyo Sebagai Pembelajaran Sosial Budaya Pada Mata Pelajaran Ips Kelas Ix. In *Seminar Nasional Pendidikan IPS*. 1(1)
- Sumantri, V. (2018). *Partisipasi masyarakat Desa Kemloko dalam upaya pelestarian tari reyog Bulkiyo Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Malang).
- Towaf, S. M., & Sukamto, M. (2017, October). Reyog Bulkiyo as a cultural potential in the natural laboratory of southern slopes of Kelud Volcano and its use for social studies learning based on environment. In *International Conference on Learning Innovation (ICLI 2017)* (pp. 220-227). Atlantis Press.
- Wijanto, Heri; Edy Kurniawan; Bambang Harmanto.2018. Philosophy Of The *Reyog Ponorogo* Equipment. *Arts and Humanities: General Arts and Humanities*.22(3).
- Wiratmaja, I. N., Suacana, I. W. G., & Sudana, I. W. (2021). Penggalian Nilai-Nilai Pancasila Berbasis Kearifan Lokal Bali Dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan. *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 1(1), 43-52.
- Wulansari, N. I., & Admoko, S. (2021). Identification of Physics Concepts in Reog Ponorogo's Dhadak Merak Dance as A Source of Learning Physics: An Analytical Study. *Berkala Ilmiah Pendidikan Fisika*, 9(1), 105-113.
- Yenrizal, Y. (2017). Penyebaran nilai-nilai lingkungan di masyarakat petani pedesaan (studi etnografi komunikasi pada masyarakat desa Tenam Bungkok, Semende Darat Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan). *Studi sosial dan politik*.

**KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT
DESA SENTOLO SEBAGAI MATERI
AJAR MATA KULIAH SASTRA
LISAN (FOLKLORE)**

Tri Ratna Herawati, Muncar Tyas Palupi

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta

Semua manusia, dari manapun dia berasal, tentu mempunyai budaya dan tradisi yang menjadi pedoman dan kebiasaan hidupnya sehari-hari. Daerah Sentolo merupakan bagian dari Kabupaten Kulon Progo. Daerah tersebut sebagai penghubung antara DIY dan Kulon Progo. Kulon Progo mengalami perkembangan pesat dengan adanya bandara Yogyakarta International Airport.

Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa kebudayaan merupakan sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan, serta meliputi sistem ide atau sebuah gagasan yang ada dalam pikiran manusia sehingga, dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak dan kompleks.. Wujud dari budaya adalah benda-benda yang bersifat nyata, sebagai contoh peralatan hidup, bahasa, organisasi sosial, seni, warisan sejarah berupa bangunan-bangunan, relief, alat-alat, kegiatan-kegiatan religi, dsb, keseluruhannya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan dalam bermasyarakat.

Salah satu wujud keistimewaan dari budaya itu sendiri adalah wujud Kearifan Lokal. Hubungan antara Kearifan lokal dan Kebudayaan merupakan dua pasangan mata uang yang saling sinergis dan saling mempengaruhi alat penuturnya. Kearifan Lokal merupakan pandangan hidup dan cara berpikir manusia dalam menjawab berbagai masalah dalam berinteraksi terhadap sesama. Cakupan kearifan lokal sangat beragam sehingga manusia bebas menentukan dan mengolahnya sesuai dengan karakter masing-masing daerah. Kearifan lokal bisa terjadi dari hasil tradisi nenek moyang yang dijunjung tinggi dan dihormati, namun juga bisa dari kebudayaan baru yang memiliki nilai-nilai seni dan keindahan, sehingga dijadikan sumber kekayaan suatu daerah. Dalam beradaptasi, manusia mengembangkan kearifan lingkungan yang berwujud pengetahuan atau ide, norma adat, nilai budaya, seni, aktifitas serta peralatan, sebagai hasil abstraksi budaya lokal yang beragam dan mampu memberikan nuansa yang bersejarah bagi suatu daerah. Ada beberapa fungsi dan manfaat dari kearifan lokal yang bisa memberikan kontribusi dan kekayaan bagi suatu daerah. Kearifan lokal dipandang mampu memberikan warna tersendiri.

Salah satu ciri kearifan lokal di wilayah Sentolo yaitu berupa hasil budaya tradisi dan kesenian, lambat atau cepat mampu memberikan kemajuan terutama di bidang pengembangan budaya khususnya di wilayah tersebut dan umumnya di Kabupaten Kulon Progo. Dampak positif yang muncul antara lain dapat meningkatkan nilai-nilai tradisi dan budaya yang dapat diajarkan kepada anak didik di sekolah, sehingga anak didik mampu memahami, dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal melalui tradisi budaya tersebut. Salah satu wujud tradisi budaya dan kesenian di wilayah

Sentolo antara lain kesenian “Kubro Saniseswo”, tradisi “Tawu Sendang Masuhan” dan beberapa hasil budaya lain yang identik dengan kearifan lokal.

Folklor atau sastra lisan merupakan produk kebudayaan yang rata-rata penyebarannya melalui mulut ke mulut masyarakat setempat. Folklor tersebut cakupannya semakin luas apabila dipadukan dengan tradisi lisan. Menurut Endraswara (2013:5) yaitu folklor merupakan media pendidikan yang bermanfaat bagi anak didik. Hasil budaya nenek moyang tersebut perlu dilestarikan karena mengandung nilai sejarah dan budaya yang bermanfaatnya bagi generasi penerusnya. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Endraswara (2019: 47) bahwa sastra lisan adalah kisah yang diceritakan oleh seorang anonim yang tidak tersusun pada jangka waktu tertentu dan beredar dengan ujaran-ujarannya pada masyarakat setempat. Tradisi budaya tersebut secara aspek sosial memberikan dampak positif bagi masyarakat karena menambah wawasan ilmu pengetahuan, seni dan budaya.

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian Erianjoni (2015) mengenai *Nilai-Nilai Kearifan Lokal Minangkabau ke dalam Materi Ajar Sosiologi*. Penelitian lain adalah Ima Siti Rahmawati (2018) tentang *Cerita Rakyat Nyi Rambut Kasih Sebagai Wujud Kearifan Lokal Terhadap Pendidikan Sastra di Majalengka*.

Pada tulisan ini, berbicara mengenai kearifan lokal masyarakat Desa Sentolo diintegrasikan sebagai materi bahan ajar mata kuliah Sastra Lisan (Folklor) dengan tujuan agar mahasiswa sebagai generasi penerus yang akan mewarisi berbagai budaya peninggalan nenek moyang perlu mempelajari dan memahami tentang Kearifan Lokal. Khususnya bagi mahasiswa yang berada di wilayah Sentolo dan umumnya berada di wilayah kabupaten Kulon Progo. Materi Ajar ini sebagai upaya untuk mempertahankan, melestarikan dan meningkatkan budaya kearifan lokal, sehingga dapat memperkaya khasanah budaya di wilayah Desa Sentolo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian diambil dengan teknik pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap kondisi masyarakat Dusun Jelok, Gedangan dan Masuhan. Dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik tersebut di atas merupakan alat pengumpul data utama (Moleong, 2013: 9). Tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan gambaran umum tentang tradisi dan kesenian budaya di daerah tersebut yang dapat diintegrasikan sebagai

bahan ajar mata kuliah Sastra Lisan. Sampel yang dipilih secara *purposive sampling* artinya sampel yang dipilih yaitu sampel untuk mewakili beberapa Dusun yang memiliki keragaman budaya. Prioritas yang dijadikan sampel penelitian di daerah tersebut karena keunikan budaya yang ada di dusun tersebut bisa membawa perubahan dan perkembangan yang positif khususnya untuk masyarakat di dusun tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kearifan Lokal Desa Sentolo

Kearifan lokal ini merupakan gambaran kearifan lokal Desa Sentolo yang merupakan hasil temuan yang peneliti peroleh dari informan yang berasal dari berbagai wilayah yang ada di Desa Sentolo yaitu Jelok, Gedangan, dan Masuhan, dan Kalibondol karena memiliki keragaman tradisi dan budaya yang bisa mewakili dusun-dusun yang ada di Sentolo.

Tabel 1. Kearifan Lokal Desa Sentolo`

No	Dusun	Jenis Kearifan Lokal	Keterangan
1	Jelok	Jathilan, Wayang Kulit	Beberapa jenis kearifan lokal yaitu tradisi budaya dan kesenian budaya akan dijabarkan dalam bentuk uraian secara deskriptif
2	Gedangan	Kubro Sanisiswo, Nyadran, Tawu Sendang, Sholawatan	
3	Masuhan	Sajen weton, puputan, Munjung	
4	Kalibondol	Mitoni, Selamatan kematian	

2. Deskripsi Kearifan Lokal di Desa Sentolo

a. Jathilan

Sejarah Jathilan asal mulanya mengisahkan perjuangan melawan penjajahan. Tarian ini diawali dengan tarian secara pelan-pelan seperti penari Gambyong, lama-lama menjadi tarian cepat, sesuai dengan iringan gamelan. Jathilan di wilayah Sentolo hampir sama coraknya dengan kesenian Jathilan dari wilayah Kabupaten Kulon Progo, yaitu tentang keunikan yaitu penarinya sebagian besar orang tua, dan busana yang digunakan oleh penari memiliki corak yang berbeda dengan busana jathilan di wilayah lain. Keunikannya diwujudkan dengan pemain barongan dan *cepét* yang merupakan figur tokoh utama yang berperan aktif dalam atraksi kesenian

tersebut. Nama Jathilan yang ada di wilayah Sentolo adalah Turonggo Wasesa dan Wahyu Kudo Lestari. Pertunjukan jathilan tersebut biasanya diadakan ketika ada upacara 17 Agustus, Ulang Tahun Desa, hajatan warga masyarakat, dan acara-acara tertentu.

b. Wayang Kulit

Wayang kulit merupakan tradisi budaya yang sudah ada sejak jaman nenek moyang, dan sampai sekarang masih dilestarikan oleh warga masyarakat Sentolo, terutama para pinisepuh warga yang masih menggandrungi kesenian wayang kulit. Kesenian wayang kulit banyak memberikan ajaran perilaku dalam kehidupan manusia, mulai dari bahasa yang dimainkan dalang sampai pada kisah pewayangan yang dimainkan oleh sang dalang ketika diselenggarakan acara wayang kulit di daerah tersebut. Jika ada acara hajatan warga atau acara ulang tahun desa, sering diadakan pertunjukan wayang kulit. Banyak petuah dan ajaran yang ditayangkan melalui pertunjukan wayang tersebut, misalnya tema yang ditayangkan adalah dengan judul Petruk Takon Bopo yang menceritakan Petruk yang berasal dari golongan rakyat jelata, karena kerendahan hati, Tuhan mengangkat derajat petruk menjadi pemimpin. Walaupun dia menjadi pemimpin, tetapi ia tetap memegang prinsip yang luhur. Sampai saat ini pun wayang kulit masih disegani dan dilestarikan oleh masyarakat di desa tersebut.

c. Nyadran

Setiap tahun, di wilayah Dusun tersebut selalu diadakan tradisi *nyadran* dan *tawu sendang*. Tradisi tersebut sudah sering dilakukan oleh para leluhur dan diteruskan oleh generasi sekarang. *Nyadran* diartikan sebagai pembersihan makam, dengan dibarengi upacara-upacara ritual untuk mendoakan para leluhur yang ada di wilayah tersebut. Waktu pelaksanaan acara *nyadran* tersebut biasa dilakukan sebelum tanggal 18, yaitu antara tanggal 1-11 Jawa diawali dengan bersih makam yang dilakukan oleh warga setempat terutama yang memiliki leluhur yang dimakamkan di makam Tinonggo tersebut. Dalam serangkaian upacara *nyadran*, banyak dibacakan doa-doa dengan bahasa Jawa. Hal ini untuk memudahkan masyarakat dalam memahami bacaan doa-doa yang dibacakan oleh rais atau kaum.

d. Tradisi *Tawu di Sendang Masuhan*.

Tradisi *tawu sendang Masuhan* diadakan setiap bulan *Suro* (Sya'ban) guna untuk melestarikan budaya leluhur warga masyarakat. Sendang tersebut berukuran sekitar 8 meter persegi. Sendang Masuhan berada di antara padukuhan Jelok dan padukuhan Masuhan. Sebelum acara *tawu*

sendang, Pertama-tama juru kunci Sendang yang diikuti warga setempat melakukan topo semedi dan puasa, tujuannya untuk membersihkan lingkungan Desa dan diri sendiri dari keburukan, kemaksiatan. Pada umumnya *tawu* sendang tersebut dilakukan pada hari Jumat,.

e. Sholawatan

Masyarakat Desa Sentolo masih memegang teguh adat istiadat, agama dan keyakinan terhadap Tuhan YME. Sholawatan sebetulnya merupakan peninggalan Wali Songo yang sampai sekarang masih digunakan sebagai acara rutin warga Sentolo. Menurut Anam (2003:23) dikatakan bahwa sholawat tujuannya untuk memvisualisasikan wujud Nabi Muhammad SAW, sebagai sosok manusia yang memiliki cahaya. Manfaat sholawat banyak memperoleh *fadhilah-fadhilah* yang besar seperti memperoleh syafaat, memperoleh *maghfirah* (ampunan), dilapangkan rezekinya, dihilangkan kesusahannya, dan memperoleh derajat tinggi.

f. Sajen Weton

Slametan weton merupakan selamat untuk memperingati hari pasaran atau hari kelahiran seseorang. Misalnya jika weton kelahiran seseorang jatuh di hari pasaran Senin Pahing, maka pada hari pasaran itu orang tersebut dibancaki atau dibuatkan bubur *abang* putih, gunanya untuk keselamatan bagi pemilik weton tersebut dan keluarganya. *Ubarampe* tersebut sudah disiapkan sejak sore setelah ba'da ashar (setelah waktu ashar) dan diletakkan di sekitar kamar atau ruangan dekat kamar tidur yang diweton. Makna keseluruhan dari *ubarampe* itu adalah setiap kehidupan manusia itu selalu diikuti oleh beberapa unsur baik wujud secara fisik maupun secara gaib untuk menjaga keseimbangan dari berbagai unsur dalam kehidupan manusia. Tujuannya agar diri seseorang dan keluarganya selamat dari berbagai bala dan musibah.

g. Mitoni

Mitoni merupakan salah satu tradisi budaya Jawa yang masih dianggap memiliki unsur sakral dan suci. Acara ini dilakukan oleh masyarakat Jawa ketika bayi berada dalam kandungan berumur tujuh bulan. *Mitoni* dimaksudkan untuk meminta keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar bayi yang dikandungnya diberi keselamatan sampai lahir dan menjadi anak yang bermanfaat. Di Desa Sentolo, tradisi ini masih dilakukan secara sederhana yaitu ibu si jabang bayi diberi kain lurik diikatkan di perut bersama dengan janur, tujuannya agar persalinan berjalan lancar. Sebelum acara itu diadakan, selamatan tujuh bulan dimulai dengan membaca doa dan sholawatan, dipimpin oleh seorang Rais. Setelah acara doa dan sholawatan selesai maka warga membawa berkat yang sudah didoakan oleh Rais .

h. Puputan

Acara *puputan* bagi orang Jawa merupakan selamatannya karena *puputnya* tali pusar bayi. Kelahiran bayi merupakan hal yang sakral karena berkaitan dengan nasib hidup bayi tersebut ketika dilahirkan di dunia. Di Desa Sentolo, acara *puputan* juga merupakan tradisi yang masih dilestarikan sampai saat ini. Masyarakat di daerah tersebut mengadakan acara *puputan* dengan terlebih dahulu mengadakan sholawatan, memuji kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keselamatan bayi tersebut dengan puji-pujian. Bayi digendong oleh bapaknya dikelilingi oleh warga dan satu persatu memotong rambut bayi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam gelas yang diisi air yang sudah didoakan oleh Rais setempat. Rambut tersebut kemudian ditimbang beratnya dan ditukar dengan harga emas. Uangnya dibagi-bagikan kepada warga yang tidak mampu sebagai sedekah.

i. Peringatan Acara Kematian

Kematian merupakan hal yang pasti terjadi pada seseorang. Menurut kepercayaan orang Jawa, khususnya di wilayah tersebut jika ada orang yang meninggal maka setiap KK (Kepala Keluarga) mengumpulkan beras minimal 1,2 kg yang dikumpulkan jadi satu dan diserahkan ke ahli warisnya dengan tujuan untuk meringankan beban keluarganya yang sedang berduka.. Tradisi itu sudah biasa dilakukan secara turun temurun. Untuk acara 3 hari, 7 hari dan seterusnya, keluarga mengadakan tahlilan untuk mendoakan arwah orang yang meninggal agar diampuni segala kesalahan dan dosanya semasa hidup di dunia. Untuk 7 harinya, 40 hari, 100 hari, sampai 1000 hari diadakan tahlilan yang dihadiri semua warga setempat.

3. Deskripsi Kearifan Lokal Masyarakat Desa Sentolo Sebagai Bahan Ajar Mata Kuliah Sastra Lisan (Folklore)

Pembelajaran mengenai kearifan lokal di Desa Sentolo dilakukan untuk menambah kekayaan terutama dalam bahan ajar mata kuliah Sastra Lisan. Dalam upaya melestarikan tradisi nenek moyang dan budaya kesenian yang adiluhung, seluruh budaya tadi sengaja diperkenalkan kepada anak didik agar bisa menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, agama, budaya yang ditanamkan melalui tradisi budaya tersebut. Berikut Tabel Data tentang Kearifan Lokal Masyarakat Desa Sentolo Sebagai Bahan Ajar Mata Kuliah Sastra Lisan.

Tabel 2. Kearifan Lokal Desa Sentolo Sebagai Materi Bahan Ajar Sastra Lisan

No	Kearifan Lokal Berupa Tradisi Budaya	Pengintegrasian pada Materi Ajar Sastra Lisan
1	Kesenian Jathilan	<p>Babak pertama dilakukan oleh penari kecil yang diiringi gamelan kurang lebih 30 menit, fungsinya sebagai pengenalan. Atraksi gerakan sesuai dengan kemampuan anak.</p> <p>Babak kedua diikuti oleh remaja sebagai contoh semangat muda yang memiliki cita-cita dan dedikasi untuk selalu semangat dalam mengarungi hidup ini.</p> <p>Babak 3 terdiri dari penari tua yang memberikan gambaran dengan berbagai cerita dan lakon yang memberi contoh dan perilaku yang baik pada anak-anak muda. Puncak dari tarian ini yaitu penari ada yang kesurupan dan disembuhkan oleh dukun atau pawang jathilan.</p> <p>Hal ini memberi materi ajar pada unsur budaya lokal, keragaman budaya dan tradisi serta norma-norma dalam tradisi budaya lokal.</p>
2	Wayang Kulit	<p>Kearifan lokal dalam wujud kesenian wayang kulit ini dapat diintegrasikan pada materi bahan ajar sastra lisan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Asal-usul kesenian wayang kulit atau sejarah wayang kulit. -Bahasa rakyat dan ungkapan tradisional dalam wayang kulit. -Cerita prosa rakyat Jawa -Mitos Cerita wayang kulit. -Nilai-nilai moral dalam lakon wayang kulit. Materi ini dapat memberikan wawasan keilmuan khususnya tentang sastra lisan.
3	Kubro Sani-siswa	<p>Kesenian Kubro Sanisiswa dapat memberikan wawasan ilmu untuk bahan ajar sastra Lisan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kesenian rakyat yang dapat memotivasi siswa memiliki semangat juang yang tinggi dalam mengisi kehidupan ini, terutama dalam meraih cita-cita.

4	Nyadran	Tradisi nyadran ini bisa menjadi ilmu bahan ajar khususnya untuk: -Materi dongeng, cerita rakyat berupa tradisi rakyat Jawa. -Kitab suci rakyat yaitu keyakinan bahwa tradisi ini bisa mendatangkan keberkahan dan keselamatan dengan puji-pujian dan doa.
5	Tawu Sendang	Tradisi Tawu Sendang ini bisa menjadi sumber bahan ajar mata kuliah sastra lisan yaitu : Legenda tentang asal – usul dan sejarah adanya sumur sendang atau sendang masuhan Mitos tentang Wali Songo yang ada dalam Sendang Masuhan
6	Sholawatan	Tradisi sholawatan dapat memberikan wawasan ilmu sastra lisan antara lain: - Religiusitas dan kepercayaan - Nyanyian Rakyat - Musik Rakyat
7	Sajen Weton	Tradisi tentang sajen weton ini dapat diintegrasikan untuk bahan ajar antara lain: -Kepercayaan dan mitos tentang pamomong diri . -Tradisi jawa
8	Puputan dan Munjung	Tradisi puputan dan munjung dapat memberikan wawasan ilmu untuk mata kuliah Sastra Lisan antara lain: - Tradisi budaya. - Agama dan kepercayaan. - Sejarah tradisi budaya.
9	Mitoni	Tradisi Mitoni dapat diintegrasikan ke dalam bahan ajar yaitu antara lain: - Tradisi dan kepercayaan. - Agama - Dongeng atau cerita rakyat.
10	Tradisi Selamatan Kematian	Tradisi Selamatan Kematian dapat diintegrasikan untuk mata kuliah Sastra lisan yaitu antara lain: - Agama dan kepercayaan. - Mitos dan cerita rakyat. - Puji-pujian dalam tradisi Jawa

KESIMPULAN

Kearifan Lokal yang ada di daerah Sentolo berupa tradisi dan kesenian antara lain: jathilan, wayang kulit, Kubro Sanisiswo, *mitoni*, *nyadran*, *tawu sendang*, *puputan* atau sepaaran bayi, dan acara selamat kematian. Dengan adanya tradisi dan kesenian budaya tersebut dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat setempat dan masyarakat luas pada umumnya. Banyak nilai-nilai budaya yang perlu dijadikan contoh, yaitu masih menjunjung tinggi tradisi nenek moyang dan mengambil suri tauladan dari tradisi dan kesenian budaya tersebut.

Kearifan lokal dapat memberi wawasan keilmuan untuk mata kuliah “Sastra Lisan” dengan tujuan agar mahasiswa sebagai generasi penerus mampu melestarikan, mengambil contoh, dan menerapkan ilmu yang ada melalui tradisi dan kesenian budaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam,Misbahul.2003 *Miftahuddin Mutiara Terpendam*: Jakarta:Darul Ulum Press
- Asteka Pipik.2020 *Kearifan Lokal Majalengka Sebagai Materi Ajar Mata Kuliah Sosiolinguistik*: Proseding Seminar Nasional pendidikan
- Endaswara,S.2013.*Metodologi Penelitian Sastra*.Yogyakarta;Caps (Center For Academic Publishing Service)
- Endraswara,S 2019.*Antropologi Sastra Lisan*;Jakarta;Gramedia
- Erianjoni.2015. *Integrasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Minangkabau ke dalam Materi Ajar Sosiologi Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik*.Tingkap,volume ii,No 1,36-46,([Http/www.repository.unp](http://www.repository.unp)).
- Moleong,L.J.2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*.Bandung;Remaja Rosdakarya
- RatnaNK.2014:*Karya Sastra,Seni dan Budaya Dalam Pendidikan Karakter*:Pustaka Pelajar
- Rahmawati,I.S.2018.Cerita Rakyat Nyi Rambut Kasih Sebagai Wujud Kearifan Lokal Terhadap Pendidikan Sastra di Majalengka.” *Diglosia: Jurnal Pendidikan,Kebahasaan,dan Kesusasteraan Indonesia*,2.1.
- Sudjana.2004.*Metode Statistika*:Bandung;Transito.
- Sibarani,R.2012*Kearifan Lokal : Hakekat,Peran dan Metode Tradisi Lisan* : Asosiasi Tradisi Lisan

Sukatman.2009. *Butir-Butir Tradisi Lisan Indonesia Pengantar Teori dan pembelajarannya*:Yogyakarta:Laksbang Pressindo

Teeuw,A.2003.*Sastra dan Ilmu Sastra*;Jakarta;Pustaka

Pelestarian Lingkungan di Lereng Gunung Arjuno Melalui Pengungkapan Hubungan Mitos Semar dengan Tirta Amerta Sari

*Wahda Rahma Laila, Fabian Omar Batitusta,
Alief Ananta Falaqurrahman*

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya

Masyarakat Jawa erat kaitannya dengan berbagai kepercayaan terhadap leluhur di suatu tempat, seperti halnya kepercayaan terhadap gunung yang sudah ada sejak zaman sebelum Hindu-Budha. Bagi masyarakat Jawa, gunung merupakan tempat sakral nan suci. Hal ini sesuai dengan pendapat Walsh (2014) yang menganggap gunung sebagai tempat semayam para dewa, leluhur dan roh nenek moyang. Masyarakat Jawa memercayai mitos bahwa Gunung Penanggungan, Lawu, Wilis, Kawi, Kemukus, Kelud, Arjuno, dan Semeru merupakan gunung suci (Titisari, Antariksa, Dwi, & Surjono, 2017). Gunung Arjuno merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Gunung Semeru, serta gunung tertinggi keempat di Pulau Jawa. Secara administratif, Gunung Arjuno mencakup tiga wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Malang (Desa Toyomarto), Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Pasuruan (Desa Tambaksari dan Desa Jatiarjo). Selain itu, wilayah Utara lereng Gunung Arjuno juga dikelilingi oleh beberapa desa dan serangkaian situs keramat yang tersebar di sepanjang jalur Utara pendakian ke puncak Gunung Arjuno (Sukmawan, 2014).

Gunung Arjuno menyimpan berbagai mitos yang berkembang di masyarakat, termasuk cerita Semar yang dipercaya sebagai sosok mitologis yang berjasa bagi kehidupan masyarakat setempat, seperti yang terjadi di Dusun Sumberawan Desa Toyomarto. Berbagai aktivitas spiritual masyarakat di Dusun Sumberawan memiliki keterkaitan dengan sosok Semar. Dusun Sumberawan memiliki situs stupa yang di dalamnya terdapat dua sumber mata air yang dipercaya memiliki fungsi tertentu bagi masyarakat. Situs stupa inilah yang memiliki kaitan khusus dengan Semar yang dipercaya sebagai sosok setengah dewa oleh masyarakat lereng Gunung Arjuno.

Situs Stupa Sumberawan memiliki dua sumber mata air yang disebut Tirta Amerta Sari. Keberadaan Tirta Amerta Sari sangat penting bagi masyarakat lereng Gunung Arjuno sebagai sumber kehidupan dan kemuliaan, serta dianggap sebagai air suci oleh masyarakat sekitar, hal ini dikarenakan air tersebut berasal dari gunung yang dianggap suci, sehingga mata air dan aliran airnya juga dianggap suci (Cahyono, 2017). Sebagai bentuk rasa syukur atas keberadaan sumber ini, masyarakat melakukan ritual khusus yang telah mengakar menjadi tradisi masyarakat lereng Gunung Arjuno di Dusun Sumberawan. Tradisi tersebut memiliki fungsi serupa dalam upaya pelestarian lingkungan guna menjaga keberadaan Tirta Amerta Sari sebagai sumber kehidupan masyarakat.

Upaya pelestarian lingkungan penting dilakukan karena Dusun Sumberawan memiliki potensi besar mengalami kerusakan dikarenakan

berada pada kawasan lereng Gunung Arjuno yang merupakan zona rawan gempa dengan potensi tanah longsor, letusan gunung, banjir hingga tsunami (Permendagri No 33 Tahun 2006). Potensi ini dapat dilihat dari banyaknya bencana alam yang terjadi di Malang, Jawa Timur. Potensi bencana yang ada antara lain banjir bandang, kebakaran hutan, longsor, angin puting beliung, letusan, dan gempa mikro vulkanik. Terbukti dengan adanya bencana banjir bandang dan tanah longsor pada bulan November 2021, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang menjadi sorotan utama karena memiliki potensi besar menelan korban dan mengakibatkan banyak kerugian. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya khusus dalam pelestarian lingkungan di Dusun Sumberawan, salah satunya melalui sastra lisan dalam tradisi yang berkembang di masyarakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara masing-masing bagian dan fungsi dalam cerita Semar hingga Tirta Amerta Sari yang merupakan bagian dari sastra lisan lereng Gunung Arjuno sangat menarik untuk dikaji karena berpotensi besar mengungkap nilai kearifan terhadap alam (Sukmawan, 2018) sehingga bermanfaat dalam upaya pelestarian lingkungan setempat.

Pentingnya Semar dan Tirta Amerta Sari bagi masyarakat lereng Gunung Arjuno pada dasarnya telah diuraikan dalam penelitian sebelumnya, salah satunya dalam artikel berjudul *Makna Ruang Sebagai Aspek Pelestarian Situs Sumberawan* oleh Syamsun Ramli dan Respati Wikantiyoso (2018) yang menjelaskan perbedaan pemaknaan dan penggunaan ruang di Situs Sumberawan, termasuk dalam hal mitos, stupa, hingga Tirta Amerta Sari. Kemudian, penelitian selanjutnya dengan judul *Dampak dan Fungsi Mite Semar Bagi Kehidupan Masyarakat Lereng Gunung Arjuna* oleh Muhammad Faisal Aristama, dkk (2020) menjelaskan fungsi mite semar melalui berbagai tradisi di dusun Tambakwatu desa Tambaksari Kecamatan Pasuruan Jawa Timur. Juga penelitian berjudul *Nilai Religius dan Fungsi Sastra dalam Cerita Rakyat Candi Sumberawan* oleh Nahdhotul Agung Prayoga dan Maulfi Syaiful Rizal (2020) yang membahas mengenai Fungsi sastra dan folklor dalam cerita rakyat Candi Sumberawan sebagai sumber tradisi kepercayaan masyarakat, alat pendidikan masyarakat, hingga fungsinya sebagai hiburan, dan alat pemaksa serta pengawas norma masyarakat. Ketiga penelitian tersebut pada dasarnya telah mengupas secara tuntas masing-masing fungsi dari keberadaan sosok Semar dan Tirta Amerta Sari dalam kehidupan masyarakat lereng Gunung Arjuno, namun belum ada pembahasan secara khusus keterkaitan antara keduanya dalam tradisi lisan yang berkembang sebagai upaya pelestarian lingkungan di Dusun Sumberawan.

Sebagai sebuah produk budaya kolektif masyarakat, keberadaan Semar dan Tirta Amerta Sari tidak dimaknai sebagai cerita semata, tetapi telah menjadi bagian dalam tradisi dan spiritual masyarakat lereng Gunung Arjuno, khususnya di Dusun Sumberawan. Berdasarkan paparan tersebut, kajian dengan pendekatan ekokritik sastra tentang kaitan Semar dengan Tirta Amerta Sari dalam upaya pelestarian lingkungan masyarakat lereng Gunung Arjuno perlu dilakukan karena memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat Dusun Sumberawan. Ekokritik sastra dalam hal ini berhubungan dengan penilaian baik buruk terhadap pola hubungan tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan manusia kepada satu samalain (Harsono, 2008). Secara sederhana ekokritik sastra dapat dipahami sebagai kritik sastra berwawasan lingkungan, karenanya pendekatan ini sangat relevan digunakan dalam upaya pelestarian lingkungan melalui sastra lisan dan tradisi yang ada di Dusun Sumberawan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan kaitan Semar dengan Tirta Amerta Sari bagi kehidupan masyarakat lereng Gunung Arjuno dan 2) Mendeskripsikan upaya pelestarian lingkungan guna menjaga keberadaan sumber air Tirta Amerta Sari sebagai sumber kehidupan masyarakat lereng Gunung Arjuno.

METODE

Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2022 di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari dengan pendekatan ekokritik sastra. Pendekatan ini digunakan karena tradisi lisan yang ada di tengah masyarakat Sumberawan disikapi sebagai tradisi bermantra sastra dan berorientasi ekologis (Sukmawan, 2018). Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kriteria ketersediaan data dan respons masyarakat (Endraswara, 2009). Objek penelitian berupa cerita semar dan Tirta Amertha Sari serta tradisi yang berkembang di masyarakat. Sumber data penelitian ini adalah; 1) dua orang informan, yaitu Bapak Dika selaku juru kunci dari situs Candi Sumberawan, dan Bapak Nuryadi yang merupakan ayah dari Bapak Dika sekaligus sesepuh desa dan mantan juru kunci Candi Sumberawan, 2) catatan observasi selama penelitian, dan 3) dokumen.

Teknik penentuan informan didasarkan pada penutur langsung cerita dan tradisi Candi Sumberawan Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari (Prayoga, 2020) dengan kriteria berdasarkan teori Spradley (Wijaya, 2018), yaitu (1) penduduk domisili tetap dengan kecakapan pengetahuan tentang cerita dan tradisi Candi Sumberawan, sehingga mampu memberi korpus data yang melimpah, cermat, dan benar-benar mewakili; (2) usia

dewasa sekitar 30 tahun sehingga memiliki pengetahuan bahasa dan budaya yang cukup luas; (3) Terlibat langsung dalam fenomena budaya (4) mampu memahami maksud dan/atau instruksi peneliti; (5) tidak memiliki gangguan wicara maupun pendengaran; (6) dapat bercerita secara mudah dan paham terhadap informasi yang dibutuhkan; (7) bersikap netral atau tidak memiliki kepentingan pribadi; serta (8) memiliki waktu yang cukup.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara terstruktur dan tidak terstruktur serta observasi lapangan, dengan data penelitian berbentuk tuturan yang disampaikan oleh juru kunci Candi Sumberawan dan sesepuh Desa Toyomarto berupa informasi terkait mitos, sastra lisan dan tradisi lisan yang berkembang di dusun Sumberawan. Sementara itu, teknik analisis data dilakukan dengan analisis isi yang digunakan untuk menganalisis data berupa paparan lisan hasil wawancara dan analisis deskriptif untuk data hasil observasi yang dilakukan melalui tahapan pengumpulan data menggunakan teknik transkripsi wawancara dan penerjemahan. Teknik analisis isi dimaksudkan guna melakukan pengolahan pada data yang menekankan kajian isi yang sesuai dengan fokus penelitian hingga kemudian dijabarkan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tirta Amerta Sari dalam Pandangan Masyarakat Lereng Gunung Arjuno

Sumber air Tirta Amerta Sari terletak di sebelah Barat dan Timur Stupa Sumberawan. Di sebelah Barat terdapat sumber air yang dinamakan sumber Kahuripan sedangkan di sebelah Timur dinamakan sumber Kamulyan. *Kahuripan* berarti kehidupan, kata *kahuripan* berasal dari kata *urip* yang berarti hidup sedangkan *kamulyan* berarti kemuliaan berasal dari kata *mulya* yang memiliki arti mulia (Bapak Nuriyadi, Wawancara 15 April 2022).

Sejarah penamaan kedua sumber tersebut tidak terlepas dari cerita yang diwariskan secara turun temurun. Dahulu kala, terdapat seorang petani yang melihat tentara Belanda menembak seekor babi. Kemudian babi tersebut berlari ke arah sumber mata air Kahuripan. Setelah babi tersebut keluar dari Kahuripan, bekas luka tembakan pada tubuh babi menghilang dan babi itu sehat kembali. Oleh karena itu, sumber tersebut diberi nama *Kahuripan* karena berdasarkan cerita tersebut, sumber air dapat menyembuhkan atau menyelamatkan babi tersebut dari kematian akibat luka terkena tembakan. Sedangkan sumber air yang kedua dulunya

dijadikan tempat mandi oleh Raja-Raja pada zaman Majapahit. Tujuan mandi pada sumber tersebut adalah agar dalam menjabat sebagai Raja dapat diberikan kemuliaan untuk memimpin. Maka dari itu sumber tersebut dinamakan sumber *Kamulyan* (Bapak Nuriyadi, Wawancara 15 April 2022).

Bagi masyarakat lereng Gunung Arjuno, sumber Kahuripan dipercaya dapat memperpanjang usia. Masyarakat lereng Gunung Arjuno juga memercayai bahwa sumber Kahuripan dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Oleh karena itu, baik masyarakat lereng Gunung Arjuno maupun masyarakat dari luar daerah, datang ke sumber Kahuripan sekadar mandi atau meminum airnya yang dipercaya berkhasiat dalam menyembuhkan penyakit.

Sedangkan sumber Kamulyan berkaitan dengan pangkat atau jabatan. Konon, banyak raja yang mandi di sumber Kamulyan untuk mendapat kemuliaan dalam jabatannya (Sukmawan, dkk, 2020). Masyarakat lereng Gunung Arjuno memercayai bahwa dengan niat baik dan bersih sumber, Kamulyan dapat membantu seseorang untuk memperoleh atau melanggengkan jabatannya. Banyak calon-calon pemimpin bahkan tokoh nasional yang datang ke sumber Kamulyan. Dari kedua sumber yakni sumber Kahuripan dan sumber Kamulyan, pengunjung lebih banyak yang menuju ke sumber Kamulyan (Bapak Nuriyadi, Wawancara 15 April 2022).

2. Keterkaitan Semar dengan Tirta Amerta Sari

Semar bagi masyarakat lereng Gunung Arjuno dianggap sebagai sosok manusia setengah dewa. Dikisahkan Semar melakukan pertapaan di Kasuranggan (Bapak Nuriyadi, Wawancara 15 April 2022). *Kasuranggan* pada kitab Negarakertagama memiliki makna tempat yang baik dikunjungi karena keindahannya seperti diselimuti awan (Syaiful Rizal, M & Agung Prayoga N, 2021). Masyarakat lereng Gunung Arjuno menisbatkan *Kasuranggan* pada Gunung Arjuno.

Kasuranggan memiliki tiga alam yakni alam *Padhang*, alam *Kadewatan*, dan *Sunyaruri*. Semar melakukan pertapaan di alam Sunyaruri. *Sunyaruri* memiliki arti tempat yang gelap dan sunyi. Hal itu dikarenakan tempat tersebut dikelilingi oleh pohon yang menjulang tinggi dan lebat sehingga sinar matahari tidak bisa menembus tempat tersebut (Bapak Nuriyadi, Wawancara 15 April 2022).

Sunyaruri sebagai tempat pertapaan Semar memiliki keterkaitan dengan keberadaan Tirta Amerta Sari. Dari alam tersebut Tirta Amerta Sari berasal.

Tirta Amerta Sari merupakan sumber air yang terletak di sebelah Utara dan Selatan Stupa Sumberawan. *Tirta amerta* berarti air suci minuman para dewa (Sukmawan, dkk, 2020). Stupa Sumberawan sendiri terletak di lereng Gunung Arjuno tepatnya di Dusun Sumberawan Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Karenanya, Tirta Amerta Sari menjadi sumber kehidupan dan kemuliaan bagi masyarakat lereng Gunung Arjuno.

3. Tradisi Masyarakat Lereng Gunung Arjuno Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan

Masyarakat lereng Gunung Arjuno sangat bersyukur dengan adanya sumber air Tirta Amerta Sari. Rasa syukur masyarakat diwujudkan melalui ritual khusus yang telah mengakar, menjadi tradisi bagi masyarakat lereng Gunung Arjuno di Dusun Sumberawan Desa Toyomarto. Ritual ini secara spiritual berkaitan dengan sosok Semar yang dipercaya masyarakat sebagai sosok suci. Selain sebagai wujud rasa syukur, tradisi tersebut juga merupakan upaya pelestarian lingkungan sekitar, terlebih lagi guna menjaga keberadaan Tirta Amerta Sari.

Festival Tirta Amerta Sari merupakan wujud rasa syukur masyarakat Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, akan adanya sumber air Tirta Amerta (Bapak Nuriyadi, Wawancara 15 April 2022). Festival ini dilaksanakan pada malam 1 *Suro* bersamaan dengan tahun baru Islam atau 1 *Muharram*. Uliningrum, W (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sebelum adanya festival Tirta Amerta Sari, masyarakat melakukan selamat langsung ke sumber air tanpa adanya arak-arakan secara berkelompok. Mulai tahun 2017 festival Tirta Amerta Sari diadakan sehingga masyarakat melaksanakan selamat bersama-sama.

Adapun arti dari nama Tirta Amerta Sari yaitu *tirta* yang berarti air, *amerta* berarti kehidupan yang abadi, dan *sari* berarti segala tumbuh-tumbuhan. Secara utuh, artinya adalah “air sebagai sumber utama kehidupan bagi umat manusia, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya”. Slogan dalam festival Tirta Amerta Sari adalah “*Memetri Giri Bumi Amerta Sari*”. *Memetri* berarti mengingat, *giri* berarti gunung, *amerta* berarti kehidupan, dan *sari* berarti tumbuh-tumbuhan. Maknanya adalah gunung dan tumbuh-tumbuhan sebagai bagian dari dunia yang menopang kehidupan bagi manusia dan makhluk lainnya, yang perlu diingat bahwa semua merupakan ciptaan Allah yang membentuk suatu ekosistem (Uliningrum, W, 2019).

Pada festival Tirta Amerta Sari, masyarakat Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto membawa berbagai hasil bumi seperti palawija. Arak-arakan dimulai dari kantor kepala desa menuju sumber air Tirta Amerta Sari dengan dipimpin oleh *kamituwo* atau Kepala Dukuh (Ramli, S., & Wikantiyoso, R, 2018). Terdapat berbagai perlengkapan yang digunakan pada saat pelaksanaan festival Tirta Amerta Sari, meliputi:

1. Tumpeng;
2. Pisang;
3. *Ancak* (tempat makanan yang terbuat dari bambu berbentuk persegi);
4. Kendi;
5. *Gendok* (tempat air yang terbuat dari tanah liat yang di dalamnya berisi bunga mawar, kenangan, dan kanthil);
6. Ikan;
7. Burung;
8. Bibit pohon.

Sesampainya di sumber air Tirta Amerta Sari, masyarakat melakukan doa bersama di sekitar Stupa Sumberawan dan dilanjutkan dengan ritual khusus oleh tokoh adat atau sesepuh desa dengan membaca mantra *kunci*. Mantra *kunci* harus dilafalkan tanpa membaca teks sebanyak tujuh kali. Adapun bunyi mantra tersebut sebagai berikut:

*Gusti ingkang Moho Suci, kula nyuwun pangapura dumateng
Gusti ingkang Moho Suci. Sirullah dzatullah sifatullah, kula
sejatine satrio nyuwun wicaksana, nyuwun panguoso kangge
tumindake satrio sejati, kula nyuwun kangge hangnyirnakake
tumindak ingkang luput.*

(Bapak Nuriyadi, Wawancara 15 April 2022)

(Terjemahan: Tuhan Yang Maha Suci, saya minta maaf kepada Tuhan Yang Maha Suci. Sirullah, dzatullah, sifatullah, saya sejatinya pemimpin memohon kebijaksanaan, memohon kekuasaan untuk menjadi pemimpin, saya memohon untuk menghilangkan perilaku yang salah)

Di akhir prosesi festival Tirta Amerta, terdapat kegiatan penanaman pohon di hutan, penyebaran ikan di sungai, dan pelepasan burung. Pelepasan ikan dilakukan di kolam area Stupa Sumberawan. Pelepasan ikan dan burung dilakukan oleh tokoh masyarakat sedangkan penanaman pohon dilakukan oleh masyarakat (Uliningrum, W, 2019).

Masyarakat Dusun Sumberawan Desa Toyomarto memercayai bahwa alam terjaga dengan baik, alam juga akan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Kegiatan pelepasan ikan dan burung memiliki tujuan agar ekosistem sungai dan hutan tetap terjaga. Ikan yang dilepaskan adalah jenis ikan tombro. Pada kegiatan penanaman pohon, tidak ada batasan jenis pohon yang ditanam, hanya saja pohon tersebut haruslah mampu menyerap air. Pemilihan pohon yang bisa menyerap air ditujukan agar pohon tersebut dapat menyimpan cadangan air sehingga pada saat musim kemarau tiba, sumber air tidak mengalami kekeringan. Kegiatan penanaman pohon juga dapat mencegah terjadinya erosi di sekitar sumber, dan apabila terjadi erosi, akibatnya air akan menjadi keruh karena bercampur dengan tanah (Bapak Nuriyadi, Wawancara 15 April 2022). Kegiatan pelepasan ikan, burung, dan penanaman pohon dapat dimaknai sebagai upaya pelestarian lingkungan, utamanya menjaga keberadaan sumber air Tirta Amerta, karena Tirta Amerta merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat lereng Gunung Arjuno.

PENUTUP

Gunung Arjuno menyimpan berbagai mitos dan tradisi yang berkembang di masyarakat, termasuk cerita Semar yang dipercaya sebagai sosok mitologis yang berjasa bagi kehidupan masyarakat setempat, salah satunya di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto. Sosok Semar ternyata masih memiliki hubungan erat dengan keberadaan Tirta Amerta Sari yang merupakan sumber kehidupan dan kemuliaan bagi masyarakat lereng Gunung Arjuno. Sumber ini tepat berada di situs menarik yang ada di Dusun Sumberawan yaitu Stupa Sumberawan. Stupa inilah yang kemudian menjadi penghubung antara sosok semar dengan sumber air Tirta Amerta Sari. Keberadaan sumber tersebut membuat masyarakat merasa bersyukur hingga kemudian lahirnya sebuah tradisi yang mengakar di masyarakat setempat yang sekaligus menjadi upaya pelestarian lingkungan, mengingat wilayah lereng Gunung Arjuno adalah salah satu wilayah yang rawan bencana.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, rekomendasi bagi peneliti selanjutnya adalah penelitian yang membahas pengaruh sastra lisan terhadap kelestarian lingkungan setempat sehingga dapat terlihat dengan jelas manfaat sastra lisan yang ada bagi masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristama, M. F., Andalas, E. F., & Sugiarti, S. (2020). Dampak dan fungsi mite Semar bagi kehidupan masyarakat lereng Gunung Arjuna. *Poetika: Jurnal Ilmu Sastra*, 8(1), 1-12.
- Cahyono, D. (2017). *Pratipa (Prasawya Tirtha Ppawitra): Tirthayatra Mengitari Ardi Suci Penanggungan*. Retrieved from <https://patembayancitraleka.wordpress.com/2017/03/15/prasawya-tirthapawitra/>
- Endraswara, S. (2008). *Metodologi Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Harsono, S. (2008). Ekokritik: Kritik Sastra Berwawasan Lingkungan. *Kajian Sastra*, 32(1), 31-50.
- Prayoga, N. A., & Rizal, M. S. (2020). *Nilai Religius dan Fungsi Sastra dalam Cerita Rakyat Candi Sumberwan*. In Seminar Internasional Riksa Bahasa (pp. 708-715).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana.
- Ramli, S., & Wikantiyoso, R. (2018). Makna Ruang Sebagai Aspek Pelestarian Situs Sumberawan. *Local Wisdom*, 10(1), 31-42.
- Sukmawan, S. (2014). Apokaliptime Sastra Lisan Lereng Arjuna. *Sirok Bastra*, 2(2), 169-183.
- Sukmawan, S., Rizal, M. S., & Nurmansyah, M. A. (2018). *Green folklore*. Universitas Brawijaya Press.
- Sukmawan, S, dkk. 2020. *Grama Tirta: Merangkai Kisah, Meramu Prakarsa, Merengkuh Asa*. Malang: MNC Publishing
- Titisari, E. Y., Antariksa, Dwi, L. W., & Surjono. (2017). Sumber Air Dalam Ruang Budaya Masyarakat Desa Toyomerto Singosari, Malang Menggali Kearifan Lokal Mengenai Water Resources Sustainability. *Seminar Nasional Arsitektur Dan Tata Ruang (SAMARTA)*, 1-9.
- Uliningrum, W. 2019. "Kirab Budaya Tirta Amerta Sari Dalam Perspektif Kearifan Lokal Kaitannya Dengan Konservasi Sumber Air Di Candi Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang". *Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya*. (Skripsi).
- Walsh, D. 2013. Kepercayaan Masyarakat Jawa Terhadap Gunung, (online diakses 24 April 2022)
- Wijaya, H. (2018). *Analisis data kualitatif model Spradley* (etnografi).

**PENGEMBANGAN
MULTIMEDIA INTERAKTIF
BERBASIS ADOBE FLASH
TERINTEGRASI NILAI-NILAI
KARAKTER PADA MATERI
SISTEM RESPIRASI**

Hudson Sidabutar, Riscal Sitorus

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan

Pendidikan adalah sesuatu yang tidak lepas dari proses pembelajaran. Pendidikan tidak hanya diselenggarakan dengan memanfaatkan buku dan pendidik saja. Pendidikan dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran sesuai dengan ilmu yang diajarkan. Salah satunya yakni menggunakan multimedia pembelajaran interaktif (Fahmi, 2014).

Pada kenyataannya, di dalam dunia pendidikan saat ini masih dijumpai berbagai permasalahan terkait keterbatasan media pembelajaran yang membuat guru kesulitan menyampaikan materi kepada peserta didik. Terdapat beberapa materi dalam biologi yang objeknya sulit untuk dihadirkan secara visual, seperti sistem respirasi. Dengan kata lain penggunaan, media pembelajaran sebagai prioritas sumber belajar pada proses pembelajaran biologi yang bersifat abstrak belum dilakukan secara optimal.

Multimedia interaktif merupakan multimedia yang dilengkapi dengan pengaturan yang dapat dijalankan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang diinginkan untuk proses selanjutnya (Gunawan, 2015). Salah satu *software* yang dapat digunakan untuk membuat multimedia yang menarik adalah *Adobe Flash* karena sifatnya yang simultan, atau dapat digunakan secara bersamaan.

Dalam proses pembelajaran, terdapat tiga ranah penilaian yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya yaitu ranah kognitif (pemahaman), ranah afektif (sikap), dan ranah psikomotorik (kemampuan) (Ermayasari, 2013). Berkenaan dengan itu, berbagai media pembelajaran dengan menggunakan multimedia interaktif telah banyak dikembangkan dan cenderung hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai kognitif siswa, namun belum memunculkan nilai-nilai karakter yang ada pada multimedia interaktif tersebut. Di samping itu, pendidikan karakter merupakan perhatian utama bangsa Indonesia saat ini. Hal ini disebabkan karena mulai mudarnya nilai-nilai karakter yang seharusnya menjadi identitas dan ciri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai karakter perlu dimuat dalam multimedia interaktif yang dikembangkan. Multimedia terintegrasi nilai-nilai karakter adalah adanya penggabungan nilai-nilai karakter yang ditetapkan dan disajikan ke dalam multimedia interaktif.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa media pembelajaran yang digunakan masih sebatas *PowerPoint* dan menggunakan buku biologi dengan bantuan diskusi dan tanya jawab antara guru dengan siswa. Penurunan nilai-nilai karakter pada beberapa siswa, seperti sikap tanggung jawab, jujur, disiplin, mandiri serta religius saat mengikuti pembelajaran juga terjadi. Dalam hal ini, penekanan pada nilai-nilai

karakter yang harus dimiliki oleh peserta didik, proses pembelajaran perlu diperhatikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengembangkan multimedia interaktif yang mendukung proses pembelajaran pada materi sistem respirasi serta menyampaikan nilai-nilai karakter yang dapat diterima oleh peserta didik pada proses pembelajaran.

METODE

Penelitian pengembangan ini mengacu pada model penelitian pengembangan 4D yang meliputi tahap pendefinisian (*define*), tahap perancangan (*design*), tahap pengembangan (*develop*) dan tahapan penyebaran (*disseminate*). *Disseminate* hanya dilakukan pada uji lapangan terbatas. Berdasarkan teknik *purposive sampling* dalam penelitian ini, ditetapkan sampel penelitian yaitu siswa kelas XI MIA 1 yang berjumlah 36 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan angket. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket dan tes hasil belajar.

Ketuntasan belajar siswa klasikal dilihat dari nilai evaluasi yang diperoleh siswa dalam menggunakan multimedia interaktif yang dikembangkan dengan nilai besar sama dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditetapkan. Hasibuan, *et al* (2019) menjelaskan bahwa persentase ketuntasan klasikal (PKK) hasil uji kognitif dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut :

$$PKK = \frac{\sum X_i}{n_i} \times 100 \%$$

Keterangan :

$\sum X_i$ PKK = Persentase ketuntasan klasikal
 = Jumlah siswa yang tuntas belajar

n_i = Jumlah seluruh siswa

Prosedur penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan multimedia interaktif berbasis *Adobe Flash CS6* terintegrasi nilai-nilai karakter pada materi sistem respirasi kelas XI MIA SMAN 1 Sipoholon terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap pendefinisian (*Define*), tahap perancangan (*Design*) tahap pengembangan (*Develop*) dan tahap penyebaran (*Disseminate*). Pada tahap *define* dilakukan analisis ujung, analisis siswa, analisis kurikulum, dan perumusan tujuan pembelajaran. Pada tahap ini juga dilakukan pemilihan media, menyusun format media dan rancangan awal untuk menghasilkan draft 1. Pada tahap *develop*,

dilakukan validasi ahli dan uji coba pengembangan. Pada tahap *disseminate*, dilakukan penyebaran terbatas menggunakan media yang telah valid.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan model deskriptif, yaitu pembagian teknik analisis data menjadi dua: analisis data untuk hasil angket validasi dan hasil angket guru peserta didik. Data hasil angket ahli materi, ahli media, guru dan siswa dianalisis dengan langkah-langkah berikut :

Data yang diperoleh berupa daftar *Checklist* yang dirangkum dalam bentuk skala *likert* yang telah diberi skor. Perolehan rentang rerata skor tersebut dengan ketentuan bahwa pada skala *likert*, skor maksimum ideal adalah 5 dan skor minimum ideal adalah 1. Berdasarkan data tersebut, suatu produk dapat dikatakan layak digunakan apabila hasil uji coba lapangan minimal termasuk dalam kriteria baik.

Analisis data hasil angket nilai karakter pada multimedia interaktif dikembangkan menggunakan analisis statistik deskriptif dengan langkah-langkah berikut:

1. Langkah pertama adalah mengubah pernyataan “ya” dan “tidak” menjadi skor 0 dan 1. Untuk pertanyaan negatif, jawaban “ya” = 0 dan jawaban “tidak” = 1. Sedangkan pertanyaan positif, jawaban “ya” = 1 dan jawaban “tidak” = 0.
2. Mencari skor rata-rata penilaian. Rumus yang digunakan adalah :

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

Keterangan :

\bar{x} = Skor rata-rata

$\sum x$ = Merupakan jumlah skor butir,

n = Jumlah butir

3. Nilai rata-rata total skor masing-masing komponen yang diperoleh dikonversikan menjadi data kualitatif berupa hasil angket penguatan nilai karakter siswa.

**Tabel 1. Konversi Skor Aktual menjadi Kategori Kualitatif
untuk interval 0 dan 1.**

No	Interval Skor	Nilai	Kategori
1	$> 0,8$	A	Sangat layak
2	$0,6 < 0,8$	B	Layak
3	$0,4 < 0,6$	C	Cukup layak
4	$0,2 < 0,4$	D	Kurang layak
5	$x \leq 0,2$	E	Sangat Kurang layak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dimulai dengan tahap awal penelitian yang menunjukkan pembelajaran yang dilaksanakan dinilai kurang maksimal dengan hanya menggunakan media yang tersedia di sekolah berupa buku dan *PowerPoint*. Hal ini merujuk pada hasil wawancara dan observasi langsung yang diadakan di SMA Negeri 1 Sipoholon. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa kurang termotivasi dengan hanya menggunakan media belajar berupa buku dan *PowerPoint*. Siswa SMA Negeri 1 Sipoholon lebih suka pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang bisa menjelaskan dengan video, audio, animasi bergerak dan berbicara, dan melihat gambar secara interaktif. Seperti yang disampaikan oleh Armansyah (2019), multimedia interaktif adalah solusi dalam memudahkan peserta didik untuk mempelajari materi dibandingkan dengan buku *teks/ebook* yang monoton.

Proses pelaksanaan pembelajaran juga menemui gejala penurunan nilai-nilai karakter yang dialami oleh siswa, seperti sikap tanggung jawab, jujur, disiplin, mandiri, serta religius saat mengikuti pembelajaran. Untuk itu, pendidikan melalui model multimedia interaktif hadir. Multimedia interaktif tidak hanya memuat materi sistem respirasi, namun juga turut mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang telah ditetapkan ke dalam multimedia interaktif tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Ratnawati (2015) yang menyatakan bahwa pendidikan karakter dapat dimuat dalam proses pembelajaran. Senada dengan itu, Ambarita (2020) menyatakan multimedia interaktif mampu tersampaikan dengan kategori baik dalam multimedia interaktif yang dikembangkan. Oleh karena itu, produk multimedia interaktif berbasis *Adobe Flash* terintegrasi nilai karakter dirancang sesuai dengan kebutuhan kognitif dan karakter baik yang perlu dimiliki siswa.

Rancangan awal (*initial design*) pada multimedia interaktif dimulai dengan menyiapkan bahan berupa *background* yang dipilih dengan menyesuaikan kebutuhan, gambar dalam format *png*, musik dan audio yang dibuat dalam format *wav*, dan video dengan proses *embedding* untuk diinput ke dalam *adobe flash CS6* serta komponen-komponen lainnya yang dibutuhkan dalam multimedia pembelajaran untuk menghasilkan *draft 1* multimedia interaktif berbasis *Adobe Flash CS6*. *Draft 1* yang dihasilkan dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar.1 Tampilan awal multimedia pada Draft 1

Draft 1 multimedia interaktif yang dihasilkan dalam materi sistem respirasi pada manusia disajikan dengan penyampaian berupa teks, gambar diam, animasi, dan video yang sesuai. Multimedia interaktif juga memuat petunjuk penggunaan aplikasi serta soal evaluasi. Integrasi nilai karakter juga dimuat dalam bentuk pesan yang akan muncul. Sebagai uji kelayakan produk, dilakukan validasi media terhadap ahli materi dan ahli media pada tahap *develop*. Menurut Hasibuan *et al*, (2019) sebuah produk dinyatakan layak apabila nilai rata-rata skor total dalam kriteria baik. Hasil penilaian ahli materi dan media adalah sebagai berikut :

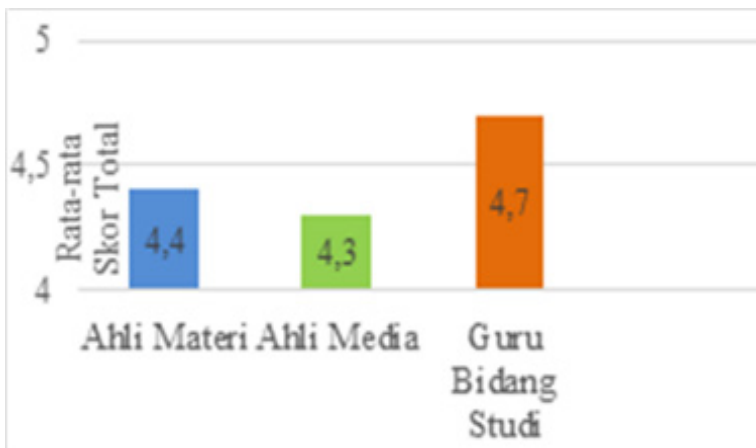
1. Validasi Ahli Materi

Angket validasi ahli materi memuat 40 butir pernyataan dengan rata-rata skor total pada aspek kualitas materi berada di angka 4,42. Berdasarkan hasil tersebut, nilai $X > 4,2$ termasuk dalam kriteria “sangat baik”. Maka, dapat dijelaskan bahwa produk yang dikembangkan layak digunakan oleh siswa dari segi materi dalam media sudah layak dengan kriteria “sangat baik”.

2. Validasi Ahli Media

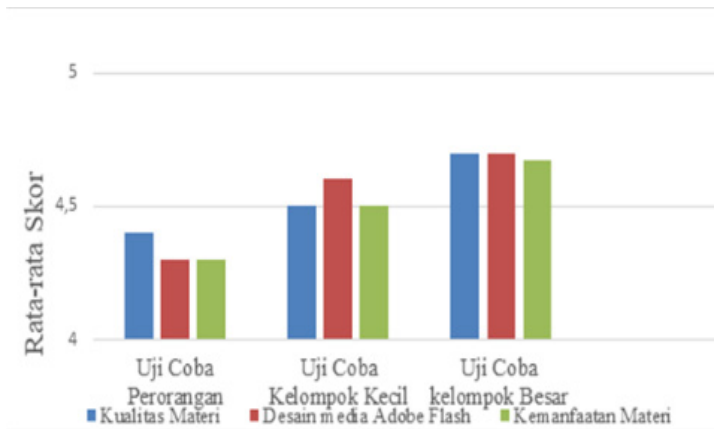
Angket validasi Media memuat 35 butir pernyataan dengan rata-rata skor total pada aspek rancangan program berada di angka 4,3. Berdasarkan hasil tersebut, nilai $X > 4,2$ termasuk dalam kriteria “sangat baik”. Maka dapat dijelaskan bahwa produk yang dikembangkan layak digunakan oleh siswa dengan kriteria kelayakan bernilai “sangat baik”.

Setelah dilakukan validasi kepada ahli materi dan ahli media, didapatkan produk berupa media belajar yang sudah direvisi. Selanjutnya, angket diberikan kepada guru bidang studi untuk mendapatkan data respon guru bidang studi terhadap multimedia interaktif yang dikembangkan. Angket respon guru bidang studi memuat 29 butir pernyataan dengan rata-rata skor total pada aspek penyajian media berada di angka 4,67. Berdasarkan hasil tersebut nilai $X > 4,2$ menjelaskan produk layak digunakan dengan kriteria “sangat baik”. Diagram hasil penilaian ahli materi, ahli media dan guru bidang studi dapat dilihat pada gambar.2.



Gambar. 2 Diagram Hasil Uji Ahli Materi, Ahli Media, dan Guru bidang Studi

Berdasarkan data di atas, kriteria pemilihan media belajar didasarkan atas (1) kelayakan praktis berupa jenis media dan ketersediaannya, dan (2) kelayakan teknis berupa kualitas pesan (kurikulum) tujuan pembelajaran, kualitas visual, dan kelayakan biaya (Rahma, 2019). Dengan demikian, produk yang telah dikembangkan sudah dinyatakan layak guna pada siswa dalam uji coba lapangan. Uji coba lapangan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu uji perorangan, uji kelompok kecil, dan uji kelompok besar. Berdasarkan hasil uji coba lapangan respon siswa terhadap media pada setiap uji secara keseluruhan pada produk yang dikembangkan dapat dilihat pada Gambar .3.



Gambar .3 Diagram Tanggapan Siswa pada Uji coba lapangan

3. Uji coba perorangan

Uji coba perorangan dilakukan kepada tiga siswa kelas XI MIA 1 dengan tingkat kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Hasil rata-rata skor total pada uji coba perorangan yaitu 4,4 yang terletak pada nilai $X > 4,2$ dan termasuk dalam kriteria “sangat baik”.

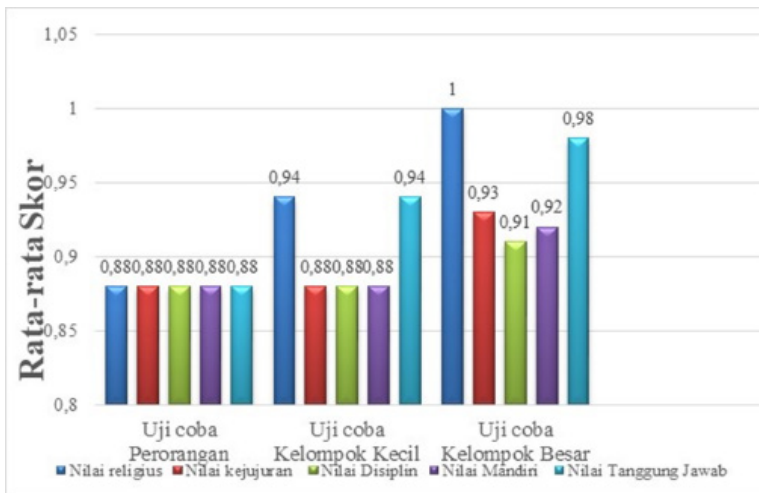
4. Uji coba kelompok kecil

Uji coba kelompok kecil dilakukan kepada enam siswa kelas XI MIA 1 dengan tingkat kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Hasil rata-rata skor total pada uji kelompok kecil yaitu 4,5 yang terletak pada nilai $X > 4,2$ dan termasuk dalam kriteria “sangat baik”.

5. Uji coba Kelompok Besar

Uji coba kelompok Besar dilakukan kepada 36 siswa kelas XI MIA 1 dengan tingkat kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Hasil rata-rata skor total respon siswa pada uji kelompok besar terhadap media yaitu 4,7 yang terletak pada nilai $X > 4,2$ dan termasuk dalam kriteria “sangat baik”.

Berdasarkan Gambar .3 dapat dilihat bahwa produk multimedia interaktif yang dikembangkan berada pada kriteria “sangat baik” dan mengalami peningkatan pada masing-masing kelompok uji coba. Artinya, produk media ini layak digunakan sebagai media belajar materi sistem respirasi dalam proses pembelajaran. Kehadiran produk ini juga dapat digunakan sebagai media penyampai nilai karakter yang dibutuhkan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Integrasi nilai-nilai karakter pada multimedia interaktif berdasarkan penilaian siswa pada setiap uji dapat dilihat pada gambar .4.



Gambar .4 Diagram Tanggapan Siswa Terhadap Integrasi Nilai Karakter dalam Multimedia Interaktif

6. Uji coba perorangan

Uji perorangan dilakukan pada siswa kelas XI MIA 1 di SMAN 1 Sipoholon sebanyak tiga orang. Angket uji coba memuat lima belas butir pernyataan dengan hasil rata-rata skor total pada indikator nilai karakter yaitu 0,88 terletak yang pada nilai rentang $X > 0,8$ dan termasuk dalam kriteria “sangat layak”.

7. Uji coba kelompok kecil

Uji kelompok kecil dilakukan pada siswa kelas XI MIA 1 di SMAN 1 Sipoholon sebanyak enam orang. Angket uji coba memuat lima belas butir pernyataan dengan hasil rata-rata skor total pada indikator nilai karakter yaitu 0,9 yang terletak pada nilai $X > 0,8$ dan termasuk dalam kriteria “sangat layak”.

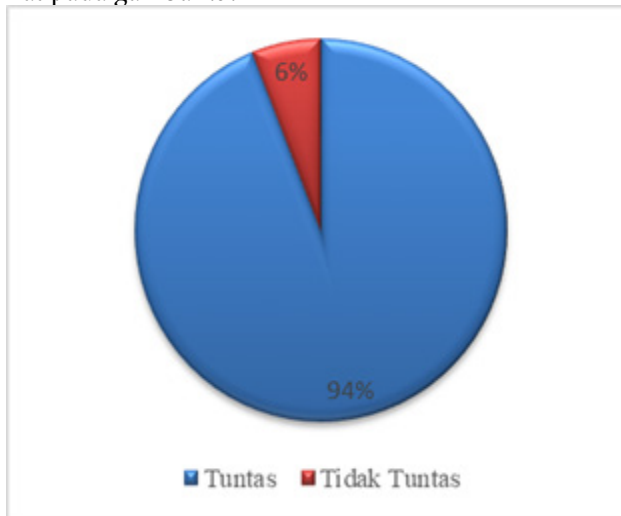
8. Uji coba kelompok besar

Uji kelompok besar dilakukan pada siswa kelas XI MIA 1 di SMA N1 Sipoholon sebanyak 36 orang. Angket uji coba memuat lima belas butir pernyataan dengan hasil rata-rata skor total rata-rata skor total pada indikator nilai karakter yaitu 0,94 yang terletak pada nilai $X > 0,8$ dan termasuk dalam kriteria “sangat layak”.

Produk yang dikembangkan mendapat penilaian rata-rata skor total 0,9 dari penilaian siswa seperti terlihat pada Gambar.4. Penyesuaian konversi

skor aktual menjadi kategori kualitatif untuk interval 0 dan 1 dinyatakan bahwa rata-rata skor total yang terletak pada nilai $X > 0,8$ dan termasuk dalam kriteria “sangat layak”. Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan produk yang dikembangkan oleh peneliti layak digunakan oleh siswa dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang telah ditetapkan yaitu nilai religius, kejujuran, disiplin, mandiri, dan tanggung jawab di dalam multimedia interaktif berbasis *Adobe Flash CS6* yang dikembangkan.

Keberhasilan belajar siswa dan ketercapaian tujuan pembelajaran setelah menggunakan multimedia pembelajaran berbasis *Adobe Flash CS6* ini dapat dilihat pada gambar .5.



Gambar .5 Diagram Presentase Ketuntasan Hasil belajar siswa

Berdasarkan Gambar. 5 didapatkan persentase jumlah siswa yang mencapai nilai ketuntasan minimal sebesar 94 %. Sebanyak 34 siswa mencapai nilai ketuntasan minimal dengan nilai rata-rata 92,2. Berdasarkan nilai yang didapatkan, produk yang dikembangkan oleh peneliti dinyatakan berhasil membantu siswa dalam belajar mengenai materi sistem respirasi yang bersifat abstrak dan sulit untuk dimengerti, serta membantu siswa untuk mencapai nilai ketuntasan minimal, yang dalam ini sesuai dengan persentase ketuntasan klasikal yang dikemukakan oleh Hasibuan *et al* (2019) bahwa setiap siswa dapat dikatakan telah tuntas jika di kelas tersebut terdapat 85 % siswa yang menyelesaikan studinya dan 85% materi telah tersampaikan, menurut Daryanto (2014).

Produk ini dapat dinyatakan layak digunakan siswa sebagai multimedia interaktif pembelajaran materi sistem respirasi dengan kriteria sangat baik. Hal ini didukung dengan penelitian Anggraini (2019) yang menunjukkan bahwa media pembelajaran multimedia interaktif sangat efektif digunakan untuk pembelajaran biologi dengan ketuntasan belajar klasikal dan menunjukkan persentase 100%.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, diperoleh kesimpulan bahwa penilaian ahli materi terhadap cakupan materi pada multimedia interaktif berbasis *Adobe Flash CS6* pada materi sistem respirasi telah memenuhi kriteria kelayakan dengan skor rata-rata 4,4 yang termasuk dalam kriteria “Sangat Baik”. Hasil penilaian ahli media terhadap multimedia interaktif berbasis *Adobe Flash CS6* telah memenuhi kriteria kelayakan dengan skor rata-rata 4,3 yang termasuk dalam kriteria “Sangat Baik”. Multimedia interaktif yang dikembangkan menggunakan *Adobe Flash CS6* terintegrasi nilai karakter termasuk dalam kriteria “sangat baik” dengan skor rata-rata 4,7 berdasarkan tanggapan guru bidang studi.

Berdasarkan tanggapan siswa, media multimedia interaktif menghasilkan kriteria “sangat baik” dengan skor rata-rata 4,5. Ketuntasan belajar klasikal siswa kelas XI MIA 1 SMA Negeri 1 Sipoholon setelah menggunakan Multimedia interaktif berbasis *Adobe Flash CS6* pada materi sistem respirasi manusia mendapat persentase 94 %. Multimedia interaktif yang diintegrasikan dengan nilai karakter menggunakan *Software Adobe Flash CS6* mendapat rata-rata skor total sebesar 0,9 yang terletak pada nilai $X > 0,8$ dan termasuk dalam kriteria “sangat layak”.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, L., Sri Rahayu lestari, N. H. (2019). Pengembangan Multimedia Interaktif Biologi Berbasis Adobe Flash CS 6 Pada Materi Sistem Sirkulasi Manusia Kelas XI MIPA SMA NASIONAL Malang. *Jurnal Pendidikan Biologi*, 10, 85–91.
- Ambarita, J. (2020). Multimedia Interaktif Berbasis Karakter di Masa Pandemi Covid 19. *Prosiding Snitt Poltekba*, 370–380.
- Armansyah, F., Sulton, S., & Sulthoni, S. (2019). Multimedia Interaktif Sebagai Media Visualisasi Dasar-Dasar Animasi. *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 2(3), 224–229.

- Daryanto. (2014). *Penelitian tindakan kelas dan penelitian tindakan sekolah*. Yogyakarta : Gava Media.
- Ermayasari, E., & Yadi, F. (2013). Hubungan Antara Ranah Afektif Siswa dengan Hasil Belajar pada Mata Pelajaran Sistem Pengelasan Di SMK N 1 Indralaya Utara Tahun 2013. *Ejournal.Unsri.Ac.Id*, 116–130.
- Fahmi, S. (2014). Pengembangan Multimedia Macromedia Flash dengan Pendekatan Kontekstual dan Keefektifannya terhadap Sikap Siswa pada Matematika. *Pythagoras: Jurnal Pendidikan Matematika*, 9(1), 90–98.
- Gunawan, A., & Harjono, S. (2015). Multimedia Interaktif dalam Pembelajaran Konsep Listrik Bagi Calon Guru. *Jurnal Pendidikan Fisika Dan Teknologi*, 1(1), 9–14.
- Hasibuan, A. M., & Sahat Saragih, Z. A. (2019). Development of Learning Devices Based on Realistic Mathematics Education to Improve Students' Spatial Ability and Motivation. *International Electronic Journal of Mathematics Education*, 14(2), 243–252.
- Rahma, F. I. (2019). MEDIA PEMBELAJARAN (kajian terhadap Langkah-langkah Pemilihan Media dan Implementasinya dalam Pembelajaran bagi Anak Sekolah Dasar). *Jurnal Studi Islam*, 14(2), 87–99.

**PARTSISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA:
Telaah Yuridis
dan Pilihan Metode**

*Triya Indra Rahmawan, Galieh Damayanti,
Agni Istighfar Paribrata*

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Proses pembentukan Peraturan Desa (Perdes) perlu dilakukan secara demokratis dan partisipatif. Hal ini ditekankan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang menyatakan bahwa sebagai sebuah produk politik, Perdes diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Penjelasan tersebut menjadi penting karena pemerintahan desa yang demokratis pada dasarnya sangat ditentukan oleh adanya partisipasi masyarakat desa dalam kehidupan desa, terutama partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik di desa.

Selain itu, desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis adalah sebuah tatanan pemerintahan lokal yang ditopang oleh adanya partisipasi masyarakat yang aktif dalam dinamika kehidupan di desa. Dengan demikian, masyarakat desa yang aktif berpartisipasi pada akhirnya akan memperkuat ketahanan politik, sosial, dan budaya di desa.

Partisipasi merupakan salah satu asas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Asas partisipasi mempunyai pengertian turut berperan aktif dalam suatu kegiatan. Dalam hal pembentukan Perdes, peran masyarakat dalam asas partisipasi diwujudkan dengan adanya pengaturan mengenai kewajiban mengonsultasikan rancangan Perdes kepada masyarakat desa dan masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Perdes. Pengaturan ini pada dasarnya menjadi penting, karena Perdes pada umumnya dibentuk dan ditujukan kepada masyarakat desa. Kemudian, Pasal 1 angka 7 UU Desa menyatakan bahwa *“Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa”*. Dalam hal ini, Perdes yang telah ditetapkan pemberlakuannya, akan mempunyai kekuatan mengikat yang dapat memberikan suatu hak dan kewajiban kepada masyarakat desa. Oleh karena itu, untuk membentuk Perdes yang memiliki legitimasi atau akar sosial yang kuat guna meminimalkan adanya penolakan terhadap Perdes yang telah diberlakukan maka dalam proses pembentukan Perdes tentu saja harus memberikan hak dan akses kepada masyarakat untuk memberikan masukan.

Namun dalam tinjauan yuridis, pengaturan hak masyarakat desa dalam pembentukan Perdes masih bersifat umum. Pasal 68 ayat (1) UU Desa yang mengatur hak masyarakat desa menyebutkan bahwa Masyarakat Desa berhak:

1. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

2. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
3. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
4. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 - Kepala Desa;
 - perangkat Desa;
 - anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 - anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
5. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

Ketentuan dalam Pasal 68 ayat (1) UU Desa tersebut tentu saja dapat dipahami masih bersifat umum karena belum jelas apa saja bentuk hak masyarakat dalam pembentukan Perdes. Pengaturan yang bersifat umum mengenai hak masyarakat dalam pembentukan Perdes juga terdapat dalam Pasal 83 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, yang menyatakan bahwa:

“(2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.”

Demikian juga pengaturan dalam Pasal 16 ayat (2) sampai dengan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis tentang Peraturan di Desa, yang menyatakan:

(2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.

(3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.

(4) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.

(5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala

Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, hak masyarakat dapat diketahui dengan adanya frasa “*wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa*”. Pengaturan yang demikian tentu saja masih bersifat umum. Padahal di sisi yang lain, partisipasi merupakan salah satu asas dalam pembentukan UU Desa yang tentu saja memerlukan perwujudan sehingga dapat terealisasi dalam pelaksanaan.

Selain itu, Perdes sebagai salah satu dari peraturan perundang-undangan tentu saja tidak dibuat dalam kondisi ataupun situasi yang netral, tetapi berada dalam dinamika kehidupan masyarakat luas dengan segala kompleksitasnya. Dalam hal ini, dapat saja beberapa bagian dari kelompok masyarakat desa yang akan dituju oleh pemberlakuan Perdes menghadapi berbagai keterbatasan dalam menerima kehadiran suatu Perdes. Padahal, suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat secara sepihak, akan sangat mungkin kehadirannya ditolak karena tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat.

Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya merupakan kehendak para pembentuk peraturan perundang-undangan dan bersifat *top down*, tetapi juga berdasarkan aspirasi dari masyarakat untuk turut serta memengaruhi proses pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, seharusnya dapat mengakomodir aspirasi masyarakat yang ada. Bukan sebaliknya, malah merugikan masyarakat terdampak dari penerapan suatu peraturan perundang-undangan.

Adanya Perdes yang mampu mengakomodir dengan baik aspirasi masyarakat pada dasarnya akan semakin menguatkan ketahanan masyarakat desa karena Perdes yang dibentuk mampu diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat desa. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana tinjauan yuridis pengaturan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perdes dan metode yang efektif untuk mewujudkannya.

METODE

Penelitian atau riset bermakna pencarian, yaitu pencarian jawaban mengenai suatu masalah (Soetandyo Wignyosoebroto, 2002: 78). Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) (Johnny Ibrahim, 2007: 57) Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Adapun pendekatan yang digunakan, antara lain *Statue Approach*

(Pendekatan Peraturan Perundang-undangan), yaitu pendekatan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan *conceptual approach* (Pendekatan Konsep), yaitu pendekatan melalui prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin yang relevan (Johnny Ibrahim, 2007: 302).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Telaah Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perdes

Pasal 2 UU Desa menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan adanya UU Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Dalam hal ini, Perdes merupakan salah satu instrumen untuk menyelenggarakan Pemerintahan, melaksanakan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa.

Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wewenang mengatur dan mengurus merupakan substansi otonomi. Dengan adanya otonomi, maka memungkinkan desa dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat desa dan pelaksanaan pembangunan.

Dengan demikian, desa mempunyai posisi dan peran yang strategis dalam mengatur dan mengurus masyarakat di desa. Desa bisa menjadi arena pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah dan tidak seperti dulu lagi, yang hanya sebatas sebagai lokasi program pembangunan. Desa akan menjadi subjek pembangunan bukan lagi sebagai objek pembangunan. Desa dapat menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan

masyarakat secara mandiri. Oleh karena itu, dalam menyelenggarakan pemerintahannya, desa perlu mendapat dukungan legalitas dalam bentuk perangkat aturan, salah satunya adalah Perdes.

Sebagai sebuah produk politik, Perdes perlu diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Perdes.

Sebagai sebuah produk, Penjelasan Umum UU Desa menyatakan bahwa sebagai Perdes merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 1 angka 7 UU Desa menyatakan bahwa Perdes ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Hal tersebut merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Sebagai bagian dari sistem perundang-undangan, Pasal 69 ayat (2) UU Desa menyatakan bahwa Perdes tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, Perdes juga tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu terganggunya kerukunan antar warga masyarakat; terganggunya akses terhadap pelayanan publik; terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, serta gender (Penjelasan Umum UU Desa).

Perdes mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa yang pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan BPD. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan Perdes senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Perdes ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Perdes yang telah ditetapkan, BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Perdes. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Perdes perlu disusun dan diproses secara demokratis yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa, serta harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perdes pada prinsipnya merupakan suatu bentuk keputusan yang

bertujuan mengatur tingkah laku, melindungi hak dan kewajiban, melindungi lembaga-lembaga sosial, serta menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat desa yang berdasar pada nilai keadilan untuk mencapai keseimbangan dan kesejahteraan umum. Perdes merupakan produk hukum di tingkat desa yang harus memiliki landasan dalam pembentukannya, yaitu : (1) landasan filosofis, berarti bahwa setiap peraturan yang dibuat harus berlandaskan pada kebenaran dan rasa keadilan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, kelestarian ekosistem, dan supremasi hukum; (2) landasan yuridis, dimaksudkan bahwa peraturan yang dibuat menjunjung tinggi supremasi dan kepastian hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan (3) landasan sosiologis, berarti bahwa setiap peraturan yang dibuat harus berasal dari harapan, aspirasi, dan kebutuhan sosial masyarakat.

Dengan demikian, Perdes mempunyai peran yang sangat signifikan dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat desa, menjaga hak-hak masyarakat desa, menjamin kebebasan masyarakat desa, dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Selain itu, Perdes juga bermanfaat sebagai pedoman kerja bagi semua pihak dalam menyelenggarakan kegiatan desa dan maupun dalam membangun dan mengurus desa.

Partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat desa dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan strategis Desa. UU Desa menempatkan sifat partisipatif sebagai asas pengaturan termasuk dalam pembentukan Perdes, yang artinya berkehendak untuk menopang proses demokratisasi di desa. Oleh karena itu, masyarakat desa dalam proses pembentukan Perdes berhak memberikan masukan terhadap rancangan Perdes.

Sebuah rancangan Perdes wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa, terlepas dari lembaga mana yang mengajukan usulan rancangan Perdes tersebut. Dalam telaah yuridis, jika rancangan Perdes tidak dikonsultasikan kepada masyarakat desa, secara formil proses pembentukan Perdes tidak sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh UU Desa.

Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang diharapkan mampu mewujudkan kehendak dan keinginan masyarakat desa, proses pembentukan Perdes pada dasarnya perlu diawali dengan melibatkan langsung masyarakat desa. Sebab, optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perdes, pada akhirnya dapat mewujudkan suatu Perdes yang aspiratif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan kehendak dan keinginan masyarakat desa.

B. Partisipasi Dalam Perspektif Pembentukan Produk Hukum

Peraturan perundang-undangan dibentuk dan ditujukan kepada masyarakat. Dengan kekuatan mengikatnya, peraturan perundang-undangan dapat memberikan suatu hak dan kewajiban kepada masyarakat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bukan merupakan suatu aktivitas yang menghilangkan kekuasaan ataupun mengurangi wewenang dari pembentuk peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah dipandang sebagai suatu bagian dari proses demokratisasi pembentukan peraturan perundang-undangan dan merupakan bentuk dari langkah memperkuat legitimasi ataupun membuat peraturan perundang-undangan memiliki akar sosial yang kuat sehingga masyarakat merasa memiliki suatu peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 huruf j dan Pasal 69 Ayat (9 dan 10) UU Desa menyebutkan bahwa Rancangan Perdes wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa. Demikian juga ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Dalam Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan bahwa: *Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.* Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (3) dinyatakan bahwa: *Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.* Dalam Pasal 6 ayat (4) disebutkan bahwa: *Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.* Ayat (5) menentukan: *Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.*

Pelaksanaan partisipasi dalam pelaksanaan musyawarah desa dijamin sampai tingkat yang sangat teknis. Hal ini sesuai dengan pengaturan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, menentukan bahwa “*Setiap unsur masyarakat berhak menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan*

tekanan selama berlangsungnya musyawarah desa.”

Pada dasarnya, bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan tertuang dalam Pasal 96 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian dilanjutkan dalam ayat 2, masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan dengan rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan seminar, lokakarya, serta diskusi. Aturan ini dapat dijadikan sebagai dasar bentuk-bentuk partisipasi masyarakat desa dalam pembentukan peraturan desa.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan bergantung pada situasi dan keadaan masyarakat serta lingkungannya (Sirajudin, 2006: 189). Partisipasi masyarakat pada hakikatnya merupakan sarana untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin, menyalurkan aspirasi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, dan menegakkan kedaulatan. Dalam hal ini, Perdes memiliki parameter agar dapat dikatakan partisipatif, yaitu: (Moh Fadli, dkk, 2011: 169)

1. Penyusunan Perdes seharusnya dijalankan dengan tujuan menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik.
2. Partisipasi, keterbukaan, dan pengawasan supaya tidak terjadi penyalahgunaan terhadap pembangunan desa merupakan dasar dalam penyusunan Perdes.
3. Partisipasi dalam penyusunan Perdes menjadi hak dan kewajiban masyarakat.
4. Adanya pemberdayaan para pihak.
5. Semua aspirasi diperhatikan tanpa terkecuali.
6. Pengambilan keputusan melalui proses yang jujur, terbuka, dan adil.
7. Adanya akses yang luas terhadap berbagai informasi yang merupakan hak publik.

C. Pilihan Metode untuk Penguatan Partisipasi Dalam Pembentukan Perdes

Pengertian partisipasi banyak dikaitkan dengan berbagai hal dan digunakan secara umum dan luas. Menurut Isbandi, partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Isbandi Rukminto Adi, 2012: 227). Partisipasi masyarakat pada hakikatnya merupakan sarana untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin, menyalurkan aspirasi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, dan menegakkan kedaulatan rakyat (Moh Fadli, dkk, 2011: 169).

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Pemerintah Desa dan masyarakat desa bersama-sama membangun dengan semangat gotong royong dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam demi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta kualitas hidupnya melalui pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Upaya tersebut tentu saja perlu dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasinya dengan pendekatan dan metode yang tepat. Di samping itu, masyarakat yang semakin kritis dan semakin kompleks permasalahannya membutuhkan pelayanan yang semakin baik, terarah, terpadu dan yang terpenting adalah bagaimana memberdayakan masyarakat dengan segala potensi dan permasalahan yang dihadapinya.

Menyikapi hal tersebut, unsur pemerintahan termasuk di dalamnya para agen perubahan memiliki peran yang strategis dalam melakukan terobosan-terobosan yang mengarah pada perbaikan kondisi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu cara yang cukup relevan untuk mengkaji kondisi lingkungan pedesaan dalam penguatan partisipasi adalah dengan penerapan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) atau pemahaman kondisi pedesaan secara partisipatif. PRA merupakan metode atau teknik, karena di dalamnya terdapat beberapa teknik-teknik identifikasi, pengukuran dan pelibatan partisipatif masyarakat. PRA diartikan sebagai pengkajian keadaan desa. Kajian bisa berbentuk kegiatan penelitian yang meliputi aspek kehidupan masyarakat. Kajian yang dapat dilakukan bermacam-macam, tergantung aspek dan kebutuhan. Pada prinsipnya, hasil dari kajian tersebut menghasilkan tiga hal, sebagai berikut (Ahmad Muhsin, dkk, 2018: 4):

1. Memperoleh informasi terkait kondisi kehidupan di daerah/desa tersebut.
2. Memperoleh informasi terkait dengan kebutuhan dan “permasalahan” yang menjadi masalah/kendala masyarakat itu sendiri.
3. Memperoleh informasi terkait dengan potensi lokal yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan SDA dan SDM untuk masyarakat sekitar.

Konsep dasar dari metode PRA adalah adanya keterlibatan masyarakat. Metode PRA dibangun berdasarkan; (1) kemampuan masyarakat setempat; (2) penggunaan teknik-teknik fasilitatif dan partisipatoris; (3) pemberdayaan masyarakat setempat dalam prosesnya (Munawar Noor, 2011: 97).

Metode PRA ditandai dengan adanya keterlibatan aktif yang menjadi kelompok sasaran. Metode ini menempatkan masyarakat yang menjadi kelompok sasaran sebagai subjek dalam proses kegiatan, dan bukan sebagai objek. Keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan dengan memberikan tekanan pada partisipasi melalui prinsip; belajar dari masyarakat, masyarakat sebagai pelaku, saling belajar dan saling berbagi pengalaman, sedangkan orang luar hanya sebagai fasilitator saja (Saepul Hayat, dkk, 2021: 170).

Metode PRA juga bisa diartikan sebagai teknik-teknik dan pendekatan pelibatan masyarakat dalam proses-proses pemikiran yang berlangsung selama kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pemantauan terhadap program pembangunan masyarakat (Saepul Hayat, dkk, 2021: 171). Menurut Hamid, dalam metode PRA ini dikenal lima dasar program, yaitu Pengenalan kebutuhan (penjajagan), Perencanaan kebutuhan, Pengorganisasian kegiatan (pelaksanaan), Pemantauan kegiatan dan Evaluasi kegiatan Hamid, dalam Saepul Hayat, dkk, 2021: 171).

Dalam konteks UU Desa maka PRA dapat memberikan pemahaman kepada para aparatur pemerintahan dan masyarakat desa dalam melakukan proses identifikasi potensi dan permasalahan di desanya. Dalam hal ini, aparatur pemerintahan desa perlu melibatkan secara aktif masyarakat desa dalam menggali potensi dan permasalahan dari masyarakat desa. Dengan demikian, metode PRA memungkinkan masyarakat desa untuk berbagi, mengembangkan, dan menganalisa pengetahuan mereka mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri, untuk perencanaan dan aksi. Melalui metode PRA, masyarakat desa bukan lagi sebagai objek yang menerima kebijakan dari atas (*top-down*), melainkan menjadi subjek yang merancang kebijakan dari bawah (*bottom-up*). Partisipasi warga yang tinggi dalam

proses pembentukan kebijakan ini akan menjadikan setiap kebijakan dapat dilaksanakan berbasis pada keswadayaan dan dapat lebih berhasil guna kesejahteraan masyarakat desa.

PENUTUP

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Perwujudan peran/partisipasi masyarakat dalam tahapan pembentukan Perdes dapat dilakukan dengan metode PRA. Melalui metode PRA, masyarakat desa bukan lagi sebagai objek yang menerima kebijakan dari atas (*top-down*), melainkan menjadi subjek yang merancang kebijakan dari bawah (*bottom-up*), karena masyarakat desa terlibat secara aktif dalam menggali potensi dan permasalahan desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi, Isbandi Rukminto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fadli, Moh dkk. 2011. *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head to A Good Village Government)*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Hayat, Saepul, dkk. 2021. *Pemberdayaan Masyarakat dengan Metode PRA (Participatory Rural Appraisal) melalui Aspek Teknologi, Sosial dan Keagamaan*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Schmid, J.J. Von. 1988. *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Pembangunan.
- Muhsin, Ahmad, dkk. 2018. *Participatory Rural Appraisal (PRA) For Corporate Social Responsibility (CSR)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Noor, Munawar. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I, No 2. Semarang: FPIPSKR Universitas PGRI.
- Rahayu. 2012. *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Rochdyanto, Saiful. 2000. *Langkah-langkah Pelaksanaan Metode PRA*. Makalah ToT PKPI. Yogyakarta.
- S.F. Marbun. 1997. *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, (Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol 4. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Sirajudin. 2006. *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah* Malang: Malang Corruption Watch dan YAPPIKA.
- Wignyosoebroto, Soetandyo. 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Masalah*. Jakarta: Elsam dan Huma.

Peraturan Perundang Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis tentang Peraturan di Desa.
- Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

REFLEKS PMP PADA BAHASA ACEH DIALEK PIDIE: Kajian Historis dan Kebudayaan

Millatuz Zakiyah

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya

Bahasa Aceh merupakan bahasa yang digunakan oleh di Sabang, Aceh Besar, Banda Aceh Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat, dan sebagian Aceh Selatan (Liliana, 2006: 1, Sulaiman, dkk.1983:1) dan Wildan (2010:1) menambahkan wilayah Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Timur, Aceh Selatan terutama di wilayah Bakongan, Blang Pidie, Kuala Batèe, Sawang, Trumon, Manggèng, Tangan Tangan, dan Meukék. Bahasa Aceh juga digunakan oleh sebagian kecil masyarakat di Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan Simeulu. Bahasa Aceh merupakan bahasa dengan penutur kesembilan besar bahasa daerah nusantara menurut sensus penduduk 1930 bahasa Aceh memiliki penutur 831.421 menduduki urutan kesembilan besar bahas di Indonesia (Saidi, Sale. 1989:21), meskipun diperlukan penelitian lanjutan mengingat besarnya warga Aceh menjadi korban tsunami tahun 2004.

Bahasa Aceh merupakan bahasa dengan penutur paling banyak di Aceh dibanding bahasa lain, seperti bahasa Gayo, bahasa Alas, bahasa Tamiang, bahasa Aneuk Jamèe, bahasa Kluet, bahasa Singkil, bahasa Simeulu, dan bahasa Haloban (Wildan, 2010). Daud dan Durie (dalam Sari, 2011) mengemukakan bahwa bahasa Aceh digunakan sekitar 70 % dari total penduduk propinsi Aceh. Hingga Wildan (2010) menulis pembahasan terkait Kaidah Bahasa Aceh, masih terdapat perbedaan pendapat terkait bahasa yang terdapat di Aceh.

Penelitian terkait bahasa Aceh, baik secara sinkronis maupun diakronis belum banyak dilakukan. Salah satu penulis berkebangsaan Belanda K. F. H. Van Langen tahun 1889 menulis buku berjudul *Handleiding voor de Boefening der Atjehsche Tall*. Selanjutnya, Kramer (1931) menulis *Kamus Bahasa Aceh-Belanda Handwoordenboek (Atjehsch -Nederland)*. Penulisan kamus ini kemudian dilanjutkan seorang Jawa, Djajadiningrat (1934) dalam *Kamus Atjeh Nederlandsch Woordenboek*. Penelitian selanjutnya terkait bahasa Aceh dilakukan Voorhoeve, P (1955) dalam buku berjudul *Critical Survey of Studies on the Language of Sumatra*. Kemudian Sulaiman (1977) menulis buku tentang “Bahasa Aceh Jilid I” dan setahun kemudian Bahasa Aceh Jilid II (1978). Buku ini hanya menjadi salah satu bahan pengayaan pembelajaran bahasa Aceh, akan tetapi belum banyak mengkaji tentang kebahasaan bahasa Aceh, seperti fonologi, morfologi, dan sintaksis.

Penelitian yang cukup serius kemudian dilakukan oleh Pusat Pembinaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun tahun 1977/1978 melalui Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Daerah Istimewa Aceh melakukan penelitian mengenai fonologi, morfologi, dan sintaksis bahasa

Aceh. Penelitian itu menghasilkan sistem fonologi, morfologi, dan sintaksis secara umum dan diterbitkan tahun 1984 dengan judul buku Struktur Bahasa Aceh. Penelitian ini kemudian dilanjutkan pada tahun-tahun sesudahnya dan menghasilkan Sistem Morfologi Bahasa Aceh (1983), Sistem Morfologi dan Kata Kerja Bahasa Aceh (1983), Sistem Perulangan Bahasa Aceh (1984), Kamus Aceh Indonesia (1985), Pemetaan Bahasa Aceh, Gayo, dan Alas (1985).

Buku-buku ini hanya mendeskripsikan bahasa Aceh dalam ilmu bahasa tanpa memberikan penjelasan mumpuni terkait bahasa Aceh. Dalam kajian fonologi misalnya, tidak ditemukan transkripsi fonetik yang representatif untuk menggambarkan deskripsi bunyi dalam bahasa Aceh. Begitu pun dalam Kamus Aceh Indonesia yang tidak memberikan pemerian terkait transkripsi fonetik. Pengkajian tentang bahasa Aceh kemudian dilakukan oleh Durie (1988) dalam *A Grammar of Acehnese: On The Basis of A Dialect of North Acehnese*. Buku ini menjelaskan bahasa Aceh dari fonologi hingga kelas kata dalam bahasa Aceh. Selain itu, Lawler (1977) menulis *A Agrees with B in Acehnese: A Problem For Relational Grammar* yang menentang masalah gramatikal dalam bahasa Aceh. Djunaidi (2004) dalam artikel *Persesuaian dalam Bahasa Aceh* melanjutkan hubungan antara verba dan nomina dalam bahasa Aceh. Wildan (2010) menulis tentang *Kaidah Bahasa Aceh yang memetakan bahasa-bahasa Aceh dan kaidahnya*.

Penelitian bahasa Aceh secara diakronis telah dilakukan Nieman (1891) seperti yang dinyatakan Durie (1990) dalam artikelnya *Proto Chamic and Acehnese Mid Vowels Toward Proto Aceh-Chamic*. Nieman telah mengisyaratkan adanya kekerabatan antara bahasa Aceh dengan bahasa-bahasa di Campa. Penelitian ini kemudian merekonstruksi bahasa Aceh ke dalam Proto Aceh Campa (PAC). Penelitian ini menggunakan acuan vokal tengah bahasa Aceh yang menunjukkan kesamaan dengan bahasa Campa, bukan bahasa-bahasa di Melayu. Sebelumnya, Dyen telah merekonstruksi bahasa Aceh dan mengklasifikasikannya dalam rumpun bahasa Melayu (dalam Poedjosoedarmo). Bahasa Aceh juga diteliti oleh Brandsetter dan menggolongkannya dalam rumpun *Malaio-Polynesishe Forschungen* (dalam Saidi, 1989). Brandsetter meneliti bahasa Aceh dalam teori akar bersama bahasa Jawa Kuna, Sunda, Karo, Aceh, dan Malagasi dan menunjukkan adanya kedekatan bahasa-bahasa ini.

Rekonstruksi terhadap vokal dalam bahasa Aceh juga dilakukan Sari (2013) bersama dengan bahasa Melayu Langkat pada Proto Austronesia. Sari (2011) menyatakan bahwa vokal dalam PAN diubah menjadi hanya lima vokal dalam bahasa Aceh. Padahal, Wildan (2010) menunjukkan adanya 17

vokal tunggal dan 17 vokal rangkap dalam bahasa Aceh. Thurgood (2007) kemudian merekonstruksi bahasa Aceh dan memasukkannya dalam Proto Melayu Chamic yang termasuk dalam Proto Melayu Polinesia Barat. Hal ini bersebrangan dengan yang dilakukan Salzer (1960) dalam paparan Keraf (1984:203) bahwa bahasa Campa bukan termasuk bahasa Austronesia. Di sisi lain Esser (dalam Saidi, 1989) mengklasifikasikan bahasa Aceh ke dalam kelompok bahasa Sumatra dari 17 kelompok bahasa di Indonesia.

Silang pendapat ini unik dikaji lebih dalam, terutama keterkaitan antara bahasa Aceh dan bahasa-bahasa Melayu Polinesia lain. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan kompilasi Wurm dan Wilson (1978) dan Kamus Aceh Indonesia (1975) serta Pemetaan Bahasa Aceh, Alas, dan Gayo (1985) dilakukan rekonstruksi terkait refleks Proto Melayu Polinesia (PMP) dan bahasa Aceh dialek Pidie (AP).

METODE

Dalam kajian ini digunakan metode kualitatif dengan teknik rekonstruksi fonologis dan leksikal. Rekonstruksi fonologis dalam kajian ini hanya dilakukan dengan perumusan refleks fonem protobahasa yang diamati melalui korespondensi bunyi berdasarkan perangkat kognat dan perumusan kaidah korespondensi fonem berdasarkan refleks protofonem bahasa pada bahasa Aceh dialek Pidie. Untuk dapat melakukan rekonstruksi dilakukan pencatatan semua korespondensi fonemis dalam refleks Proto Melayu Polinesia pada bahasa Aceh dialek Pidie, membandingkan unsur yang menunjukkan kontras, dan mengadakan rekonstruksi fonem (Keraf, 1984:60).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. REFLEKS PMP PADA BAHASA ACEH DIALEK PIDIE (AP)

Refleks Proto Melayu Polinesia pada bahasa Aceh dialek Pidie tampak dalam retensi dan inovasi fonologis dan leksikal. Inovasi dan retensi fonologis ini terjadi secara teratur dan tidak teratur yang menghasilkan kaidah perubahan bunyi yang primer dan sekunder. Berikut disajikan retensi dan inovasi fonologis Proto Melayu Polinesia (PMP) pada bahasa Aceh dialek Pidie (AP).

2. RETENSI DAN INOVASI FONOLOGIS PROTO MELATU POLINESIA PADA BAHASA ACEH PIDIE

A. PMP *i

a. PMP *i > AP /i/ tanpa syarat

PMP	AP	
*i-kami	kamɑɑ	‘kami’
*i-ni	ŋɑɑ	‘ini’
*DuRi	ɖurɑɑ	‘duri’
*bəli	blɑɑ	‘beli’
*wari	kurɑɑ	‘hari’
*taliq	ʔɑɑ	‘tali’

b. PMP *i > AP Ø tanpa syarat

PMP	AP	
*talik	ʔareʔ	‘tarik’
*ma-quDip	uɖep	‘hidup’
*lanjit	lanʔe!	‘langit’
*ma saket	saket	‘sakit’
*piliq	pileh	‘memilih’

3. PMP *i > AP /e//KVK#

PMP	AP	
*ikuR	iku	‘ekor’
*ijunʔ	idoŋ	‘hidung’
*si-ia	jih	‘dia’
*qizaw	ijo	‘hijau’
*qi(n)tuŋ	iʔUŋ	‘hitung’
*ma-qitəm	iʔəm	‘hitam’

*taliŋa	gəliŋuŋ	‘telinga’
*qasiRa	sira	‘garam’
*piliq	pileh	‘pilih’
*ma-nipis	ɽipeh	‘tipis’
*dilaq	liɽa	‘lidah’
* PMP n bituqə	AP binɽaŋ	‘bintang’
*k*iilsaət p	kpiliaəɽp	‘his’akpila’ t’
*m*cai-yiuRmaq	mcoirmah	‘ciu’ m’erah’
*li*mka-wiRi	liwmiə ŋ	‘kiri’ lima’
*b*b-in-aHi	ininəŋ	‘perempuan’
*-iisni-aHi	siəəŋ	‘dag’piengre’ mpuan’
*mipi	mimpi	‘mimpi’

4. PMP *i> AP /I//KVK#

PMP *i> AP /I/ dalam kasus yang terbatas pada dua contoh sebagai berikut.

PMP	AP	
*kulit	kullɽ	‘kulit’
*kepit	səmpɽi	‘sempit’

5. PMP *i> AP /ɛ//KVK#

PMP *i> AP /I/ dalam kasus yang terbatas pada dua contoh sebagai berikut.

PMP	AP	
*aŋin	aŋɛn	‘angin’
*ma-kuniŋ	kunɛŋ	‘kuning’

6. PMP *i> AP /iə/ kecuali /#

PMP	AP	
*isi	siə	‘daging’
*ka-wiRi	wiə	‘kiri’
*waHir	iə	‘air’

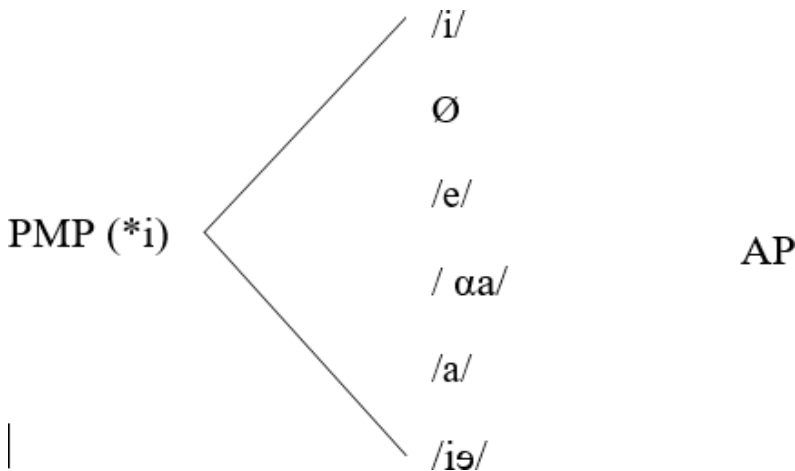
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa refleks PMP fonem *i pada bahasa Aceh dialek Pidie mengalami split secara teratur pada PMP (*i)> AP /i/, Ø, /e/, /əa/, /a/, dan /iə/.

7. PMP *i> AP/əa//KV# atau KVK#

PMP *i> AP /əa/ terjadi pada KV# dan hanya satu kasus pada KVK#.

PMP	AP	
*kaRus	garU?	‘garuk’
*qi(n)tuŋ	iŋUŋ	‘hitung’
*kabut	kabUŋ	‘kabut’
*tubuq	tumbU?	‘tumbuh’
*puluh	pIUh	‘sepuluh’

8. PMP *i> AP /a// #(K)VK atau KVK#



B. PMP *u

1. PMP *u > AP /u/ kecuali pada #

PMP	AP	
*tuktuk	tʉʉʉ?	'ketuk'
*gunuŋ	gunɔŋ	'gunung'
*ñamuk	ñamɔʉ?	'nyamuk'
*bunuq	pɔh	'buah'
*buaq	bɔh	'buah'

2. PMP *u > AP Ø kecuali/#

PMP	AP	
*busuk	oʉ	'rambut'
*tutuŋ	tʉøʉ	'bakar'
*tuquR	tʉo	'kering'
*(q)ulay	gləŋ	'cacing'
*puluh	plUh	'sepuluh'
*taqun	tʉon	'tahun'
*buruk	broʉ	'buruk'
*bunuq	pɔh	'bunuh'
*i-kasu	kah	'kamu'
*ma-taqu	tɛ	'tahu'

3. PMP *u> AP /U//KVK#

PMP	AP	
*ulaR	ulə	‘ular’
*kulit	kulIt	‘kulit’
*m-utaq	mutah	‘muntah’
*tuqelan	tuləŋ	‘tulang’
*Rumaq	rumoh	‘rumah’
*ma-kuniŋ	kunəŋ	‘kuning’
*ma-tuqah	tuha	‘tua’
*qulu	uleə	‘kepala’
*tubuq	tuḃU?	‘tumbuh’
*quraŋ	uröəŋ	‘orang’
*bulan	bulön	‘bulan’
*ma-zauq	ju?uh	‘jauh’
*ma-quDip	uḃep	‘hidup’
*buŋa	buŋəŋ	‘bunga’
*quZan	ujöəŋ	‘hujan’
*pu(n)dul	tuḃpoy	‘tumpul’
*ikuR	iku	‘ekor’
*qutan	uḃön	‘hutan’
*kutu	guḃeə	‘kutu’
*Duwa	duwa	‘dua’
*suruŋ	suruŋ	‘dorong’
*ma-putiq	puḃeh	‘putih’
*DuRi	ḃuraa	‘duri’
*gunuŋ	gunəŋ	‘gunung’

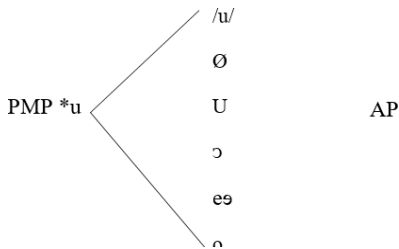
4. PMP *u> AP /eə//KV#

PMP	AP	
*i-aku	keə	‘aku’
*kutu	guḃeə	‘kutu’
*batu	baḃeə	‘batu’

5. PMP *u> AP /o//(K)VK#

PMP	AP	
*taqun	t ^h on	‘tahun’
*buruk	broʔ	‘buruk’
*ijun	idoŋ	‘hidung’
*busuk	oʔ	‘rambut’
*ZaRum	jarom	‘jarum’
*DaHun	on	‘daun’
*baqeRu	baro	‘baru’
*tuquR	t ^h o	‘kering’
*(tT)uud	t ^h oʔ	‘lutut’
*ciyum	com	‘cium’

Berdasarkan contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi split pada fonem PAN *u pada bahasa Aceh Pidie. Oleh karena itu dapat disimpulkan sebagai berikut.



Selain kaidah yang bersifat teratur, terdapat kaidah yang bersifat tidak teratur (sporadis) dalam refleksi fonem PMP *u pada AP, yaitu sebagai berikut.

PMP	AP	
*bulu	bulə	‘bulu’
*qasu	asap	‘asap’
*tutun	t ^h oʔ	‘bakar’
*pu(n)dul	t ^h umpoy	‘tumpul’
*qawuk	anαa	‘debu’
*(tT)uud	t ^h oʔ	‘lutut’
*buka	pəhah	‘buka’
*asu	asey	‘anjing’

Fonem PMP *-*u>/ə/* pada **bulu>AP bulə* ‘bulu’, sementara PMP *-*u-* tetap */u/* pada AP, PMP **b> AP /b/*, dan PMP **l>AP /l/*. Fonem

PMP	AP	
<i>*qasu</i>	asap	‘asap’
<i>*bituqən</i>	binṭaŋ	‘bintang’

PMP **u>AP /a/* pada **qasu> AP asap* ‘asap’, sedangkan PMP **q>AP*, PMP **a>AP /a/*, dan paragoge konsonan berupa */p/>AP* asap. Fonem PMP **u>AP /öə/* pada **tutuŋ>AP t̪öəŋ*

PMP	AP	
<i>*bulu</i>	bulə	‘bulu’
<i>*qabu</i>	abə	‘abu’

‘bakar’, fonem PMP **t> AP /t̪/*, fonem PMP *-*u-* pada penultima>AP Ø, dan fonem PMP **ŋ> AP Ø*. Fonem PMP **u* pada ultima> diftong pada AP */oy/* pada **pu(n)dul> AP t̪umpoy* ‘tumpul’, fonem PMP

**p> AP /t̪/*, fonem PMP *-*u-* pada penultima > AP */u/*, gugus konsonan PMP **-nd-> AP /-mp-/*, dan PMP **l> AP Ø*. Fonem PMP *-*u-* pada ultima>AP */aa/* pada **qawuk> AP anaa* ‘debu’, fonem PMP **q> AP Ø*, fonem PMP **a> AP /a/*, fonem PMP **w> AP /n/*, fonem PMP **k> AP Ø*. Fonem PMP **u> AP /ö/* pada **(tT)uud> AP t̪ööŋ* ‘lutut’, fonem PMP **t> AP /t̪/*, fonem PMP **u* pada posisi ultima> AP */o/* dan fonem PMP **d> AP /t̪/*. Fonem PMP *-*u-> AP /ə/* pada **buka> AP pəhah*, fonem PMP **b> AP /p/*, fonem PMP **k> AP /h/*, fonem PMP **a> AP /a/*, dan paragode konsonan berupa */h/*. Fonem PMP *-*u> diftong AP /ey/* pada **asu> asey* ‘anjing’, fonem PMP **a> AP /a/*, fonem PMP **s> AP /s/*.

C. PMP *ə

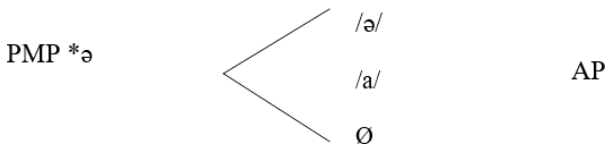
1. PMP *ə > AP /a/#KVK atau KVK#

PMP	AP	
*(d)aRə q	ɟara	‘darah’
*qə nay	anɔa	‘debu’
*lə m	lam	‘dalam’

2. PMP *ə > AP Ø kecuali /#

PMP	AP	
*bəlaq	plah	‘belah’
*əsa	sa	‘satu’
*bituqən	binɟaŋ	‘bintang’
*ma-bəRəqat	braɟ	‘berat’

Berdasarkan contoh tersebut, dapat dirumuskan split dalam refleks fonem PMP *ə pada AP sebagai berikut.



Selain perubahan yang bersifat teratur, terdapat perubahan yang tidak teratur (sporadis) dalam refleks fonem PMP *ə pada AP sebagai berikut.

PMP	AP	
*liqə r	ɟakuə	‘leher’
*dəŋəR	ɟəŋə	‘dengar’
*ma-tazə m	ɟincɔa	‘tajam’
*tanə m	ɟanɔm	‘tanam’
*ma-bənər	bəɟci	‘benar’

3. Fonem PMP *-ə-> diftong pada AP

/uə/ dalam PMP *liqə r> AP ʔakuə 'leher', fonem PMP *l>AP /t/, fonem PMP *i> AP /a/, fonem PMP *q> AP /k/, fonem PMP *r> AP Ø. Fonem PMP *-ə-> AP /ə/ pada ultima PMP *dəŋəR> dəŋə, fonem PMP *d> AP/ɗ/, fonem PMP *ə pada penultima mengalami retensi pada AP, begitu juga fonem PMP *ŋ mengalami retensi pada AP, fonem PMP *R> AP Ø. Fonem PMP

4. *ə> diftong pada AP /ɑ/ dalam*ma-tazə m>

PMP	AP	
*ma-bənər	bəʔi	'batu'
*ma-qitə m	iʔəm	'hitam'
*dəŋəR	dəŋə	'dengar'

ʔincaa, fonem PMP *t> AP /t/, fonem PMP *a> peninggian vokal AP /i/, fonem PMP *z> AP

E. PMP *e

1. PMP *e >AP Ø, kecuali /#

PMP	AP	
*tuqelan	ʔuləŋ	'tulang'
*baqeRu	baro	'bahu'
*bəli	blaa	'beli'
*ke (Z)erj	dəŋ	'dahan'
*berey	mε	'beri'

2. PMP *e > AP /a// KVK#

PMP *e> AP /a/ dalam kasus yang terbatas pada dua contoh sebagai berikut.

PMP	AP	
*pərəq	prah	'peras'
*enem	nam	'enam'

Berdasarkan contoh tersebut, dapat dirumuskan split fonem PMP *e pada AP sebagai berikut.

PMP	AP	
*isəp	piëp	'hisap'
*ke (Z)əŋ	ɖəŋ	'dahan'
*kepit	səmpɭɿ	'sempit'
*berəy	mɛ	'beri'

Selain perubahan yang bersifat teratur, terdapat pula perubahan fonem PMP *e yang bersifat tidak teratur sebagaimana berikut.

PMP	AP	
*qaqay	akiə	'kaki'
*lanɣuy	lanɣ	'berenang'
*ikuR	iku	'ekor'
*tanə m	tanəm	'menanam'
*ma-kuniŋ	kunəŋ	'kuning'
*tanaq	tanəh	'tanah'
*ma-panas	panaih	'panas'
PMP	AP	
*isəp	piëp	'hisap'
*ke (Z)əŋ	ɖəŋ	'dahan'
*kepit	səmpɭɿ	'sempit'
*berəy	mɛ	'beri'

Fonem PMP *e> AP diftong nasal ië pada *isəp> AP piëp 'menghisap', terjadi afresis fonem PMP *i>AP Ø, substitusi fonem PMP

*s>AP /p/, dan retensi fonem PMP *p. Fonem PMP *e> ə pada PMP *ke(Z)əŋ > AP ɖəŋ 'dahan', terjadi substitusi fonem PMP *k> AP ɖ, pelepasan fonem PMP *e dan retensi fonem PMP *ŋ. Fonem PMP *e> AP ə pada PMP

*kepit> AP səmpɭɿ 'sempit'. Fonem PMP *k> AP

/s/, fonem PMP *p> AP /-mp-/, fonem PMP *i> AP /I/, dan fonem PMP *t> AP /t/. Fonem PMP

*e>ɛ pada PMP *berəy> AP mɛ 'beri', fonem PMP *b> AP /m/, diftong PMP *ey> AP Ø.

3. RETENSI DAN INOVASI LEKSIKAL PROTO MELAYU POLINESIA PADA BAHASA ACEH DIALEK PIDIE

Selain retensi dan inovasi fonologis, dalam refleksi PMP pada AP juga terdapat retensi dan inovasi leksikal. Berikut disajikan data retensi leksikal dalam refleksi PMP pada AP kemudia inovasi leksikal dalam refleksi PMP pada AP.

A. Retensi Leksikal dalam refleksi PMP pada AP

Dalam refleksi PMP pada AP hanya terjadi 2 retensi leksikal sebagai berikut.

PMP	AP	
*j	i	'di'
*susu	susu	'susu'

B. Inovasi Leksikal dalam refleksi PMP pada AP

PMP	AP	
*ma-kapal	ɓbay	'tebal'
*ma-panas	panaih	'panas'

ANALISIS SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA ACEH DIALEK PIDIE PERSEPEKTIF FONOLOGIS DAN LEKSIKAL

Bahasa Aceh merupakan bahasa rumpun Proto Austronesia yang menurut Esser merupakan bagian dari kelompok bahas Sumatra. Bahasa Aceh sebagai bahasa yang brada di Indonesia merupakan kelanjutan dari Proto Melayu Polinesia. Dalam kajian diakronis, deskripsi sejarah suatu bahasa dilakukan dengan pendekatan deduktif dan teknik rekonstruksi berdasarkan metode kualitatif. Proto Melayu Polinesia yang digunakan dalam kajian ini mengacu pada karya Demwolf (1934—1938), Blust (1974), dan Dyen (1975) atau berdasarkan kompilasi yang diterbitkan oleh Wurm dan Wilson (1978).

Dalam kajian ini dijelaskan retensi dan inovasi fonologis dan leksikal Proto Melayu Polinesia (PMP) pada bahasa Aceh dialek Pidie (AP) . Dalam tataran fonologis, ditemukan bahwa fonem-fonem Proto Melayu Polinesia mengalami retensi dan inovasi pada bahasa Aceh dialek Pidie. Retensi fonem vokal terjadi pada fonem /i/, /u/, /ə/, /e/, dan

/a/. Sementara dalam retensi fonologis fonem konsonan terjadi pada

fonem /b/, /k/, /l/, /m/,

/n/, /p/, /r/, /s/, /ŋ/. Retensi leksikal hanya terjadi dalam dua kasus yaitu PMP *susu> AP susu 'susu' dan PMP *i> AP i 'di'.

Inovasi fonologis terjadi seperti pada PMP *i-kami> AP kamaa 'kami', fonem PMP

*i secara teratur >AP aa. Juga terjadi pada PMP *DuRi> AP duraa 'duri', PMP *i-ni> AP ŋaa 'ini', PMP *taliq> AP talaa 'tali', dan PMP

*bəli> AP blaa 'beli'. Fonem PMP *i mengalami perendahan vokal dan diftongisasi pada AP /aa/. Diftongisasi juga terjadi pada fonem PMP *a> AP /öə/ seperti pada PMP

*quraŋ> AP uröəŋ 'orang', PMP *anak> AP anöək 'anak', dan PMP *quZan> AP ujöəŋ 'hujan'. Pada contoh ini diftongisasi disertai dengan penaikan vokal PMP *a> AP /öə/.

Secara leksikal, data PMP *ijan> AP pajan 'kapan' dan PMP *lima> AP liməŋ 'lima'. Pada contoh tersebut perubahan fonem PMP

*i-> AP /a/ dan fonem PMP -*a> AP /ə/ menunjukkan inovasi vokal pada bahasa Aceh Pidie. Sementara fonem -*j-, -*n-, *l-, -*m-, dan -*i- menunjukkan retensi fonem.

Pada bahasa Aceh dialek Pidie refleks fonem PMP menghasilkan kaidah primer atau teratur dan kaidah sekunder atau tak teratur. Di dalam tabel terlampir dan pada pembahasan refleks PMP pada bahasa Aceh dialek Pidie tampak kemiripan leksikal etomin.

PMP dengan kosakata bahasa Aceh dialek Pidie sebagai refleks dari bentuk awalnya, yaitu PMP.

Perubahan fonologis bahasa Aceh dialek Pidie tampak pada substitusi fonem PMP *a> AP /ö/ pada posisi ultima. Kaidah terjadi secara bersyarat dan teratur dalam beberapa evidensi. Sebagai contoh PMP

*wanan> AP unön 'kanan', *qutan> AP uṭön 'hutan', *əpat > AP pöt 'empat', *bulan> AP bulön 'bulan', *ma-pawDaq> AP panö? 'pendek', *apa> AP pö 'apa', dan *atas> AP aṭöh 'atas'.

Selain substitusi, dalam refleks PMP pada bahasa Aceh dialek Pidie juga terjadi split dan merger. Split terjadi pada PMP *a> AP /a/, /ö/, /u/, /ə/, /o/, /ɔ/, /ə/, /öə/, dan Ø, seperti pada contoh PMP *mamaq> AP mamah 'mengunyah', *wanan> AP unön 'kanan', *kali> AP kuh 'gali', *taliŋa> AP gəliŋuŋ 'telinga'*(qa)baRa> AP baho 'bahu'

*m-ñawa> AP ñawaŋ 'nyawa', *kaRat> AP kap 'gigit', *ulaR> AP ulə 'ular', *quZan> AP ujöəŋ 'hujan'. Split pada fonem lain terjadi pada PMP *u> AP /u/, /a/, /aa/, /e/, /iə/, dan Ø, PMP

*k> AP /k/, /ʔ/, dan /g/, PMP *n> AP /n/ dan

/ŋ/, dan PMP *s> AP /s/ dan /h/. Contoh split lain dapat dilihat pada

pembahasan refleks dan tabel lampiran.

Merger dalam refleks PMP pada bahasa Aceh dialek Pidie seperti terjadi pada fonem *s, *q> AP /h/ seperti dalam PMP

*tanaq> AP *ṭanoh* ‘tanah’, PMP *panaq> AP

panah ‘panah’, *ma-iRaḡ>AP mirah ‘merah’,

*ma-panas>AP panaih ‘panas’, *ma-nipis>AP *ṭipeh* ‘tipis’, dan *i-kasu> AP kah ‘kamu’. Merger lain seperti pada fonem PMP *i, *a,

*ə> AP /a/, fonem PMP *a, *u> AP /u/, dan fonem PMP *a, *ə> AP /ə/. Contoh merger lain dapat dilihat pada pembahasan refleks dan tabel lampiran.

Dari hasil analisis ini tampak bahwa inovasi leksikal dan fonologis lebih dominan daripada retensi. Bahasa Aceh dialek Pidie ternyata memiliki sejarah perkembangan fonologi yang unik, seperti adanya diftongisasi yang teratur pada fonem-fonem vokal. Pada tabel 1 disusun daftar refleks fonem-fonem PMP pada bahasa Aceh dialek Pidie sebagai inventarisasi etimon protobahasa dan fonem-fonem PMP untuk menetapkan kaidah perubahan. Acuan ini didasarkan pada kesepadanan perangkat kognat yang ditemukan dan dapat menjelaskan hubungan PMP dan bahasa Aceh dialek Pidie. Tabel 2 menjelaskan tentang refleks fonem vokal dan diftong PMP pada bahasa Aceh dialek Pidie dan tabel 3 menjelaskan tentang refleks konsonan PMP pada bahasa Aceh dialek Pidie.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, Osra M., Abdullah Wamad., Latif, Surya Nola., Ahmaddin, Syech. 1985. Pemetaan Bahasa Aceh, Gayo, dan Alas. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ali, Zaini., Hanoum, Syarifah., Hanafiah, Adnan., Sulaiman, Budiman. 1983. Sistem Morfologi Bahasa Aceh. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Campbell, Lyle. 1998. Historical Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan . 1985. Kamus Aceh Indonesia. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta
- Djajadiningrat, A. R. Hosein. 1934. Kamus Atjeh Nederlandsch Woordenboek oleh Dr. 1934. Batavia: Landsdrukkrij.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan . Sistem Perulangan Bahasa Aceh. 1984. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Djunaidi, Abdul. 2004. Persesuaian Bahasa Aceh. Jurnal Bahasa dan Seni: 32 (2)
- Durie, Mark. 1988. A Grammar of Acehnese: ON The Basis of A Dialect of North Acehnese. Holland/ USA: Foris Publication.
- . 1990. Proto Chamic and Acehnese Mid Vowels Toward Proto Aceh-Chamic. Melbourne: University of Melbourne.
- Hanafiah, Adnan., Ibrahim Makam. 1984. Struktur Bahasa Aceh. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Keraf, Gorys. 1984. Linguistik Bandingan Historis. Jakarta: Gramedia.
- Langen, K. F. H. van. 1889. Handleiding voor de Boefening der Atjehsche Tall. 's- Gravenhage. Martinuss Nijhoff.
- Lawler. 1977. A Agrees with B in Acehnese: A Problem For Relational Grammar. New York: Academic Press.
- Liliana. 1996. Kategori Sintaksis dan Tipe Konstruksi Frasa Bahasa Aceh. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sari, Dewi Kumala. 2011. Refleksi Fonem Vokal Proto Austronesia dalam Bahasa Aceh dan Bahasa Melayu Dialek Langkat (suatu kajian linguistik historis komparatif). Medan: Universitas Sumatera Utara.

- Saidi, Sale. 1989. *Linguistik Bandingan Nusantara*. Flores: Nusa Indah
- Thurgood, Graham. 2007. *Acehnese: Genetic Affiliations, Diversity, and Absorption*. Chico: California State University.
- Sulaiman, Budiman. 1977. *Bahasa Aceh*. Jilid I. Bireun: Pustaka Mahmudiyah
- 1978. *Bahasa Aceh*. Jilid II. Banda Aceh: Pustaka Faraby
- , 1977. *Bahasa Aceh*. Jakarta: Pustaka Mahmudiyah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Poedjosoedarmo, Soepomo. Tanpa Tahun. *Keluarga Besar Bahasa Austronesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Wildan. 2010. *Kaidah Bahasa Aceh*. Banda Aceh: Geuci
- Wurm, S.A., dan Wilson, B. 1978. *English Finderlist of Reconstructions in Austronesian Languages*. Pasific Linguistics Series C-No-333.

Mencari Identitas Diri-Kultural Indonesia

Mohamad Anas

Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Brawijaya

Sebagai bangsa yang mempunyai akar sejarah dan kebudayaan yang sangat panjang, bangsa Indonesia kaya dengan dengan warisan-warisan kultural maupun bangun pemikiran filsafatnya. Di dalam karakteristik geografisnya, Bangsa Indonesia adalah gugusgugus wilayah yang ditaburi oleh kekayaan dan keanekaragaman hayati dan non-hayati, dan didiami oleh berbagai suku dengan aneka bahasa, agama, adat-kebudayaan, maupun nilai-nilai sebagai manifestasi cara pandang dunianya, serta dicirikan dengan keadaan wilayahnya terdiri dari lautan maupun pulaupulau (daratan) yang bertabur di atasnya.

Penelitian mengenai identitas diri Bangsa Indonesia ini diarahkan untuk mencari dan menelaah bangunan dasar nalar dan prinsip yang mendasari, bagaimana struktur serta pengaruhnya pada masyarakat di era tersebut. Penelitian ini sangat penting guna melihat secara komprehensif, apakah nalar dari setiap periode itu berkelanjutan atautah terputus.

Penelitian singkat yang menggunakan metode arkeologi ini menjadi eksperimen untuk melihat apakah kondisi historis kebudayaan masyarakat Indonesia sesuai dengan teori yang digunakan atautah tidak. Jika terdapat kecocokan maka tentu akan memperkuat bangunan teori tersebut.

METODE

Landasan teori pertama penelitian ini bertolak dari gagasan Foucault tentang arkeologi-genealogi pengetahuan. Foucault bertolak menelusuri *episteme*, yang mempunyai arti “dasar, arsip, prinsip, atau tonggak penentu arah’. Prinsip dasar ini dinilai pada konteks sejarah, khususnya sejarah pemikiran, sangat menentukan dalam membangun struktur diskursif. Foucault menggunakan term *episteme* guna menunjukkan suatu pengandaian, prinsip, syarat-syarat kemungkinan dan pendekatan tertentu yang membentuk suatu sistem diamdiam telah menentukan pemikiran, cara pandang, pengamatan dan pembicaraan mereka (Bertens, 1983, p. 314-315).

Episteme itu mempunyai struktur maka dalam hal ini Foucault menyamakan *episteme* dengan sistem pemikiran dan menjadi landasan epistemologi setiap zaman yang memengaruhi corak ilmu pengetahuan yang dibangun di atasnya. Setiap zaman mempunyai *episteme* yang berbeda-beda, secara konseptual sebuah *episteme* baru mampu menyubtitusi *episteme* lama serta bagaimana *episteme* baru tersebut menyirkulasikan dirinya sedemikian rupa menggeser *episteme* lama hingga sebuah zaman kemudian mempunyai nada dasar keteraturan pemikiran yang lain sama sekali bila dibandingkan zaman sebelumnya.

Usaha untuk mengeksplisitkan atau “menggali” *episteme* yang menentukan arah suatu periode tertentu inilah yang disebut *arkeologi pengetahuan*. Sasaran arkeologi pengetahuan adalah kerangka pemikiran khas suatu zaman dan struktur pemikiran yang mampu memberi makna pada dunia. Arkeologi menyaratkan sejarah, Foucault berupaya mengurai kekusutan pola sejarah tradisional mengenai apa yang secara tradisional dipandang sebagai tidak dapat diubah. Proses kerjanya melalui arsip-arsip sejarah dari berbagai masyarakat untuk menjelaskan pembentukan wacana dan peristiwa yang telah menghasilkan bidang-bidang pengetahuan dan pembentukan wacana dari berbagai zaman (Foucault, 1982, p. 138-140).

Foucault dalam studi tersebut bermaksud menemukan *episteme* yang mendasari disiplin ilmu tertentu dan ciri pengetahuan yang menentukan bagi setiap periode, oleh Foucault disebut *abad*. Melalui *episteme* ini, sebuah obyek dapat dimengerti dan dipahami melalui pernyataan dan pandangan tertentu, suatu objek dapat dipahami dengan pernyataan dan pandangan tertentu, bukan melalui yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Yudi Latif (2002, p. 2-3) membahasakan sebagai wilayah nusantara/Indonesia adalah wilayah lautan yang luas juga wilayah daratan subur sekaligus. Dua aspek inilah yang melekat dalam ciri wilayah seluruh bangsa Indonesia. Sebagai “negeri lautan yang ditaburi oleh pulaupulau” (*archiphilego*)—ini merupakan istilah yang lebih disukai oleh Soekarno—wilayah Nusantara/Indonesia mempunyai karakterkarakter tertentu: yakni Nusantara merefleksikan sifat laut. Sifat kelautan adalah menyerap dan membersihkan, menyerap tanpa mengotori lingkungannya. Sedangkan sebagai wilayah daratan (titik tekannya adalah pulaupulau bukan lautnya), karakter wilayah nusantara bersifat seperti tanah: yakni kesanggupannya untuk menerima dan menumbuhkan.

Berangkat dari kedua jenis karakter ini, tentu sangat dapat dipahami bahwa bangsa Indonesia selalu bisa menyerap kebudayaankebudayaan asing yang datang melalui seluruh penjuru lautan. Bangsa-bangsa asing seperti orang-orang Hindi, orang-orang Arab, orang-orang Tionghoa yang telah lama hilir-mudik melakukan perniagaan dengan bangsa Indonesia melalui jalur laut. Dengan corak seperti itu, bangsa Indonesia merupakan bangsa kosmopolit dan terbuka dengan kebudayaan lain bahkan sebelum kedatangan para penjajah di negeri ini. Bangsa ini selain menyerap kebudayaan-kebudayaan asing, juga mempunyai kemampuan menyaring

dan membersihkan unsur-unsur kebudayaan yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan maupun masyarakat. Ringkasnya wilayah Nusantara seperti dikatakan oleh Dennys Lombards adalah merupakan wilayah terjadinya “silang-budaya” dari berbagai penjuru dunia (Lombard, 1987, p. 59).

Wilayah nusantara memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk menerima dan menumbuhkan. Di wilayah yang terdiri dari berbagai daratan (pulau-pulau) ini apapun budaya dan ideologi masuk, sejauh dapat dicerna dan disesuaikan oleh tata sosial dan tata nilai masyarakatnya, dapat berkembang secara berkelanjutan. Dalam sebuah etos pertanian yang dipunyai oleh masyarakat pedalaman nilai-nilai religiusitas (ketuhanan) tumbuh subur dan menguntungkan mereka dalam rangka menggarap lahan garapan pertaniannya. Sensivitas kebersamaan dan nilai-nilai ketuhanan ini telah mendorong dan menjadikan wilayah nusantara sebagai tempat penyemaian dan penyerbukan berbagai corak kebudayaan yang lebih beragam dibanding dengan kawasan asia manapun (Latif, 2011, p. 3).

Inti dari proses kebudayaan adalah humanisasi, yakni kerja-kerja peradaban yang semakin mencipta hidup bersama semakin manusiawi, semakin menyejahterakan satu sama lain. Humanisasi dari apa ke mana? Humanisasi dari saling ‘memakan’ antar sesama bak serigala buas (*homo homini lupus*), dan ini yang pernah dipraktekkan di era kolonialisme atau bahkan hingga negeri ini merdeka, menuju humanisasi yang memperlakukan manusiawi pada sesama untuk bisa hidup berdampingan (*homo homini socius*) dan beradab.

Mengapa hal ini menjadi titik tolak untuk mencermati dan memahami ke-Indonesiaan? Sebab, bingkai ini sangat mendasar sebagai tafsir teks kultural. Dan, lebih dari itu kondisi ini mewacana secara fenomenal sejak reformasi bergulir, untuk mencari identitas diri, sebagai negara dan bangsa.

Dalam rentang waktu setengah abad lebih setelah negeri ini merdeka secara politis, pengalaman sejarah bernegara membuktikan bahwa membaca dan mamahami ke-Indonesiaan secara politis belaka ternyata justru membawa negeri ini dalam keretakan dan perpecahan. Di bawah kekuasaan dan otoritas kuasa NKRI, pemerintah pusat, keIkaan, ternyata membuat keragaman (kebhinekaan), sementara yang bersifat lokalitas, dan etnis menjadi antagonistik yang subordinatif, yang harus patuh, bergantung dan diperintah, lalu diseragamkan secara sentralistik.

Ke-Indonesiaan yang pada mulanya dengan tulus membangun dengan menyeru: “kami bangsa Indonesia, dalam teks kultural 1908, 1928, yang lengkapnya berbunyi: bertanah air satu, berbahasa satu dan berbangsa satu Indonesia, yang dari keragaman ini ketika diformat melalui politik

bernegara acap kali jatuh dalam otoritarianisme demokrasi terpimpin Soekarno tua, atau demokrasi paternalistik Soeharto, telah jelas meretakkan keindonesiaan serta membuat jurang ketidakadilan dalam kehidupan berbudaya, beragama, beretnik, dalam konteks masyarakat kini. Padahal, alih-alih pemikiran dan angan-angan untuk menjadi negara besar dan mandiri sebetulnya telah dikontekstualisasikan oleh para pendiri negeri ini. Bung Karno, Bung Hatta, Sjahrir, Agus Salim, Tan Malaka, melalui sebuah teks politik, telah memproklamirkan diri menjadi bangsa yang merdeka, menghormati setiap warga negara, menganut sistem negara hukum (bukan negara kekuasaan ala feodalisme raja atau paternalisme aristokrat), serta menjadi negara demokratis yang mana kedaulatan penuh berada di tangan rakyat.

Jika tafsiran keindonesiaan secara politik telah gagal, bagaimana dengan tafsiran keindonesiaan secara ekonomi?. Tafsiran Indonesia secara ekonomi, alih-alih dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui hutang besar-besaran dari biaya pembangunan justru membuat jurang ketidakadilan dalam negeri semakin melebar. Ekonomisasi dengan memasukkan globalisasi modal, dan semakin menjadi budaya korupsi yang sulit dihilangkan kini telah membuat anak negeri hanya menjadi kuli, menjadi obyek terbaca, menjadi tertindas dan terzalimi.

Dalam simbolisasi Goenawan Mohammad, keindonesiaan yang semula di gagas dengan keikhlasan oleh para anak bangsa dengan sejajar kini diproses oleh kekuasaan menjadi alegori keikaan *sapu lidi* di mana perekatnya adalah pemaksaan dengan otoritas militer demi penyatuan, sedangkan kemajemukan diseragamkan dalam perlakuan lidi-lidi yang menafikan keindahan, kekayaan keragaman suku, etnik, *local genius*, agama, seni dan seterusnya. Inilah alegori yang dikritik tajam oleh Bung Hatta pada Bung Karno tua dalam penyatuan dan bukannya **persatuan organik**.

Setidaknya terdapat 4 era epistemologi kultural dalam perjalanan bangsa Indonesia hingga kini. Era kultural pertama adalah era yang sangat lokal keberadaannya, di era ini dasar sistem masyarakat yang paling menonjol adalah “nilai solidaritas”. Susunan masyarakat merupakan persekutuan kecil-kecil yang hidup dalam desa. Keputusan-keputusan yang penting diambil secara permufakatan (S. Takdir Alisyahbana, 1977: 14). Secara berkelanjutan, era ini berlanjut berupa dominasi Hindu-Budha, meski secara rasionalitas era Hindu-Budha lebih maju karena telah mengenal tradisi tulis, dan memperkenalkan bentuk kerajaan yang lebih modern, akan tetapi era ini mempunyai kesamaan pada level ontologis. Masyarakat Indonesia sistem pengetahuannya masih diselubungi mitos dan adat (S. Takdir Alisyahbana, 1977: 18).

Dalam standar rasionalitas modern, era tersebut menurut Alisyahbana masyarakat Indonesia sistem pengetahuannya masih diselubungi mitos dan adat (Alisyahbana, 1977: 18). Hanya saja, dalam perspektif strukturalisme, mitos sangat penting dan mempengaruhi sistem sosial dan budaya masyarakat Indonesia, bahkan hingga kini mitos masih tetap berjalan. Akan tetapi, interpretasi ‘mitos’ juga harus dilakukan dalam konteks ini untuk memajukan peradaban bukan malah menganggap mitos sebagai penghalang untuk menuju peradaban rasionalitas. Sebab bagaimanapun ‘mitos’ juga merupakan hasil rasionalisasi yang dilakukan oleh nenek moyang bangsa ini.

Penilaian Takdir atas ‘irrasionalitas’ masyarakat Indonesia pra-kolonial ini tentu saja didasarkan pada alur modernitas dan kebebasan individu sebebaskan-bebasnya. Menurut penilaian Adinegoro, kampanye Takdir ini akan menjerumuskan masyarakat dan bangsa Indonesia jatuh ke kubangan kapitalisme dan imperialisme. Menurutnya, kemajuan yang dimaksud Takdir adalah “*civilisatie*” bukan *kultur*, ‘kulitnya’ bukan ‘kayunya’. Terdapat bangsa yang hanya mempunyai *civilisatie* semata, tidak berkultur, ibarat suatu manusia yang ‘muka cantik hati busuk’, ada pula bangsa yang *kultur*-nya tinggi tetapi *civilisatie*-nya rata-rata, seperti bangsa Tiongkok. Bangsa yang telah mencapai keduanya misalnya bangsa Japan, kultur Timur dengan *civilisatie* Barat. Maka, pemimpin harus mampu membedakan *kultur* dan *civilisatie* (Baso, 2012, p. 35-36).

Kultur adalah karakter, watak dan jiwa yang melakat pada manusianya, sementara pakaian luarnya adalah memperindah kultur. Kultur bersifat tetap atau permanen, sering kali kultur disebut kepribadian. Menurut Adinegoro, *civilisatie* tidaklah permanen, oleh karena itu bisa berpindah-pindah. Orang Jepang sudah mampu menyamakan dirinya dengan bangsa Eropa karena *civilisatie*-nya sudah di-*over*-nya dari Barat, akan tetapi kulturnya tetap sebagai dulu ala Tiongkok. Perdebatan di antara para pemikir kebangsaan itu terjadi sebab, para pendiri bangsa ini membicarakan kultur, sementara Takdir mengemukakan *civilisatie* (Baso, 2012: p. 37).

Terlepas dari perdebatan tersebut, penulis melihat bahwa pandangan hidup masyarakat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari ‘kuatnya’ dominasi ketuhanan –tentu saja Tuhan dalam konsep masa lalu – dalam segala bidang kehidupan. Jika dilihat dalam hubungan triadik (Tuhan-Alam-Manusia), kuatnya dominasi pandangan dunia yang meletakkan ‘Tuhan’ sebagai pusat, sehingga menghilangkan poros alam dan bahkan manusia itu sendiri. Dalam memahami alampun, diletakkan sebagai ‘perantara’ untuk bisa sampai kepada Tuhan. Nilai-nilai luhur yang diyakini berasal dari nilai ketuhanan juga berpengaruh dalam praktik politik masyarakat. Artinya,

politik tidak dipahami sebagai aktivitas seni dalam meraih kekuasaan untuk mewujudkan kesejahteraan, tetapi politik – kekuasaan – dipahami sebagai pemberian dari sang ilahi. Kini, jejak sisi negatif dari cara pandang ini dapat dirasakan sampai kini ketika hubungan agama dan negara belum pernah tuntas, hal ini menjadi tanda bahwa bentukan nalar tersebut masih sangat terasa.

Era berikutnya adalah era kultural awal Islam. Pada era ini *lokal genius* Indonesia dapat saling melengkapi, terjadi proses penggabungan, pengkombinasian antara unsur-unsur asli dengan unsur Islam yang muncul menjadi sebuah pola budaya baru. Sehingga terbangunlah suatu hasil sinkretis tersebut dengan kalimat: Indonesia yang Islam; Islam yang Indonesia. Secara definitif, *local genius* adalah terdapatnya unsur-unsur atau ciri-ciri tradisional yang mampu bertahan dan bahkan mempunyai kemampuan untuk mengakomodasikan unsur-unsur yang datang dari luar serta mengintegrasikannya ke dalam budaya asli. (Ayatrohaedi (ed.). 1986, p. 31 dan E. Cassier, 1987, p. 340).

Era kultural yang keempat adalah era Kolonialisme Belanda, sebuah era yang menindas, menghegemonik secara terstruktur. Pada era ini pula pola-pola penanaman menjadi bangsa yang lunak, malas, dan tidak berperadaban dibentuk sedemikian rupa secara masif dan kolektif. Pola-pola inilah yang hingga kini masih tersisa dan jelas menjadi kendala dalam memajukan bangsa ini. Kenyataannya, penjajahan bukan hanya terjadi secara politik dan ekonomi belaka tetapi terjadi secara besar-besaran pola-pola kolonialisme nalar atau mental, pembunuhan karakter dan identitas bangsa, pembelengguan nalar oleh kolonial Belanda pada bangsa ini. Dan hingga kini, pasca negeri ini telah memerdekakan diri secara politik, pola-pola kolonialisme nalar atau mental itu masih tersisa, membekas secara mendalam. Masa kolonial juga memperkenalkan produktivitas individual yang pada perkembangannya politik ekonomi dunia memusatkan pada manusia sebagai unit yang konsumtif yang justru mampu menyingkirkan aksi-aksi solidaritas dan demokratisasi (Santoso (ed.) 2003, p. 352).

PENUTUP

Setidaknya ada empat strategi untuk merumuskan kembali Keindonesiaan, *pertama*, perumusan strategi itu dibuat dengan persepsi budaya yang komprehensif, yang mempunyai cakupan luas terhadap perikehidupan masyarakat Indonesia. Persepsi budaya tidak hanya mengarah pada kesenian belaka, sebab strategi budaya bukan strategi kesenian. Namun cakupan dalam strategi yang berdasar budaya ini mengubah cara hidup, persepsi dan tingkah laku warisan kolonial. Secara lebih khusus, perubahan tersebut menyangkut semua faktor budaya, yakni: *anthropos, oikos, tekne*, dan *ethnos*. (Poespowardojo 1986: 184186) *Kedua*, strategi yang diarahkan untuk mengarah ke masa depan. Warisan budaya harus dihargai dan sekaligus menjadi bahan pijakan, tetapi agar warisan tersebut bermakna diperlukan tafsir ulang yang kreatif dan produktif, seperti dalam bahasa Gadamer, interpretasi bukan hanya mengarah pada teks, ataupun hanya pada konteks teks tersebut di buat, akan tetapi diperlukan kontekstualisasi yang bersifat produktif, bukan hanya reproduktif. Gadamer juga mengingatkan, berpijak pada tradisi bukan lalu membuat kita masuk dalam kubangan romantisme, tetapi justru malah mengarahkannya pada modern yang berasal dari dalam diri kita. Modernitas yang digali dari dalam.

Akhirnya, dalam strategi tersebut terkandung adanya kondisi dinamis yang mandiri. Berbuat secara mandiri, tidak tergantung ataupun menyandarkan diri pada kebaikan bangsa lain. Masyarakat juga harus mempunyai kemampuan akulturatif, yakni terbuka terhadap unsur-unsur luar, menerima secara selektif dan yang terpenting dari itu adalah mampu mengintegrasikannya ke dalam kebudayaan nasional untuk memperkuat identitas kebangsaan, seperti yang telah terbukti dalam serjarah era kultural sebelum masa kolonial.

Sebagai catatan penting bahwa relasi budaya Indonesia dengan unsur-unsur asing mengalami tegangan sebagai berikut: bahwa Budaya Indonesia tidak pernah sepenuhnya anti terhadap budaya luar dan dalam, antara “ego” dan “the other”. Dominasi kultural tidak akan bisa sungguh-sungguh mendiktekan “*the dominated*” untuk mengkonstruksi pandangan-pandangan, kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang merupakan tiruan atau *mimikri* “terjajah” dari “penjajah”. Seiring dengan perkembangan pesat dunia modern, rumitnya jejaring kebudayaan Indonesia untuk dipahami. Maka pelacakan identitas Indonesia dengan kembali ke masa lalu, yakni dengan mencari Indonesia murni yang cenderung ke arah puritan dan bahkan puritanisme adalah hal yang kurang bijak, namun

mengikuti gerak globalisasi juga harus diperhatikan dengan seksama. Idealnya, pencarian diri kultural Indonesia adalah dengan membiarkannya selalu berada dalam proses persilangan akibat dari perjumpaan dengan budaya-budaya lain.

Agar perumusan identitas itu terus berjalan dengan baik seperti aliran sungai abadi, maka cara yang terbaik adalah membiarkan wacana kebudayaan di Indonesia tetap hidup. Dengan demikian, identitas Indonesia akan selalu berada dalam ruang tarik ulur yang bergerak, yakni ruang ketiga, ruang interpretasi. Untuk menciptakan ruang wacana dan penafsiran yang melibatkan sebanyak etnis di Indonesia inilah kiranya perlu terus dikembangkan. Budaya Indonesia menjadi 'teks' terbuka yang setiap subyek atau etnis manusia Indonesia berwenang menginterpretasikannya. Dalam ruang interpretasi itulah semua subyek berdialektika dan menghasilkan penafsiran yang kontekstual. Dengan demikian, kebangsaan memang bukanlah suatu entitas yang jadi dan untuk proses 'redefinisi' menjadi Indonesia kini perlu diciptakan keindonesiaan yang interaktif antar etnis, gerakan yang bergerak terus menerus. Sebuah tugas yang besar bukan?

DAFTAR RUJUKAN

- Ayatrohaedi (ed.). 1986. *Kepribadian Budaya Lokal (local genius)*, Jakarta, Pustaka Jaya
- Baso, Ahmad. 2005. *Islam Pasca Kolonial*, Bandung: Mizan
- Cassier, E. 1987. *Manusia dan Kebudayaan, Sebuah Esai Tentang Manusia*, terj. A. Nugroho, Jakarta: Gramedia.
- Foucault, 1982, *Arkeology of Knowledge & Discourse on Language*, New York: Pantheon Book, transl. A.M. Sheridan Smith.
- Lombard, Denys. 1996. *Nusa Jawa Silang Budaya (Jilid I-III)*, Jakarta, Gramedia.
- Lubis, Muchtar. 1981. "Penerusan Kebudayaan Kita Terputus", *Prisma*, 11 November.
- _____, 2001, *Manusia Indonesia*, Jakarta: Obor
- Latief, Yudi. 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia
- Santoso, Budi. (ed.). 2003. *Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius

- Soeprapto, Sri dan Jirzanah, 1996. "Pengembangan Kebudayaan sebagai Identitas Bangsa", *Jurnal Filsafat UGM*, Yogyakarta, Pebruari,
- Sutrisno, Muji. 2004. "Menafsir KeIndonesiaan", dalam: *Hermeneutika Pascakolonial: Soal Identitas*, Yogyakarta: Kanisius
- Takdir Alisyahbana, Sutan *Perkembangan Sejarah Kebudayaan Indonesia Dilihat dari Segi Nilai-Nilai*, 1977.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Dominasi abad pencerahan lalu disusul abad modern yang berparadigma antroposentrik berdampak pada peminggiran kutub ekologi dan bahkan tuhan sekaligus. Pada ranah mikro, kita dapat merasakan bagaimana standarisasi yang berhasrat penyeragaman itu lalu meminggirkan segala macam narasi-narasi yang dianggap menyimpang dari narasi besar. Antropologi manusia modern yang kemudian membentuk karakteristik subjek dominan, hegemoni, dan tentu saja instrumental lalu berdampak pada peminggiran narasi lokal, kebenaran bersifat terpusat, bahkan narasi karakter jelas tidak menjadi bagian yang penting untuk diperbincangkan.

Di sisi lain, paradigma developmentalisme yang menekankan pada ukuran statistik dalam pembangunan masyarakat kenyataannya bergeser ke arah peminggiran manusia itu sendiri. Tolak ukur materialistik menjadi dominan dan meminggirkan hal-hal mendasar dalam pembangunan manusia itu sendiri, yakni karakter.

Dalam konteks demikianlah, kehadiran buku ini penting kiranya untuk menyuguhkan ke khalayak umum dalam memperbincangkan karakter dalam berbagai dimensi, bentuk dan bahkan model yang dapat menjadi kontribusi penting dalam upaya mencapai tujuan mendasar dari pembangunan berkelanjutan.

Selamat membaca.



UPT PENGEMBANGAN
KEPRIBADIAN MAHASISWA



SIPINTER
Seminar Nasional Pengembangan Nilai & Karakter

